



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 - 2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 - 2029





SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan Pembangunan nasional jangka panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi.

13. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja lima tahunan yang dijabarkan setiap tahun guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Tahun 2025-2029.
14. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJMD Tahun 2025-2029 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
15. Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
16. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Arah Kebijakan pembangunan Daerah Periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA-PD dan RKPD selama tahun 2025-2029.

BAB III SISTEMATIKA DAN ISI

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I. pendahuluan;
 - b. bab II. gambaran umum Daerah;
 - c. bab III. visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah
 - d. bab IV. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. bab V. penutup.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27 Agustus 2025
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 27 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (2-109/2025)

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFRIL, SH., M.Hum
NIP. 19710929 199603 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang berbasas berkelanjutan. Berdasarkan amanat tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.

Dalam Upaya mendukung terwujudnya efektifitas, efisiensi dan sinergitas penyelenggaraan Pembangunan nasional dan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang mengamanatkan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional tahun 2024, Pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan RPJMD Tahun 2025 – 2029 mengikuti periode RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang disusun oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RPJMD dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka koordinasi, sinergi dan harmonisasi perencanaan jangka panjang daerah.

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Disusun melalui pendekatan proses yaitu: pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), dan pendekatan substansi, yaitu: pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Maksud dan Tujuan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- c. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
- d. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- f. Mendukung terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan;
- g. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
- h. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- i. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- j. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- k. Memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja pemerintahan daerah baik tahunan, maupun lima tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARAN: (2-109/2025)

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-45
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-74
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	II-97
2.1.5. Standar Pelayanan Minimal	II-141
2.1.6. Kerjasama Daerah.....	II-165
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-174
2.2.1. Realisasi APBD Tahun 2020-2024.....	II-176
2.2.2. Neraca Daerah tahun 2020-2024.....	II-180
2.2.3. Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2026-2030	II-182
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	II-186
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-186
2.3.2. Isu Strategis Daerah.....	II-189
BAB III VISI MISI, TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
3.1.1. Visi dan Misi.....	III-1
3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-8
3.2. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-14
3.2.1. Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.....	III-16
3.2.2. Pengembangan Wilayah	III-17
3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.....	III-41
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV-51
4.2.1. Indikator Kinerja Utama.....	IV-51
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah.....	IV-54
BAB V P E N U T U P.....	V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan.....	V-1
5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	V-1

5.1.2. Keterhubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pusat dan Kabupaten/Kota.....	V-1
5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	V-2
5.2.1. Pengendalian Perencanaan	V-2
5.2.2. Pengendalian Pelaksanaan	V-3
5.3. Kesimpulan.....	V-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.....	I-7
Gambar 2. 1.	Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024.....	II-2
Gambar 2. 2.	Koridor Ekonomi Sulawesi.....	II-5
Gambar 2.3.	Grafik Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Fungsi ekosistem Penyediaan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Wilayah Administrasi	II-22
Gambar 2.4.	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	II-22
Gambar 2.5.	Grafik Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Fungsi Ekosistem Penyediaan Air Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Administrasi	II-25
Gambar 2.6.	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Provinsi Sulawesi Tenggara	II-25
Gambar 2.7.	Tren Proyeksi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan Data BAU dan Upaya Tambahan.....	II-29
Gambar 2.8.	Rata-Rata Pengeluaran Listrik per Kapita Sebulan menurut Tipe Daerah (rupiah), 2021–2023	II-29
Gambar 2.9.	Rata-Rata Pengeluaran Listrik per Kapita Sebulan menurut Kabupaten/Kota (rupiah), 2023.....	II-30
Gambar 2.10.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak menurut Tipe Daerah (persen), 2021–2023.....	II-31
Gambar 2.11	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak menurut Kabupaten/Kota (persen), 2023.....	II-32
Gambar 2.12	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak menurut Tipe Daerah (persen), 2021–2023.....	II-35
Gambar 2.13.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak menurut.....	II-36
Gambar 2.14.	Grafik Indeks Resiko Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023.....	II-38
Gambar 2.15.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara (persen) Tahun 2019-2024.....	II-46
Gambar 2.16.	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2022-2024	II-47
Gambar 2.17.	Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran Tahun 2022-2024	II-48
Gambar 2.18.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2017 - September 2024	II-49
Gambar 2.19.	PDRB per Kapita Atas Dasar Berlaku Provinsi Sulawesi Tenggara (Juta Rupiah), Tahun 2020-2024	II-51
Gambar 2.20.	Distribusi Pengangguran menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2023-Februari 2025	II-53
Gambar 2.21.	Perkembangan Gini Ratio, September 2021-September 2024	II-54
Gambar 2.22.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara, 2020-2024.....	II-55
Gambar 2.23.	Grafik Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Sulawesi Tenggara (tahun), 2020-2024.....	II-57
Gambar 2.24.	Capaian Indeks Keluarga Sehat, Tahun 2018-2023.....	II-58

Gambar 2.25.	Tren Proyeksi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan	II-60
Gambar 2.26.	Tren Proyeksi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan	II-61
Gambar 2.27.	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Sulawesi Tenggara (tahun), 2020–2024	II-62
Gambar 2.28.	Indeks Literasi Digital Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022	II-65
Gambar 2.29.	Nilai Indeks Manusia Digital dan Nilai Pilar Indeks Manusia Digital Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	II-66
Gambar 2.30.	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tenggara 2023 - 2024	II-67
Gambar 2.31.	Pertumbuhan IPK Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023, Proyeksi 2024, dan Target 2045	II-68
Gambar 2.32.	Pergerakan Dimensi Pembentuk IPK Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 dan Proyeksi 2024	II-69
Gambar 2.33.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sulawesi Tenggara, 2018–2024	II-72
Gambar 2.34.	Grafik. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2022	II-74
Gambar 2.35.	Grafik Angka Ketergantungan Provinsi Sulawesi Tenggara 2019-2023	II-75
Gambar 2.36.	Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), 2024	II-76
Gambar 2.37.	Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Subkategorinya di Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Harga Konstan 2010 (persen), 2020–2024	II-79
Gambar 2.38.	Distribusi Persentase dan Perubahan Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Februari 2024	II-81
Gambar 2.39.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/ Informal, Februari 2023–Februari 2025	II-82
Gambar 2.40.	Perkembangan Indeks Pembangunan TIK Indonesia, 2018–2023	II-85
Gambar 2.41.	Indeks Pembangunan TIK dan Subindeks Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022 dan 2023	II-86
Gambar 2.42.	Pertumbuhan PMTB menurut Subkomponen Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), 2020–2024	II-89
Gambar 2.43.	Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri menurut Subkomponen Provinsi Sulawesi Tenggara(persen), 2020–2024	II-91
Gambar 2.44.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni menurut Tipe Daerah (persen), 2021–2023	II-93
Gambar 2.45.	Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tenggara Januari 2024- Maret 2025 (Persen)	II-97
Gambar 2.46.	Indeks dan Nilai SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	II-100
Gambar 2.47.	Grafik Perkembangan Nilai Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2023	II-107
Gambar 2.48.	Grafik Perkembangan Aspek IDI Tahun 2022-2023	II-107
Gambar 2.49.	Kerangka Indeks Daya Saing Daerah 2024	II-110

Gambar 3.1.	Skema Visi Misi dengan perumusan Tujuan dan Sasaran, Program dan kegiatan.....	III-9
Gambar 3.2.	Peta Arah Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	III-21
Gambar 3.3.	Arah Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029	III-22
Gambar 3.4.	Arah Kebijakan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029.....	III-23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Pembagian Wilayah Adminsitratif dan Luas Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kab/Kota, Tahun 2024.....	II-2
Tabel 2. 2.	Capaian dan Target Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024.....	II-8
Tabel 2. 3.	Produksi Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara.....	II-11
Tabel 2. 4.	Capaian dan Target Kinerja Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024.....	II-13
Tabel 2. 5.	Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tenggara.....	II-16
Tabel 2.6.	Proyeksi Kebutuhan dan Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2030.....	II-17
Tabel 2.7.	Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	II-19
Tabel 2.8.	Proyeksi Kebutuhan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2030.....	II-20
Tabel 2.9.	Proyeksi Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Hingga Tahun 2030.....	II-23
Tabel 2.10.	Proyeksi Trend Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kabupaten/Kota Periode 2022-2030.....	II-24
Tabel 2.11.	Proyeksi Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tenggara hingga Tahun 2030 ..	II-26
Tabel 2.12.	Proyeksi Trend Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kabupaten/Kota periode 2022-2030.....	II-27
Tabel 2.13.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	II-27
Tabel 2.14	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan	II-28
Tabel 2.15.	Capaian dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2025.....	II-34
Tabel 2.16	Status Mutu Air pada Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-34
Tabel 2. 17.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	II-38
Tabel 2. 18.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Sulawesi Tenggara Tahun 2020	II-40
Tabel 2.19.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024	II-40
Tabel 2.20.	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP Tahun 2020-2023 dan Tahun 2020-2024	II-41
Tabel 2.21.	Tingkat Kepadatan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-42
Tabel 2.22	Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029	II-43
Tabel 2.23	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret 2023-September 2024	II-49
Tabel 2.24.	Garis Kemiskinan dan Perkembangannya menurut Daerah Tempat Tinggal Maret 2023-September 2024	II-50
Tabel 2.25.	Produk Domestik Regional Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020-2024.....	II-51
Tabel 2.26.	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Karakteristik, Februari 2023-. Februari 2025	II-52

Tabel 2.27.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara menurut Dimensi Penyusunannya, 2020-2024	II-55
Tabel 2.28.	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022-2024.....	II-56
Tabel 2.29.	Proyeksi Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan Data BAU dan Upaya Tambahan.....	II-59
Tabel 2.30.	Proyeksi Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak ...dibawah Dua Tahun/Baduta Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan Data BAU dan Upaya Tambahan.....	II-60
Tabel 2.31.	Indeks Pembangunan Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara 2019-2024	II-63
Tabel 2.32.	Indeks Literasi Digital Provinsi Sulawesi Tenggara.....	II-64
Tabel 2.33.	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2023.....	II-70
Tabel 2.34.	Indeks Kualitas Keluarga Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.....	II-71
Tabel 2.35.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018-2024.....	II-73
Tabel 2.36.	Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan dan Subkategorinya di Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Harga Konstan 2010 (persen), 2020-2024.....	II-76
Tabel 2.37.	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), 2020-2024	II-78
Tabel 2.38.	Rasio Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023.....	II-79
Tabel 2.39.	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2023-Februari 2025.....	II-80
Tabel 2.40.	Kategori Penilaian IID, Rentang Skor Nilai IID.....	II-83
Tabel 2.41.	Penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	II-83
Tabel 2.42.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Sulawesi Tenggara (triliun rupiah).....	II-87
Tabel 2.43.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020-2024	II-89
Tabel 2.44.	Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2023	II-92
Tabel 2.45.	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni 2022-2024	II-94
Tabel 2.46.	Status Desa di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan IDM (2023-2024).....	II-94
Tabel 2.47.	Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tenggara bulan Maret, 2024-2025 (persen)	II-97
Tabel 2.48.	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	II-101
Tabel 2.49.	Hasil Skor Sub Dimensi pada Dimensi Strategi.....	II-108
Tabel 2.50.	Hasil Skor Sub Dimensi pada Dimensi SDM	II-108
Tabel 2.51.	Hasil Skor Sub Dimensi pada Dimensi Sistem.....	II-109
Tabel 2.52.	Skor Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	II-109
Tabel 2.53.	Skor Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2024.....	II-111
Tabel 2.54.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	II-113
Tabel 2.55.	Kerjasama Daerah Tingkat Nasional dan Internasional.....	II-166

Tabel 2.56.	Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024	II-177
Tabel 2.57.	Neraca Daerah Tahun 2020-2024	II-181
Tabel 2.58.	Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2026-2030	II-183
Tabel 2.59.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sulawesi Tenggara	II-196
Tabel 3.1.	Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029	III-6
Tabel 3.2.	Keterkaitan Antara Visi dan Misi RJPD 2025-2045 dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029.....	III-8
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029.....	III-11
Tabel 3.4.	Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.....	III-14
Tabel 3.5.	Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Provinsi Sulawesi Tenggara	III-18
Tabel 3.6.	Matriks Arah Pengembangan Kewilayahan Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029.....	III-24
Tabel 3.7.	Matriks Program Prioritas Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029	III-42
Tabel 3.8.	Prioritas Pembangunan Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029.....	III-59
Tabel 3.9.	Arah Kebijakan Pembangunan Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029.....	III-70
Tabel 4. 1.	Rencana Program Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029.....	IV-2
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029.....	IV-51
Tabel 4.3.	Matriks Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029.....	IV-55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang berbasis berkelanjutan. Berdasarkan amanat tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Penyusunan RPJMD terhitung mulai tanggal 20 Februari Tahun 2025 Bapak Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, SE.,MM dan Bapak Ir. Hugua, M.Ling resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara periode Tahun 2025-2029 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Berkaitan dengan itu, sesuai Peraturan Menteri Dalam Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd menyebutkan bahwa terhitung sejak tanggal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur wajib menyusun RPJMD sesuai dengan visi dan misi pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Terhitung sejak tanggal pelantikan tersebut maka visi “Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju, Menuju Masyarakat Aman, Sejahtera dan Religius”, menjadi misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029. Visi dan misi tersebut merupakan bagian penting dalam RPJMD dan selanjutnya akan dijabarkan dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan hingga pada penyusunan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Proses penyusunan RPJMD berlaku sama dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah lainnya yaitu RPJPD, RKPd, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, dilakukan melalui beberapa tahapan pelaksanaan. Secara garis besar, tahapan penyusunan RPJMD menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu :

1. **Persiapan Penyusunan RPJMD**
 Persiapan penyusunan RPJMD meliputi : pembentukan tim penyusunan dengan keputusan kepala daerah, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
2. **Penyusunan Rancangan Awal RPJMD**
 Dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
3. **Penyusunan Rancangan RPJMD**
 Penyusunan rancangan RPJMD provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi.
4. **Pelaksanaan Musrenbang RPJMD**
 Dilaksanakan dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
5. **Perumusan Rancangan Akhir RPJMD**
 Merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.
6. **Penetapan RPJMD**
 Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari konsep rencana pembangunan nasional, karenanya dalam menyusun program pembangunan daerah tetap mengacu kepada rencana pembangunan nasional, baik rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 telah sejalan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 yang berfokus pada pembangunan kawasan-kawasan strategis berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Alam. Selain itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga harus memuat skenario pembangunan yang berasaskan berkelanjutan berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Adapun strategi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Sulawesi Tenggara periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Sinergi dan terpadu, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan dan menyelaraskan pelaksanaan TPB atau dengan kata lain mengintegrasikan prinsip TPB kedalam rencana pembangunan daerah;
2. Multidimensional baik dimensi keuangan, kelembagaan, teknologi dan dimensi politik;
3. Kerjasama multipihak, filantropi, ormas, dunia usaha, akademis, media dan pemerintah;
4. Perspektif jangka panjang, melaksanakan pelaksanaan pencapaian TPB dalam perencanaan baik jangka menengah maupun jangka panjang; dan
5. Internalisasi dampak lingkungan dan sosial ke dalam pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 menggunakan kombinasi pendekatan politik, teknokratik,

partisipatif, atas bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan politik berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada Langsung) secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Sebelum dipilih oleh rakyat, calon Gubernur dan Wakil Gubernur merumuskan visi dan misinya sebagai janji yang akan dilaksanakan apabila terpilih. Visi dan misi tersebut kemudian tuangkan dan dijabarkan dalam RPJMD. Namun dalam penyusunan RPJMD tersebut harus tetap mengacu kepada RPJPD dan memperhatikan RPJPN. Pendekatan teknokratik berkaitan dengan profesionalisme dan keahlian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi daerah secara komprehensif. Pendekatan partisipatif merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pergeseran pemahaman bahwa masyarakat bukan sekedar obyek tetapi juga merupakan pelaku pembangunan mendorong pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan wujud transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang belakangan ini juga disebut dengan istilah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan Bappeda dan OPD.

Bappeda sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan ini merumuskan rancangan awal dengan masukan dari rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rancangan awal tersebut nantinya akan dibahas dalam kegiatan Musrenbang RPJMD dalam rangka penyempurnaan dokumen RPJMD. Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dilakukan mulai dari pengusulan program atau proyek dari tingkat bawah (desa/kelurahan) oleh masyarakat. Penyelenggaraan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang dimaksudkan sebagai wahana menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan yang kemudian hasilnya akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan dan selanjutnya Musrenbang tingkat kabupaten/kota. Program dan proyek yang diusulkan oleh masyarakat akan dinilai dari urgensi dan kemampuan pemerintah ditingkat bawah dalam melaksanakan usulan tersebut. Se jauh mana urgensi dan kemampuan pemerintah berkaitan dengan berbagai usulan yang masuk akan menentukan pelaksanaan program dan proyek nantinya. Apabila suatu usulan dianggap sangat urgen tetapi tidak mampu dilaksanakan oleh pemerintah ditingkat bawah maka akan diusulkan untuk dibawa ke Musrenbang di atasnya, yaitu di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Selain menggunakan pendekatan di atas dalam proses penyusunan RPJMD, pendekatan substansi juga merupakan pendekatan yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Pendekatan dimaksud yaitu pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

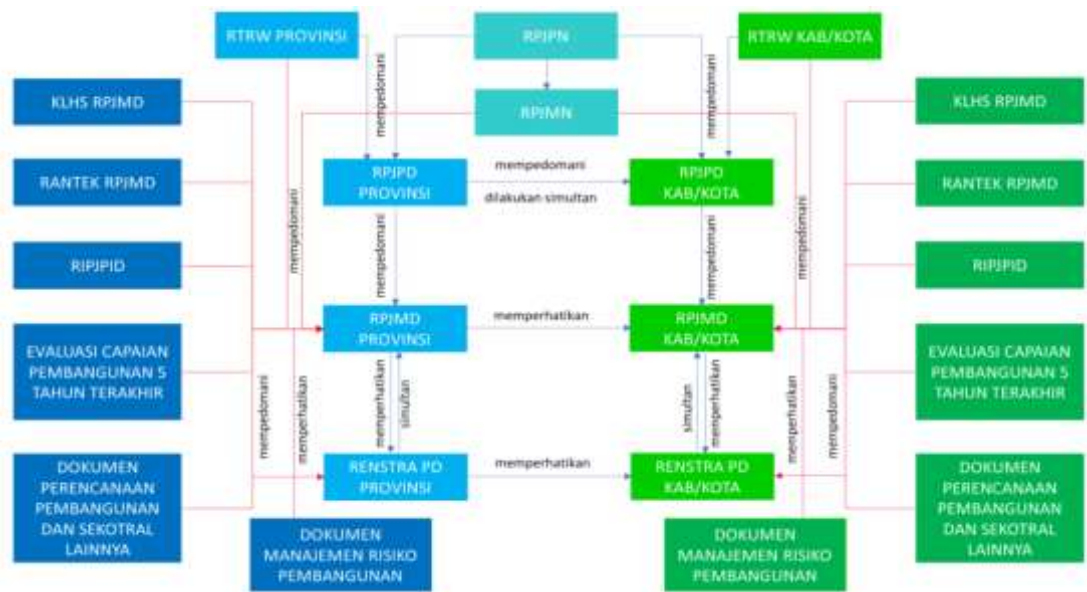
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13).
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 10);
36. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7)
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara: (5-241/2024)).

1.3. Hubungan Antar Dokumen



Gambar 1. 1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian maka pola hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat sasaran pokok Pembangunan Nasional beserta serangkaian Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional salah satunya adalah mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan nasional dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 263 dijelaskan bahwa RPJMD harus berpedoman pada RPJMN.

b. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dengan RPIPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, terutama yang berkaitan erat pada arah kebijakan pembangunan tahap pertama RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

c. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi lain

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029 senantiasa mengedepankan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan daerah provinsi di regional Sulawesi dengan memperhatikan aspek prioritas bersama, urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat serta kemampuan keuangan daerah masing-masing.

d. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dengan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029 dijabarkan setiap tahunnya ke dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

e. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dengan Renstra PD Tahun 2025-2029

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029 sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah

f. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara 2014-2034

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029 sejalan dengan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 untuk lebih fokus pada pembangunan Kawasan-kawasan strategis yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Alam.

g. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 selain berkorelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tersebut di atas, juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sektoral ditingkat nasional dan daerah. Beberapa dokumen perencanaan tersebut antara lain : 1) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB); 2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD) Provinsi Sulawesi Tenggara; 3) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK); 4) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG); 5) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM); 6) Grand Design Reformasi Birokrasi; 7) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 8) RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Tenggara; 9) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Tenggara; 10) RAD Pengurangan Resiko Bencana; 11) Pedoman Pelaksanaan PUG di Sulawesi Tenggara; 12) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD; 13) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) dan beberapa dokumen perencanaan sektoral lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2029 adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan RKPd setiap tahun dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- c. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
- d. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- f. Mendukung terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan;
- g. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
- h. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- i. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- j. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- k. Memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja pemerintahan daerah baik tahunan, maupun lima tahunan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

- 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
- 2.1.5 Standar Pelayanan Minimal
- 2.1.6 Kerjasama Daerah

- 2.2 Gambaran Keuangan Daerah
 - 2.2.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024
 - 2.2.2 Neraca Daerah tahun 2020-2024
 - 2.2.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2026-2030
- 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.2 Isu Strategis Daerah

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - 3.1.1 Visi dan Misi
 - 3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - 3.2.1 Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029
 - 3.2.2 Pengembangan Wilayah
 - 3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 4.2.1 Indikator Kinerja Utama
 - 4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kaidah Pelaksanaan
 - 5.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran
 - 5.1.2 Keterhubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pusat dan Kabupaten/Kota
- 5.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
 - 5.2.1 Pengendalian Perencanaan
 - 5.2.2 Pengendalian Pelaksanaan
- 5.3 Kesimpulan

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

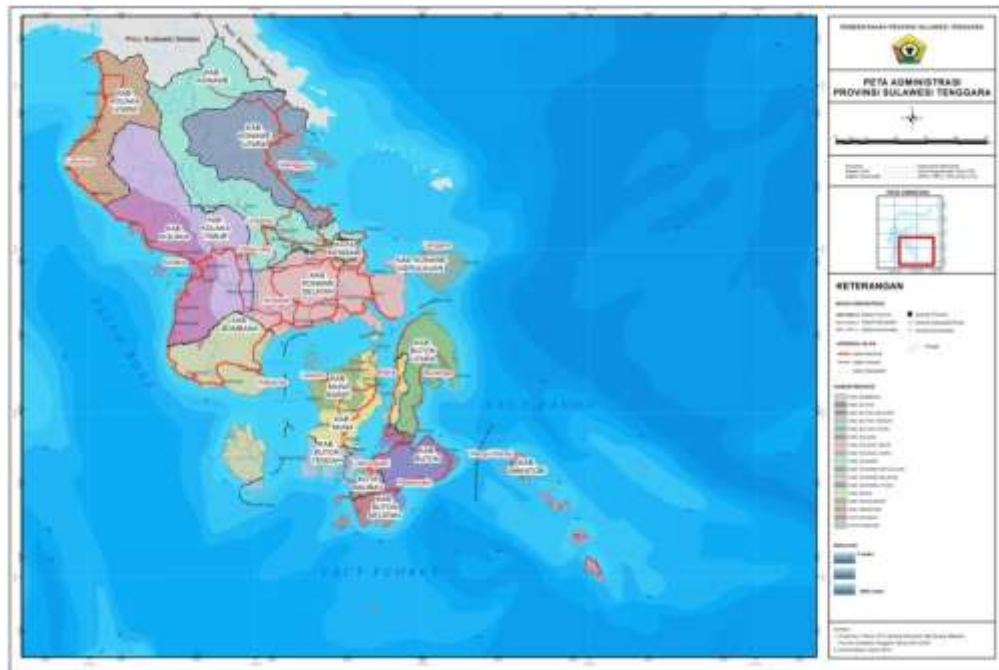
1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 2° 45' 28.14" - 7° 20' 59.68" Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur pada koordinat 120° 22' 13.583" - 125° 4' 13.029" Bujur Timur.

Luas wilayah darat sesuai Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara (peta dasar telah mendapat persetujuan BIG) adalah seluas 3.616.013 Ha, wilayah laut (sejauh 12 mil laut diukur dari garis Pantai) seluas kurang lebih 4.719.166 Ha, sedangkan sesuai batas administrasi luas wilayah Sulawesi Tenggara adalah berupa daratan seluas 36.159,71 km² dengan daratan terluas yakni Kabupaten Konawe (5.351,85 km²). Dengan jumlah pulau 591 dengan laut seluas 110.000 km². yang terdiri dari 15 wilayah kabupaten dan 2 kota yang terdiri dari 221 Kecamatan, 379 Kelurahan dan 1.908 Desa Berdasarkan Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, namun terdapat beberapa pulau di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum termasuk dalam Kepmendagri tersebut diantaranya Pulau Kawi-Kawia (Busel), Pulau Ponda (Usulan Muna Barat), Pulau Batu Tiga, Pulau Maware (Usulan Baubau) sehingga jumlah Pulau di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 594. Untuk itu Berkaitan dengan peran strategis dan kewenangan daerah, kejelasan status pulau dan jumlah pulau tersebut diperlukan segera upaya sinkronisasi dan harmonisasi data dari daerah dan kementerian demi keterpaduan program pembangunan selanjutnya. Berdasarkan posisi geografisnya, batas Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah;
Sebelah Selatan : Provinsi NTT di Laut Flores;
Sebelah Timur : Provinsi Maluku di Laut Banda;
Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone.

Gambar 2. 1. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024



Sumber: RTRW Prov. Sultra Tahun 2014-2034

Tabel 2. 1. Pembagian Wilayah Adminsitratif dan Luas Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kab/Kota, Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Total Area (Km ²)
1. Buton	Pasarwajo	1.669,33
2. Muna	Raha	1.858,10
3. Konawe	Unaaha	5.351,85
4. Kolaka	Kolaka	2.958,92
5. Konawe Selatan	Andoolo	4.237,74
6. Bombana	Rumbia	3.293,97
7. Wakatobi	Wanci	450,46
8. Kolaka Utara	Lasusua	2.932,25
9. Buton Utara	Buranga	1.755,83
10. Konawe Utara	Wanggudu	4.219,81
11. Kolaka Timur	Tirawuta	3.992,53
12. Konawe Kepulauan	Langara	705,71
13. Muna Barat	Laworo	818,70
14. Buton Tengah	Labungkari	836,96
15. Buton Selatan	Batauga	517,63
16. Kota Kendari	Kendari	265,79
17. Kota Baubau	BauBau	294,14
18. Sulawesi Tenggara	Kendari	36.159,71

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024

Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi daratan Konawe dan Kolaka. Sedangkan kepulauan meliputi Pulau Buton dan Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar di bagian Selatan dan Tenggara. Wilayah Sulawesi Tenggara, pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit, sedangkan permukaan tanah

pegunungan yang relatif rendah yakni sekitar 1.868.860 hektar sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 meter diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan mencapai 40 derajat, serta terdapat Kawasan pesisir dan laut yang diperkirakan mencapai 110.000 km².

Secara umum topografi Sulawesi Tenggara bergelombang, bergunung dan berbukit. Pada beberapa tempat terdapat dataran aluvial seperti Mowewe, Lainea, Ladongi dan lain-lain. Berdasarkan kelas kemiringan lahan maka kondisi topografi di Sulawesi Tenggara dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Dataran Konawe-Lahumbuti dengan luas kurang lebih 87.500 Ha.
- b) Dataran Rate-rate-Lambandia dengan luas kurang lebih 25.000 Ha.
- c) Dataran Waworamo-Punggaluku dengan luas kurang lebih 18.000 Ha.
- d) Dataran Tinanggea-Lakara dengan luas kurang lebih 17.000 Ha.
- e) Dataran Lalindu-Lasolo dengan luas kurang lebih 17.000 Ha.
- f) Dataran Konda dengan luas kurang lebih 14.000 Ha.
- g) Dataran Sampara dengan luas kurang lebih 14.000 Ha.
- h) Dataran Roraya dengan luas kurang lebih 10.000 Ha.
- i) Dataran Kolono dengan luas kurang lebih 4.000 Ha.
- j) Dataran Oko-oko – Tawai dengan luas kurang lebih 13.500 Ha.
- k) Dataran Kolaka – Pomalaa dengan luas kurang lebih 12.000 Ha.
- l) Dataran Watuputih dengan luas kurang lebih 7.000 Ha.

Diantara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan telah banyak digunakan untuk usaha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan tanah yang mencapai 40°. Serta memiliki beberapa sungai yang melintasi hampir seluruh kabupaten/kota. Sungai-sungai tersebut pada umumnya potensial untuk dijadikan sebagai sumber energi, untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan irigasi. Daerah aliran sungai, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Konawe, melintasi Kabupaten Kolaka dan Konawe. DAS tersebut seluas 7.150,68 km² dengan debit air rata-rata 200 m³/detik. Bendungan Wawotobi yang menampung aliran sungai tersebut, mampu mengairi persawahan di daerah Konawe seluas 18.000 ha. Selain itu, masih dapat dijumpai banyak aliran sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan debit air yang besar sehingga berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi seperti: Sungai Lasolo di Kabupaten Konawe, Sungai Roraya di Kabupaten Bombana (Kecamatan Rumbia dan Poleang), Sungai Wandasa dan Sungai Kabangka Balano di Kabupaten Muna, Sungai Laeya di Kabupaten Kolaka dan Sungai Sampolawa di Kabupaten Buton.

Di samping sungai-sungai tersebut terdapat pula 2 (dua) rawa yang cukup besar, yaitu Rawa Aopa yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Rawa Tinondo yang terdapat di Kabupaten Kolaka serta Daerah Aliran Sungai (DAS) Wanggu yang merupakan salah satu DAS prioritas di Sulawesi Tenggara karena disamping memiliki fungsi hidrologis sebagai sumber utama sedimen yang menyebabkan pendangkalan Teluk Kendari, juga terdapat berbagai sarana dan prasarana vital seperti Bandar Udara Halu Oleo, Kampus Universitas Halu Oleo, Polda Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Secara administrasi DAS Wanggu dibagi atas dua daerah otonom yaitu Kota Kendari (26,38 %) dan Kabupaten Konawe Selatan (73,62%) dengan total luas 33.208 hektar (BPDAS Sampara, 2003). Bagian hilir DAS Wanggu merupakan wilayah Kota Kendari, sedangkan hulunya merupakan Kabupaten Konawe Selatan.

Sedangkan keberadaan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara Berdasarkan SK.81155/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 dan data BPS tahun 2022 disebutkan bahwa luas kawasan hutan dan konservasi perairan Sulawesi Tenggara adalah 3.742.909 Ha, terdiri atas : Kawasan Hutan Nasional (108.415 Ha), Kawasan Hutan Marga Satwa (162.656 Ha), Kawasan Hutan Suaka Alam (7.905 Ha), Kawasan Hutan Cagar Alam (1.457 Ha), Kawasan Hutan Taman Raya (7.849 Ha), Hutan Lindung (1.080.819 Ha), Hutan Produksi Tidak Tetap (408.995 Ha), Hutan Produksi Tetap (448.011 Ha), Taman Nasional Laut (1.315.552 Ha), dan Taman Bawah Laut (105.079 Ha). Keberadaan kawasan hutan yang harus tetap dipertahankan dalam rangka meningkatkan potensinya di Sulawesi Tenggara, mengingat kawasan hutan dihadapkan pada tantangan dan permasalahan diantaranya : kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi dan budidaya pertanian non kehutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan HTI, serta permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup maka telah ditetapkan beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

Kawasan Suaka Alam yang meliputi :

- Cagar Alam Napabalano
- Cagar Alam Lamedai
- Cagar Alam Kakinawe
- Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo
- Suaka Margasatwa Buton Utara
- Suaka Margasatwa Tanjung Peropa
- Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo
- Suaka Margasatwa Lambusango.

Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi :

- Taman Hutan Raya Gunung Nipa-nipa
- Taman Hutan Nasional Rawa Aopa Watumohai
- Taman Nasional Laut Wakatobi
- Taman Wisata Alam Mangolo
- Taman Wisata Alam Tirta Rimba Moramo
- Taman Wisata Alam Laut P. Padamarang dan sekitarnya
- Taman Wisata Alam Teluk Lasolo
- Taman Buru Mata Osu

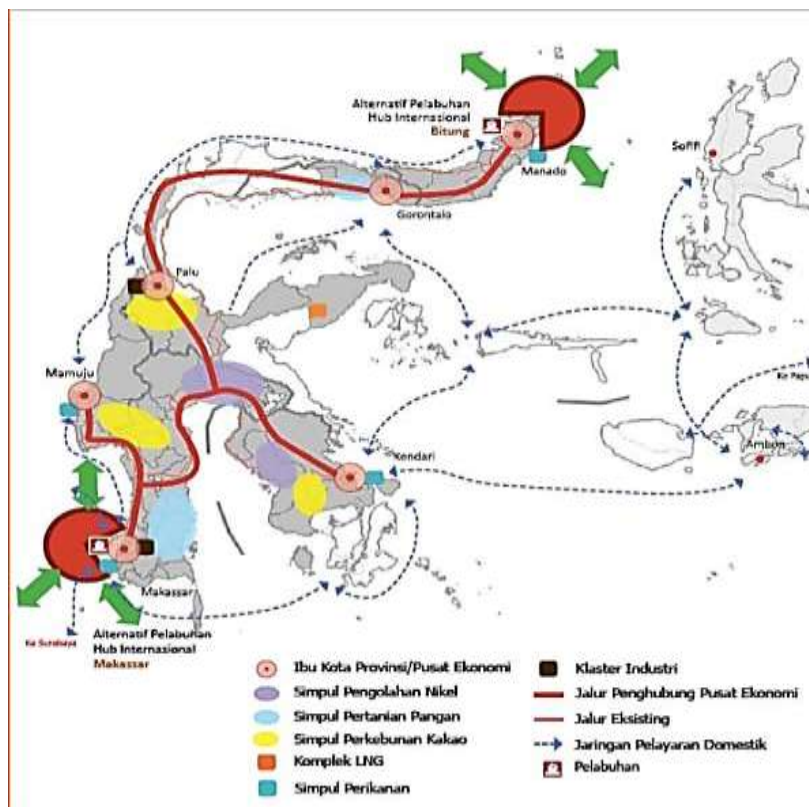
Untuk kawasan Budidaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Pada tahun 2017 kawasan budidaya pada penggunaannya terbagi atas lahan sawah irigasi seluas 100.121,8 Ha, lahan sawah non irigasi 28,564,1 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian terdiri atas penggunaannya yaitu tanah perkebunan seluas 683.504,0 Ha, tanah tegalan/kebun seluas 231.171,2 Ha, tanah ladang/huma seluas 141.731,5 Ha, tanah padang rumput 105.885,4 Ha, Sementara tidak diusahakan seluas 222,909,0 Ha dan Lainnya seluas 1.442.357,5 Ha dan untuk luas lahan budidaya air tawar seluas 20.885 Ha.

Provinsi Sulawesi Tenggara berada di jalur strategis yang menghubungkan Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, menjadikannya pintu gerbang penting dalam distribusi barang dan jasa. Posisi strategis Sulawesi Tenggara dalam konteks pembangunan nasional terletak pada perannya sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan, khususnya

nikel. Selain itu, provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan kelautan. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, Sulawesi Tenggara dapat berperan lebih besar dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian timur dan mewujudkan kemandirian ekonomi regional.

Pengembangan potensi ekonomi daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan nasional, khususnya melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Sulawesi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), ditetapkan sebagai "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Pertambangan Nikel". dua sektor utama, yaitu subsektor perikanan dan subsektor industri logam dasar. Subsektor perikanan didukung oleh sumber daya laut yang melimpah serta komoditas ekspor unggulan seperti gurita beku, rumput laut, dan ikan pelagis. Sementara itu, industri logam dasar didorong oleh cadangan nikel yang luas di wilayah Sulawesi Tenggara, menghasilkan feronikel dan baja tahan karat untuk kebutuhan ekspor.

Gambar 2.2. Koridor Ekonomi Sulawesi



Sumber: Kemenko Perekonomian

Sektor pertambangan, khususnya nikel, memiliki keunggulan signifikan. Sulawesi Tenggara merupakan wilayah dengan luas penghasil nikel terbesar di Indonesia mencapai area pertambangan seluas 198.624,66 km² dengan sumber daya nikel yang diperkirakan mencapai 97,4 miliar ton. Potensi ini diperkuat oleh program

hilirisasi nikel yang diinisiasi oleh pemerintah, yang pada tahun 2023 menyumbang Rp.18.529,9 miliar atau 21,44% terhadap total PDRB (BPS, 2024).

Sektor Industri Logam Dasar diprioritaskan untuk dikembangkan guna mendukung kemandirian nasional. Industri berbasis mineral yang menjadi fokus utama mencakup empat jenis logam, yaitu baja, aluminium, tembaga, dan nikel, yang merupakan sumber daya alam yang krusial untuk mendukung pengembangan kawasan industri prioritas di luar Pulau Jawa. Sulawesi Tenggara memiliki cadangan nikel yang melimpah, tersebar di berbagai wilayah seperti Kabupaten Konawe Utara, Kolaka Utara, Konawe, Kolaka, Bombana, Konawe Selatan, dan Buton. Berdasarkan itu pemerintah telah menetapkan pengembangan Kawasan Industri Konawe sebagai salah satu bagian strategis untuk mendukung industrialisasi nasional

Pengembangan Kawasan Industri diKonawe sejalan dengan kebijakan hilirisasi mineral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sulawesi Tenggara menjadi pusat utama hilirisasi nikel, didukung oleh keberadaan tiga smelter nikel yang telah beroperasi: PT Antam di Kolaka dengan kapasitas produksi ferronickel 27.000 metrik ton per tahun; PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe dengan kapasitas produksi Nickel Pig Iron (NPI) 1 juta metrik ton per tahun; serta PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Konawe yang memiliki kapasitas produksi NPI 2-3 juta metrik ton per tahun (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).

Salah satu indikator utama untuk menilai kinerja pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), Sulawesi Tenggara mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,35% pada tahun 2023, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketujuh di Indonesia (BPS, 2024).

Sulawesi Tenggara terus memperkuat perannya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional di sektor pertambangan. Berdasarkan data BPS pada Februari 2024, nilai ekspor daerah ini mencapai USD 295,70 juta, dengan komoditas besi dan baja (HS 72) sebagai penyumbang utama yang mencapai 98,01% dari total ekspor. Ini menegaskan bahwa sektor pertambangan menjadi pilar utama ekspor daerah sekaligus menunjukkan dominasi sektor tersebut dalam struktur ekonomi ekspor Sulawesi Tenggara.

Selain nikel, Sulawesi Tenggara juga memiliki berbagai komoditas ekspor unggulan lainnya, seperti produk olahan dari daging dan ikan, serta beragam jenis ikan dan udang segar. Potensi ekspor perikanan juga terus berkembang, terbukti dengan pengiriman perdana 3,2-ton ikan kerapu hidup dari perairan Wakatobi ke Hong Kong pada Oktober 2024, dengan nilai mencapai USD19.200. Sementara itu, pada Agustus 2024, terdapat ekspor 646-ton kelapa lokal ke Tiongkok bernilai Rp2,5 miliar yang menandakan tingginya permintaan global terhadap produk perkebunan Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, pada Februari 2024 pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melepas ekspor komoditas perikanan, yaitu ikan tuna dan daging kepiting rajungan, dengan total pengiriman 128 ton ke Filipina dan Amerika Serikat. Hal ini semakin mempertegas peran Sulawesi Tenggara sebagai daerah dengan sektor ekspor yang beragam dan berdaya saing tinggi

Upaya peningkatan kualitas produk ekspor terus dilakukan melalui pengembangan standar pengolahan dan pengemasan, yang diharapkan akan memperluas akses pasar ke negara-negara tujuan baru. Dengan keberagaman produk

ini, Sulawesi Tenggara semakin memperkuat posisinya dalam perdagangan global, tidak hanya sebagai pemasok bahan tambang tetapi juga sebagai penghasil komoditas perkebunan dan perikanan yang berkualitas tinggi.

2. Potensi Sumber Daya Alam

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang tersedia terdiri dari sumberdaya yang ada didarat dan laut. Potensi Sumber daya Alam darat dan laut di Sulawesi Tenggara tersebar merata hampir diseluruh kabupaten/Kota. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah Sulawesi Tenggara diidentifikasi sebagai wilayah yang memiliki sumberdaya alam dengan potensi unggulan seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki konsep pengembangan kawasan untuk pendorong pertumbuhan ekonomi yang tertera pada RPJPD 2025-2045. Pusat pertumbuhan wilayah dibagi menjadi kawasan industri pertambangan, kawasan industri terpadu kendari, kawasan sistem minapolitan, kawasan sistem agropolitan, kawasan pariwisata, serta kawasan pesisir kendari dan sekitarnya. Kawasan minapolitan bertujuan untuk mendorong sistem pusat ekonomi berbasis perikanan. Kawasan pesisir Kendari dan sekitarnya bertujuan untuk dijadikan pusat pengolahan industri perikanan dan pariwisata. Kawasan pariwisata bertujuan untuk pengembangan ekonomi berbasis pariwisata yang sejalan dengan perlindungan laut dan pesisirnya. Arah pengembangan kawasan ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang memperkuat pengembangan ekonomi biru. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki fokus ekonomi di sektor pertambangan yang merupakan sektor ekstraktif. Agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan berdampingan, perlu dipastikan bahwa sektor pertambangan dilakukan dengan dasar-dasar aspek keberlanjutan yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi.

Pada sektor pertambangan Potensi kandungan Nikel di Sulawesi Tenggara telah di kenal sejak jaman Belanda. Data menunjukkan nikel Sulawesi Tenggara telah di eksploitasi sejak tahun 1934 oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tolo Maatschappij. Cadangan Nikel di Sulawesi Tenggara cukup besar, jumlah cadangan nikel Sulawesi Tenggara berdasarkan data Dinas ESDM provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 97 milyar tondengan luas sebaran nikelnya 480 ribu Ha sehingga menjadikannya salah satu produsen nikel terbesar di Indonesia. Kekayaan ini menjadi potensi besar untuk pengembangan sektor hilir, seperti industry baterai dan logam berat, yang mendukung agenda industrialisasi nasional berbasis sumber daya lokal.

Sulawesi Tenggara memiliki cadangan nikel yang melimpah, tersebar di berbagai wilayah seperti Kabupaten Konawe Utara, Kolaka Utara, Konawe, Kolaka, Bombana, Konawe Selatan, dan Buton. Total cadangan nikel di provinsi ini mencapai 97.401.593.025,72 WMT (Tabel 10). Kabupaten Konawe Utara menjadi wilayah dengan cadangan terbesar, yaitu 46 miliar WMT, dengan luas area mencapai 82.626,03 hektar.

Selain nikel potensi besar yang ada di Sulawesi Tenggara adalah Aspal Alamnya yang terkenal di dunia. Potensi aspal alam di sultra yang terletak di pulau buton dengan jumlah cadangan 2.663.648.000 M3 atau setara sekitar 3.835.653.120 ton (DESMDM Prov.Sultra, 2011). Jika disetarakan dengan jumlah energi yang dapat dihasilkan sekitar tatanan geologi pulau buton sendiri didapatkan potensi aspal (bitumen padat) di buton setelah dilakukan studi geokimia hidrokarbon pada contoh batu aspal Fm. Sampolakosa dari daerah Lawele dan daerah Sampolawa, bitumen padat/oil shale dari Fm. Winto dari daerah Sampolawa dan minyak rembesan/oilseeps pada Fm. Tondo

daerah Kapontori. Ini semua memberikan gambaran potensi hidrokarbon pada daerah sultra sangat prospek.

Potensi kandungan Emas di Sulawesi Tenggara juga cukup besar. Terdapat lima kabupaten yang memiliki potensi kandungan emas, yakni Kolaka Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan total cadangan emas 1,1 juta ton senilai Rp 270 triliun, potensi terbesar berada di Kabupaten Bombana sebesar 540 ribu ton. Potensi lain yang ada di Sulawesi Tenggara adalah marmer seluas 206.237 juta meter kubik, dan batu gamping seluas 188.352 hektar.

Di sisi lain, dari sektor perikanan Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan potensi besar dalam sektor perikanan dengan lokasinya yang strategis dikelilingi Laut Banda, Laut Flores, dan Teluk Bone menjadikan Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah, yang mendukung berbagai jenis perikanan tangkap menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu penghasil produksi perikanan terbesar di Indonesia.

Produksi Perikanan Sulawesi Tenggara (Sultra) setiap tahun mengalami peningkatan. Produksi yang berlimpah ini mampu memenuhi kebutuhan wilayah sekitar seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, Batam dan Semarang. Di samping itu juga menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekspor yang cukup tinggi. Data produksi sektor perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2. Capaian dan Target Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB (Subsektor perikanan) (persen)	11.6	11.44	11.78	11,6	
2.	Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi (Ribu Ton)	636.87	660.88	670.03	681,903	695,645
3.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Persen)	70	85	87	77,08	89,36
4.	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	70.51	70.78	72.32	73,38	73,38
5.	Cakupan bina kelompok (Pokmaswas)	131	135	135	89	89
6.	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ribu Ton)	255.18	254.55	259.64	266.816	277.169
7.	Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (Juta Hektar luas kawasan konservasi)	1.96	1.96	1.96	1,96	1,96
8.	Nilai Tukar Nelayan	97.45	102.54	102.46	99,41	96,98

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan dari 118,09 triliun pada

tahun 2018 menjadi Rp 176,18 triliun pada tahun 2023. Dari capaian angka tersebut, PDRB Sub-Sektor Perikanan konsisten berkontribusi sebesar 10-12% setiap tahun terhadap PDRB Provinsi (BPS Prov. Sultra) dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Data ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan tidak hanya memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berdaya saing untuk menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Jumlah total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi) terjadi peningkatan pasca pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021. Hal ini juga ditunjukkan pada meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus bergerak cepat dengan menyalurkan berbagai bantuan untuk nelayan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan nelayan agar lebih berdaya saing di bidang usaha penangkapan ikan.

Kebijakan dan implementasi revitalisasi perikanan tangkap dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk program peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan penjagaan mutu dan nilai tambah, perluasan akses pasar dan pemasaran hasil, meningkatkan keberhasilan dan prasarana pendukung usaha perikanan yaitu perikanan tangkap, budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengeloaan perikanan skala kecil melalui pendekatan program Pengelolaan Akses Area Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara juga membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah dan terutama kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual.

Upaya-upaya peningkatan produktivitas perikanan tangkap tersebut salah satu dampaknya dapat terlihat melalui pertumbuhan angka produksi perikanan tangkap di tahun 2023. Namun demikian peningkatan produksi perikanan tangkap tersebut tidak secara langsung berimplikasi pada peningkatan nilai indeks kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut tergambar pada data yang dirilis oleh Pusdatin KKP dimana indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan dalam kurun lima tahun terakhir, meskipun ada sedikit peningkatan pasca pandemi covid 19 pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan dimana indeks NTN tidak mencapai nilai 100. Sebagaimana data yang dirilis oleh Pusdatin KKP dimana rata-rata indeks NTN Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 hanya mencapai 99,41 dimana nilai NTN ini sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 yaitu sebesar 102,46. Faktor penurunan indeks NTN tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga nelayan yang mana disisi lain harga-harga kebutuhan bahan pokok juga terus mengalami kenaikan.

Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan (SDKP). Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil usaha penangkapan ikan merupakan sumber ekonomi utama bagi keluarganya, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat berpengaruh terhadap taraf kehidupannya.

Angka konsumsi ikan per kapita per tahun dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan per wilayah dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan suatu wilayah dalam pengelolaan perikanan. Sampai akhir Desember tahun 2023

Angka Konsumsi Ikan Nasional mencapai 57,61 sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 73,58.

Angka konsumsi ikan yang terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa pemanfaatan produksi hasil perikanan di dalam wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sangat tinggi sehingga dapat menjadi peluang pengembangan industri pengolahan ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Saat ini produk hasil olahan berbahan ikan telah banyak dijumpai di pasar-pasar lokal, restoran-restoran kelas menengah dan mini market dalam berbagai kemasan dan jenis olahan yang cukup higienis dengan harga yang cukup terjangkau.

Salah satu strategi pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan masyarakat adalah peningkatan intensitas sosialisasi dan promosi tentang manfaat dan keunggulan kandungan gizi produk olahan perikanan dibanding sumber protein lainnya. Salah satu strategi yang tetap dilakukan hingga saat ini adalah pelaksanaan Program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), dimana salah satu bentuk kegiatannya adalah lomba masak serba ikan.

Selain itu, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam Laut, Kawasan Konservasi Perairan, dan Daerah Perlindungan Laut. Kawasan Konservasi dimaksud meliputi total luasan sebesar 2.068.969,41 hektar, yaitu:

- a) Taman Nasional Wakatobi; Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo dan Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang ;
- b) Daerah Perlindungan Laut; 10 Kawasan Konservasi Perairan; Kawasan Konservasi P3K di Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Bombana; dan,
- c) Daerah Perlindungan Laut di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Konawe Selatan, Kapontori, Pasarwajo, Wolowa, dan Siontapina serta Daerah Konservasi Kima di Konawe.

Disisi lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Rare dalam mengembangkan kawasan konservasi lainnya yang berdampak konservasi di luar kawasan Konservasi formal yang disebut dengan OECM (*Other Effective Area-Based Conservation Measure*) dengan luas 339.953 Ha melalui Progran Pengelolaan Area Akses Perikanan (PAAP) untuk kebutuhan perlindungan nutfah, terumbu karang dan sumber daya hayati untuk kelangsungan produksi.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Pembinaan POKMASWAS merupakan rangkaian kegiatan pembekalan sosialisasi dan bimbingan kepada Pokmaswas untuk meningkatkan partisipasi dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Jumlah POKMASWAS yang terdaftar hingga saat ini adalah sebanyak 135 kelompok. Namun berdasarkan status keaktifannya, hingga Desember 2023 hanya tercatat sebanyak 28 kelompok yang aktif menjalankan tupoksinya. Kemudian dari sebanyak 18 pokmaswas yang menjadi target

awal untuk dilakukan pembinaan selama tahun 2023, hanya 13 kelompok yang dapat dikunjungi dan dilakukan pembinaan.

Selanjutnya pada sektor pertanian terdiri dari pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan. Untuk Sektor Pertanian Tanaman Pangan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari (1) Padi Sawah, (2) Padi Ladang, (3) Jagung, (4) Kacang Kedelai, (5) Kacang Tanah, (6) Kacang Hijau, (7) Ubi Kayu, dan (8) Ubi jalar. Sedangkan untuk Sektor Peternakan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari: (1) Populasi hewan ternak yaitu Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing, Babi, Kuda, Ayam Burasm Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik, Itik Manila, Puyuh, (2) Populasi hewan petelur yaitu Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Itik, Itik Manila dan Puyuh.

Tabel 2. 3. Produksi Sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)					
	Padi	532.773	530.029	488.389	479.410	555.836
	Jagung	179.906	150.561	181.295	67.629	124.997
	Kedelai	629	574	9.681	4.647	585
	Kacang Tanah	3.046	3.104	2.332	1.967	2.476
	Kacang Hijau	804	296	307	482	358
	Ubi Kayu	167.769	137.657	149.336	112.263	113.103
	Ubi Jalar	17.707	15.469	15.269	19.995	13.879
2.	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)					
	Sapi Potong	361.568	391.479	421.454	200.279	235.685
	Sapi Perah	51	46	51	16	29
	Kerbau	2.349	2.544	2.668	1.308	2.024
	Kambing	195.128	204.357	213.719	58.860	65.529
	Babi	98.108	108.606	117.216	21.303	14.373
	Kuda	644	667	724	164	616
	Ayam Buras	11.088.813	11.572.793	12.168.591	1.626.394	1.722.896
	Ayam Ras Petelur	455.719	473.916	505.923	218.432	218.050
	Ayam Ras Pedaging	4.477.630	5.122.986	5.444.745	8.972.038	9.654.576
	Itik	577.699	609.651	631.190	134.891	146.156
	Itik Manila	42.942	45.353	47.071	149.434	162.767
	Puyuh	9.266	3.724	4.090	435	0
3.	Jumlah Produksi Daging dan Telur (Kg)					
	Produksi Daging					
	Sapi	3.720.990	4.521.025	4.525.615	5.902.211	5.985.197
	Kerbau	17.183	32.303	32.768	16.085	13.911
	Kambing	324.283	205.081	200.882	536.633	560.596
	Babi	624.514	556.432	585.216	201.775	170.067
	Kuda	9.684	16.800	17.250	0	244
	Ayam Buras	11.953.741	12.475.471	13.117.741	1.753.253	1.857.282
	Ayam Ras Petelur	333.873	352.453	376.254	160.023	159.743
	Ayam Ras Pedaging	5.092.956	5.826.722	6.192.976	10.469.337	11.265.780
	Itik	362.216	381.182	395.756	84.577	91.640
	Itik Manila	28.342	29.912	31.067	9.598	10.965
	Puyuh	2.039	819	900	96	0
	Produksi Telur					
	Ayam Buras	7.195.531	10.277.404	10.806.512	1.444.345	1.530.045
	Ayam Ras Petelur	5.724.897	6.135.121	6.549.471	2.827.731	2.822.785
	Itik	6.705.361	4.885.177	5.057.771	1.080.891	1.171.159

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024*
	Itik Manila	235.752	248.988	258.431	79.841	91.194
	Puyuh	16.094	6.468	7.104	754	0

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat menunjukkan bahwa Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan, Populasi Ternak, Produksi Daging dan Produksi Telur. Produktivitas padi terus mengalami kenaikan dan mencapai target produktivitas yang telah ditetapkan dari tahun 2020 sampai 2024. Produktivitas padi pada tahun 2020 mencapai 39,85 ku/ha dari target 39,56 ku/ha, tahun 2021 mencapai 41,57 ku/ha dari target 39,56 ku/ha, tahun 2022 mencapai 41,30 ku/ha dari target 39,56 ku/ha, tahun 2023 mencapai 42,08 ku/ha dari target 41,71 ku/ha dan tahun 2024 mencapai 42,80 ku/ha dari target 41,38 ku/ha. Walaupun capaian produktivitas padi mengalami peningkatan, namun capaian produksi justru mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Penurunan produksi tersebut diakibatkan oleh perbedaan metode perhitungan produksi dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 telah menggunakan metode perhitungan produksi berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA).

Tahun 2024 produksi mencapai 555.836 ton/GKG dari target produksi 499.133 ton/GKG karena target produksi telah disesuaikan berdasarkan KSA. Sedangkan untuk capaian produksi jagung dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dan tidak mencapai target, yang disebabkan karena kurangnya minat petani menanam jagung untuk kebutuhan komersial, hanya untuk kebutuhan konsumsi saja. Stimulan dari pemerintah berupa bantuan benih jagung hibrida untuk pakan ternak yang belum mampu menarik minat sebagian besar petani untuk menanam jagung tersebut. Sedangkan untuk komoditas lainnya tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena tidak ada bantuan dari pemerintah untuk petani.

Untuk capaian populasi ternak untuk sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, babi, kuda, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, itik manila dan puyuh dari tahun 2020 sampai 2022 mencapai target yang ditetapkan, kecuali kuda namun tidak signifikan. Pada tahun 2023 sampai 2024 mengalami penurunan populasi sehingga tidak mencapai target populasi yang ditetapkan. Sedangkan produksi daging sapi dari tahun 2020 sampai 2024 terus meningkat sesuai dengan permintaan konsumen walaupun tidak mencapai target produksi daging. Produksi daging kerbau meningkat dari tahun 2020-2022, dimana tahun 2021 dan 2022 mencapai target produksi daging. Produksi daging kambing dari tahun 2020-2022 menurun dan tidak mencapai target, namun tahun 2023 dan 2024 produksi daging mencapai target dengan meningkatnya permintaan konsumen. Produksi daging babi berfluktuasi dari tahun 2020-2024 dan tidak mencapai target produksi daging, produksi daging kuda meningkat dari tahun 2020-2022 dan mencapai target. Sedangkan untuk unggas yakni produksi daging ayam buras, ayam ras petelur dan produksi daging itik terus meningkat dari tahun 2020-2022 dan mencapai target. Produksi daging untuk ayam pedaging terus meningkat dari tahun 2020-2024 dan mencapai target produksi daging karena banyaknya permintaan konsumen. Produksi daging puyuh berfluktuasi dan tidak mencapai target. Di sisi lain produksi telur ayam buras, ayam ras petelur dan itik meningkat dari tahun 2020-2022 dan mencapai target produksi telur. Produksi telur itik manila walaupun tidak mencapai target, namun produksi telur terus meningkat dari tahun 2020-2022. Telur puyuh berfluktuasi dari tahun 2020-2022 dan tidak mencapai target, sedang produksi telur puyuh pada tahun 2023-2024 tidak ada, hal tersebut diakibatkan oleh sudah tidak adanya peternakan puyuh.

Penyebab sebagian besar populasi, produksi daging dan produksi telur menurun pada tahun 2023 dan 2024 dan tidak mencapai target, hal ini disebabkan adanya perubahan metode pendataan pada sensus 2023 dibanding pendataan tahun 2022 yang dilakukan oleh dinas kabupaten/kota secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Hasil sensus pertanian tahun 2023 menunjukkan bahwa populasi ternak sangat sedikit dibandingkan dengan nilai dilapangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah nilai yang diakui adalah nilai yang dikeluarkan oleh BPS. BPS mendata ternak berdasarkan Konsep Rumah Tangga Usaha Pertanian yaitu rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar, sehingga tidak semua ternak yang dipelihara oleh petani/peternak didata oleh BPS.

Selanjutnya pada Sektor unggulan komoditi perkebunan dan hortikultura yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdiri dari tanaman kakao, jambu mete, kelapa, cengkeh, lada, kopi, pala, kelapa sawit, sagu, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, jeruk dan durian. Adapun capaian dan target kinerja produksi komoditi perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4. Capaian dan Target Kinerja Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Capaian Kinerja (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Kakao	114.003,0	107.054,0	104.649,0	101.736,0	107.876,0
2	Jambu Mete	52.777,0	51.700,0	36.285,0	33.503,0	34.247,0
3	Kelapa Dalam	38.397,0	39.155,0	40.208,0	41.187,0	39.335,0
4	Cengkeh	13.434,0	9.490,0	13.438,0	13.928,0	14.404,0
5	Lada	5.604,0	5.579,0	5.469,0	5.446,0	5.531,0
6	Kopi	2.675,0	2.776,0	2.732,0	2.799,0	2.883,0
7	Pala	710,0	763,0	585,0	634,0	778,0
8	Kelapa Sawit	5.030,0	3.950,0	7.962,0	7.794,0	8.720,0
9	Sagu	2.760,0	2.705,0	2.684,0	2.632,0	2.819,0
10	Bawang Merah	655,0	1.015,3	449,3	490,7	782,1
11	Cabai Rawit	3.801,4	4.286,7	3.914,5	4.528,9	3.891,0
12	Cabai Besar	1.962,5	2.411,2	2.540,2	3.449,0	3.332,2
13	Jeruk	50.214,0	22.219,6	19.927,0	10.482,9	15.520,7
14	Durian	11.737,9	12.885,5	23.744,5	14.097,4	15.974,0

Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Keterangan:

* = Angka bersifat sementara

**= Data produksi dalam buku statistik namun tidak menjadi target iku pada tahun bersangkutan

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura di Sulawesi Tenggara secara umum mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan produksi walaupun tidak terlalu signifikan. Tahun 2024 produksi Sektor Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yang terbesar adalah Tanaman Kakao 107.876 ton dan yang terkecil adalah Tanaman Bawang Merah hanya mencapai 782,1 ton.

Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya jumlah produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura yaitu Faktor Internal (OPD/Pemerintah) diantaranya adalah keterbatasan dukungan anggaran APBD, terbatasnya kualitas SDM tenaga pendamping petani perkebunan dan hortikultura (tenaga penyuluh, pengamat

opt dan pengawas/sertifikasi benih). Sedangkan Faktor Eksternal (Petani/Lahan) antara lain (1) Budidaya tanaman tidak sesuai GAP/GHP, (2) Belum optimalnya penanganan hama penyakit tanaman; (3) Belum optimalnya penggunaan benih unggul bersertifikat; (4) Belum optimalnya ketersediaan benih unggul bersertifikat; (5) Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk perkebunan dan hortikultura.

Disamping faktor penghambat tersebut diatas, terdapat faktor pendukung yang mampu mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi yaitu Faktor Internal (OPD/Pemerintah) antara lain (1) Dukungan anggaran APBN melalui Dana APBN (Satker Perkebunan, Satker Hortikultura dan Satker PSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia); (2) Berkembangnya beberapa kawasan Perkebunan dan Hortikultura yang telah ditetapkan secara resmi oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/kpts/PD.200/1/2015 dan Kepmentan Nomor 472/Kpts/RC.040/2018, dan Permentan No.03 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian; dan (3) Keberpihakan pemerintah cukup tinggi dalam regulasi, pembinaan, pengawasan dan pelayanan publik. Sedangkan faktor Faktor Eksternal (Petani/lahan) antara lain; (1) Potensi Lahan dan iklim yang mendukung untuk berbudidaya tanaman perkebunan dan hortikultura; (2) Strategisnya letak Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan kemudahan akses pasokan benih dan pemasaran produk petani; (3) Terbukanya pasar domestik maupun ekspor produk hasil perkebunan dan hortikultura; (4) Tingginya minat petani untuk mengusahakan komoditi perkebunan dan hortikultura; dan (5) Harga jual komoditi perkebunan dan hortikultura yang relatif stabil jika dibandingkan dengan komoditi pangan.

Selain potensi sumber daya alam Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki sektor pariwisata unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Potensi pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari wisata budaya seperti Benteng keraton Buton di Kota Baubau, benteng Liya Togo di pulau Wangi-Wangi Kab. Wakatobi, Rumah Adat Mekongga di pantai wisata Kab. Kolaka, Rumah Adat Konawe di Unaaha; Wisata maritim atau bahari seperti Taman Nasional Wakatobi; wisata cagar alam seperti Taman hutan Rakyat Nipa-Nipa (Murhum) di Kota kendari dan Suaka Margasatwa Tanjung Peropa.

3. Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup merupakan input penting dalam proses kegiatan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup disebutkan bahwa dalam penataan ruang wilayah penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumberdaya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi keberlangsungan hidup.

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyedia (suportive capacity) dan kapasitas tamping limbah (asimilative capacity). Dalam pedoman ini, telaah daya dukung terbatas pada kapasitas penyedia sumberdaya alam, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya air, pangan, dan lahan yang merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Ketersediaan dan pencadangan sumberdaya alam dalam mendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan mampu mencukupi kegiatan pembangunan saat ini dan generasi yang akan datang.

Daya Dukung Air Kemampuan lingkungan dalam mendukung penyedia air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang digunakan berupa jumlah air larian dan jumlah air tanah yang berlebihan. Kelebihan air tanah yang dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air. Koefisien air larian sesuai dengan kelas tutupan lahan berdasarkan standar permen LH Nomor 17 tahun 2009. Jumlah mata air dihitung dari rata-rata debit kemudian diperhitungkan dalam setahun. Sementara itu kebutuhan air dihitung dengan 2 pendekatan yakni: (1) kebutuhan layak yang mencakup tidak hanya untuk kebutuhan dasar namun meliputi kebutuhan sosial, pertanian dan industri, (2) kebutuhan dasar. Standar kebutuhan layak mengacu pada WHO adalah 1.000 m³/kapita/tahun sedangkan kebutuhan dasar mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) sebesar 120 l/orang/hari atau 43,8 m³/kapita/tahun.

Hasil analisis daya dukung air di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel 2.5. menunjukkan bahwa ketersediaan air sebesar 19.961.681.388 m³/tahun, sementara kebutuhan air hidup layak mencapai 4.254.137.906 m³/tahun. Dengan demikian daya dukung lingkungan hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan layak penduduk Sulawesi Tenggara masih surplus sebesar 15.707.543.482 m³/tahun dengan dukungan ketersediaan yang surplus air seluas 3.401.711 ha (94,09 persen) dari kebutuhan air, sedangkan ketersediaan lahan yang defisit air seluas 213.801 ha (5,91 persen). Ambang batas ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sebesar 279,94 juta.

Tabel 2.5 Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	KABUPATEN/KOTA	DDDTLH INDIKATIF PENYEDIAAN AIR PROV. SULAWESI TENGGARA								
		KETERSEDIAAN (SUPPLY)	KEBUTUHAN (DEMAND)	SELISIH KEBUTUHAN	AMBANG BATAS	SELISIH	LUAS WILAYAH SURPLUS		LUAS WILAYAH DEFISIT	
		m3/Tahun	m3/Tahun	m3/Tahun	jiwa	jiwa	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Bombana	1.150.086.038,40	246.507.779,21	903.578.259,19	714.830	564.392	329.251,38	9,11	116,75	0,003
2	Buton	428.889.600,00	186.040.135,32	242.849.464,68	267.120	151.886	135.776,86	3,76	29.003,24	0,80
3	Buton Selatan	125.068.032,00	152.708.480,74	(27.640.448,73)	77.967	(17.283)	33.051,93	0,91	21.559,28	0,60
4	Buton Tengah	305.330.342,40	183.738.457,91	121.591.884,49	190.747	76.050	54.482,39	1,51	30.768,76	0,85
5	Buton Utara	584.046.720,00	108.179.954,94	475.866.765,06	363.944	297.325	170.694,77	4,72	4.389,24	0,12
6	Kolaka	997.744.608,00	386.247.635,38	611.496.972,62	619.960	382.317	265.846,02	7,35	30.154,32	0,83
7	Kolaka Timur	1.430.421.984,00	198.602.999,63	1.231.818.984,37	890.842	770.124	396.100,61	10,96	5.887,69	0,16
8	Kolaka Utara	1.497.207.456,00	223.838.508,03	1.273.368.947,97	933.903	796.115	293.115,22	8,11	264,70	0,01
9	Konawe	5.344.893.216,00	418.917.109,57	4.925.976.106,43	3.335.508	3.078.671	527.481,46	14,59	-	0,00
10	Konawe Kepulauan	580.534.752,00	60.101.530,73	520.433.221,27	362.398	325.304	70.514,98	1,95	-	0,00
11	Konawe Selatan	1.220.239.296,00	503.749.833,32	716.489.462,69	756.638	448.033	396.472,94	10,97	31.519,86	0,87
12	Konawe Utara	4.083.485.183,99	111.927.284,85	3.971.557.899,14	2.549.474	2.481.628	421.508,32	11,66	-	0,00
13	Kota Bau-Bau	152.888.960,00	255.423.438,41	(102.534.478,41)	95.145	(64.115)	11.354,96	0,31	17.555,00	0,49
14	Kota Kendari	371.737.728,00	552.566.904,23	(180.829.176,23)	232.071	(113.032)	8.661,65	0,24	18.087,59	0,50
15	Muna	983.065.593,60	348.740.636,74	634.324.956,86	611.777	396.289	185.811,38	5,14	2.855,39	0,08
16	Muna Barat	514.902.182,40	137.712.686,67	377.189.495,73	320.277	235.677	77.207,22	2,14	-	0,00
17	Wakatobi	191.139.696,00	179.134.530,83	12.005.165,17	118.940	7.520	24.379,18	0,67	21.639,25	0,60
	TOTAL	19.961.681.388,79	4.254.137.906,50	15.707.543.482,29	12.441.541	9.816.901	3.401.711,26	94,09	213.801,09	5,91

Sumber : Dokumen D3TLH Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022

Berdasarkan hasil analisis data di tahun 2018 daya dukung air Sulawesi Tenggara memiliki potensi sekita 20,54 milyar m³/tahun dengan dengan jumlah penduduk 2.653.654 jiwa sehingga kebutuhan air total sebesar 8,68 milyar m³. Dengan demikian Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 mengalami surplus sebesar 11.86 milyar m³/tahun dengan daya dukung sebesar 2,4. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan air akan meningkat yang dapat mempengaruhi daya dukungnya. Dengan proyeksi penambahan penduduk pada tahun 2023 sebesar 2.931.349 jiwa, maka kebutuhan total air di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mencapai 9.5 milyar m³, sehingga dengan asumsi potensi air sebesar 20,54 milyar m³/tahun maka Sulawesi Tenggara masih mengalami surplus air sebesar 11.02 milyar m³ dengan daya dukung mengalami penurunan menjadi 2,2.

Demikian pula apa bila kondisi lingkungan terkait jasa penyediaan air diasumsikan tidak mengalami perubahan atau penurunan yang signifikan maka dengan proyeksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2030 menjadi 3.384.393 jiwa kebutuhan air total di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2030 menjadi 10.8 milyar m³ dan masih mengalami surplus sebesar 9.7 milyar m³ dengan daya dukung 1,9. Kondisi ini belum melampaui daya dukung yang ditetapkan SDG's sebesar 1. Proyeksi kebutuhan dan daya dukung air Sulawesi Tenggara pada tahun 2018-2030 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6. Proyeksi Kebutuhan dan Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2030

No	Kabupaten Kota	Proyeksi Kebutuhan Air				
		Ketersediaan (Supply)	Penduduk 2018	Kebutuhan (2018)	Kebutuhan (2023)	Kebutuhan (2030)
		m ³ /Tahun	Jiwa	m ³ /Tahun	(Ha)	(Ha)
1	Bombana	1.761.809.963	180035	741.720.388	855.811.818	1.068.378.802
2	Buton	901.926.570	101618	222.085.615	234.994.829	253.697.621
3	Buton Selatan	261.403.945	79979	40.546.373	42.869.852	46.185.734
4	Buton Tengah	402.457.719	92165	40.797.654	43.102.259	46.339.719
5	Buton Utara	1.009.971.115	63070	241.591.421	261.300.314	291.606.628
6	Kolaka	1.642.955.739	256827	772.620.706	852.408.044	969.780.042
7	Kolaka Timur	2.297.069.253	130860	1.302.675.673	1.435.846.877	1.629.070.115
8	Kolaka Utara	1.734.420.400	147863	510.233.162	558.513.325	617.728.869
9	Konawe	3.258.586.488	249010	901.992.285	1.009.318.999	1.210.455.284
10	Konawe Kepulauan	387.918.871	33680	111.241.603	123.450.549	149.776.897
11	Konawe Selatan	2.281.491.925	309298	2.193.024.892	2.368.404.863	2.615.898.703
12	Konawe Utara	2.445.811.836	62403	349.569.844	390.944.418	449.997.626
13	Muna	950.177.005	221343	529.284.696	566.237.155	628.435.426
14	Muna Barat	553.144.894	80619	414.164.714	442.971.598	491.290.820
15	Wakatobi	335.999.012	95737	137.976.924	139.912.398	141.783.873
16	Kota Baubau	161.178.200	167519	89.431.782	103.076.649	125.484.581
17	Kota Kendari	160.412.870	381628	83.215.978	96.704.882	120.234.121
Ketersediaan		20.546.735.806	2.653.654	8.682.173.711	9.525.868.828	10.856.144.861
Surplus				11.864.562.09	11.020.866.978	9.690.590.945
Daya Dukung				2,4	2,2	1,9

Sumber: Analisis D3TLH dan KLHS RPJMD Sulawesi Tenggara, 2018

Selanjutnya **Daya dukung pangan** dihitung dengan mengacu pada Permen LH Nomor 17 Tahun 2009 tentang daya dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan beras. Berdasarkan hasil analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup tahun 2022, dari 17 Kabupaten/Kota memiliki ketersediaan pangan sebesar 4.758.765.859.298 kkal, sedangkan kebutuhan pangan sebesar 2.059.686.240.000 kkal, sehingga dengan demikian Provinsi Sulawesi Tenggara masih mengalami surplus sebesar 2.699.079.298 kkal. Kondisi ini didukung oleh ketersediaan lahan yang surplus sebesar 2.673.967 Ha (73,96 persen) dari wilayah Sulawesi Tenggara dan lahan yang defisit sebesar 941.544 ha (26,04 persen) dari wilayah Sulawesi Tenggara. Daya dukung pangan di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7 . Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	KABUPATEN/KOTA	DDDTLH INDIKATIF PENYEDIAAN PANGAN PROV. SULAWESI TENGGARA								
		KETERSEDIAAN (SUPPLY)	KEBUTUHAN (DEMAND)	SELISIH KEBUTUHAN	AMBANG BATAS	SELISIH	LUAS WILAYAH SURPLUS		LUAS WILAYAH DEFISIT	
		(kkal)	(kkal)	(kkal)	jiwa	jiwa	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Bombana	1.638.181.061.580,28	118.056.220.500,00	1.520.124.841.080,29	2.087.813	1.937.375	329.368,13	9,11	-	0,00
2	Buton	76.676.127.430,05	90.429.881.500,00	(13.753.754.069,95)	97.474	(17.760)	113.961,67	3,15	50.818,43	1,41
3	Buton Selatan	74.434.541.250,07	74.747.437.500,00	(312.896.249,94)	94.815	(435)	33.971,39	0,94	20.639,82	0,57
4	Buton Tengah	107.675.249.660,00	90.008.470.750,00	17.666.778.910,00	137.203	22.506	53.244,31	1,47	32.006,84	0,89
5	Buton Utara	55.245.804.320,05	52.279.260.250,00	2.966.544.070,05	70.568	3.949	128.684,95	3,56	46.399,07	1,28
6	Kolaka	321.457.309.669,99	186.490.344.250,00	134.966.965.419,99	409.608	171.965	211.011,64	5,84	84.988,70	2,35
7	Kolaka Timur	287.328.758.470,56	94.733.450.500,00	192.595.307.970,56	366.599	245.881	329.698,71	9,12	72.289,59	2,00
8	Kolaka Utara	128.447.351.479,57	108.129.133.000,00	20.318.218.479,57	164.080	26.292	191.021,41	5,28	102.358,51	2,83
9	Konawe	621.720.189.160,71	201.552.835.750,00	420.167.353.410,71	791.704	534.867	444.428,27	12,29	83.053,19	2,30
10	Konawe Kepulauan	38.478.719.019,94	29.109.516.500,00	9.369.202.519,94	48.970	11.876	49.614,90	1,37	20.900,08	0,58
11	Konawe Selatan	276.871.147.850,36	242.177.773.750,00	34.693.374.100,36	352.318	43.713	244.165,98	6,75	183.826,83	5,08
12	Konawe Utara	57.600.575.539,86	53.242.148.500,00	4.358.427.039,86	72.800	4.954	317.008,97	8,77	104.499,35	2,89
13	Kota Bau-Bau	108.005.354.200,04	124.979.285.000,00	(16.973.930.799,96)	137.600	(21.660)	12.947,62	0,36	15.962,35	0,44
14	Kota Kendari	463.416.387.006,83	270.819.579.250,00	192.596.807.756,83	590.572	245.469	20.191,33	0,56	6.557,91	0,18
15	Muna	288.499.644.160,01	169.104.208.000,00	119.395.436.160,01	367.860	152.372	124.951,28	3,46	63.715,49	1,76
16	Muna Barat	108.786.716.999,91	66.389.850.000,00	42.396.866.999,91	138.665	54.065	44.270,56	1,22	32.996,66	0,91
17	Wakatobi	105.940.921.499,80	87.436.845.000,00	18.504.076.499,80	135.112	23.692	25.426,34	0,70	20.592,09	0,57
	TOTAL	4.758.765.859.298,04	2.059.696.240.000,00	2.699.079.619.298,03	6.063.761	3.439.121	2.673.967,46	73,96	941.544,89	26,04

Sumber: Dokumen D3TLH Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022

Berdasarkan hasil analisis data di tahun 2018 daya dukung pangan Sulawesi Tenggara memiliki potensi sekitar 3,13 triliun kkal maka kebutuhan pangan dengan dengan jumlah penduduk 2.653.654 jiwa sebesar 2,08 triliun kkal. Dengan demikian Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 mengalami surplus sebesar 1,04 triliun kkal dengan daya dukung sebesar 1,5. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan pangan akan meningkat yang dapat mempengaruhi daya dukungnya. Dengan proyeksi penambahan penduduk pada tahun 2023 sebesar 2.931.349 jiwa maka kebutuhan total pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mencapai 2,3 triliun kkal sehingga dengan asumsi potensi pangan sebesar 3,13 triliun maka Sulawesi Tenggara masih mengalami surplus pangan sebesar 826 milyar kkal dengan daya dukung mengalami penurunan menjadi 1,36. Demikian pula apa bila kondisi lingkungan terkait jasa penyediaan air diasumsikan tidak mengalami perubahan atau penurunan yang signifikan maka dengan proyeksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2030 menjadi 3.384.393 jiwa kebutuhan pangan total di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2030 menjadi 2,6 triliun kkal dan masih mengalami surplus sebesar 470 milyar kkal dengan daya dukung 1,2. Kondisi ini belum melampaui daya dukung yang ditetapkan SDG's bahwa pada tahun 2030 pangan mengalami surplus. Proyeksi Kebutuhan pangan Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 – 2030 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.8. Proyeksi Kebutuhan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2030

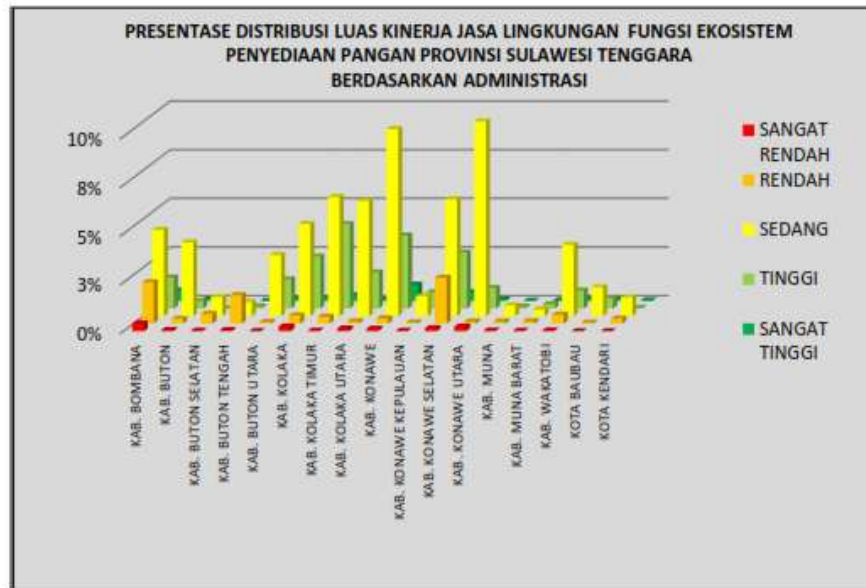
No	Kabupaten Kota	Proyeksi Kebutuhan Air				
		Ketersediaan (Supply)	Penduduk 2018	Kebutuhan (2018)	Kebutuhan (2023)	Kebutuhan (2030)
		m3/Tahun	Jiwa	m3/Tahun	(Ha)	(Ha)
1	Bombana	1.761.809.963	180035	741.720.388	855.811.818	1.068.378.802
2	Buton	901.926.570	101618	222.085.615	234.994.829	253.697.621
3	Buton Selatan	261.403.945	79979	40.546.373	42.869.852	46.185.734
4	Buton Tengah	402.457.719	92165	40.797.654	43.102.259	46.339.719
5	Buton Utara	1.009.971.115	63070	241.591.421	261.300.314	291.606.628
6	Kolaka	1.642.955.739	256827	772.620.706	852.408.044	969.780.042
7	Kolaka Timur	2.297.069.253	130860	1.302.675.673	1.435.846.877	1.629.070.115
8	Kolaka Utara	1.734.420.400	147863	510.233.162	558.513.325	617.728.869
9	Konawe	3.258.586.488	249010	901.992.285	1.009.318.999	1.210.455.284
10	Konawe Kepulauan	387.918.871	33680	111.241.603	123.450.549	149.776.897
11	Konawe Selatan	2.281.491.925	309298	2.193.024.892	2.368.404.863	2.615.898.703
12	Konawe Utara	2.445.811.836	62403	349.569.844	390.944.418	449.997.626
13	Muna	950.177.005	221343	529.284.696	566.237.155	628.435.426
14	Muna Barat	553.144.894	80619	414.164.714	442.971.598	491.290.820
15	Wakatobi	335.999.012	95737	137.976.924	139.912.398	141.783.873
16	Kota Baubau	161.178.200	167519	89.431.782	103.076.649	125.484.581
17	Kota Kendari	160.412.870	381628	83.215.978	96.704.882	120.234.121
Ketersediaan		20.546.735.806	2.653.654	8.682.173.711	9.525.868.828	10.856.144.861
Surplus				11.864.562.09	11.020.866.978	9.690.590.945
Daya Dukung				2,4	2,2	1,9

Sumber: Analisis D3TLH dan KLHS RPJMD Sulawesi Tenggara, 2018

Analisis **Daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup** Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan pendekatan spasial menggunakan jasa ekosistem berbasis grid skala ragam. Metode Spasial adalah suatu pendekatan yang menggunakan data spasial atau data yang terkait dengan lokasi geografis dalam melakukan analisis. Dalam konteks ini, jasa lingkungan hidup dan fungsi lingkungan hidup akan terbentuk sesuai dengan karakteristik wilayah yang dipengaruhi oleh karakteristik bentang alam, vegetasi alami serta penggunaan lahannya. Pendekatan jasa ekosistem berbasis grid skala ragam mengacu pada penilaian dan pengelolaan jasa-jasa ekosistem dengan membagi wilayah menjadi grid atau petak-petak kecil. Setiap petak ini kemudian dianalisis untuk menentukan jenis dan kuantitas jasa ekosistem yang terkait. Metode ini memungkinkan untuk mengevaluasi pengaruh berbagai faktor spasial, seperti jenis vegetasi, topografi, dan ketersediaan sumber daya alam, terhadap jasa-jasa ekosistem yang diberikan oleh area tersebut.

Selanjutnya alternatif skenario dan rekomendasi DDDT-LH dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan DDDT-LH (pangan, air, kehati dan jasa ekosistem lainnya) terhadap jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup dan keselamatan; mutu hidup; dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kondisi terkini dari DDDT-LH Provinsi Sulawesi Tenggara yang terkait dengan pokok permasalahan pencapaian target TPB dibahas pada beberapa bagian yaitu **Status Jasa Lingkungan Daya Dukung dan Penyediaan Pangan**. Pangan adalah kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, penting bahwa ketersediaan pangan di suatu wilayah selalu terjamin. Alam memiliki berbagai ekosistem yang memberikan manfaat bagi makhluk hidup, salah satunya adalah menyediakan bahan pangan yang berasal dari sumber hayati, baik tumbuhan maupun hewan, untuk dikonsumsi oleh manusia. Sulawesi Tenggara sebagian wilayahnya terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi, sementara sebagian lainnya tersebar di beberapa pulau besar dan kecil di bagian selatan jazirah tersebut. Secara umum, lahan di Sulawesi Tenggara dapat diklasifikasikan menjadi berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah dalam hal penyediaan bahan pangan. Lahan berpotensi sangat tinggi memiliki luas sekitar 102.170,44 hektar atau sekitar 2,83 persen dari total luas wilayah provinsi Sulawesi Tenggara. Lahan berpotensi tinggi memiliki luas sekitar 823.715,34 hektar atau sekitar 22,78 persen. Sedangkan lahan berpotensi sedang, yang merupakan yang terluas di Sulawesi Tenggara, mencakup luas sekitar 2.297.581,91 hektar atau sekitar 63,55 persen dari total luas wilayah tersebut. Sisa lahan tergolong rendah dan sangat rendah, masing-masing dengan luas sekitar 332.640,91 hektar (9,20 persen) dan 59.403,75 hektar (1,64 persen) dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, ditunjukkan pada Gambar berikut.

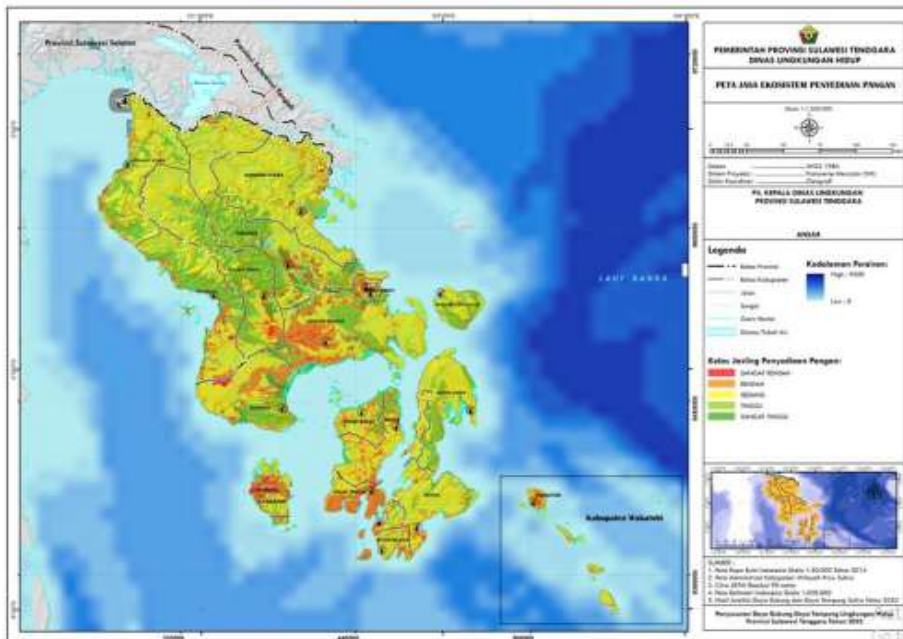
Gambar 2.3. Grafik persentase distribusi luas kinerja jasa lingkungan fungsi ekosistem penyediaan pangan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan wilayah administrasi



Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025 -2029

Lahan yang memiliki potensi sangat tinggi dan tinggi terdapat di wilayah jazirah atau daratan pulau Sulawesi bagian tenggara, termasuk Kabupaten Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Kolaka Timur. Informasi lebih detail tentang kinerja fungsi ekosistem sebagai penyedia pangan disajikan pada Gambar dan Tabel sebagai berikut:

Gambar 2.4. Peta jasa ekosistem penyediaan pangan Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber : Laporan KLHS RPJMD 2025 -2029

Proyeksi Daya Dukung Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara didasarkan pada data daya dukung pangan selama periode 2018 hingga 2022. Hasil Proyeksi daya dukung pangan Sulawesi Tenggara hingga tahun 2030 menunjukkan bahwa daya dukung pangan Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengalami penurunan pada tahun 2030, meskipun secara kuantitatif diproyeksikan daya dukung pangan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2030 belum melampaui daya dukung pangan.

Tabel. 2.9. Proyeksi daya dukung pangan Provinsi Sulawesi Tenggara hingga tahun 2030

No	Wilayah Kabupaten/ Provinsi	Daya Dukung Pangan Tahun 2022 (Kkal/Tahun)	Status DD 2022	Daya Dukung Pangan Tahun 2025 (Kkal/Tahun)	Status DD 2025	Daya Dukung PangTahun 2030 (Kkal/Tahun)	Status DD 2030
1	Bombana	1.481.606.003.919,57	Belum Melampaui DD	1.469.986.939.366,00	Belum Melampaui DD	1.450.621.831.776,71	Belum Melampaui DD
2	Buton	(6.800.560.775,30)	Melampaui DD	(9.651.977.927,09)	Melampaui DD	(14.404.339.846,73)	Melampaui DD
3	Buton Selatan	9.065.959.294,71	Belum Melampaui DD	7.115.883.571,50	Belum Melampaui DD	3.865.757.366,14	Belum Melampaui DD
4	Buton Tengah	32.317.584.954,64	Belum Melampaui DD	30.045.313.302,86	Belum Melampaui DD	26.258.193.883,22	Belum Melampaui DD
5	Buton Utara	2.556.540.221,83	Belum Melampaui DD	138.641.391,48	Belum Melampaui DD	(3.891.189.992,45)	Melampaui DD
6	Kolaka	104.313.901.723,57	Belum Melampaui DD	92.426.788.991,42	Belum Melampaui DD	72.614.934.437,85	Belum Melampaui DD
7	Kolaka Timur	176.699.860.399,13	Belum Melampaui DD	170.655.491.684,85	Belum Melampaui DD	160.581.543.827,71	Belum Melampaui DD
8	Kolaka Utara	3.776.557.309,93	Belum Melampaui DD	(2.601.526.341,86)	Melampaui DD	(13.231.665.761,50)	Melampaui DD
9	Konawe	409.714.735.651,78	Belum Melampaui DD	397.527.876.446,42	Belum Melampaui DD	377.216.444.437,50	Belum Melampaui DD
10	Konawe Kepulauan	10.220.992.591,37	Belum Melampaui DD	8.801.379.841,36	Belum Melampaui DD	6.435.358.591,36	Belum Melampaui DD
11	Konawe Selatan	18.626.514.707,50	Belum Melampaui DD	7.131.384.600,36	Belum Melampaui DD	(12.027.165.578,21)	Melampaui DD
12	Konawe Utara	4.374.626.522,00	Belum Melampaui DD	1.190.167.075,58	Belum Melampaui DD	(4.117.265.335,14)	Melampaui DD
13	Kota BauBau	(36.568.213.416,03)	Melampaui DD	(46.432.100.514,24)	Melampaui DD	(62.871.912.344,60)	Melampaui DD
14	Kota Kendari	128.259.022.953,26	Belum Melampaui DD	101.525.337.078,26	Belum Melampaui DD	56.969.193.953,26	Belum Melampaui DD
15	Muna	105.220.328.749,30	Belum Melampaui DD	97.991.604.124,30	Belum Melampaui DD	85.943.729.749,30	Belum Melampaui DD
16	Muna Barat	42.022.232.955,26	Belum Melampaui DD	39.382.530.142,76	Belum Melampaui DD	34.983.025.455,26	Belum Melampaui DD
17	Wakatobi	30.157.165.571,23	Belum Melampaui DD	29.626.786.678,37	Belum Melampaui DD	28.742.821.856,94	Belum Melampaui DD
18	Sulawesi Tenggara	2.515.563.253.333,75	Belum Melampaui DD	2.394.860.519.512,32	Belum Melampaui DD	2.193.689.296.476,61	Belum Melampaui DD

Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Hasil analisis, 2024

Adapun proyeksi daya dukung pangan per kabupaten dan kota menunjukkan penurunan selama periode 2022 hingga 2030. Dari 17 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, 4 kabupaten diantaranya mengalami penurunan daya dukung pangan, dimana pada tahun 2022 “Belum Melampaui”, namun pada tahun 2030 telah melampaui daya dukung pangannya. Kondisi ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah permintaan (demand) bahan pangan, yang tidak diikuti dengan pertambahan suplai bahan pangan yang memadai. Kabupaten-kabupaten yang diproyeksikan akan mengalami penurunan daya dukung pangan di tahun 2030 adalah Buton Utara, Kolaka Utara, Konawe Selatan, dan Konawe Utara. Selengkapnya disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10. Proyeksi trend daya dukung pangan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kabupaten/Kota periode 2022-2030

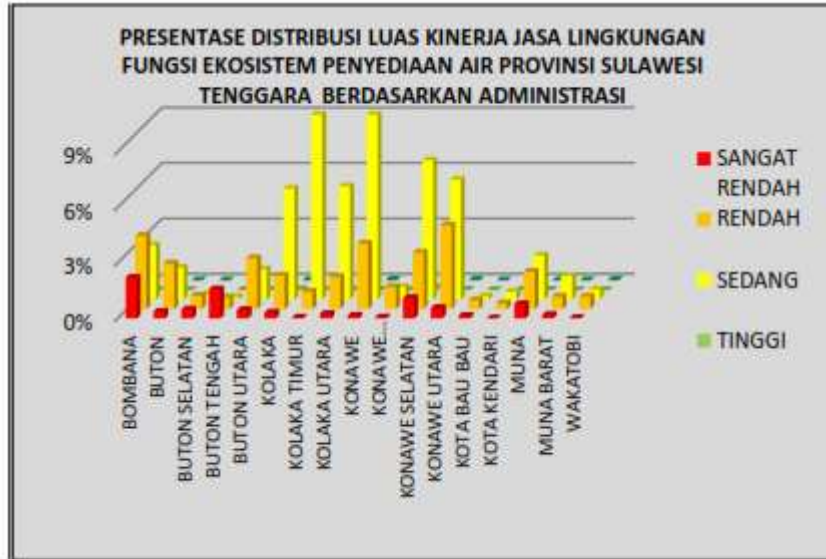
No	Wilayah Kabupaten/Provinsi	Daya Dukung Pangan Tahun 2022 (Kkal/Tahun)	Status DD 2022	Daya Dukung Pangan Tahun 2030 (Kkal/Tahun)	Status DD 2030	TREND STATUS DD PANGAN
1	Bombana	1.481.606.003.919,57	Belum Melampaui DD	1.450.621.831.776,71	Belum Melampaui DD	Tetap →
2	Buton	(6.800.560.775,30)	Melampaui DD	(14.404.339.846,73)	Melampaui DD	Tetap →
3	Buton Selatan	9.065.959.294,71	Belum Melampaui DD	3.865.757.366,14	Belum Melampaui DD	Tetap →
4	Buton Tengah	32.317.584.954,64	Belum Melampaui DD	26.258.193.883,22	Belum Melampaui DD	Tetap →
5	Buton Utara	2.556.540.221,83	Belum Melampaui DD	(3.891.189.992,45)	Melampaui DD	Turun ↓
6	Kolaka	104.313.901.723,57	Belum Melampaui DD	72.614.934.437,85	Belum Melampaui DD	Tetap →
7	Kolaka Timur	176.699.860.399,13	Belum Melampaui DD	160.581.543.827,71	Belum Melampaui DD	Tetap →
8	Kolaka Utara	3.776.557.309,93	Belum Melampaui DD	(13.231.665.761,50)	Melampaui DD	Turun ↓
9	Konawe	409.714.735.651,78	Belum Melampaui DD	377.216.444.437,50	Belum Melampaui DD	Tetap →
10	Konawe Kepulauan	10.220.992.591,37	Belum Melampaui DD	6.435.358.591,36	Belum Melampaui DD	Tetap →
11	Konawe Selatan	18.626.514.707,50	Belum Melampaui DD	(12.027.165.578,21)	Melampaui DD	Turun ↓
12	Konawe Utara	4.374.626.522,00	Belum Melampaui DD	(4.117.265.335,14)	Melampaui DD	Turun ↓
13	Kota Bau-Bau	(36.568.213.416,03)	Melampaui DD	(62.871.912.344,60)	Melampaui DD	Tetap →
14	Kota Kendari	128.259.022.953,26	Belum Melampaui DD	56.969.193.953,26	Belum Melampaui DD	Tetap →
15	Mina	105.220.328.749,30	Belum Melampaui DD	85.943.729.749,30	Belum Melampaui DD	Tetap →
16	Mina Barat	42.022.232.955,26	Belum Melampaui DD	34.983.025.455,26	Belum Melampaui DD	Tetap →
17	Wakatobi	30.157.165.571,23	Belum Melampaui DD	28.742.821.856,94	Belum Melampaui DD	Tetap →
	Sulawesi Tenggara	2.515.563.253.333,75	Belum Melampaui DD	2.193.689.296.476,61	Belum Melampaui DD	Tetap →

Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Hasil analisis, 2024

Status Jasa Lingkungan Daya Dukung dan Penyediaan Air Selain kebutuhan pangan, keberadaan air bersih juga merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. Air bersih juga merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Secara alami, sumber air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti sungai dan danau, serta dari air tanah. Secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Tenggara, lahan yang mampu menyediakan air dapat diklasifikasikan menjadi berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dalam penyediaan air bersih di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya mencakup luas sekitar 4.757,53 hektar, atau sekitar 0,13 persen dari total luas lahan di provinsi tersebut. Lahan dengan potensi tinggi dalam penyediaan air bersih mencakup luas sekitar 10.584,82 hektar, atau sekitar 0,29 persen. Sementara itu, lahan dengan potensi sedang dalam penyediaan air bersih memiliki luas sekitar 2.141.170,50 hektar, atau sekitar 59,22 persen. Lahan dengan potensi rendah memiliki luas sekitar 1.138.818,60 hektar, atau sekitar 31,50 persen dari total luas lahan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terakhir,

lahan dengan kategori potensi sumber daya air sangat rendah mencakup luas sekitar 320.180,90 hektar, atau sekitar 8,86 persen, ditunjukkan pada Gambar berikut:

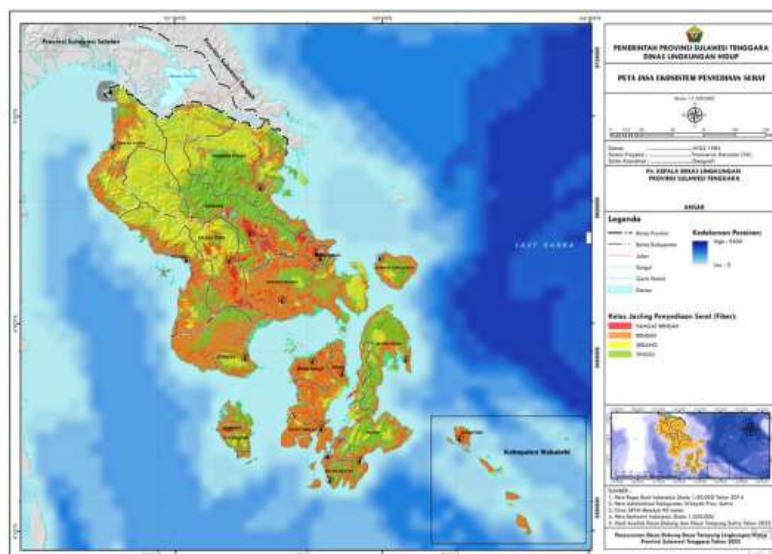
Gambar 2.5. Grafik persentase distribusi luas kinerja jasa lingkungan fungsi ekosistem penyediaan air Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan administrasi



Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Sebagian besar lahan di Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi penyediaan air tergolong dalam kategori rendah hingga sedang. Lahan dengan potensi penyediaan air sedang, tinggi hingga sangat tinggi terutama terdapat di Kabupaten Konawe, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Bombana. Wilayah-wilayah tersebut dikenal memiliki aliran sungai yang besar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Rincian distribusi potensi sumber air berdasarkan wilayah administratif Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut:

Gambar 2.6. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan air Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Proyeksi Daya Dukung Air Provinsi Sulawesi Tenggara Hasil proyeksi daya dukung air Provinsi Sulawesi Tenggara hingga tahun 2045 menunjukkan bahwa daya dukung air Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengalami penurunan, dari 14,441,079,544.15 m³ di tahun 2022 menjadi 12.932.409.300,70 m³ pada tahun 2030, meskipun demikian secara kuantitatif diproyeksikan daya dukung air Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2030 belum melampaui daya dukung pangan. Selengkapnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2 .11. *Proyeksi daya dukung air Provinsi Sulawesi Tenggara hingga tahun 2030*

No	Wilayah Kabupaten/ Provinsi	Daya Dukung Air (m ³) Tahun 2022	Status DD 2022	Daya Dukung Air (m ³) Tahun 2025	Status DD 2025	Daya Dukung Air (m ³) Tahun 2030	Status DD 2030
1	Bombana	773.634.006,53	Belum Melampaui	731.263.808,14	Belum Melampaui	1.450.621.831.776,71	Belum Melampaui
2	Buton	237.854.480,55	Belum Melampaui	225.074.505,16	Belum Melampaui	204.036.764,30	Belum Melampaui
3	Buton Selatan	(14.108.833,39)	Melampaui DD	(20.116.216,77)	Melampaui DD	(30.052.057,26)	Melampaui DD
4	Buton Tengah	137.814.470,50	Belum Melampaui	128.222.229,09	Belum Melampaui	112.421.835,49	Belum Melampaui
5	Buton Utara	448.923.596,67	Belum Melampaui	434.507.338,92	Belum Melampaui	410.837.322,06	Belum Melampaui
6	Kolaka	504.399.726,98	Belum Melampaui	463.957.448,02	Belum Melampaui	397.163.659,21	Belum Melampaui
7	Kolaka Timur	1.135.469.610,26	Belum Melampaui	1.099.912.060,83	Belum Melampaui	1.041.524.021,82	Belum Melampaui
8	Kolaka Utara	1.172.716.673,85	Belum Melampaui	1.135.393.946,11	Belum Melampaui	1.074.104.775,10	Belum Melampaui
9	Konawe	4.665.744.800,61	Belum Melampaui	4.554.082.014,61	Belum Melampaui	4.371.245.176,88	Belum Melampaui
10	Konawe Kepulauan	496.219.660,46	Belum Melampaui	483.895.814,92	Belum Melampaui	463.711.004,57	Belum Melampaui
11	Konawe Selatan	629.185.882,34	Belum Melampaui	585.928.889,47	Belum Melampaui	514.579.941,47	Belum Melampaui
12	Konawe Utara	3.789.056.774,78	Belum Melampaui	3.716.237.326,57	Belum Melampaui	3.597.368.174,93	Belum Melampaui
13	Kota BauBau	(149.318.825,46)	Melampaui DD	(171.913.298,38)	Melampaui DD	(209.477.278,72)	Melampaui DD
14	Kota Kendari	(328.622.189,54)	Melampaui DD	(389.166.610,99)	Melampaui DD	(489.846.703,95)	Melampaui DD
15	Muna	561.480.214,49	Belum Melampaui	530.774.190,69	Belum Melampaui	480.198.519,24	Belum Melampaui
16	Muna Barat	353.409.242,38	Belum Melampaui	339.663.848,93	Belum Melampaui	317.069.665,07	Belum Melampaui
17	Wakatobi	27.220.196,14	Belum Melampaui	23.034.203,03	Belum Melampaui	16.174.408,43	Belum Melampaui
18	Sulawesi Tenggara	14.441.079.544,15	Belum Melampaui	13.870.751.575,35	Belum Melampaui	12.932.409.300,70	Belum Melampaui

Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan hasil proyeksi daya dukung air (DD Air) menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari 17 wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 3 kabupaten/kota yang status DD Air nya diproyeksikan melampaui DD Air pada tahun 2030, yaitu Kabupaten Buton Selatan, Kota Baubau, dan Kota Kendari. Hasil proyeksi ini tidak menunjukkan adanya kabupaten/kota yang mengalami penurunan status DD air dari keadaan eksisting tahun 2022. Namun demikian, secara keseluruhan pada periode 2022 hingga 2030 seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan nilai daya DD Air dari 14.441.079.544,15 m³/Tahun 2022 menjadi 12.932.409.300,70m³/Tahun 2030. Hal ini sejalan dengan trend pertumbuhan jumlah penduduk yang terus

meningkat dari tahun ke tahun yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan air domestik maupun kebutuhan air lahan di perkotaan. Selengkapnya disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12. Proyeksi trend daya dukung air Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kabupaten/Kota periode 2022-2030.

No	Wilayah Kabupaten/Provinsi	Daya Dukung Air Tahun 2022 (M3/Tahun)	Status DD 2022	Daya Dukung Air Tahun 2030 (M3/Tahun)	Status DD 2030	TREND STATUS DD Air	
						Tetap	➡
1	Bombana	773.634.006,53	Belum Melampau DD	661.349.960,06	Belum Melampau DD	Tetap	➡
2	Buton	237.854.480,55	Belum Melampau DD	204.036.764,30	Belum Melampau DD	Tetap	➡
3	Buton Selatan	(14.108.833,39)	Melampaui DD	(30.052.057,26)	Melampaui DD	Tetap	➡
4	Buton Tengah	137.814.470,50	Belum Melampau DD	112.421.835,49	Belum Melampau DD	Tetap	➡
5	Buton Utara	448.923.596,67	Belum Melampau DD	410.837.322,06	Belum Melampau DD	Tetap	➡
6	Kolaka	504.399.726,98	Belum Melampau DD	397.163.659,21	Belum Melampau DD	Tetap	➡
7	Kolaka Timur	1.135.469.610,26	Belum Melampau DD	1.041.524.021,82	Belum Melampau DD	Tetap	➡
8	Kolaka Utara	1.172.716.673,85	Belum Melampau DD	1.074.104.775,10	Belum Melampau DD	Tetap	➡
9	Konawe	4.665.744.800,61	Belum Melampau DD	4.371.245.176,88	Belum Melampau DD	Tetap	➡
10	Konawe Kepulauan	496.219.660,46	Belum Melampau DD	463.711.004,57	Belum Melampau DD	Tetap	➡
11	Konawe Selatan	629.185.882,34	Belum Melampau DD	514.579.941,47	Belum Melampau DD	Tetap	➡
12	Konawe Utara	3.789.056.774,78	Belum Melampau DD	3.597.368.174,93	Belum Melampau DD	Tetap	➡
13	Kota Bau Bau	(149.318.825,46)	Melampaui DD	(209.477.278,72)	Melampaui DD	Tetap	➡
14	Kota Kendari	(328.622.189,54)	Melampaui DD	(489.846.703,95)	Melampaui DD	Tetap	➡
15	Mana	561.480.214,49	Belum Melampau DD	480.198.519,24	Belum Melampau DD	Tetap	➡
16	Mana Barat	353.409.242,38	Belum Melampau DD	317.069.665,07	Belum Melampau DD	Tetap	➡
17	Wakatobi	27.220.196,14	Belum Melampau DD	16.174.403,43	Belum Melampau DD	Tetap	➡
	Sulawesi Tenggara	14.441.079.544,15	Belum Melampau DD	12.932.409.300,70	Belum Melampau DD	Tetap	➡

Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Hasil analisis, 2024

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah atau komunitas. IKP ini mengukur beberapa indikator untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP juga berperan dalam mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah.

Perhitungan untuk wilayah provinsi di kelompokkan kedalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. Pada tahun 2024 provinsi Sulawesi Tenggara memiliki IKP dengan skor terbaik.

Tabel 2.13. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	kategori
1	Indikator Ketahanan Pangan (IKP)	Persen	76,68	Sangat tahan

Sumber Data: Badan Pangan Nasional RI

Kerangka konseptual Dalam penyusunan IKP dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan yaitu:

1. Aspek ketersediaan pangan
Aspek ketersediaan pangan mencakup rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersi beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan sagu serta stok beras pemerintah daerah
2. Aspek keterjangkauan pangan
Aspek keterjangkauan pangan meliputi persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proposi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik
3. Aspek pemanfaatan pangan.
Aspek pemanfaatan pangan meliputi rata-rata lama sekolah perempuan berusia diatas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk dan angka harapan hidup pada saat lahir.

Ketiga pilar tersebut diatas yang menjadi acuan dalam penentuan indeks ketahanan pangan suatu wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa **IKP** Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 berada pada kategori sangat tahan dengan skor 76,68%.

Pada **Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan** (Prevalence of Undernourishment) digunakan untuk mengukur persentase populasi yang tidak memiliki akses cukup terhadap pangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi harian minimum mereka. Indikator ini mencerminkan tingkat keamanan pangan di provinsi Sulawesi Tenggara serta memberikan gambaran mengenai jumlah individu yang berisiko mengalami gizi buruk dan berbagai dampak kesehatan terkait. Tingginya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan dapat mengindikasikan adanya masalah ekonomi, distribusi pangan yang tidak merata, atau kebijakan pangan yang kurang efektif, sehingga memerlukan perhatian dan tindakan dari pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Kondisi prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2 .14. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan

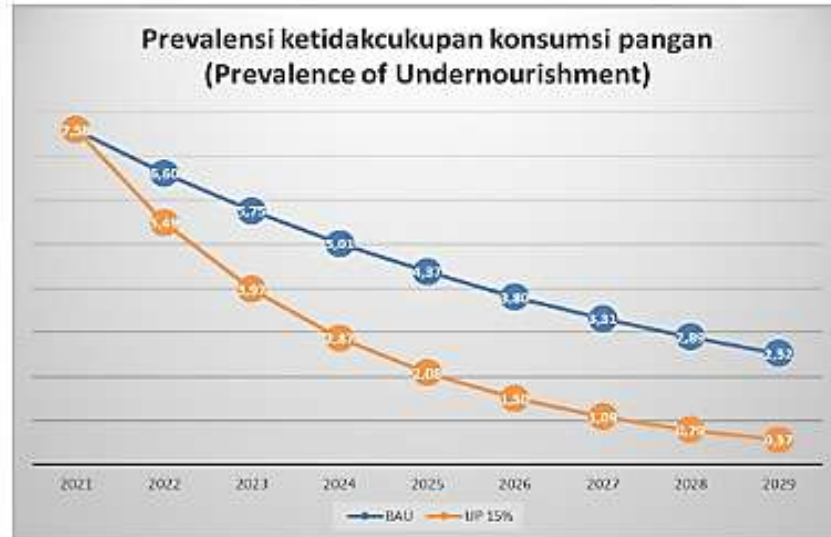
Indikator TPB	Jenis Proyeksi	2025	2026	2027	2028	2029
Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	BAU	4,37	3,80	3,31	2,89	2,52
	UP 15%	2,08	1,50	1,09	0,79	0,57

Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Hasil analisis, 2024

Berdasarkan Tabel. Proyeksi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) mengalami penurunan yang relative kecil hingga tahun 2029. Dengan persentase 4,37% pada tahun 2025 menurun menjadi 2,52% pada Tahun 2029. Hasil proyeksi ini menunjukkan bahwa Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) telah mencapai target penurunan, namun jika didukung dengan upaya tambahan sebesar 15%, proyeksi ini akan menjadi sangat maksimal menurunkan angka Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) mencapai angka 0,57% pada Tahun 2029. Tren Proyeksi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence

of Undernourishment) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan ditunjukkan pada Gambar 2.7.

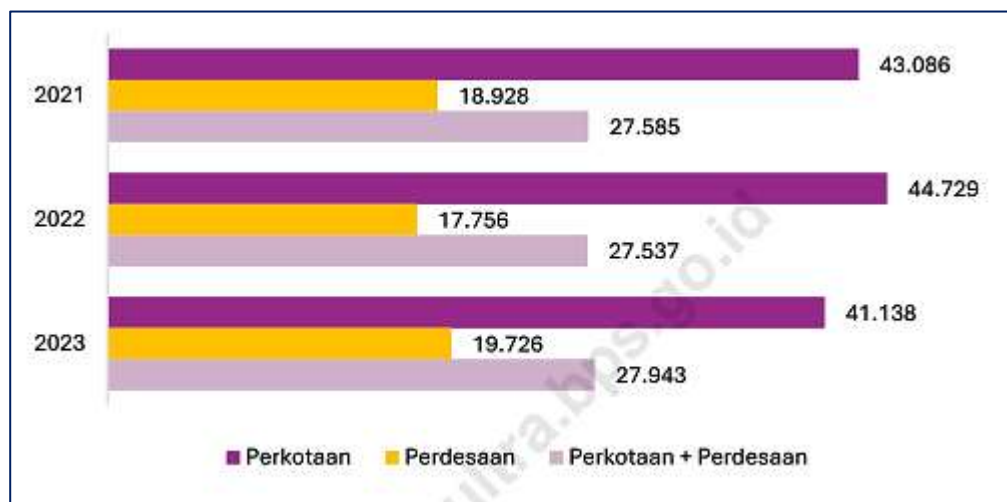
Gambar 2.7. Tren Proyeksi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan



Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Hasil analisis, 2024

Konsumsi Listrik Perkapita. Listrik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia pada saat sekarang ini. Hampir seluruh rumah tangga di Sulawesi Tenggara telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utamanya baik itu listrik yang bersumber dari PLN maupun nonPLN. Hal ini menunjukkan bahwa listrik telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi setiap rumah tangga.

Gambar 2.8. Rata-Rata Pengeluaran Listrik per Kapita Sebulan menurut Tipe Daerah (rupiah), 2021-2023



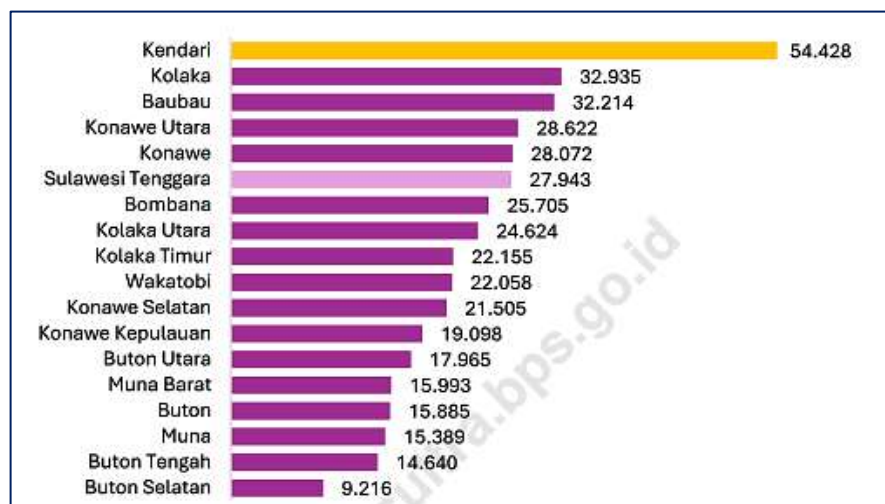
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021-2023

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran listrik di Sulawesi Tenggara sebesar 27.943 rupiah per kapita sebulan. Angka ini cenderung stabil selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Stabilitasnya angka rata-rata pengeluaran listrik per kapita sebulan menunjukkan bahwa penggunaan listrik oleh rumah tangga selama 3 tahun terakhir tidak terlalu meningkat maupun menurun. Di sisi lain, tarif listrik PLN yang diatur oleh pemerintah hanya beberapa sekali mengalami penyesuaian yang tidak terlalu signifikan selama periode 2022–2023. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi penggunaan maupun dari sisi harga listrik tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan.

Selama 3 tahun terakhir, rata-rata pengeluaran listrik per kapita sebulan di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dari daerah perdesaan. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk listrik di daerah perkotaan mencapai 41.138 rupiah. Nilai ini hampir 2 kali lipat nilai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk listrik di daerah perdesaan yang besarnya hanya sekitar 19.726 rupiah.

Tingginya nilai rata-rata pengeluaran listrik per kapita sebulan di daerah perkotaan di satu sisi bisa menunjukkan bahwa biaya listrik yang digunakan oleh rumah tangga di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan. Biaya listrik yang lebih tinggi biasanya karena penggunaan daya listrik yang lebih tinggi juga. Listrik untuk rumah tangga yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dibedakan tarifnya berdasarkan daya listrik yang terpasang. Di sisi lain, tingginya rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk listrik di daerah perkotaan juga bisa mengindikasikan bahwa konsumsi listrik di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan.

Gambar 2.9. Rata-Rata Pengeluaran Listrik per Kapita Sebulan menurut Kabupaten/Kota (rupiah), 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Pada level kabupaten/kota, terdapat perbedaan yang cukup besar pada nilai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk listrik antar kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Kabupaten/kota dengan rata-rata pengeluaran listrik tertinggi adalah Kota Kendari dengan nilai sebesar 54.428 rupiah per kapita sebulan. Sedangkan kabupaten/kota dengan nilai rata-rata pengeluaran listrik terendah yaitu Kabupaten Buton Selatan dengan nilai sebesar 9.216 rupiah per kapita sebulan. Rendahnya nilai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk listrik di Kabupaten Buton Selatan ini

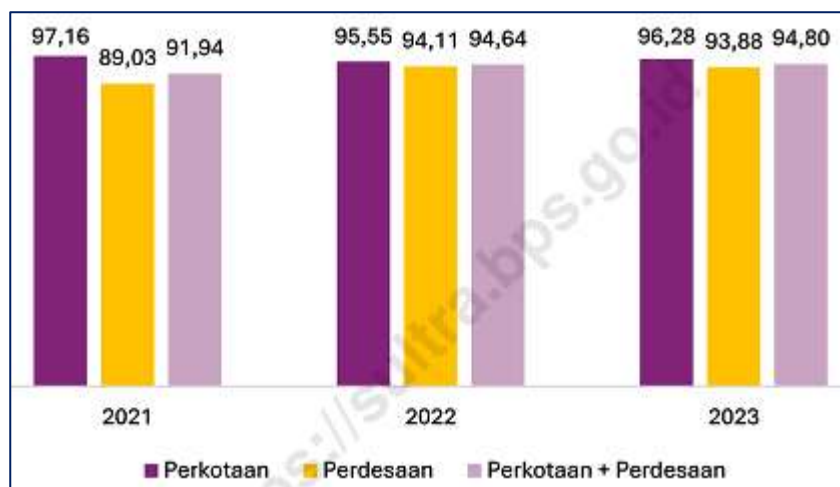
sejalan dengan masih cukup banyaknya rumah tangga yang menggunakan listrik non-PLN dibandingkan kabupaten/kota lain. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik non-PLN sebagai sumber penerangan utama di Kabupaten Buton Selatan sebesar 7,13 persen.

Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum. Air yang digunakan untuk minum oleh masyarakat sudah semestinya merupakan air yang layak dan aman. Kelayakan dan keamanan air minum masyarakat perlu dijaga guna menjamin kesehatan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat banyak menggunakan sumber air minum yang tidak layak, maka potensi munculnya berbagai penyakit yang bersumber dari lingkungan akan semakin tinggi. Penyakit-penyakit ini akan memiliki dampak yang lebih serius bila terjadi pada anak-anak, khususnya balita. Untuk itulah, pemenuhan air minum sehat dan layak harus terus dikawal.

Pemenuhan akses air minum layak bersama dengan akses sanitasi layak telah menjadi agenda prioritas global sebagaimana tertuang dalam Tujuan 6 TPB yang menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Untuk mencapai tujuan ini, ditetapkanlah beberapa target yang harus dicapai pada tahun 2030 salah satunya adalah mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2020-2024 juga telah menargetkan peningkatan akses air minum layak menyeluruh di Indonesia.

Untuk melihat capaian pembangunan dalam hal pemenuhan akses air minum layak, digunakanlah indikator yang dihitung berdasarkan data Susenas yang berkaitan dengan perumahan. Sejak tahun 2019, konsep sumber air minum layak yang digunakan mengacu pada metadata TPB yaitu rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan baik air kemasan bermerek maupun isi ulang, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.

Gambar 2.10. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak menurut Tipe Daerah (persen), 2021–2023

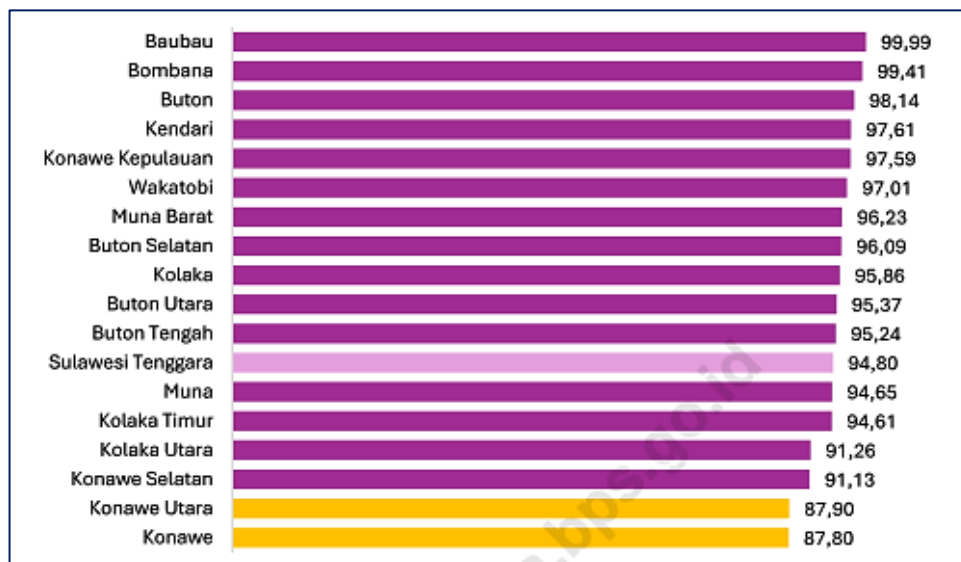


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2023

Selama 3 tahun terakhir, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Sulawesi Tenggara terus meningkat. Pada tahun 2021, sekitar 91,94 persen rumah tangga memiliki akses terhadap air minum layak. Persentase ini meningkat menjadi 94,80 persen pada tahun 2023. Secara umum sebagian besar rumah tangga di Sulawesi Tenggara sudah memiliki akses terhadap sumber air yang termasuk kategori layak.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di daerah perkotaan cenderung lebih besar daripada daerah perdesaan. Hal ini bisa terjadi karena meskipun rumah tangga di daerah perkotaan sebagian besar menggunakan air kemasan bermerek ataupun air isi ulang sebagai sumber air utama untuk minum utamanya, namun sumber air utama yang digunakan untuk mandi cuci kebanyakan termasuk kategori layak. Pada tahun 2023, sebanyak 95,74 persen rumah tangga di daerah perkotaan yang menggunakan air kemasan bermerek/air isi ulang untuk minum menggunakan sumber air leding, air terlindungi, maupun air hujan sebagai sumber air untuk mandi/cuci/dan lain-lain. Dengan kata lain, meskipun rumah tangga di daerah perkotaan minum air kemasan bermerek/air isi ulang, namun sebagian besar dari mereka sudah mempunyai akses terhadap sumber air layak.

Gambar 2.11. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak menurut Kabupaten/Kota (persen), 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Pada level kabupaten/kota, sebagian besar kabupaten/kota memiliki persentase yang nilainya lebih dari 90 persen. Namun demikian, masih ada 2 kabupaten yang persentasenya kurang dari 90 persen. Kedua kabupaten itu yaitu Kabupaten Konawe Utara dengan persentase sebesar 87,90 persen dan Kabupaten Konawe dengan persentase sebesar 87,80 persen.

Meskipun tren rumah tangga yang memiliki akses sumber air minum layak terus meningkat, namun capaian ini masih belum memenuhi target RPJMN 2020–2024 yang menargetkan 100 persen rumah tangga dapat memiliki akses sumber air minum layak. Selain mengejar pencapaian indikator tersebut, tantangan lain dalam penyediaan air minum di Sulawesi Tenggara maupun di daerah lain yaitu terkait tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum. Penguatan tata kelola dan kelembagaan

penyelenggaraan air minum di daerah harus terus dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong keberlanjutan akses sumber air minum masyarakat. Tata kelola dan kelembagaan yang baik bisa menciptakan penyelenggaraan air minum yang lebih maksimal baik dari segi cakupan maupun kualitas serta keberlanjutannya.

Penggunaan air isi ulang yang tinggi oleh rumah tangga tidak serta merta membuat capaian indikator pemenuhan akses air minum layak menjadi bagus. Air isi ulang yang banyak digunakan oleh rumah tangga di Sulawesi Tenggara sebetulnya bukanlah pilihan ideal untuk digunakan sebagai sumber air minum utama. Dalam metadata indikator TPB disebutkan bahwa selain melihat kelayakan sumber air minum, pemenuhan akses air minum bagi masyarakat juga harus mempertimbangkan keberlanjutannya dan juga kualitas sumber air minum tersebut. Keberlanjutan sumber air minum yang dimaksud yaitu sumber air minum tersebut dapat diakses setiap diperlukan. Kondisi ini akan lebih mudah terpenuhi apabila air minum yang digunakan oleh masyarakat terdistribusikan melalui saluran perpipaan sebagaimana target RPJMN 2020–2024 yang menargetkan akses air minum perpipaan di Indonesia pada 2024 sebesar 30 persen.

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup dapat digambarkan melalui indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang memberikan informasi atau indikasi awal secara cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH juga dapat digunakan dalam menilai kinerja perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH ditentukan dari empat komponen indikator kinerja kunci, yaitu : indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), indeks kualitas tutupan lahan (IKTL), dan mulai tahun 2021 melalui Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditambah dengan indeks kualitas air laut (IKAL).

Capaian IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, yaitu sebesar 70,95 pada tahun 2019; 72,04 pada tahun 2020; 74,97 pada tahun 2021; 76,88 pada tahun 2022; dan 78,41 pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan nilai IKLH dari tahun 2018 sebesar 71.19 menjadi 70.95 pada tahun 2019, namun nilai IKLH tersebut tetap berada pada level cukup. Capaian nilai IKLH tersebut juga lebih tinggi dari nilai IKLH nasional yaitu 66,55 pada tahun 2019; 70,27 pada tahun 2020; 71,41 pada tahun 2021; 72,42 pada tahun 2022; dan 72,54 pada tahun 2023. IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 sampai tahun 2023 seluruhnya berada pada level baik karena berada pada kisaran nilai $70 \leq x \leq 90$.

Faktor pendukung utama pencapaian IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut adalah adanya kebijakan pembangunan daerah serta dukungan program dan kegiatan yang berwawasan lingkungan terutama pada sektor-sektor pengelolaan sumber daya alam. Selain faktor pendukung tersebut, juga terdapat faktor penghambat terutama minimnya prasarana dan sarana dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2.15. Capaian dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2025

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja						Target	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.19	70.95	72.04	74.97	76.88	82.05	77.00	82.39
1.	Indeks Kualitas Air	54.00	53.10	50.55	53.26	56.21	76.23	56.32	76.63
2.	Indeks Kualitas Udara	91.10	91.22	90.01	90.89	92.05	86.76	92.12	87.16
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69.14	69.14	74.67	74.34	74.33	83.57	74.64	83.71
4.	Indeks Kualitas Air Laut***	-	-	-	81.60	85.70	79,64	85.84	79.75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2024

Keterangan :

* = Target kinerja berdasarkan Renstra DLH Sultra Tahun 2024-2026, lebih rendah dari capaian Tahun 2023 disebabkan perhitungan capaian Tahun 2023 menggunakan format baru.

** = Target kinerja berdasarkan Renja DLH Sultra Tahun 2025

*** = Indeks kualitas air laut (IKAL) berlaku mulai Tahun 2021

Pada Indeks kualitas air (IKA) memberi pengaruh yang cukup besar dalam pencapaian IKLH di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data capaian tahun 2018-2022 masih berada pada level rendah (50.55 – 56.21), dan pada Tahun 2023 telah berada pada level sedang dengan nilai 76,23. Meskipun demikian, berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara (2023), masih terdapat beberapa sungai mengalami pencemaran ringan sampai sedang seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16. Status Mutu Air pada Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara

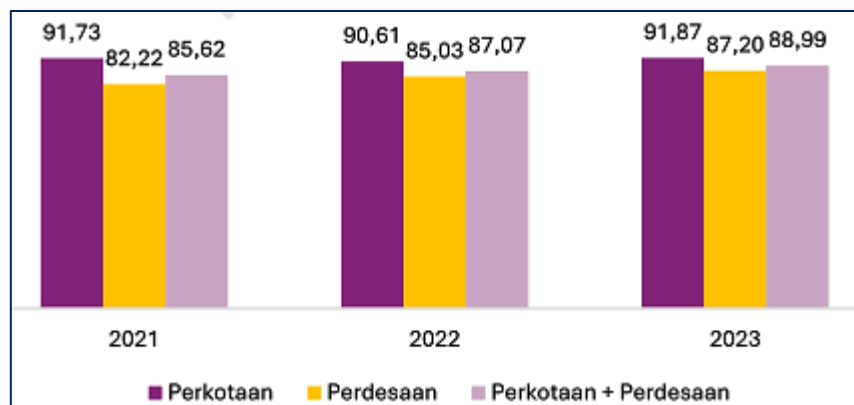
No.	Nama Sungai	Status Mutu Air	Parameter yang melebihi baku mutu
1.	Sungai Sabilambo	Memenuhi- cemar ringan	BOD, TSS, DO, TDS, amoniak, Zn,
2.	Sungai Wanggu	Memenuhi	-
3.	Sungai Konawehea	Memenuhi-cemar ringan	BOD, klorin, deterjen, amoniak, TSS, DO, amoniak, Cadmium, Zn, Cu
4.	Sungai Poleang	Memenuhi-cemar ringan	BOD, TSS, DO, Nitrat, Total fosfat, deterjen, amoniak, Cadmium, Zn,
5.	Sungai Roraya	Memenuhi-cemar ringan	BOD, TSS, DO, Nitrat, total fosfat, deterjen, amoniak, Cadmium, Zn
6.	Sungai Lasolo-Lalindu	Memenuhi-cemar sedang	BOD, COD, DO, Fecal koli, Total coli, sampah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman. Limbah atau kotoran adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia termasuk dalam hal ini limbah atau kotoran yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Limbah atau kotoran tersebut, harus dikelola dengan tepat agar kesehatan lingkungan tetap terjaga. Salah satu upaya pengelolaan limbah atau kotoran manusia yaitu melalui penyediaan sanitasi.

Sebagai upaya untuk mengelola limbah atau kotoran yang dihasilkan oleh manusia, penyediaan sanitasi yang layak menjadi sebuah kebutuhan yang sangat perlu diperhatikan. Kelayakan suatu sanitasi dilihat dari penggunaan fasilitas tempat BAB, jenis kloset yang digunakan, dan tempat pembuangan akhir tinja. Sanitasi rumah tangga diklasifikasikan layak, jika rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas tempat BAB yang digunakan hanya oleh anggota rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, atau menggunakan fasilitas MCK komunal. Kriteria selanjutnya adalah jenis kloset yang digunakan berupa leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau IPAL. Khusus untuk rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan, sanitasinya juga dianggap layak apabila tempat pembuangan akhir tinjanya berupa lubang tanah.

Gambar 2.12. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak menurut Tipe Daerah (persen), 2021–2023

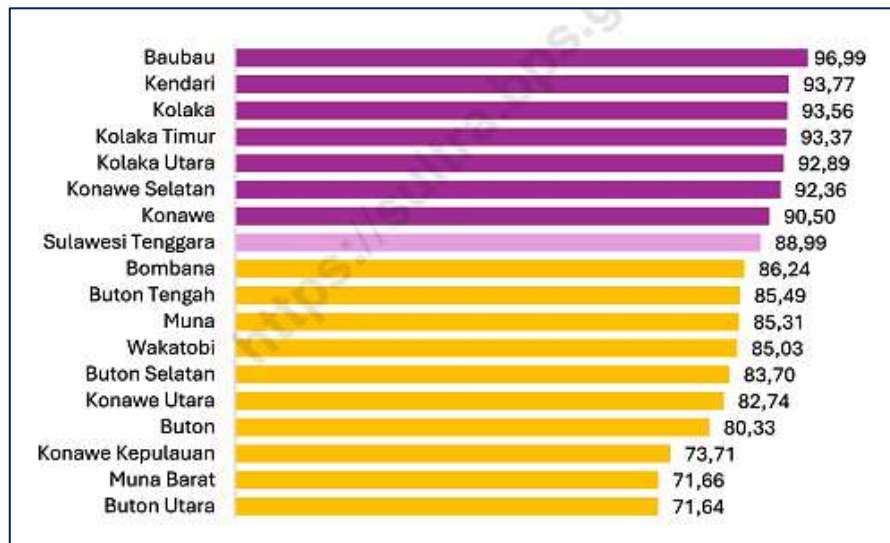


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2023

Secara umum, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, sekitar 85,62 persen rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan angka ini meningkat menjadi 88,99 persen pada tahun 2023. Peningkatan terbesar terjadi di daerah perdesaan, di mana akses sanitasi layak naik dari 82,22 persen pada tahun 2021 menjadi 87,20 persen pada tahun 2023.

Di daerah perkotaan, persentase ini relatif stabil dan tetap tinggi, dengan sedikit peningkatan dari 91,73 persen pada tahun 2021 menjadi 91,87 persen pada tahun 2023. Meskipun terus meningkat, namun capaian indikator ini masih belum memenuhi target RPJMN 2020–2024 yaitu sebesar 90 persen. Berbagai langkah pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat harus terus diupayakan. Selain fokus pada daerah perdesaan, perhatian juga harus diberikan pada daerah perkotaan karena pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi sehingga kebutuhan akan sanitasi di masa mendatang juga akan semakin meningkat.

Gambar 2. 13. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota (persen), 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di sebagian besar kabupaten/kota sudah lebih dari 80 persen. Beberapa kabupaten/kota bahkan ada yang persentasenya sudah lebih dari 90 persen. Kabupaten/kota tersebut yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka, Kota Kendari, dan Kota Baubau. Semua kabupaten/kota tersebut persentasenya juga sudah lebih dari persentase level provinsi.

Meskipun sebagian besar kabupaten/kota persentasenya sudah lebih dari 80 persen, namun masih ada beberapa kabupaten yang persentasenya kurang dari itu. Kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan dengan persentase sebesar 73,71 persen, Kabupaten Muna Barat dengan persentase sebesar 71,66 persen, dan Kabupaten Buton Utara dengan persentase sebesar 71,64 persen. Ketiga kabupaten ini merupakan kabupaten yang terletak di wilayah kepulauan.

Penyediaan sanitasi layak dan berkelanjutan menjadi sangat penting bagi setiap daerah agar kesehatan lingkungan menjadi lebih terjaga dan pada akhirnya akan membuat kesehatan masyarakat juga terjaga. Kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan demi meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan RPJMN 2020-2024 terkait sanitasi, perlu dilakukan beberapa hal yaitu peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi berkelanjutan, pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, serta pengembangan kerja sama dan pola pendanaan.

Timbulan Sampah Terolah Difasilitas Pengolahan Sampah Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/ lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini

sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran. Penghitungan pengelolaan sampah/limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Berbagai aktivitas yang tercakup dalam kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, antara lain kegiatan pengadaan air bersih baik oleh PDAM maupun swasta, kegiatan pengelolaan sampah dan limbah (padat dan cair, baik yang berasal dari industri maupun rumah tangga), serta kegiatan daur ulang, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta. Meskipun kategori ini memiliki kontribusi terkecil terhadap total PDRB Sulawesi Tenggara, aktivitas dari kategori ini berdampak besar bagi kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nilai tambah dari kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada tahun 2024 tercatat sebesar 256,65 milyar rupiah. Selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi kategori ini cenderung menurun, yaitu rata-rata 0,15 persen. Kemudian, pertumbuhan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami kecenderungan pertumbuhan yang melambat dalam periode tahun 2020–2024 dimana pada tahun 2020 tumbuh sebesar 3,30 persen dan terus melambat hingga berkontraksi sebesar 1,39 persen pada tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 4,92 persen. Kemudian, pada tahun 2024 berkontraksi kembali sebesar 1,10 persen.

6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang dikategorikan wilayah rawan bencana yang diakibatkan perubahan iklim sebagai salah satu dampak dari tingkat emisi **Gas Rumah Kaca (GRK)** yang terjadi baik secara alami ataupun atas campur tangan aktivitas manusia. Dampak lain dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) juga pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi, social dan lingkungan. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu adanya sasaran visi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Menuju *Net Zero Emission* melalui penurunan intensitas emisi GRK di dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang termuat di dalam indikator utama Pembangunan (45 indikator) yaitu penurunan emisi GRK. Aksara sebagai media pemantauan, evaluasi dan pelaporan aksi mitigasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK).

Potensi Capaian Penurunan emisi GRK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yang dilaporkan di dalam Aksara adalah sebesar 2,88% dari target sebesar 15,48%. Capaian ini berdasarkan aksi mitigasi yang dilaksanakan dan dilaporkan OPD teknis pada tahun 2024. Aksi mitigasi yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sektor lahan, energi, pertanian, limbah dan IPPU telah banyak menyoroti upaya pemerintah dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Upaya tersebut berupa kegiatan yang dilaksanakan dan berdampak langsung ke penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam pelaporan ke Aksara belum menyeluruh kegiatan ini dilaporkan akan tetapi dengan masuknya Emisi GRK kedalam Indikator Utama Pembangunan dapat berdampak positif pada pelaporan aksi mitigasi penurunan emisi GRK di dalam Aksara.

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat risiko suatu wilayah terhadap berbagai jenis bencana alam. IRB dihitung berdasarkan tiga komponen utama:

- Bahaya (Hazard) yaitu kemungkinan terjadinya suatu jenis bencana alam di suatu wilayah, diukur berdasarkan frekuensi dan intensitas kejadian bencana di masa lampau.
- Kerentanan (Vulnerability) yaitu tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap dampak bencana alam, diukur berdasarkan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan wilayah tersebut.
- Kapasitas (Capacity) yaitu kemampuan suatu wilayah untuk mempersiapkan diri, menanggapi, dan pulih dari dampak bencana alam, diukur berdasarkan kesiapsiagaan, sumber daya, dan kelembagaan yang tersedia.

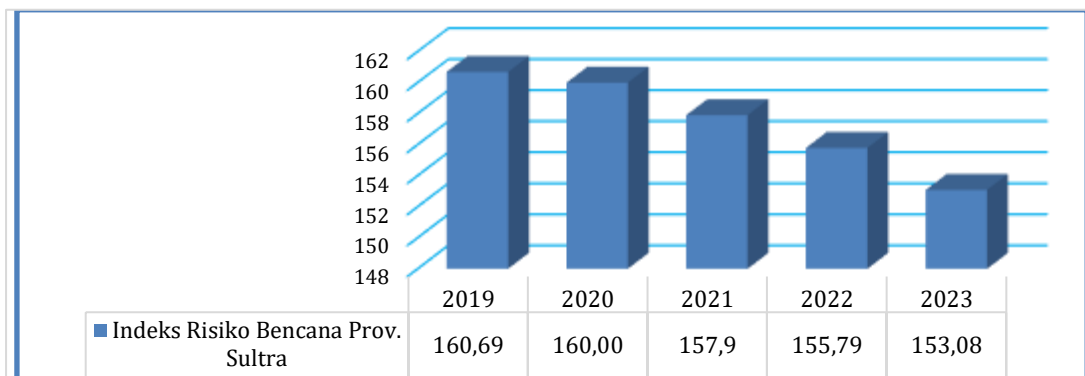
Tabel.2.17. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Realisasi Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Sulawesi Tenggara	160,09	160,09	157,90	155,79	153,08
Target	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Sulawesi Tenggara	171,32	131,93	109,12	98,63	94,41

Sumber: BNPB

Selama Tahun 2023, tercatat terdapat 12 bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrim (4 kejadian), banjir (3 kejadian) dan kekeringan (3 kejadian) (BNPB, 2023). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki indeks risiko sebesar 153,08 dan tergolong tinggi. Berikut grafik yang menggambarkan besaran nilai indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023:

Gambar 2.14. Grafik Indeks Resiko Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2023



Sumber : BNPB, Tahun 2024

Sedangkan **Indeks ketahanan daerah (IKD)** Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap fokus dalam upaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut yang dapat terjadi setiap saat dan dapat berdampak besar yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka harus terus melakukan Mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana 2022-2026 oleh BNPB, disepakati ada 13 jenis bencana yang perlu diantisipasi di Sulawesi Tenggara yaitu: Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gempabumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Likuefaksi,

Kekeringan, Tanah Longsor, Tsunami, Epidemii dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi, dan Covid – 19.

Penanggulangan kebencanaan di Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada 7 (tujuh) prioritas Program Pengurangan Risiko Bencanayaitu: 1). Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, 2). Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, 3). Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, 4). Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, 5). Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, 6). Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, 7). Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Berdasarkan penilaian kapasitas secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks **Ketahanan Daerah 0,34** dan nilai ini menunjukkan Tingkat Kapasitas Daerah Rendah. Merujuk pada nilai Indeks Ketahanan Daerah tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara masih perlu meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang telah dilakukan, maka secara umum tingkat risiko untuk masing-masing bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut: 1). Tingkat risiko bencana banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di 13 kabupaten dan 1 kota; dan tingkat risiko sedang di dua kabupaten dan 1 kota, 2). Tingkat risiko bencana banjir bandang di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di sembilan kabupaten dan 2 kota. Sedangkan tingkat risiko sedang di tiga kabupaten, 3). Tingkat risiko bencana cuaca ekstrim di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di 10 kabupaten dan dua kota Sedangkan tingkat risiko sedang meliputi lima kabupaten, 4). Tingkat risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di satu kabupaten Tingkat risiko sedang di delapan kabupaten dan dua kota; Sedangkan tingkat risiko rendah 5 kabupaten, 5). Tingkat risiko bencana gempabumi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko sedang di lima kabupaten sedangkan tingkat risiko rendah di 10 kabupaten dan dua kota, 6). Tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di lima kabupaten dan dua kota. Tingkat risiko sedang di 10 kabupaten, 7). Tingkat risiko bencana kekeringan di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di 15 kabupaten dan dua kota, 8) Tingkat risiko bencana tanah longsor di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi meliputi sembilan kabupaten dan satu kota dan sedangkan tingkat risiko sedang di enam kabupaten dan satu kota serta 9). Tingkat risiko bencana tsunami di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di 8 kabupaten dan 1 kota. Sedangkan tingkat risiko sedang di lima kabupaten dan satu kota; tingkat risiko rendah di satu kabupaten, 10) Tingkat risiko bencana epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko rendah di lima kabupaten dan satu kota, 11). Tingkat risiko bencana kegagalan teknologi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko rendah di tujuh kabupaten, 12). Tingkat risiko bencana Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko rendah di 15 kabupaten dan 2 kota dan 13). Tingkat risiko bencana likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan tingkat risiko tinggi di satu kabupaten. Tingkat risiko sedang 10 kabupaten dan duakota. Sedangkan tingkat risiko rendah tiga kabupaten.

Tabel 2.18. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Sulawesi Tenggara Tahun 2020

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks ketahanan daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,35	0,34	RENDAH
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,33		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,41		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,22		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,30		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,30		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,60		

Sumber: BNPB

7. Demografi

Penduduk yang dimaksud dalam kajian ini adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Sulawesi Tenggara selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Perkembangan penduduk di wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah angka kelahiran, angka kematian, angka migrasi (migrasi masuk dan migrasi keluar), dan kebijakan pemerintah seperti program Keluarga Berencana (KB). Adapun perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara selama 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.19. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 - 2024

Wilayah	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Buton	114.800	116.600	118.410	120.210	122,13
Muna	214.750	218.060	221.370	224.690	227,98
Konawe	255.640	260.290	264.930	269.520	274,07
Kolaka	237.130	240.100	243.040	245.930	248,76
Konawe Selatan	307.470	312.920	318.350	323.790	329,21
Bombana	150.160	152.860	155.510	158.110	160,65
Wakatobi	110.880	112.760	114.620	116.450	118,26
Kolaka Utara	137.000	139.890	142.770	145.640	148,50
Buton Utara	66.270	67.200	68.090	68.950	69,80
Konawe Utara	67.510	69.100	70.680	72.250	73,83
Kolaka Timur	120.330	122.170	123.980	125.770	127,55
Konawe Kepulauan	36.900	37.610	38.310	39.000	39,69
Muna Barat	84.200	85.900	87.590	89.290	90,96
Buton Tengah	113.960	115.800	117.630	119.460	121,29
Buton Selatan	94.680	96.320	97.950	99.580	101,19
Kota Kendari	344.540	351.060	357.650	364.220	370,76
Kota Baubau	158.820	161.280	163.720	166.150	168,54
Sulawesi Tenggara	2.615.030	2.659.940	2.704.610	2.749.010	2.793,07

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024

Pada tabel 2.20 di atas terlihat bahwa **Jumlah Penduduk** Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebesar 2.793,07 jiwa dimana Kota Kendari memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 370,76 jiwa atau sebesar 13,27% dari total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya komposisi jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 39,69 ribu atau hanya mencapai 1,42% dari total jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya pada **Laju pertumbuhan penduduk** pertahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah metode geometrik. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa Periode Tahun 2020-2023, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi berada pada Kabupaten Konawe Utara sebesar 2,30 persen dan terendah sebesar 1,26 persen adalah Kabupaten Kolaka. Sedangkan Periode Tahun 2020-2024, Laju Pertumbuhan Penduduk tertinggi masih tetap berada Kabupaten Konawe Utara sebesar 2,27 persen. Laju Pertumbuhan Penduduk terendah berada pada 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kolaka sebesar 1,23 dan Buton Utara sebesar 1,24 persen.

Tabel 2.20. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan SP Tahun 2020-2023 dan Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun(%)	
	2020-2023	2020-2024
Buton	1,56	1,55
Muna	1,53	1,51
Konawe	1,74	1,73
Kolaka	1,26	1,23
Konawe Selatan	1,77	1,75
Bombana	1,76	1,72
Wakatobi	1,62	1,61
Kolaka Utara	2,07	2,04
Buton Utara	1,24	1,24
Konawe Utara	2,30	2,27
Kolaka Timur	1,51	1,48
Konawe Kepulauan	1,88	1,85
Muna Barat	1,98	1,95
Buton Tengah	1,47	1,48
Buton Selatan	1,63	1,62
Kota Kendari	1,98	1,93
Kota Baubau	1,55	1,52
Sulawesi Tenggara	1,69	1,67

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024

selanjutnya penyebaran penduduk merupakan distribusi penduduk terhadap penggunaan lahan yang berkaitan langsung dengan tingkat **kepadatan penduduk** di suatu wilayah. Kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya penduduk yang bermukim dalam suatu kawasan/wilayah dengan luasan tertentu (km²). Konsentrasi penduduk dengan kepadatan tertinggi umumnya berada di wilayah perkotaan sebagai ibukota provinsi, sedangkan kepadatan terendah berada pada wilayah dengan luasan yang tinggi namun memiliki jumlah penduduk yang rendah. Adapun sebaran populasi penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.21. Tingkat Kepadatan Penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk per km ²		
	2020	2023	2024
Buton	69,01	72,01	73,10
Muna	115,99	120,92	122,70
Konawe	48,02	50,36	51,21
Kolaka	80,30	83,12	84,07
Konawe Selatan	72,80	76,41	77,69
Bombana	45,75	48,00	48,77
Wakatobi	247,31	258,51	262,53
Kolaka Utara	46,95	49,67	50,64
Buton Utara	37,96	39,27	39,75
Konawe Utara	16,08	17,12	17,50
Kolaka Timur	30,23	31,50	31,95
Konawe Kepulauan	52,50	55,26	56,24
Muna Barat	103,32	109,06	111,10
Buton Tengah	137,13	142,73	144,92
Buton Selatan	184,03	192,37	195,49
Kota Kendari	1.298,42	1.370,33	1.394,95
Kota Baubau	541,40	564,87	572,99
Sulawesi Tenggara	72,59	76,02	77,24

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.22 di atas dapat diketahui bahwa penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara tersebar dengan tingkat kepadatan tinggi sampai rendah. Kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2024 terdapat di Kota Kendari dengan rata-rata 1.394,95 jiwa/km², sedangkan tingkat kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Konawe Utara sebesar 17,50 jiwa/km². Wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi seperti Kota Kendari perlu mendapatkan afirmasi kebijakan pengembangan program yang terkait penyediaan infrastruktur pelayanan, yang juga diikuti dengan pengembangan adaptif program penekanan jumlah penduduk serta pola penataan ruang yang baik. Sementara wilayah dengan tingkatan kepadatan yang rendah dapat menjadi lokus pengembangan industri besar yang memerlukan skala ruang yang luas.

Dari sisi **Komposisi Penduduk** Menurut Umur dan Jenis Kelamin, Pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh komposisi penduduk yang berada dalam suatu wilayah, baik pada aspek umur maupun jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Sulawesi Tenggara selama 5 (lima) tahun terakhir didominasi oleh jumlah laki-laki yang lebih banyak dibanding perempuan dengan rata-rata rasio sebesar 102,08. Publikasi BPS berjudul Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tenggara 2020-2035. Hasil Sensus Penduduk 2020 merilis bahwa rasio jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut akan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2025 sampai 2030 sebesar 102,23. Hal ini berarti bahwa penambahan penduduk laki-laki akan lebih tinggi dibanding penduduk berjenis kelamin perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan usia didominasi oleh penduduk umur 15-65 tahun yang tergolong usia produktif dengan rata-rata 66,98 persen. Diproyeksikan bahwa komposisi penduduk usia produktif tersebut akan mengalami peningkatan hingga tahun 2030 sebesar 67,03 persen. Peningkatan tersebut akan diikuti oleh penurunan rasio ketergantungan yang diproyeksi mencapai 49,55 pada tahun 2030, sedangkan pada 5 (lima) tahun terakhir mencapai rata-rata 50,69. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia

produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif dapat didayagunakan sebagai modal pembangunan dengan mengoptimalkan kualitas daya saingnya.

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu pembuat kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya.

Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa lampau, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hubungannya satu sama lain. Penerapan asumsi yang digunakan akan menentukan hasil proyeksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Oleh karena itu, penetapan asumsi merupakan kunci penghitungan proyeksi penduduk. Secara umum, asumsi mengenai kecenderungan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu. Namun, informasi ini belum dapat ditentukan sebagai dasar proyeksi, masih diperlukan pandangan pakar demografi dan pemangku kebijakan sehubungan dengan kebijakan di masa datang.

Jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Tenggara selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2020, jumlah penduduk wilayah ini mencapai 2.615.030 jiwa kemudian meningkat menjadi 2.659.940 jiwa pada tahun 2021, hingga Pada tahun 2024, jumlah penduduk menjadi 2.793,07 jiwa dan diproyeksi terus meningkat hingga akhir periode RPJMD yaitu tahun 2029 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.23 sebagai berikut:

*Tabel 2.22. Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029*

Wilayah	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Buton	123,958	125,875	127,822	129,799	129,799
Muna	231,571	235,090	238,663	242,290	242,290
Konawe	279,190	284,154	289,206	294,348	294,348
Kolaka	251,977	255,057	258,173	261,328	261,328
Konawe Selatan	335,148	340,976	346,905	352,938	352,938
Bombana	163,642	166,481	169,309	172,306	172,306
Wakatobi	120,318	122,300	124,314	126,362	126,362
Kolaka Utara	151,701	154,825	158,013	161,268	161,268
Buton Utara	70,797	71,738	72,693	73,660	73,660
Konawe Utara	75,593	77,323	79,092	80,901	80,901
Kolaka Timur	129,533	131,456	133,408	135,389	135,389
Konawe Kepulauan	40,466	41,220	41,987	42,769	42,769
Muna Barat	92,853	94,688	96,558	98,466	98,466
Buton Tengah	123,273	125,225	127,208	129,223	129,223
Buton Selatan	102,987	104,734	106,510	108,317	108,317
Kota Kendari	377,961	385,024	392,220	399,550	399,550
Kota Baubau	171,224	173,818	176,452	179,126	179,126

Wilayah	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Sulawesi Tenggara	2,795,178	2,889,854	2,938,388	2,987,737	2,987,737

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara diproyeksi akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2029. Pada tahun 2025, jumlah penduduk di wilayah ini telah mencapai 2,795,178 jiwa kemudian meningkat menjadi 2,987,737 jiwa pada tahun 2029. Sementara laju pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024) mencapai rata-rata 1,69 persen dan diproyeksi akan cenderung menurun secara fluktuatif.

Selanjutnya **keberadaan masyarakat adat** di Sulawesi Tenggara Secara sosial budaya, memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) yang mendasari perilaku kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara sosial dalam suatu kelompok atau komunitas. Di wilayah ini dikenal komunitas kesukuan yang terdiri atas 7 (tujuh) suku dan masyarakat adat Sulawesi Tenggara, yaitu Suku Buton, Suku Culambacu, Suku Kulisusu, Suku Muna, Suku Padoe, Suku Tolaki dan Suku Morenene. Pada setiap suku terdapat kelembagaan adat yang memiliki struktur organisasi dan wewenang dalam mengelola sumberdaya yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Dahulu, lembaga ini memiliki otoritas penuh dalam melaksanakan sistem pemerintahan, namun saat ini telah mengalami perubahan seiring ditetapkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2014. Legitimasi lembaga adat khususnya dalam pengelolaan sumberdaya alam kembali mendapatkan penyesuaian otoritas dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Eksistensi lembaga adat dalam piranti kearifan lokal yang dimilikinya terbukti secara empiris mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan melalui implementasi sejumlah tradisi dan adat istiadat, baik dalam bentuk ritual keagamaan dan kepercayaan maupun aturan normative yang mengatur seluruh elemen kehidupan. Masyarakat Buton melaksanakan Ritual Tutura yang biasanya digelar setiap tahun di puncak Gunung Siontapina sebagai sebuah tradisi untuk menjaga kelestarian hutan. Masyarakat Kepulauan Wakatobi yang secara geografis berbatasan dengan Kepulauan Buton juga memiliki kearifan lokal dalam bentuk kaindea dan motika untuk menjaga kelestarian hutan. Sementara itu, masyarakat Suku Muna juga melaksanakan ritual kafindae dan kaago-ago, dan masyarakat Suku Tolaki melakukan ritual motasu sebagai upaya untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Implementasi sejumlah ritual adat tersebut dapat menanamkan nilai-nilai dalam menjaga kelestarian ekosistem, baik di darat maupun dilaut.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 2 (dua) taman nasional yang perlu dijaga kelestariannya, yaitu Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, dan Taman Nasional Wakatobi. Terdapat pula kawasan Hutan Lambusango yang dijuluki ‘Paru-Paru Dunia’ dengan dua kawasan konservasi yaitu Cagar Alam Kakenauwe dan Suaka Margasatwa Lambusango. Adapun beberapa Kawasan Suaka Margasatwa (SM) yang tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara meliputi SM Tanjung Batikolo, SM Tanjung Peropa dan SM Tanjung Amolengo. Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai menjadi tempat perlindungan satwa langka dan endemik yang tercatat ada 155 jenis burung, 37 diantaranya jenis burung endemik dan 32 jenis burung langka. Hewan-hewan seperti babi rusa, anoa, buaya muara, musang sulawesi, rusa, dan beberapa jenis primata

seperti monyet hitam dan tangkasi berada di kawasan ini. Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa juga memiliki 323 spesies tanaman yang terdiri dari berbagai jenis pohon, rotan dan liana. Kawasan taman nasional tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan hidup flora dan fauna endemik khas Sulawesi Tenggara. Anggrek Serat (*Diplocaulobium utile*) merupakan flora khas Sulawesi Tenggara dan Anoa (*Bubalus depressicornis*) atau (*Bubalus quarlesi*) sebagai fauna khas Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, di Taman Nasional Wakatobi terdapat 112 jenis karang dari 13 famili, 93 jenis ikan hias dan beberapa jenis penyu. Ada pula beberapa jenis burung laut seperti angsabatu coklat, cerek melayu dan raja udang erasia.

Pelestarian flora dan fauna sebagai bagian keanekaragaman hayati Provinsi Sulawesi Tenggara perlu mendapatkan perhatian dalam rencana program pembangunan lingkungan hidup. Ancaman perambahan hutan dan alih fungsi lahan oleh kegiatan perkebunan dan pertambangan patut menjadi lokus. Salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan merevitalisasi peran kelembagaan adat dalam setiap spot kawasan di wilayah administrasinya masing-masing, agar proses pengelolaan dan perlindungan kawasan dapat berlangsung secara kolaboratif.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan (riil) yang dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya produksi barang dan jasa di suatu daerah atau wilayah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan nilai PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di daerah atau wilayah tersebut.

Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2024 adalah sebesar 5,40 persen. Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan terjadinya percepatan ekonomi disbanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,35 persen. Angka pertumbuhan tahun 2024 tersebut menunjukkan adanya resiliensi dan pemulihan lebih cepat terhadap kondisi perekonomian di Sulawesi Tenggara setelah mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 akibat pandemic Covid-19.

Sepanjang tahun 2024, hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dibanding tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Industri Pengolahan yaitu sebesar 12,98 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas Industri Pengolahan Logam Dasar yaitu peningkatan produksi ferro nikel dan stainless steel di Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2024 juga dicapai oleh kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 11,98 persen dan kategori Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 7,81 persen. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya aktivitas pertambangan bijih logam untuk menunjang kebutuhan bahan baku bagi Industri Pengolahan Logam Dasar serta meningkatnya belanja pegawai pemerintah akibat adanya penerimaan aparatur sipil negara dalam jumlah besar pada tahun 2024.

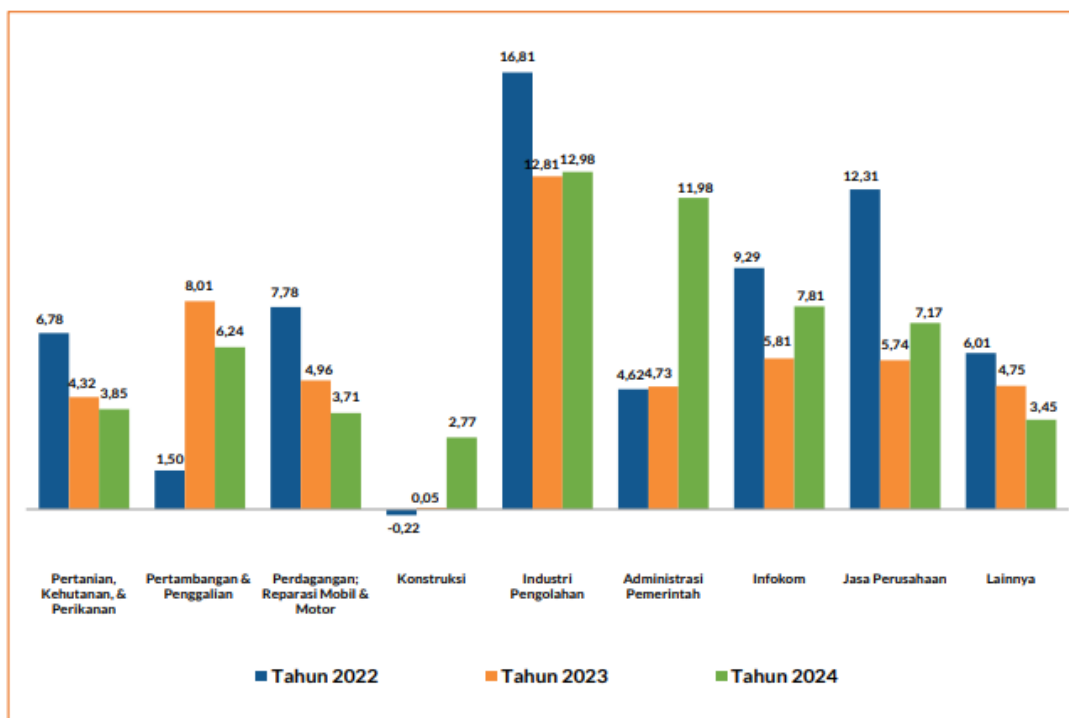
Gambar 2.15. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara (persen), 2020–2024



Sumber Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain Tahun 2024

Berikut Laju pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2024 menurut lapangan usaha tumbuh sebesar 5,40 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Industri Pengolahan sebesar 12,98 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,98 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,81 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 3,85 persen. Struktur PDRB Sulawesi Tenggara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 23,48 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 21,13 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,53 persen; Konstruksi sebesar 12,15 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,40 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sulawesi Tenggara mencapai 78,69 persen.

Gambar 2.16. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2022-2024



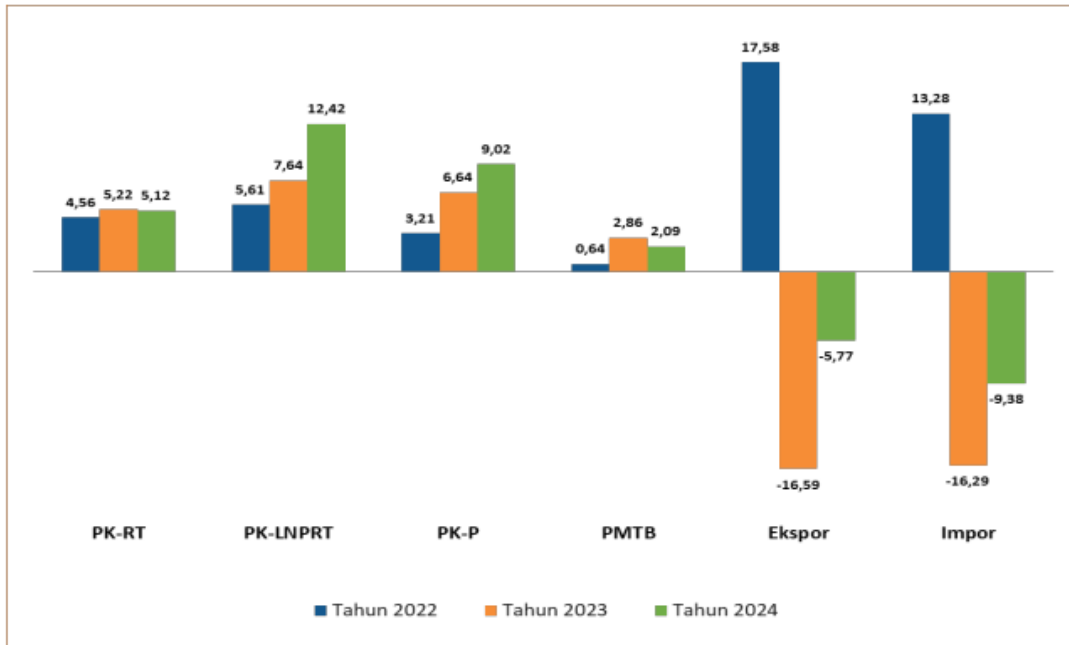
Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2025

Dari sisi perbandingan antara tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara pada triwulan IV-2024 dibanding triwulan IV-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,08 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 9,92 persen; diikuti Real Estat sebesar 9,42 persen; dan Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,88 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan adalah Jasa Keuangan sebesar 3,33 persen. Sebagai lapangan usaha yang memiliki peran dominan, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian masing-masing tumbuh sebesar 5,80 persen dan 7,36 persen.

Sedangkan dari sisi pengeluaran Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) sebesar 12,42 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,02 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,12 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,09 persen. Sementara, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi sebesar 5,77 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran juga tercatat mengalami kontraksi sebesar 9,38 persen. Struktur PDRB Sulawesi Tenggara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tenggara masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 46,14 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 40,45 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 34,75 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 12,71 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPR sebesar 1,04 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar

0,75 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki peran sebesar 35,85 persen.

Gambar 2.17. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran Tahun 2022-2024



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2025

Dari sisi perbandingan antara tahun 2023 dan 2024 Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,08 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,32 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,17 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 4,02 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,19 persen. Sedangkan Komponen Ekspor Barang dan Jasa berkontraksi sebesar 26,00 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran juga tercatat mengalami kontraksi sebesar 25,36 persen.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan, September 2017– September 2024.

Sepanjang periode September 2017 hingga Maret 2020, perlahan tapi pasti persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara terus mengalami penurunan. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut terhenti sejak memasuki masa pandemi COVID-19. Pada September 2020, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dari 11,00 persen menjadi 11,69 persen (naik 0,69 persen poin). Peningkatan ini terus terjadi hingga September 2021. Pasca pandemi COVID-19 tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara masih fluktuatif, sempat mengalami penurunan di periode Maret 2022, kemudian kembali naik pada periode berikutnya, dan pada September 2024, tingkat kemiskinan berhasil turun di angka 10,63 persen. Hal ini didukung oleh mulai membaiknya kondisi perekonomian di Sulawesi Tenggara secara umum. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2017 sampai dengan September 2024 disajikan pada Gambar berikut:

Gambar 2.18. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2017–September 2024



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2017–September 2024

Perkembangan Penduduk Miskin, Maret 2023–September 2024 Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada September 2024 mencapai 305,27 ribu orang. Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin menurun 14,44 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 16,26 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 10,63 persen poin, turun 0,58 persen poin terhadap Maret 2024 atau turun 0,80 persen poin terhadap Maret 2023. Berdasarkan daerah tempat tinggal pada periode Maret 2024–September 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebesar 6,84 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 7,60 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun 0,67 persen poin dari 7,45 persen menjadi 6,78 persen. Sementara itu, di perdesaan turun 0,53 persen poin dari 13,60 persen menjadi 13,07 persen. Jika dibandingkan terhadap periode Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 4,12 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun 12,14 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun 0,62 persen poin dari 7,40 persen menjadi 6,78 persen. Sementara di perdesaan turun 0,87 persen poin dari 13,94 persen menjadi 13,07 persen.

Tabel 2.23. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret 2023–September 2024

Daerah Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
1	2	3
Perkotaan		
Maret 2023	79,89	7,40
Maret 2024	82,61	7,45
September 2024	75,77	6,78
Perdesaan		
Maret 2023	241,64	13,94
Maret 2024	237,10	13,60
September 2024	229,50	13,07
Perkotaan + Perdesaan		
Maret 2023	321,53	11,43

Daerah Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan orang)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
Maret 2024	319,71	11,21
September 2024	305,27	10,63

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, Maret 2024, dan September 2024

Perkembangan Garis Kemiskinan, Maret 2023–September 2024 Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. GK merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari, sedangkan GKBM adalah nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan bukan makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Tabel 2.25 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2023 sampai dengan September 2024.

Tabel. 2.24. Garis Kemiskinan dan Perkembangannya menurut Daerah Tempat Tinggal Maret 2023 - September 2024

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Perkotaan			
Maret 2023	334.125	129.262	463.387
Maret 2024	350.388	135.244	485.632
September 2024	354.813	138.640	493.453
Perubahan Maret'24–Sept'24(%)	1,26	2,51	1,61
Perubahan Maret'23–Sept'24(%)	6,19	7,26	6,49
Perdesaan			
Maret 2023	333.604	98.358	431.962
Maret 2024	343.993	104.366	448.359
September 2024	352.533	108.034	460.567
Perubahan Maret'24–Sept'24(%)	2,48	3,51	2,72
Perubahan Maret'23–Sept'24(%)	5,67	9,84	6,62
Perkotaan + Perdesaan			
Maret 2023	333.797	110.183	443.980
Maret 2024	346.345	116.370	462.715
September 2024	353.412	119.931	473.343
Perubahan Maret'24–Sept'24(%)	2,04	3,06	2,30
Perubahan Maret'23–Sept'24(%)	5,88	8,85	6,61

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, Maret 2024, dan September 2024

Pada September 2024 GK Sulawesi Tenggara sebesar Rp 473.343/kapita/bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,30 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 6,61 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal pada periode Maret 2024 - September 2024, Garis Kemiskinan di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 1,61 persen. Pada Bulan Maret 2024 Garis Kemiskinan sebesar Rp 485.632/kapita/bulan, dan menjadi Rp 493.453/kapita/ bulan pada September 2024. Sedangkan di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebesar

2,72 persen, dimana sebelumnya Rp 448.359/kapita/bulan menjadi Rp 460.567/kapita/bulan pada September 2024.

PDRB per Kapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang ada di wilayah tersebut.

Gambar 2.19. PDRB per Kapita Atas Dasar Berlaku Provinsi Sulawesi Tenggara (juta rupiah), 2020–2024



Sumber Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain Tahun 2024

Selama lima tahun terakhir, PDRB Sulawesi Tenggara atas dasar harga berlaku terus mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 49,72 juta rupiah per kapita dan terus meningkat hingga mencapai 67,84 juta rupiah per kapita pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan rata-rata pendapatan tiap penduduk di Sulawesi Tenggara selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.25. Produk Domestik Regional Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020–2024

	Uraian	2020	2021	2022	2023 *	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDRB/GRDP (miliar rupiah/billion rupiah)					
	- ADHB/at Current Market Price	130.107,27	139.476,77	158.800,27	176.179,90	189.481,75
	- ADHK/at 2010 Constant Market Price	93.445,72	97.275,32	102.656,43	108.152,98	113.989,49
2	PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (ribu rupiah/thousand rupiah)					
	- ADHB / at Current Market Price	49.718,15	52.436,02	58.714,73	64.088,40	67.839,91
	- ADHK / at 2010 Constant Market Price	35.708,60	36.570,47	37.956,13	39.342,46	40.811,51
3	Pertumbuhan PDRB	1,13	2,41	3,79	3,65	3,73

	Uraian	2020	2021	2022	2023 *	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	per Kapita ADHK 2010 (persen)/Per Capita GRDP Growth Rate at 2010 Constant Market Price (percent)					
4	Jumlah Penduduk (ribu orang)/Population (thousand people)***	2.616,90	2.659,94	2.704,61	2.749,01	2.793,07
5	Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)/Population Growth (percent)	1,76	1,64	1,68	1,64	1,60

Sumber Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain Tahun 2024

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010. Hampir sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB per kapita di Sulawesi Tenggara sebelum tahun 2020 cukup tinggi. Namun pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 1,13 persen dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,10 persen. Meskipun tidak sampai mengalami kontraksi seperti pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, tetapi kondisi ini menggambarkan adanya perlambatan kenaikan pendapatan penduduk di Sulawesi Tenggara. Seiring dengan pulihnya perekonomian daerah, pendapatan penduduk juga mengalami perbaikan dimana pada tahun 2023 meningkat sebesar 3,65 persen dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 3,73 persen.

Pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2025 sebesar 3,27 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Pada Februari 2025, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024. Pada Februari 2025, TPT laki-laki sebesar 2,81 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,96 persen. Jika dibandingkan dengan Februari 2024, TPT laki-laki turun sebesar 0,10 persen poin sedangkan TPT perempuan naik sebesar 0,28 persen poin.

Tabel 2.26. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Karakteristik, Februari 2023-Februari 2025

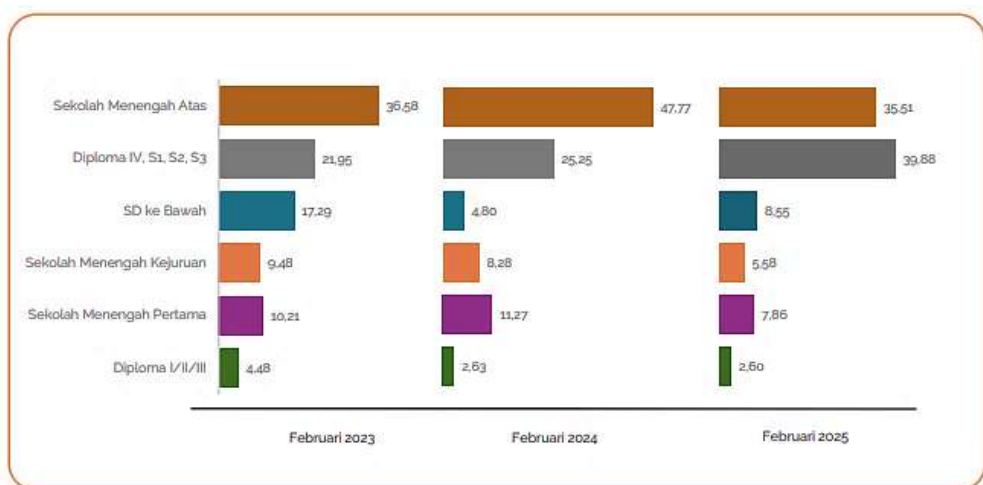
Karakteristik	Februari 2023 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Februari 2024 (persen)	Agustus 2024 (persen)	Februari 2025 (persen)	Perubahan Feb 24-Feb 25 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,66	3,15	3,22	3,09	3,27	0,05
TPT Menurut Jenis Kelamin						
- Laki-laki	3,61	2,68	2,91	2,52	2,81	-0,10
- Perempuan	3,74	3,87	3,68	3,90	3,96	0,28

Karakteristik	Februari 2023 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Februari 2024 (persen)	Agustus 2024 (persen)	Februari 2025 (persen)	Perubahan Feb 24-Feb 25 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal						
- Perkotaan	5,20	4,01	4,77	4,90	5,47	0,70
- Perdesaan	2,86	2,59	2,32	1,99	1,92	-0,40
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						
SD ke Bawah	1,75	1,48	0,51	1,06	0,92	0,41
Sekolah Menengah Pertama	2,39	2,17	2,10	1,89	1,71	-0,39
Sekolah Menengah Atas	5,06	4,69	5,62	4,21	3,94	-1,68
Sekolah Menengah Kejuruan	6,01	5,73	5,10	4,97	3,43	-1,68
Diploma I/II/III	8,02	1,75	3,04	2,79	3,53	0,49
Diploma IV, S1, S2, S3	5,73	3,80	4,76	5,23	7,52	2,76

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2025

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,47 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (1,92 persen). Dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,70 persen poin, sedangkan TPT perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,40 persen poin. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT mempunyai pola yang berbeda dari Februari 2023 sampai dengan Februari 2025. Pada Februari 2025, TPT tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,52 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 0,92 persen.

Gambar 2. 20. Distribusi Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2023–Februari 2025

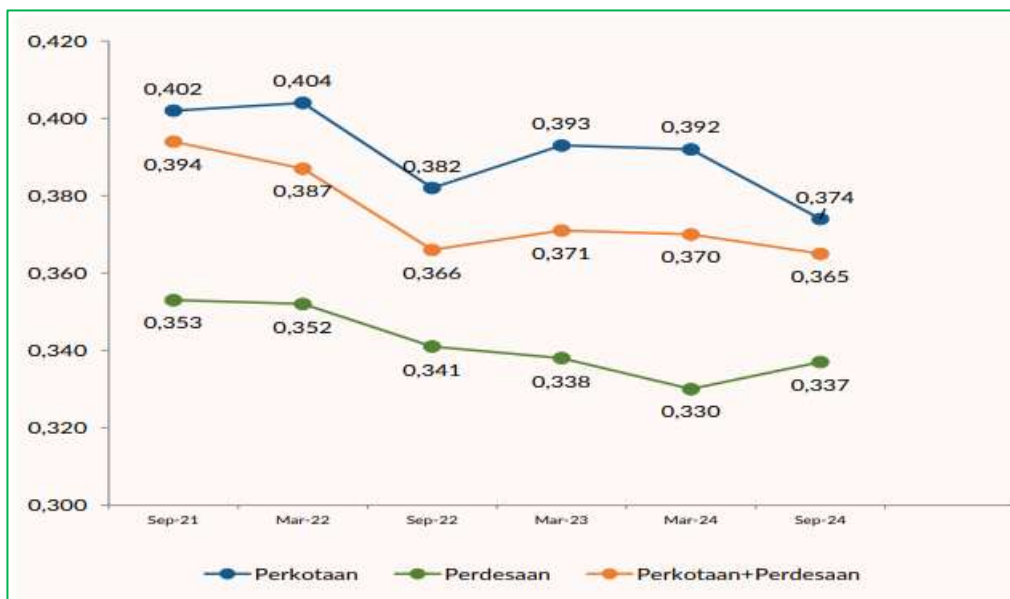


Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2025

Selama periode Februari 2023 dan Februari 2024, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas, sedangkan pada Februari 2025 didominasi oleh tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 mencapai 39,88 persen. Sementara itu, distribusi pengangguran yang terendah adalah tamatan Diploma I/II/III dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), masing-masing sebesar 2,60 persen dan 5,58 persen.

Perkembangan Gini Ratio September 2021–September 2024. Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Sulawesi Tenggara selama periode September 2021 - September 2024 terus mengalami penurunan meski naik sesaat di Maret 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tenggara mulai membaik. Dalam setahun terakhir, berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,374. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,018 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,392 dan sebesar 0,019 poin dibanding Maret 2023 yang sebesar 0,393. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2024 tercatat sebesar 0,337, naik sebesar 0,007 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 0,330 dan mengalami penurunan sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 sebesar 0,338.

Gambar 2.21. Perkembangan Gini Ratio, September 2021–September 2024



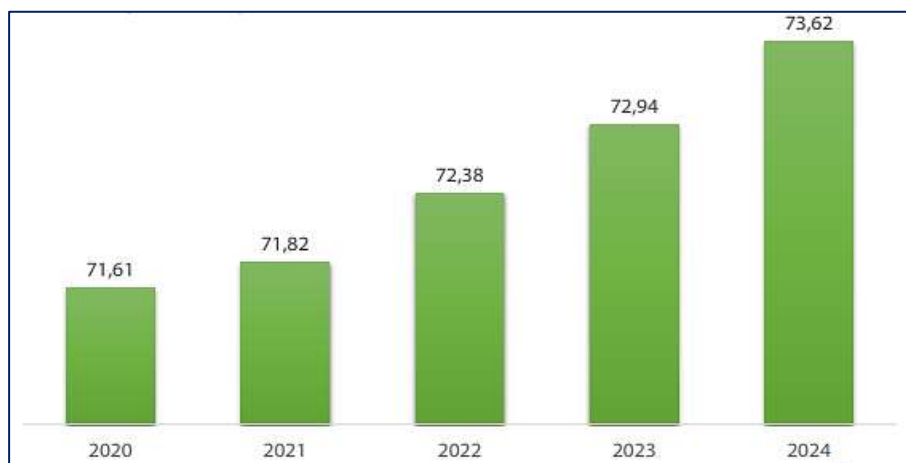
Sumber BPS Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2025 :
Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2024, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,10 persen yang berarti masuk pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini naik dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 18,06 persen dan Maret 2023 yang sebesar 18,04 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 17,42 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 19,36 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024 di Sulawesi Tenggara terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Sulawesi Tenggara sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020- 2024, IPM Sulawesi Tenggara rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun, dari 71,61 pada tahun 2020 menjadi 73,62 pada tahun 2024.

Gambar 2.22. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara, 2020-2024



Sumber BPS Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2025

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak yang mengalami percepatan pertumbuhan yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 4,83 persen dibanding tahun sebelumnya 4,21 persen. Adapun Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya relatif tetap yaitu 0,13 persen dan 0,07 persen. Sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya lebih cepat dari 0,65 persen menjadi 1,18 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020-2024

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	71,56	71,61	71,70	71,79	71,88
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,65	13,68	13,69	13,70	13,71
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,04	9,13	9,25	9,31	9,42
Standar Hidup Layak						

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Pengeluaran per Kapita (yang disesuaikan)	Rp.000	9.331	9.381	9.708	10.117	10.606

Sumber BPS Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2024

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Sulawesi Tenggara rata-rata meningkat 0,11 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,04 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun (0,07 persen) dibandingkan tahun 2023, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2023 (0,12 persen). Sementara itu, RLS pada tahun 2024 meningkat 0,11 tahun (1,18 persen) dibandingkan tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2023 (0,99 persen).

Seiring dengan meningkatnya IPM Provinsi Sulawesi Tenggara, seluruh kabupaten/kota juga mengalami peningkatan IPM. Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan IPM terbesar adalah Kabupaten Muna Barat (1,38 persen), Kabupaten Buton Utara (1,29 persen), dan Kabupaten Buton Selatan (1,27 persen). Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami peningkatan IPM terkecil adalah Kota Kendari (0,54 persen), Kabupaten Kolaka (0,62 persen), dan Kota Baubau (0,77 persen). Dari sisi perbandingan antar kabupaten/kota, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah ditempati oleh Kabupaten Buton Tengah (67,58), sedangkan urutan teratas ditempati oleh Kota Kendari (85,97) yang menjadikan Kota Kendari sebagai satu-satunya wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$). Sejak 2024 jumlah kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq IPM$).

Tabel 2.28. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2022-2024

No.	Provinsi/ Kab/Kota	Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Buton	7.594	7.995	8.401	68,05	68,96	69,72
2.	Muna	8.328	8.703	9.107	70,09	70,62	71,50
3.	Konawe	10.552	10.963	11.415	73,14	73,88	74,50
4.	Kolaka	12.639	13.055	13.534	74,98	75,73	76,20
5.	Konawe Selatan	9.347	9.753	10.250	69,67	70,64	71,51
6.	Bombana	8.680	9.132	9.692	67,49	68,12	68,85
7.	Wakatobi	9.758	10.240	10.739	70,88	71,45	72,03
8.	Kolaka Utara	10.721	11.020	11.650	70,47	71,11	71,75
9.	Buton Utara	7.935	8.289	8.746	69,17	69,85	70,75
10.	Konawe Utara	9.666	10.113	10.658	71,52	72,11	72,71
11.	Kolaka Timur	8.155	8.520	9.012	68,77	69,61	70,32
12.	Konawe Kepulauan	7.192	7.564	7.996	67,49	68,11	68,77
13.	Muna Barat	7.668	8.076	8.458	66,53	67,44	68,37
14.	Buton Tengah	7.670	8.003	8.434	66,41	66,94	67,58
15.	Buton Selatan	7.476	7.936	8.386	66,47	67,19	68,04
16.	Kendari	14.765	15.116	15.651	85,19	85,51	85,97
17.	Baubau	10.835	11.207	11.755	78,15	79,00	79,61

No.	Provinsi/ Kab/Kota	Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
18.	Sulawesi Tenggara	9.708	10.117	10.606	72,38	72,94	73,62

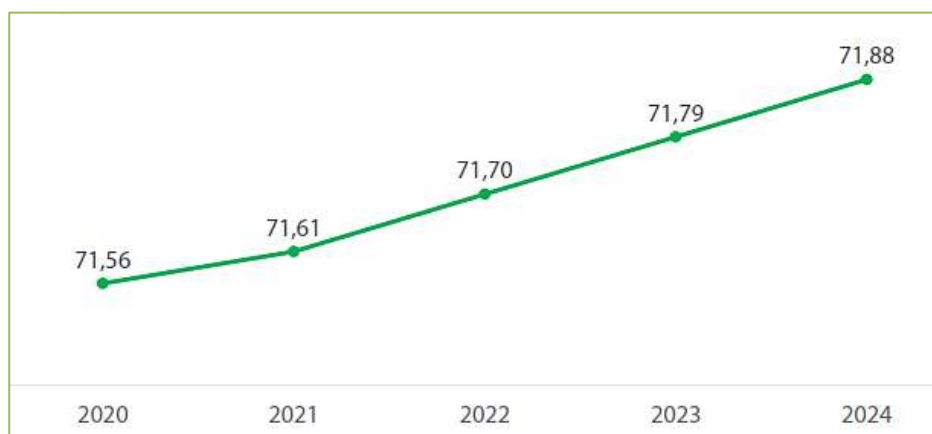
Sumber BPS Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2024

2. Kesehatan Untuk Semua

Umur Harapan Hidup. Derajat Kesehatan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dengan Fokus Kesejahteraan Sosial. Salah satu komponen pembentuk Indikator Derajat Kesehatan adalah Umur Harapan Hidup (UHH) pada saat lahir (life expectancy at birth). Umur Harapan Hidup (UHH) pada saat lahir (life expectancy at birth) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Umur Harapan Hidup (UHH) adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun peningkatan tersebut belum menunjukkan angka yang cukup signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi Umur Harapan Hidup (UHH) diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, Umur Harapan Hidup di Sulawesi Tenggara telah meningkat sebesar 0,32 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,11 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup (UHH) Sulawesi Tenggara adalah 71,56 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 71,88 tahun. Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2024 meningkat 0,09 tahun (0,13 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2023 (0,11 persen). Dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 2. 23. Grafik Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Sulawesi Tenggara (tahun), 2020–2024

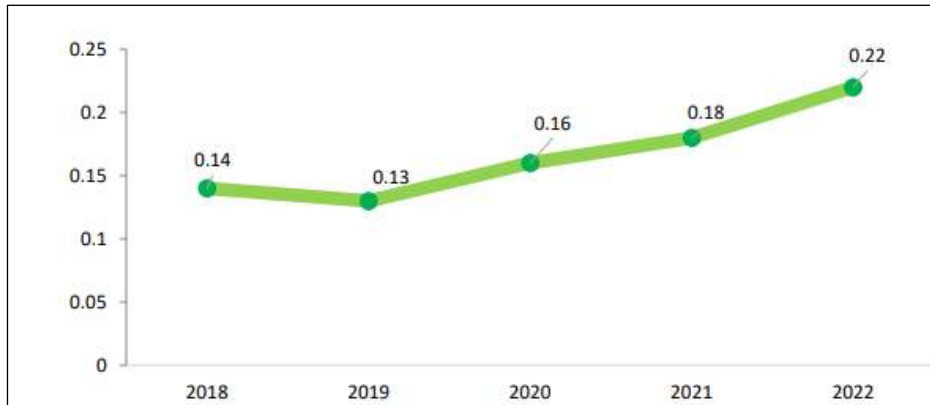


Sumber BPS Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2024

Indeks Keluarga Sehat merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang

mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Berikut merupakan capaian indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2018-2022:

Gambar 2.24. Capaian Indeks Keluarga Sehat, Tahun 2018-2023



Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat 2023

Data di atas menunjukkan trend kenaikan Indeks Keluarga Sehat dari tahun 2019 s.d 2022, mengalami peningkatan tiap tahun meski tidak terlalu signifikan, dari 0,13 sampai 0,22 pada tahun 2022, hal ini menunjukkan dampak positif dari hasil kinerja puskesmas dalam melakukan kegiatan intervensi dilapangan dengan pendekatan keluarga atau kunjungan rumah melalui kegiatan penyuluhan, konseling edukasi, pembinaan dan pemantauan. Dari Tahun 2017 Indeks Keluarga Sehat Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada urutan ke-26 yakni hanya sebesar 0,12 dan tahun 2022 naik di posisi 13, dengan IKS sebesar 0,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan intervensi oleh Puskesmas melalui kunjungan rumah berdampak positif terhadap perubahan cakupan indikator Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

Prevalensi Stunting. Prevalensi balita stunting di Sulawesi Tenggara tahun 2023 tercatat masih cukup tinggi dan bahkan menjadi salah satu kontributor terbesar kasus stunting di tingkat nasional. Perkembangan kasus Stunting di Sulawesi Tenggara, hasil SSGI tahun 2022 menunjuk angka prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara sebesar 27,7 persen atau turun 2,4 persen jika dibandingkan hasil SSGI tahun 2021 yang tercatat sebesar 30,1 persn, namun hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mencatat prevalensi stunting Sulawesi Tenggara kembali naik menjadi 30 persen. merujuk pada sumber data lainnya yakni E-PPGBM yang dirilis oleh dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat prevalensi satunting Sulawesi Tenggara di tahun 2023 sebesar 10,2 persen. Terdapat Gab yang cukup besar, tapi Sebagai informasi bahwa ada perbedaan metodologi perolehan kedua data tersebut, dimana data SSGI dan SKI merupakan data yang diperoleh dari hasil survey, sedangkan E-PPGBM merupakan data yang diperoleh berdasarkan *by name by address*.

Sementara itu Prevalensi balita dengan underweight di Sulawesi Tenggara sebesar 23,9 persen, wasting sebesar 12,1 persen, dan overweight sebesar 4,3 persen. Beberapa faktor yang menjadi penyebab gizi buruk yang berdampak pada kasus stunting antara lain masalah ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Faktor ekonomi terutama kemiskinan menjadi salah satu determinan yang menjadi akar penyebab ketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan dan tidak sehat, serta ketidakmampuan mengakses fasilitas Kesehatan mudah dan gratis.

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan indikator krusial dalam menilai status kesehatan dan gizi anak-anak di wilayah tersebut. Stunting mengacu pada kondisi di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya, yang merupakan hasil dari kekurangan gizi kronis. Stunting, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak, serta meningkatkan risiko penyakit dan kematian. Di Sulawesi Tenggara, prevalensi stunting masih menjadi tantangan besar dan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi terkait untuk mengatasi masalah ini melalui program intervensi gizi, edukasi tentang pemberian makan yang baik, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan sumber daya pangan yang memadai. Proyeksi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan ditunjukkan pada Tabel.

Tabel. 2.29. Proyeksi Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan

Indikator TPB	Jenis Proyeksi	Tahun Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	BAU	27,15	26,97	26,78	26,60	26,43
	UP 7,5%	21,45	19,70	18,09	16,61	15,25

Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan Tabel 2.30 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita mengalami tren penurunan dan diproyeksi pada tahun 2029 mencapai 26,43 tahun. Namun demikian proyeksi capaian ini belum mencapai target nasional sebesar 16,4%. Penurunan angka capaian indikator ini dapat dimaksimalkan dengan Upaya tambahan sebesar 7,5% sehingga pada tahun 2029 dapat mencapai 15,25% serta dapat mencapai target nasional. Tren Proyeksi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 2.25. Tren Proyeksi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan



Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Hasil Analisis, 2024

Selanjutnya Gambaran mengenai Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta di Sulawesi Tenggara tidak jauh berbeda dengan stunting pada umur lima tahun. Penyebab utamanya adalah kekurangan gizi kronis, dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak, serta meningkatkan risiko penyakit dan kematian. Hasil survey yang dilakukan menunjukkan masih tingginya angka Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta dan angka penurunannya belum mencapai target nasional. Proyeksi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.30. Proyeksi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan

Indikator TPB	Jenis Proyeksi	Tahun Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	BAU	28,03	28,57	29,11	29,66	30,23
	UP 7,5%	20,65	19,49	18,40	17,37	16,4

Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan Tabel di atas Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta mengalami tren penurunan dan diproyeksi pada tahun 2029 mencapai 30,23% dan jauh dari target. Dengan Upaya tambahan indicator ini dapat mencapai target nasional pada tahun 2029 dengan capaian 16,4%. Tren Proyeksi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan ditunjukkan pada Gambar berikut:

Gambar 2.26. Tren Proyeksi Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan data BAU dan Upaya Tambahan



Sumber: Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Hasil Analisis, 2024

3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

Pemerintah terus meningkatkan kualitas pendidikan antara lain dengan mengembangkan akses pendidikan anak usia dini, meningkatkan kesempatan dan infrastruktur pendidikan, mengevaluasi dan menyempurnakan kurikulum, serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru. Dengan berkembangnya pendidikan yang berkualitas, masyarakat memiliki daya saing yang baik dan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga kualitas hidupnya lebih baik dari generasi sebelumnya. Perkembangan pembangunan bidang pendidikan dipantau secara berkesinambungan berdasarkan data dan indikator. Indikator pendidikan menggambarkan kondisi dan perkembangan pendidikan secara tepat antara lain, **Rata-Rata Lama Sekolah (HLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)**.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk Harapan Lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan apritas daya beli (*purchasing power parity*).

Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Sulawesi Tenggara rata-rata meningkat 0,11 persen pertahun, sementara RLS meningkat 1,04 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun (0,07 persen) dibandingkan tahun 2023, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2023 (0,12 persen). Sementara itu, RLS pada tahun 2024 meningkat 0,11 tahun (1,18 persen) dibandingkan tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2023 (0,99 persen).

Gambar 2.27. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Sulawesi Tenggara (tahun), 2020–2024



Sumber BPS Prov. Sultra Berita Resmi Statistik 2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat didefinisikan sebagai sebuah angka yang mencerminkan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina mengembangkan perpustakaan, yang ditunjukkan oleh rata-rata hasil pembagian antara Unsur dan Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dengan Aspek Masyarakat (AM) dibandingkan dengan masing-masing standar UPLMnya. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilakukan dengan menggunakan tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu (1) pemerataan layanan perpustakaan; (2) ketercukupan koleksi; (3) ketercukupan tenaga perpustakaan; (4) tingkat kunjungan masyarakat per hari; (5) jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP; (6) keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi; dan (7) anggota perpustakaan. Ketujuh unsur ini akan diturunkan dalam definisi operasional sebagai berikut.

1. Pemerataan layanan perpustakaan adalah upaya untuk menyediakan akses yang adil, merata, dan inklusif terhadap layanan perpustakaan bagi seluruh anggota masyarakat yang ditunjukkan oleh jumlah kelembagaan perpustakaan yang ada di Indonesia
2. Ketercukupan koleksi perpustakaan kondisi di mana sebuah perpustakaan memiliki jumlah koleksi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik koleksi cetak maupun digital
3. Ketercukupan SDM/Tenaga perpustakaan tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan di perpustakaan. Mereka adalah individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus dalam bidang perpustakaan dan informasi, serta memiliki peran penting dalam memastikan operasional perpustakaan yang efektif dan berkualitas

4. Kunjungan perpustakaan per hari individu atau kelompok yang menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mengakses sumber daya informasi dan layanan yang disediakan. Adapun pengguna perpustakaan meliputi; siswa, mahasiswa, akademisi, peneliti, profesional, masyarakat umum, dan kelompok khusus seperti anak-anak, remaja, atau lanjut usia. Kunjungan perpustakaan per hari merujuk pada rata-rata harian banyaknya pengunjung yang memanfaatkan perpustakaan baik secara onsite maupun online
5. Perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan adalah perpustakaan yang telah dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik yang telah terakreditasi atau tidak.
6. Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi di bidang perpustakaan adalah merujuk pada partisipasi dan interaksi aktif masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan oleh perpustakaan guna mempromosikan dan meningkatkan pemahaman serta apresiasi terhadap peran perpustakaan. Program tersebut meliputi kegiatan perpustakaan yang melibatkan masyarakat baik secara luring maupun daring.
7. Jumlah Anggota perpustakaan adalah mengacu pada jumlah individu yang menjadi anggota perpustakaan di berbagai perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Anggota perpustakaan adalah individu yang telah mendaftar dan memiliki akses ke layanan perpustakaan, termasuk meminjam buku, mengakses sumber informasi, atau berpartisipasi Definisi Operasional Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat dalam kegiatan perpustakaan lainnya.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah alat yang penting untuk mengevaluasi dan mendorong peningkatan literasi masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, IPLM tidak hanya mengukur kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga literasi digital, sosial, dan budaya. Keberhasilan pengembangan literasi masyarakat membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Melalui implementasi IPLM yang efektif, Provinsi Sulawesi Tenggara dapat mempercepat langkah menuju daerah yang lebih maju dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Pembangunan Literasi Masyarakat di Sulawesi Tenggara melibatkan berbagai pihak termasuk Pemerintah, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Perpustakaan dengan tujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi. Pembangunan ini didukung oleh kegiatan-kegiatan seperti sayembara penulisan cerita anak, pembangunan perpustakaan modern, dan kerjasama dengan sekolah/ perguruan tinggi. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan persentase meningkat dari tahun 2019-2024 di sajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.31. Indeks Pembangunan Literasi Provinsi Sulawesi Tenggara 2019-2024

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	51,81	10,91	13,93	69,93	67,53	72,31

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov Sultra

Indeks Literasi Digital (ILDID) adalah indikator yang mengukur tingkat kemampuan individu dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara bijak, dalam artian:

- 1) Kecakapan Digital (Digital Skill): Kemampuan individu dalam menggunakan perangkat digital, mengakses, mengolah, dan mengomunikasikan informasi, serta menyelesaikan masalah dengan menggunakan TIK.
- 2) Etika Digital (*Digital Ethics*): Kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan menerapkan etika digital dalam beraktivitas di internet, seperti memahami netiket, privasi, dan keamanan digital.
- 3) Keamanan Digital (Digital Safety): Kemampuan individu dalam menjaga keamanan diri dan perangkat digital dari berbagai ancaman, seperti penipuan online, malware, dan *cyberbullying*.
- 4) Budaya Digital (*Digital Culture*): Kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan mengembangkan budaya digital yang positif dan bertanggung jawab dalam beraktivitas di internet.

Pemerintah melalui Kemenkominfo membuat program untuk peningkatan kompetensi digital, yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital. Target program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan digital masyarakat. Diperlukan pemahaman dan pemetaan tentang kompetensi digital masyarakat supaya program berlangsung sesuai tepat sasaran. Pemetaan kompetensi digital masyarakat di Indonesia dilakukan dengan mengadakan survei status literasi digital dan mengukurnya menjadi Indeks Literasi Digital Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Survei Status Literasi Digital di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Katadata Insight Center (KIC) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), Indeks Literasi Digital di Indonesia tahun 2022 berada pada level 3,54 dari angka maksimum 5,00, adapun Indeks Literasi Digital Sulawesi Tenggara ialah 3,57. Skor tersebut termasuk dalam kategori sedang. Indeks tersebut diukur mengacu pada 4 pilar, yaitu pilar Kecakapan digital (digital skill), Etika digital (digital ethics), Keamanan digital (digital safety), dan Budaya digital (digital culture). Skor Pilar Digital Skill sebesar 3,45, Skor Pilar Digital Ethics 3,79, skor Pilar Digital Safety 3,19, dan skor Pilar Digital Culture 3,84. Keempat skor pilar tersebut berkategori sedang, artinya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara pada keempat aspek tersebut berada pada level sedang.

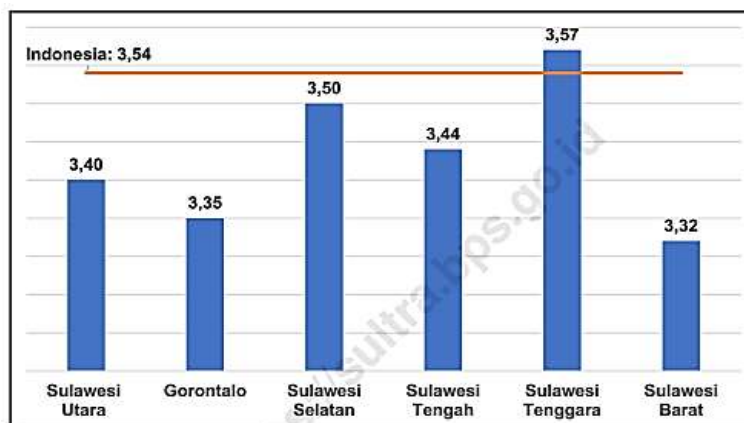
Tabel 2.32. Indeks Literasi Digital Provinsi Sulawesi Tenggara

Indeks Literasi Digital Provinsi Sulawesi Tenggara	2019	2020	2021	2022	2023
	-NA-	-NA-	3,43	3,57	-NA-

Sumber: <https://survei.literasidigital.id/indeks-literasi-digital-provinsi> Kementerian Kominfo

Jika dilihat menurut provinsi di Pulau Sulawesi, skor Indeks Literasi Digital berada pada kisaran 3,32 sampai dengan 3,57 (dari skala 1-5). Artinya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi digital di seluruh provinsi di Pulau Sulawesi berkategori sedang. Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Indeks Literasi Digital tertinggi dengan skor 3,57 dari 6 provinsi di Pulau Sulawesi. Sebaliknya Provinsi Sulawesi Barat memiliki skor terendah, yaitu 3,32.

Gambar 2.28. Indeks Literasi Digital Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022



Sumber: Publikasi Status Literasi Digital di Indonesia, 2022

Untuk mewujudkan transformasi digital sebagai salah satu pilar utamanya, diperlukan acuan yang dapat mengidentifikasi kondisi masyarakat digital di Indonesia saat ini. Salah satu acuan tersebut adalah pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Berpedoman pada G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang dihasilkan selama Presidensi G20, IMDI dirancang untuk mengukur kondisi masyarakat digital di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan SDM digital yang komprehensif dan tepat sasaran.

Pengukuran IMDI yang secara rutin dilakukan sejak tahun 2022, memiliki peran penting dalam memantau perkembangan kompetensi digital masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan upaya mempercepat transformasi digital Indonesia yang digambarkan melalui empat pilar utama IMDI yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Tanpa percepatan dan penguatan SDM maupun infrastruktur digital yang didukung pemerintah dan seluruh stakeholders, kesenjangan digital berpotensi semakin melebar, baik dari segi akses, literasi, keterampilan digital, maupun pemanfaatan teknologi internet. Pengukuran IMDI menjadi langkah strategis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai posisi serta perkembangan masyarakat digital Indonesia saat ini dan di masa depan.

Pada Tahun 2024 IMDI secara Nasional berada pada 43,34. Berdasarkan pilar-pilar pembentuknya, pilar keterampilan digital merupakan pilar dengan nilai tertinggi, yaitu 58,25 Sedangkan pilar dengan nilai terendah diperoleh oleh pilar pemberdayaan, dengan nilai 25,66. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat digital Indonesia sudah cukup terampil dalam penggunaan perangkat digital secara umum, namun belum optimal dalam pemanfaatannya ke arah yang produktif secara ekonomi. Sedangkan Untuk Wilayah Provinsi, khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024 berada pada 43,44 dengan nilai pilar tertinggi adalah Pilar Keterampilan Digital 60,14 dan nilai pilar terendah adalah Pilar Pemberdayaan 26,21. Terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.29. Nilai Indeks Manusia Digital dan Nilai Pilar Indeks Manusia Digital Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024



Sumber: Kementerian Komunikasi Dan Digital 2024

4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Sulawesi Tenggara memiliki dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang. Berdasarkan data BPS Sulawesi Tenggara, angkatan kerja di provinsi ini menunjukkan peningkatan dimana tahun 2024 mencapai 1.476.461 jiwa naik sebesar 80.027 jiwa dari tahun 2023. Sektor pertanian masih menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Sultra, meskipun sektor lain seperti pertambangan juga memiliki peran signifikan. Dengan berbagai dinamika yang terjadi pemerintah harus hadir memberikan perlindungan sosial dan layanan bagi pekerja serta keluarga mereka dari berbagai risiko sosial ekonomi yang terkait dengan pekerjaan. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara adalah bagian integral dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara tahun 2024 mencapai angka 38,17 persen atau sejumlah 313.4199 peserta. Berdasarkan status pekerjaan, pekerja formal yang terdaftar sebanyak 219.213 jiwa dan pekerja informal sebanyak 94.206 jiwa. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara masih jauh dari Universal Coverage Jamsostek (UCJ) dan masih kategori rendah dari jumlah pekerja yang terdaftar. Cakupan kepesertaan Jamsostek diharapkan dapat mencakup minimal 80 persen dari total jumlah pekerja untuk mendapatkan kategori UCJ tinggi.

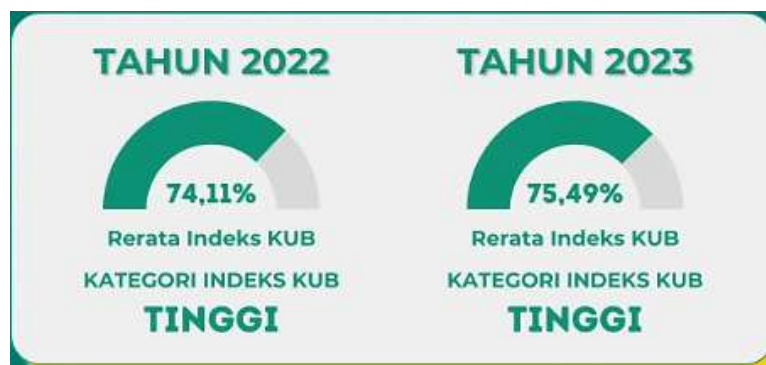
5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Dimensi toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, dan menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas Sehingga sebuah kerukunan umat beragama akan terbentuk di dalam sebuah masyarakat tergantung dari tingkat toleransi, kerja sama, saling menghormati, saling percaya, dan kemampuan dalam menyelesaikan sebuah konflik dalam sebuah komunitas masyarakat. Dari definisi

konseptual di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga elemen pokok tentang konsep kerukunan antar umat beragama yaitu adanya toleransi, adanya kesetaraan dan kerjasama antar pemeluk umat beragama.

Sehubungan dengan itu Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama secara rutin melakukan survei Indeks KUB. dalam tiga tahun terakhir, Indeks IKUB di Indonesia secara nasional menunjukkan tren positif. Indeks KUB 2022 sebesar, 73,09. Sementara dua tahun berikutnya, indeks KUB sebesar 76,02 pada 2023, ini menggambarkan bahwa sikap toleransi antarumat beragama di Indonesia cenderung membaik. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan ini adalah berbagai upaya Kementerian Agama dalam menyosialisasikan dan menginternalisasikan penguatan moderasi beragama melalui berbagai program dan kegiatan, meski indeks menunjukkan tren positif, namun tantangan dalam menjaga kerukunan beragama masih ada beberapa kasus intoleransi dan sikap umat beragama yang belum menunjukkan sikap moderat masih terjadi di berbagai wilayah. Sejalan dengan itu, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Moderasi Beragama yang mengamanatkan pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber). Pembentukan Sekber ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi penyelenggaraan penguatan moderasi beragama di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Gambar 2.30. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tenggara 2023 -2024



Sumber: kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara

Indeks kerukunan umat beragama (KUB) di provinsi Sulawesi Tenggara terus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data yang dihimpun pihak Kemenag, kerukunan umat beragama dengan keberagaman suku dan budaya serta agama yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara, pada 2022 lalu indeksnya berada pada posisi 74 persen, sedangkan 2023 menempati posisi 75 persen.

Kehidupan kerukunan umat beragama di Sulawesi Tenggara dengan pendekatan tiga indikator yaitu toleransi, Kerjasama dan kesetaraan ini cukup baik dan memiliki kategori tinggi secara nasional dan bahkan rata-rata nasional juga masuk dalam kategori yang tinggi dan masuk 10 besar se-Indonesia salah satu barometer yang dikategorikan dalam kerukunan umat di Sulawesi Tenggara yakni terdapat kampung KUB yang berada di Kabupaten Muna tepatnya di Desa Waleale Kecamatan Tongkuno Selatan dihuni dua penganut agama dalam satu etnis dan di Kota Kendari terdapat dua rumah ibadah yang diantarai satu tembok. ini menggambarkan bahwa sikap toleransi antarumat beragama di Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung membaik.

Disisi lain berkaitan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan kebudayaan di Indonesia. IPK memberikan gambaran tentang bagaimana kebudayaan dikelola,

dilestarikan, dan dikembangkan dalam suatu masyarakat. Pengukuran ini penting untuk melihat kontribusi kebudayaan dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2023, hampir seluruh dimensi IPK Nasional mengalami peningkatan. Hal ini melanjutkan tren positif dari tahun 2022 dimana terjadi rebound skor IPK Nasional setelah mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut akibat Pandemi Covid-19. Peningkatan skor tertinggi terjadi pada Dimensi Ekspresi Budaya dengan kenaikan 3,41 poin. Sementara itu, satunya dimensi yang mengalami penurunan skor adalah Dimensi Gender yang turun 0,59 poin.

Provinsi Sulawesi Tenggara Pada tahun 2023, skor **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)** mencapai 55,10, mengalami pertumbuhan sebesar 4,01% dari 52,98 pada tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan yang terjadi pada seluruh dimensi. Dimensi dengan capaian tertinggi adalah Dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan skor 75,50, sedangkan dimensi dengan capaian terendah adalah Dimensi Ekonomi Budaya dengan skor 17,83. Capaian IPK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 menempati peringkat 26 dari 34 provinsi, turun tiga peringkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Selain itu, Sulawesi Tenggara juga menempati Cluster 2, dimana merupakan kelompok provinsi dengan faktor core positif dan faktor support negatif.

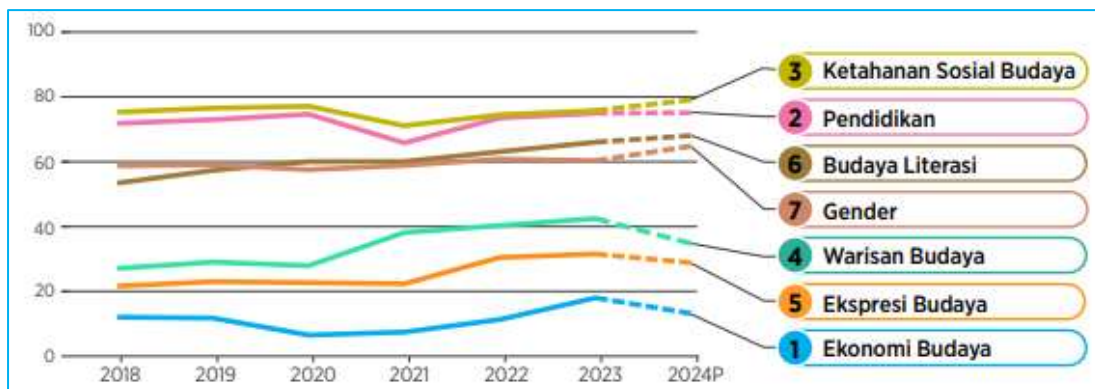
Gambar 2.31. Pertumbuhan IPK Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023, Proyeksi 2024, dan Target 2045



Sumber Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

IPK Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 diproyeksikan sebesar 53,55 poin. Berdasarkan baseline tahun 2018, sampai tahun 2023 IPK Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mencapai 126,3% dari proyeksi tahun 2024. Artinya, capaian IPK Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 sudah melampaui proyeksi tahun 2024. Pada tahun 2045 Indonesia Emas, IPK Nasional ditargetkan sebesar 68,15 poin. Tercapainya target tersebut harus didukung oleh pertumbuhan seluruh provinsi termasuk Sulawesi Tenggara dengan target sebesar 64,96 poin. Target tersebut dapat tercapai jika skor IPK Sulawesi Tenggara tahun 2045 tumbuh sebesar 17,88% dari tahun 2023. Diperlukan peningkatan akses dan pendidikan budaya, pengembangan infrastruktur budaya, serta kolaborasi antar lembaga.

Gambar 2.32. Pergerakan Dimensi Pembentuk IPK Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 dan Proyeksi 2024



Sumber Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Pada Dimensi Pendidikan IPK Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan 2,01%, dari 73,25 menjadi 74,72. Indikator Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian, mengalami kenaikan skor dari 36,58 di tahun 2022 menjadi 41,13 di tahun 2023. Salah satu faktor peningkatan ini adalah upaya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) Kendari dalam menerapkan Bahasa Tolaki sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok). Beberapa sekolah di Kendari sudah memiliki tenaga pengajar yang bersertifikat mulok. Namun, bagi sekolah yang belum memiliki tenaga pengajar tersebut, mereka dapat memanfaatkan guru-guru dari Suku Tolaki untuk mengajar.

Selanjutnya pada Dimensi Budaya Literasi IPK Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan sebesar 4,69%, dari 62,84 menjadi 65,78. Indikator Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir, meningkat dari 7,98 di tahun 2022 menjadi 8,50 di tahun 2023. Peningkatan ini salah satunya merupakan dampak dari adanya Perpustakaan Modern, sebuah perpustakaan terbesar dan bertaraf internasional di Provinsi Sulawesi Tenggara

Sedangkan untuk Dimensi Ekonomi Budaya IPK Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan 59,90%, dari 11,15 menjadi 17,83. Indikator Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan tumbuh 63,64%, dari 0,11 di tahun 2022 menjadi 0,18 di tahun 2023. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melantik Ketua dan Kepengurusan Komite Seni dan Budaya Nusantara (KSNB) Sulawesi Tenggara. Jika banyak kegiatan seni yang diselenggarakan, hal ini juga akan berpengaruh kepada penghasilan para pelaku seni di Provinsi Sulawesi Tenggara.

6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan inklusi sosial adalah konsep-konsep penting yang saling terkait dan berperan dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarga, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Kesetaraan gender adalah pemahaman bahwa setiap orang, terlepas dari

jenis kelaminnya, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Inklusi sosial adalah upaya untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat, termasuk kelompok yang seringkali terpinggirkan, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan layanan publik. Terkait dengan itu dapat digambarkan dengan beberapa aspek sebagai berikut.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mengetahui gambaran capaian perlindungan anak di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota digunakan Indeks Perlindungan Anak (IPA). Indeks Perlindungan Anak (IPA) disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak Hak Anak (KHA) dengan mengaplikasikan empat klaster pemenuhan hak anak (Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) dan satu klaster perlindungan khusus anak (Klaster V : Perlindungan Khusus) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak. Capaian Indeks Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.33. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	51,05	53,56	56,31	54,52	55,31	55,66

Sumber : BPS, Indeks Kualitas Keluarga 2018 – 2023 (dipublish oleh Kementerian PPPA)

Selanjutnya disisi lain **Indeks Kualitas Keluarga** telah ditetapkan sebagai tolok ukur untuk meningkatkan kualitas keluarga di suatu wilayah dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. IKK memiliki rentang nilai indeks antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: 1) IKK yang “kurang responsif gender dan hak anak” apabila nilai kurang atau di bawah 50; 2) IKK yang “cukup responsif gender dan hak anak” apabila nilai antara 50-75; dan 3) IKK yang “responsif gender dan hak anak” apabila nilai di atas 75.

Nilai IKK Nasional Tahun 2023 meningkat dibandingkan nilai Tahun 2022 dan sudah berada di atas 75 artinya kualitas keluarga di Indonesia sudah pada tahap responsif gender dan hak anak. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) terdiri dari lima dimensi. Kelima dimensi tersebut meliputi: (1) Kualitas Legalitas-Struktur/KLS; (2) Kualitas Ketahanan Fisik/KKF; (3) Kualitas Ketahanan Ekonomi/KKE; (4) Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi/KKSP; dan (5) Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya/KKSB. Pada tahun 2023, hanya Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik yang mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dimensi dengan capaian tertinggi adalah Dimensi Kualitas Legalitas Struktur sedangkan dimensi dengan capaian terendah adalah Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa, nilai IKK Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan metadana lama tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,01 poin, atau dari 75,41 persen (2022) menjadi 77,42 persen (2023). Sedangkan pada metadana baru mengalami kenaikan sebesar 1,73 poin atau dari 75,95 persen (2022) menjadi 77,68 persen (2023). Nilai IKK Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 baik menggunakan metadana lama maupun metadana baru, memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IKK level nasional. Berdasarkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022, nilai IKK Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 menunjukkan kualitas keluarga dengan kategori ‘Responsif Gender dan Hak Anak’.

Dimensi penyusun IKK terdiri dari lima (5) dimensi. Pada tahun 2023, dari lima dimensi penyusun IKK Provinsi Sulawesi Tenggara baik menggunakan metadana lama maupun metadana baru terdapat satu dimensi yang mengalami penurunan, yaitu dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) dengan penurunan sebesar 0,43 poin pada metadana lama dan sebesar 0,58 poin pada metadana baru. Sedangkan dimensi yang mengalami kenaikan ada empat, dimensi yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) dengan kenaikan sebesar 2,99 poin dengan menggunakan metadana lama dan naik 3,21 poin dengan menggunakan metadana baru. Berikut tabel indeks kualitas keluarga Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan metadana lama dan metadana baru.

Tabel 2.34. Indeks Kualitas Keluarga Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara

Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Matadana Lama		Metadana Baru	
	2022	2023	2022	2023
Nasional	76,08	77,00	76,73	77,64
Sulawesi Tenggara	75,41	77,42	75,95	77,68

Sumber : Kementerian PPPA (edisi 2024) diolah

Selanjutnya pada **Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sulawesi Tenggara** Tahun 2024 adalah 0,460 turun sebanyak 0,031 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,491. Penurunan IKG Sulawesi Tenggara 2024 dipengaruhi oleh perbaikan sebagian indikator pada ketiga dimensinya, khususnya dimensi pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Keterlibatan perempuan di legislatif meningkat 8,89 persen dibandingkan tahun 2023 (20,00 persen) menjadi 28,89 persen. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 55,64 persen pada 2023 menjadi 60,30 persen pada 2024, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki hanya meningkat dari 84,15 persen pada 2023 menjadi 85,03 persen pada 2024.

Selama enam tahun terakhir, IKG Sulawesi Tenggara secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kecuali pada 2023 yang meningkat sangat kecil hanya 0,001 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan. Sejak 2018, IKG Sulawesi Tenggara mengalami penurunan sebesar 0,019 poin per tahun sehingga totalnya mencapai 0,115 poin selama lima tahun terakhir.

Gambar 2. 33. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sulawesi Tenggara, 2018–2024



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2025

Selanjutnya **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dengan diskripsi capaian terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan dengan kriteria yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPG digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiakan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. IPG Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2018 s.d 2024 mengalami perkembangan meningkat dari 90,24 pada tahun 2018 menjadi 91,53 pada tahun 2024. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG dan menunjukkan bahwa pembangunan manusia berbasis gender di Sulawesi Tenggara mengalami perkembangan yang positif.

Tabel 2.35. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2018 – 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Buton	78,39	79,01	79,82	80,18	80,69	81,46	82,07	82,07
2	Muna	87,34	87,08	87,51	87,59	87,76	87,95	88,13	88,37
3	Konawe	93,12	92,91	92,61	92,65	93,18	93,53	93,76	93,83
4	Kolaka	89,77	89,59	89,87	89,78	90,01	90,23	90,25	90,77
5	Konawe Selatan	87,26	87,30	87,45	87,73	88,03	88,37	88,70	88,57
6	Bombana	83,71	84,02	84,77	84,67	84,91	85,77	85,92	86,08
7	Wakatobi	88,23	88,39	88,60	88,39	88,99	89,05	89,32	89,59
8	Kolaka Utara	97,55	97,84	97,32	97,24	97,79	98,38	98,48	98,64
9	Konawe Utara	85,44	85,58	85,69	86,17	86,66	87,04	87,24	87,33
10	Buton Utara	91,94	91,83	91,85	92,02	91,99	92,82	92,58	92,46
11	Kolaka Timur	98,15	98,16	98,63	98,37	99,07	99,29	99,30	99,31
12	Konawe Kepulauan	83,71	83,76	84,43	85,00	85,05	86,10	86,28	86,41
13	Muna Barat	88,13	88,05	88,82	88,65	88,91	89,35	89,59	89,70
14	Buton Tengah	78,57	79,29	80,15	80,57	81,48	83,01	83,32	83,79
15	Buton Selatan	72,21	72,49	72,28	72,25	72,56	73,43	74,22	74,51
16	Kota Kendari	94,57	94,66	94,75	94,61	94,84	94,92	94,98	95,84
17	Kota Bau-Bau	90,64	90,65	90,65	90,27	90,45	90,94	91,24	92,11
18	SULAWESI TENGGARA	90,24	90,24	90,56	90,50	90,68	91,04	91,20	91,53

Sumber : BPS Prov. Sultra, 2024.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Kelima domain tersebut adalah (i) domain pendidikan, (ii) domain kesehatan dan kesejahteraan, (iii) domain lapangan dan kesempatan kerja, (iv) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) domain gender dan diskriminasi.

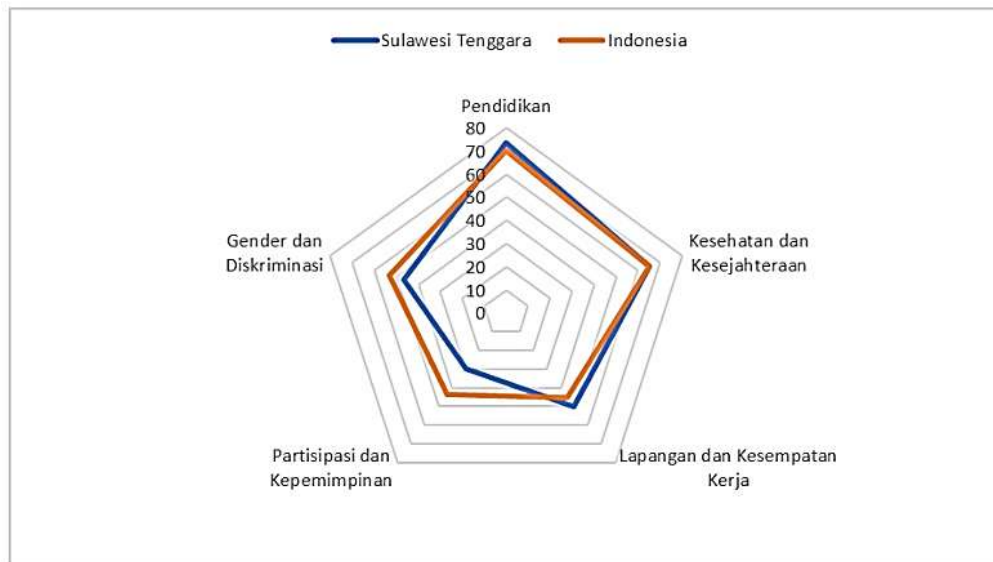
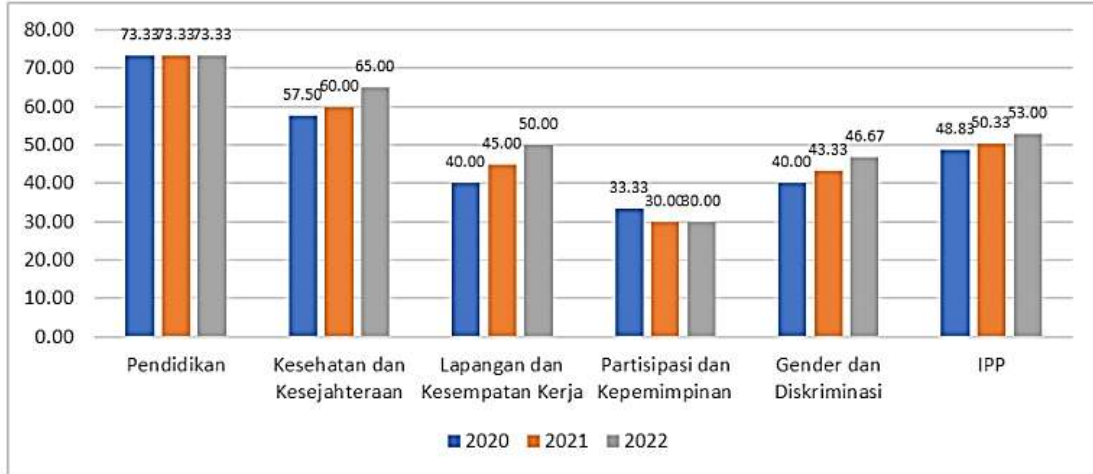
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2022 mengalami peningkatan dibandingkan IPP tahun 2020 (51,00) dan tahun 2021 (53,33). Peningkatan IPP dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut mencapai dua poin. IPP Provinsi Sulawesi Tenggara terus naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPP Sulawesi Tenggara naik dari 48,83 lalu naik 50,33 pada tahun 2021 dan naik menjadi 53,00 pada tahun 2022. Kenaikan IPP ini masih berada di bawah capaian IPP Nasional.

Kenaikan IPP Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 didorong oleh hasil capaian masing-masing IPP yang mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Tidak ada domain yang mengalami penurunan. Domain Pendidikan dan domain Partisipasi dan Kepemimpinan mendapatkan hasil yang sama dengan capaian tahun 2021. Adapun domain Kesehatan dan Kesejahteraan, domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, serta domain Gender dan Diskriminasi mengalami peningkatan.

Terdapat dua domain yang menjadi penilaian IPP berada pada angka di bawah capaian Nasional. Domain tersebut adalah domain Partisipasi dan Kepemimpinan yang mendapatkan angka 30,00. Capaian tahun 2022 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Berikut Perbandingan IPP dan nilai indeks

domain Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020, 2021 dan 2022 dan Perbandingan antara nilai indeks domain Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional pada 2022

Gambar 2. 34. Grafik. Capaian Pembangunan Pemuda Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2022



Sumber. Kemenpora buku indeks PPI 2023

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka ketergantungan (dependency ratio) atau Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.

Angka ketergantungan di Sulawesi Tenggara Pada tahun 2019 berada pada level yang cukup tinggi dengan nilai sebesar 58,50%, Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 58 sampai 59 penduduk usia tidak produktif. Sedangkan pada tahun 2020 – 2023 Angka ketergantungan menunjukkan adanya perbaikan dengan penurunan yakni sebesar 49,84 di tahun 2020 atau turun sebesar 8,66 persen poin, dan cenderung stabil selama empat tahun terakhir dimana tahun 2023 angka ketergantungan sebesar 49,05 persen.

Gambar 2. 35. Grafik Angka Ketergantungan Provinsi Sulawesi Tenggara 2019-2023

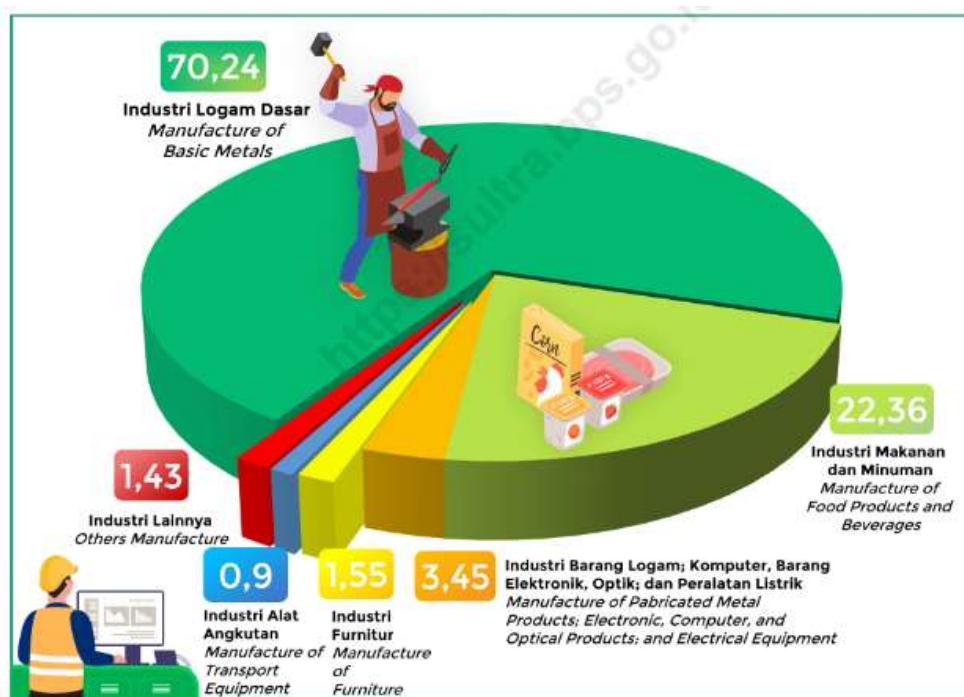


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

PDRB Industri pengolahan. Kategori Industri Pengolahan terdiri dari 16 (enam belas) subkategori. Dari ke-16 subkategori tersebut, terdapat 13 (tiga belas) subkategori yang ada di Sulawesi Tenggara Sedangkan 3 (tiga) subkategori yaitu Industri Batubara dan Pengilangan Migas; Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki; serta Industri Mesin dan Perlengkapan belum tersedia. Pada tahun 2024 Kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 9,41 persen, dimana kontribusi ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari ke-13 subkategori, subkategori Industri Logam Dasar memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Industri Pengolahan pada periode 2020–2024. Kontribusinya terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2024 kontribusinya menjadi sebesar 70,24 persen.

Gambar 2.36. Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), 2024



Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain 2024

Berbeda halnya dengan Subkategori Industri Makanan dan Minuman yang mana sejak tahun 2020 menjadi kontributor terbesar kedua untuk Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 43,10 persen. Akan tetapi, kontribusinya terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi sebesar 22,36 persen dan menjadi kontributor terbesar kedua setelah subkategori Industri Logam Dasar. Selanjutnya, kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Industri Pengolahan tahun 2024 adalah subkategori Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik sebesar 3,45 persen. Sedangkan sisanya bersumber dari subkategori lainnya yang kontribusinya kurang dari dua persen.

Tabel 2.36. Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan dan Subkategorinya di Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Harga Konstan 2010 (persen), 2020–2024

No.	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
	1	2	3	4	5	6
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas / Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products	-	-	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman/Manufacture of Food Products and Beverages	-1,54	5,48	1,77	-36,23	16,55
3	Industri Pengolahan Tembakau/Manufacture of Tobacco Products	-8,41	-17,99	-0,02	-7,37	4,98
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/Manufacture of Textiles and Wearing Apparel	-0,59	0,64	9,21	-5,11	6,90
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit	-	-	-	-	-

No.	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
	1	2	3	4	5	6
	dan Alas Kaki/ Manufacture of Leather and Related Products and Footwear					
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/ Manufacture of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials	-3,13	-2,15	-10,15	9,70	-31,51
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/Manufacture of Paper and Paper Products; Printing and Reproduction of Recorded Media	-1,74	5,10	11,79	2,95	-1,73
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/ Manufacture of Chemical, Pharmaceutical and Botanical Products	4,83	4,65	-3,20	10,53	33,08
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/ Manufacture of Rubber; Rubber Products and Plastics Products	1,75	5,44	2,23	0,02	2,68
10	Industri Barang Galian bukan Logam/Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products	6,56	-2,58	-6,79	8,23	-14,44
11	Industri Logam Dasar/ Manufacture of Basic Metals	29,53	10,21	34,20	47,82	14,07
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik/ Manufacture of Fabricated Metal Products; Electronic, Computer, and Optical Products; and Electrical Equipment	-6,48	-7,86	7,47	4,54	-6,83
13	Industri Mesin dan Perlengkapan/Manufacture of Machinery and Equipment	-	-	-	-	-
14	Industri Alat Angkutan/Manufacture of Transport Equipment	-0,58	3,95	-10,88	-6,41	0,60
15	Industri Furnitur/Manufacture of Furniture	2,60	1,07	1,25	-4,09	16,26
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/Other Manufacture; Repair and Installation of Machinery and Equipment	-0,34	2,97	-2,73	6,57	4,71
17	Industri Pengolahan/Manufacturing	10,19	6,39	16,81	12,81	12,98

Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain 2024

Kategori Industri Pengolahan tumbuh signifikan pada tahun 2024 sebesar 12,98 persen dibanding tahun 2023. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi dibanding kategori-kategori lainnya. Hal ini disebabkan karena subkategori Industri Logam Dasar sebagai kontributor terbesar pada kategori ini tumbuh sebesar 14,07 persen. Demikian halnya subkategori Industri Makanan dan Minuman yang menjadi kontributor terbesar kedua mengalami pertumbuhan sebesar 16,55 persen. Di sisi lain, ada beberapa subkategori yang mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu seperti subkategori Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya; subkategori Industri Barang Galian bukan Logam; dan subkategori Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik. Subkategori Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya terkontraksi sebesar 31,51 persen, kemudian subkategori Industri Barang Galian bukan Logam terkontraksi sebesar 14,44 persen dan subkategori Industri Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik terkontraksi 6,83 persen.

Dalam periode 5 tahun terakhir, tahun 2021 mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu tumbuh 6,39 persen dibanding tahun 2020 yang mampu tumbuh 10,19 persen. Hal ini diakibatkan oleh kontributor terbesar yaitu subkategori Industri Logam Dasar yang juga tumbuh melambat 10,21 persen dari 29,53 persen pada tahun 2020. Selain itu, subkategori Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik yang merupakan kontributor terbesar ketiga yaitu mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 7,86 persen lebih dalam dibanding kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 yang sebesar 6,48 persen.

PDRB Makan dan Minum. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terdiri dari Penyediaan Akomodasi baik berbintang maupun tidak berbintang serta penyediaan makan minum termasuk diantaranya restoran/rumah makan dan warung makan. Tahun 2024, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 945,40 milyar rupiah atau 0,50 persen terhadap total PDRB Sulawesi Tenggara. Subkategori Penyediaan Makan Minum merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan nilai tambah kategori ini sebesar 64,30 persen. Sedangkan subkategori Penyedia Akomodasi memberikan kontribusi sebesar 35,70 persen.

Tabel 2.37. Peranan Subkategori Terhadap Nilai Tambah Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), 2020–2024

No.	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
	1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Akomodasi/ <i>Accommodation</i>	37,28	36,76	35,46	34,60	35,70
2	Penyediaan Makan Minum/ <i>Food and Beverage Service Activities</i>	62,72	63,24	64,54	65,40	64,30
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain 2024

Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan melambat dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 4,24 persen. Hal ini disebabkan karena subkategori utamanya penyediaan makan minum tumbuh melambat sebesar 1,88 persen dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 6,66 persen. Sebaliknya, kategori

penyediaan akomodasi yang tumbuh meningkat sebesar 8,36 persen dibanding tahun 2023 yang tumbuh 2,69 persen.

Gambar 2.37. Laju Pertumbuhan PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Subkategorinya di Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Harga Konstan 2010 (persen), 2020–2024



Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain 2024

Rasio Kewirausahaan adalah perbandingan populasi Wirausaha terhadap populasi angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan kondisi wirausaha di Provinsi Sulawesi Tenggara. Rasio kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 meningkat tajam menjadi 12,19 setelah sebelumnya nilainya 0,08 pada Tahun 2022. Pada realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha pada tahun 2022 semua capaian target tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan yaitu sebesar 5%. Pada tahun 2022 meningkatnya usaha kecil dari total 48.703 unit yang tumbuh menjadi wirausaha sebanyak 400 unit dilihat dari unit UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga pencapaian target atas realiasi adalah 0.08%. Pada realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha pada tahun 2023 capaian target mencapai 12.19% sesuai dengan target yang telah ditargetkan yaitu sebesar 5%. Pada tahun 2023 meningkatnya usaha kecil dari total 48.703 unit yang tumbuh menjadi wirausaha dilihat berdasarkan jumlah umkm sebanyak 320 unit UKM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, ditambahkan 5.935 unit usaha Kecil (termasuk peserta pelatihan) yang memiliki dan menerbitkan Nomor Izin Berusaha (NIB) sehingga pencapaian target atas realisasi adalah 12.19%.

Tabel 2.38. Rasio Kewirausahaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 - 2023

Rasio Kewirausahaan	Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
	0	0	1,00	0,08	12,19

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Sultra, 2024.

Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. PUK cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. PUK pada Februari 2025 sebanyak 216,79 juta orang, bertambah sebanyak 2,79 juta orang dibandingkan Februari 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yang mencapai 153,05 juta orang, sisanya termasuk bukan

angkatan kerja sebanyak 63,74 juta orang. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 145,77 juta orang penduduk bekerja dan 7,28 juta orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah sebanyak 3,67 juta orang; 3,59 juta orang; dan 0,08 juta orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan sebesar 1,30 persen poin sejak Februari 2023 sampai dengan Februari 2025. TPAK pada Februari 2025 sebesar 70,60 persen, naik 0,80 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 84,34 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 56,70 persen. Dibandingkan pada Februari 2024, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,32 persen poin dan 1,29 persen poin.

Tabel 2.39. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2023–Februari 2025

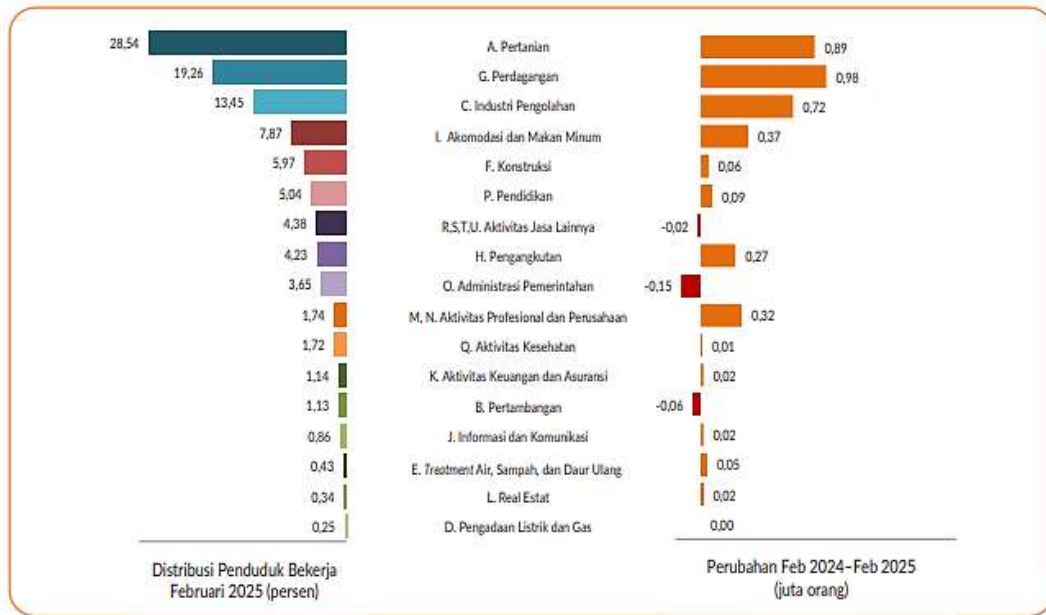
Kedaaan Ketenagakerjaan	Februari 2023	Agustus 2023	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Perubahan Feb 2024–Feb 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penduduk Usia Kerja (PUK)	211,59	212,59	214,00	215,37	216,79	2,79	1,30
Angkatan Kerja	146,62	147,71	149,38	152,11	153,05	3,67	2,46
– Bekerja	138,63	139,85	142,18	144,64	145,77	3,59	2,52
– Pengangguran	7,99	7,86	7,20	7,47	7,28	0,08	1,11
Bukan Angkatan Kerja	64,97	64,88	64,62	63,26	63,74	-0,88	-1,36
	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,30	69,48	69,80	70,63	70,60	0,80	
– Laki-laki	83,98	84,26	84,02	84,66	84,34	0,32	
– Perempuan	54,42	54,52	55,41	56,42	56,70	1,29	

Sumber BPS Prov. Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2025

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2025, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,54 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,26 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 13,45 persen. Dibandingkan Februari 2024, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan penduduk bekerja terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,98 juta orang); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,89 juta orang); dan Industri Pengolahan (0,72 juta orang). Sementara lapangan usaha yang mengalami penurunan terbesar adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,15 juta orang); Pertambangan dan Penggalan (0,06 juta orang); dan Jasa Lainnya (0,02 juta orang).

Gambar 2.38. Distribusi Persentase dan Perubahan Jumlah

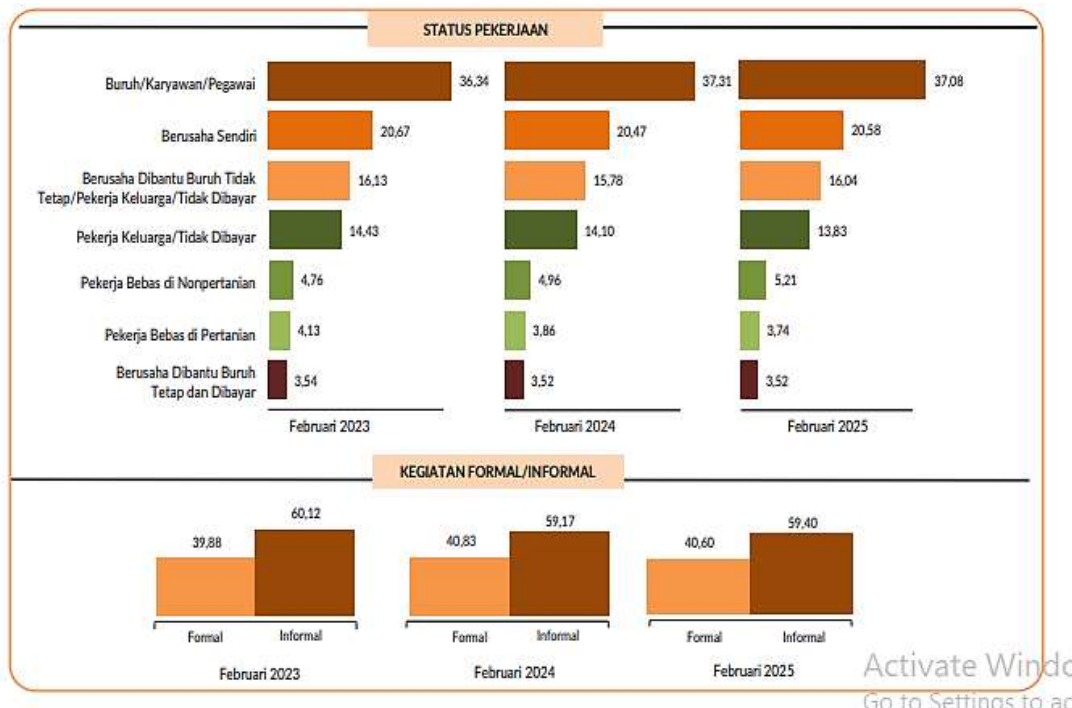
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Februari 2025



Sumber BPS Prov. Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2025

Sedangkan dari sisi **Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan** Pada Februari 2025, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 37,08 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, yaitu sebesar 3,52 persen. Dibandingkan Februari 2024, status pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar sebesar 0,26 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar terdapat pada status pekerja keluarga sebesar 0,27 persen poin. Berdasarkan status pekerjaan, kegiatan penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada Februari 2025, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 86,58 juta orang (59,40 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 59,19 juta orang (40,60 persen) (Gambar 2 dan Lampiran 1). Dibandingkan Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin.

Gambar 2. 39. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/ Informal, Februari 2023–Februari 2025



Sumber BPS Prov. Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2025

Dilihat dari **Tingkat Pendidikan** dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2025, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 35,89 persen. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi yaitu tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 12,83 persen dan mengalami tren yang semakin meningkat dari Februari 2023. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2023 dan Februari 2024. Dibandingkan dengan Februari 2024, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, masing-masing sebesar 0,65 persen poin dan 0,34 persen poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Diploma IV, S1, S2, S3 mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (0,75 persen poin). Selanjutnya **Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja** terdiri dari pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh dengan persentase sebesar 66,19 persen pada Februari 2025. Sementara itu, sisanya sebesar 33,81 persen merupakan pekerja tidak penuh. Dibandingkan Februari 2024, persentase pekerja tidak penuh mengalami penurunan sebesar 0,59 persen poin. Jika dibandingkan dengan Februari 2023, persentase pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 0,29 persen poin.

Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2024 adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengukur dan menilai inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik yang bersifat digital maupun non-digital. IID 2024 mengukur inovasi yang telah diterapkan oleh daerah selama dua tahun terakhir (2022 dan 2023). Hasil

pengukuran IID ini kemudian digunakan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berprestasi dalam inovasi. Beberapa poin penting terkait pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) diantaranya mengukur dan menilai inovasi daerah berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Inovasi Daerah (SIID) yang berisi informasi dan data terkait inovasi daerah yang telah berhasil diterapkan oleh pemerintah daerah. Laporan ini kemudian divalidasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri dan Hasil pengukuran IID menjadi dasar penilaian dalam ajang Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Berikut kategori penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID)

Tabel 2.40. Kategori Penilaian IID, rentang Skor Nilai IID

RENTANG SKOR	KATEGORI
60,01 – 100,00	Sangat Inovatif
35,00 – 60,00	Inovatif
0,01 – 34,99	Kurang Inovatif
0	Tidak Dapat Dinilai

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sultra terlihat berfluktuasi, untuk Tahun 2024 dan 2022 Pemerintah Provinsi Sultra mendapat Nilai Inovatif, namun pada Tahun 2023 mendapatkan Nilai Kurang Inovatif, hal ini disebabkan oleh :

- Banyaknya indikator penilaian yang tidak terisi dengan lengkap.
- Masih kurangnya Jumlah Inovasi yang diterapkan pada OPD dilingkup Provinsi Sultra.
- Masih kurangnya Sosialisasi mengenai Penilaian IID atau Inovation Government Awards (IGA).

Berikut Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022, 2023, dan 2024.

Tabel 2.41. Penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

TAHUN	RENTANG SKOR	KATEGORI
2024	51,36	Inovatif
2023	32,85	Kurang Inovatif
2022	41,60	Inovatif

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Sulawesi Tenggara

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan angka optimisme tersebut perlu ditunjang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, dimana kondisi saat ini masih berada pada kategori kurang baik. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk

menggambarkan kondisi tersebut adalah capaian indeks ekonomi hijau. Indeks Ekonomi hijau merupakan indikator yang disusun oleh berbagai indikator. Secara garis besar terbagi atas tiga yaitu Pilar Ekonomi, Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan. Berdasarkan data yang tersedia dari data Bappenas, pada tahun 2015 hingga tahun 2021, nilai rerata indikator Ekonomi Hijau Sulawesi Tenggara berada disekitar 52 poin. Selanjutnya berdasarkan alur data yang sama tersebut, nilai Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 sebesar 45,54 dan pada tahun 2021 sebesar 51,9 Poin. Dengan angka tersebut, kita bisa menemukan bahwa selama 6 tahun, terdapat peningkatan 6,36 poin atau setiap tahunnya meningkat sebesar 1,06 poin/tahun. Angka kenaikan ini tidak mendukung target RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2029 yang berada pada kisaran 80.80 sampai 84.16 poin.

Dari tiga pilar yang disebutkan di atas, pilar lingkungan hidup memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan indeks ekonomi hijau yaitu sebesar 50% (0.5 poin), maka dengan demikian untuk mendukung target RPJMD tersebut, salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah melalui pengarusutamaan lingkungan hidup dalam setiap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan bauran energi baru terbarukan : mengembangkan potensi energi terbarukan yang dimiliki Sulawesi Tenggara, seperti tenaga surya, air, dan biomassa;
- Melindungi dan merestorasi hutan : mencegah deforestasi, melakukan reboisasi, dan merestorasi lahan yang terdegradasi;
- Meningkatkan kualitas air dan udara : mengendalikan pencemaran air dan udara dari kegiatan industri, pertanian, dan domestik;
- Mengurangi emisi gas rumah kaca : menerapkan praktik pertanian rendah emisi, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan meningkatkan efisiensi energi;
- Melindungi lahan gambut : mencegah konversi lahan gambut dan melakukan restorasi lahan gambut yang terdegradasi.

Ekonomi biru merupakan konsep pengembangan ekonomi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya akuatik secara inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia mengadopsi konsep ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang menempatkan ekonomi biru sebagai salah satu arah pembangunan ekonomi. Pemerintah Pusat melalui BAPPENAS telah menerbitkan Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation, Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2025-2045 dan RPJPN 2025-2045. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengeluarkan Peta Jalan Ekonomi Biru yang berfokus pada Konservasi Sumber Daya, Perikanan Tangkap Berkelanjutan, Pengembangan Budidaya Kelautan, Penguatan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Peningkatan Pengelolaan Sampah Laut terutama plastik. Dokumen-dokumen ini mencakup arahan dan strategi besar untuk memandu pengembangan ekonomi biru yang terdiversifikasi dan berkelanjutan, berbasis pada kesehatan dan ketahanan ekosistem kelautan, serta manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan.

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PENERAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025-2045 dirancang dengan mengacu pada seluruh kebijakan nasional di atas dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2045. Dalam RPJPD 2025-2045 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Visi berupa Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan. Meskipun tidak secara spesifik

menyebutkan ekonomi biru dalam visi RPJPD, dokumen ini memberikan acuan pembangunan ekonomi biru yang mengedepankan keadilan (equitable) dalam pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, seluruh rangkaian rencana dalam dokumen ini dikembangkan berdasarkan data, indikator capaian, dan kajian berbagai isu strategis antara lain mencakup:

- Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki nilai Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 60,57 pada tahun 2023 dan memiliki target nilai di Tahun 2045 sebesar 88,57. Hal ini menggambarkan perlunya rencana dan usaha kolaboratif yang kuat untuk mencapai target tersebut sesuai dengan 3 (tiga) pilar IBEI yaitu pilar sosial, ekonomi dan lingkungan.
- Adanya target capaian pendapatan per kapita sebesar 300,03-361,33 juta rupiah di tahun 2045 (dari angka pendapatan per kapita 64,09 juta rupiah di tahun 2023) akan membuat pemerintah mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama di Sulawesi Tenggara, baik yang ekstraktif maupun non-ekstaktif. Oleh karena itu, sektor ekstraktif perlu bisa berjalan bersamaan dengan sektor ekonomi biru yang memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya pesisir sebagai bagian dari pilar-pilar IBEI.
- Urgensinya adalah memastikan keberlanjutan sektor ekonomi biru karena perannya sebagai sektor yang paling menyerap tenaga kerja. Jumlah nelayan di Sulawesi Tenggara sebanyak 133.518 jiwa menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat di sektor ekonomi biru. Sehingga, Sektor ekonomi biru menjadi penopang pemerataan kesejahteraan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi biru menjadi penyeimbang sektor pertambangan yang saat ini kurang adil (less equitable) yang ditunjukkan oleh peningkatan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara.

4. Transpormasi Digital

Pembangunan TIK Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam enam tahun terakhir. Pada tahun 2018, nilai Indeks Pembangunan TIK tercatat sebesar 5,07 (skala 1-10) dan terus meningkat hingga tahun 2023 dengan nilai mencapai 5,90. Dari ketiga subindeks, pertumbuhan paling pesat terjadi pada subindeks penggunaan TIK yaitu tumbuh sebesar 1,56 persen. Adapun subindeks keahlian TIK tumbuh sebesar 0,67 persen serta subindeks akses dan infrastruktur TIK tumbuh sebesar 0,17 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan pembangunan TIK Indonesia dari tahun 2022 ke tahun 2023 didorong oleh penggunaan TIK yang semakin tinggi oleh masyarakat.

Gambar 2.40. Perkembangan Indeks Pembangunan TIK Indonesia, 2018–2023



Sumber BPS Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2023

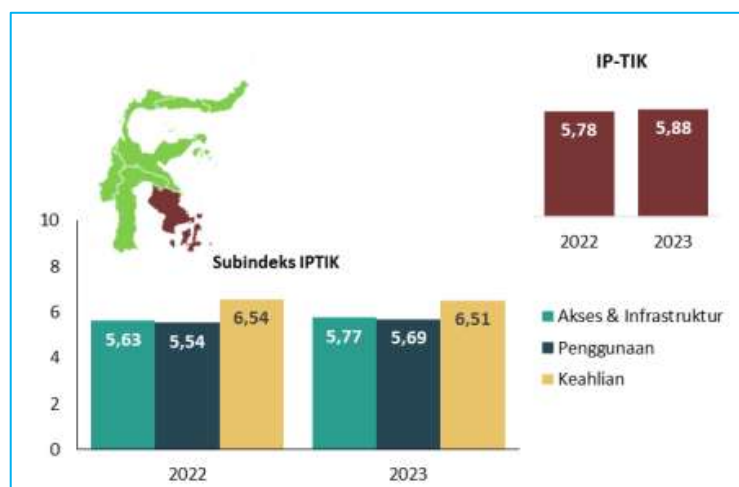
Persentase individu yang menggunakan internet (penetrasi internet) semakin meningkat dari waktu ke waktu, yaitu dari 66,48 persen pada tahun 2022, menjadi 69,21 persen pada tahun 2023. Peningkatan penetrasi internet didorong oleh kebutuhan mengakses informasi dengan cepat dan mudah serta ketersediaan infrastruktur yang memungkinkan jangkauan internet semakin luas. Indeks Pembangunan TIK provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 yang menggambarkan adanya perbaikan pembangunan TIK pada provinsi-provinsi di Indonesia. Dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat empat provinsi yang mengalami penurunan Indeks Pembangunan TIK pada tahun 2023, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Barat, Bali, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya, untuk melihat posisi pembangunan TIK antar provinsi, nilai Indeks Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51– 10,00), sedang (5,01– 7,50), rendah (2,51–5,00), dan sangat rendah (0–2,50). Pada tahun 2023, seluruh provinsi menempati kategori yang sama dengan tahun 2022 (Tabel 5). Sebagian besar provinsi berada pada kelompok Indeks Pembangunan TIK yang sedang, baik pada tahun 2022 maupun 2023. Sudah tidak ada provinsi Indonesia yang masuk kategori sangat rendah.

Provinsi yang menempati kategori Indeks Pembangunan TIK sedang selama kurun waktu dua tahun berturut-turut yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bengkulu, Jawa Tengah, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan, Lampung, Gorontalo, Aceh, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian Provinsi Sulawesi Tenggara menempati kategori Indeks Pembangunan TIK sedang selama kurun waktu 2022–2023 berikut Nilai Indeks Pembangunan TIK Provinsi Sulawesi Tenggara beserta subindeks penyusunnya disajikan secara lengkap pada Gambar berikut yang merupakan visualisasi nilai Indeks Pembangunan TIK beserta subindeks akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2022–2023.

Gambar 2.41 Indeks Pembangunan TIK dan Subindeks Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022 dan 2023



Sumber: BPS Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2023

Berdasarkan Nilai Indeks Pembangunan TIK Provinsi Sulawesi Tenggara beserta subindeks perlu dipertimbangkan kembali agar dapat disusun suatu indeks yang benar-benar mencerminkan pembangunan TIK di suatu daerah, Untuk menyelesaikan tantangan ini di perlukan upaya serta penerapan sebagai berikut:

1. Menerapkan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam memudahkan proses perizinan untuk penggelaran dan perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang merata dan berkualitas, serta memberikan insentif bagi operator seluler dan penyedia layanan.
2. Memfasilitasi penyediaan akses internet (Wi-Fi) gratis di ruang publik, seperti di kantor pemerintahan, taman, perpustakaan, hingga layanan Kesehatan masyarakat.
3. Mendorong penyediaan perangkat lunak, seperti computer di sekolah dan perpustakaan sebagai pendukung pembelajaran digital.
4. Memfasilitasi penyediaan balai Latihan kerja bagi masyarakat maupun UMKM melalui koordinasi lintas Lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta.
5. Menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM dalam mengadopsi teknologi digital untuk menerapkan pembayaran digital dan memasarkan produk platform e-commerce.
6. Fasilitasi penerapan use case smart mining, smart logistic, dan smart agriculture di Sulawesi Tenggara.
7. Memfasilitasi program Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan bidang TIK tingkat dasar dan menengah bagi guru, tenaga pengajar, dan masyarakat.
8. Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung pembelajaran digital, seperti akses internet, komputer, dan perangkat lunak.
9. Mendorong kualitas dan kapasitas Pendidikan vokasi melalui program beasiswa serta penyediaan sarana prasarana pendukung pembelajaran digital.
10. Melakukan program pelatihan dan pemberdayaan digital bagi SDM ASN untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola SPBE.
11. Menerapkan kebijakan yang mendukung manajemen data, meliputi pengumpulan data hingga pemanfaatan data.

5. Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda, dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi capital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 2.42. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Sulawesi Tenggara (triliun rupiah)

Uraian/ Description	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	2	3	4	5	6
Total PMTB (miliar rp)/Total of GFCF (billion rp)					
a. ADH Berlaku/at current market prices	50.524,41	55.416,04	59.449,66	63.524,42	65.850,20

Uraian/ Description	2020	2021	2022	2023*	2024**
b. ADH Konstan 2010/at 2010 constant price	37.940,57	40.239,52	40.498,19	41.654,63	42.526,17
Proporsi terhadap PDRB/ proportion at GRDP (% ADH Berlaku/% at current market price)	38,83	39,73	37,44	36,06	34,75
Struktur PMTB/Structure of GFCF (%)					
a. Bangunan/Buildings	64,15	66,75	66,71	64,69	64,76
b. Nonbangunan/ Nonbuildings	35,85	33,25	33,29	35,31	35,24
c. Total PMTB/Total of GFCF	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan/Growth (%)	-2,10	6,06	0,64	2,86	2,09

Sumber BPS Prov. Sultra Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Pengeluaran 2020–2024

Catatan/Note:

*Angka Sementara/Preliminary Figures

**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Kontribusi PMTB dalam perekonomian Sulawesi Tenggara dilihat dari sisi pengeluaran cukup besar dengan menduduki posisi ketiga setelah komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor dengan tren yang meningkat dikisaran angka 34–40 persen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Jika dilihat strukturnya, baik subkomponen bangunan maupun nonbangunan, memiliki pola yang cukup stabil setiap tahunnya. Proporsi subkomponen bangunan mempunyai andil terbesar dalam PMTB, berada pada kisaran 64–67 persen. Sementara itu, subkomponen nonbangunan memiliki proporsi pada kisaran 33–36 persen selama 2020–2024. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut.

Gambar 2.42. Pertumbuhan PMTB menurut Subkomponen Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), 2020–2024



Catatan/Note: *Angka Sementara/Preliminary Figures | **Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber BPS Prov. Sultra Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Pengeluaran 2020–2024

Pertumbuhan “riil” subkomponen bangunan selama lima tahun terakhir cukup berfluktuasi. Dimana pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 6,06 persen, dan terendah pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,10 persen akibat pandemic Covid-19 yang terjadi pada tahun itu. **Pada Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri** Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah, dan sebagainya. Secara total, nilai ekspor luar negeri selama periode 2020–2024 cukup berfluktuatif. Dimana pada tahun 2020 sampai 2022 nilai ekspor meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2023 sampai 2024 mengalami sedikit penurunan. Nilai ekspor barang dan jasa luar negeri pada tahun 2024 sebesar 61,83 triliun rupiah.

Tabel 2.43 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020–2024

Uraian/ Description	2020	2021	2022	2023*	2024**
1	2	3	4	5	6
Total nilai ekspor (miliar rp)/Total of exports value (billion rp)					
a. ADH Berlaku/at current market prices	35.201,83	63.351,93	86.683,14	65.864,80	61.830,01

Uraian/ Description	2020	2021	2022	2023*	2024**
b. ADH Konstan 2010/at 2010 constant price	34.127,92	56.398,05	66.710,03	55.191,97	51.779,16
Proporsi terhadap PDRB/ proportion at GRDP (% ADH Berlaku/% at current market price)	27,06	45,42	54,59	37,38	32,63
Struktur Ekspor/Structure of Exports					
a. Barang/Goods (miliar rp/billion rp)	34.920,12	63.088,23	86.395,22	65.559,84	61.480,25
Persentase/ Percentage (%)	99,20	99,58	99,67	99,54	99,43
b. Jasa Servis (Miliar rp/billion rp)	281,72	263,70	287,92	304,95	349,75
Persentase/ Percentage (%)	0,80	0,42	0,33	0,46	0,57

Sumber BPS Prov. Sultra Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Pengeluaran 2020–2024

Catatan/Note:

*Angka Sementara/Preliminary Figures

**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 disebabkan menurunnya nilai ekspor fero nikel dan stainless steel. Sejalan dengan nilai ekspor ADHB, nilai ekspor ADHK 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, dimana pada tahun 2020–2022 terjadi peningkatan nilai ekspor, namun pada tahun 2023–2024 mengalami penurunan dengan nilai “riil” sebesar 51,78 triliun rupiah. Selama kurun waktu tersebut juga, proporsi ekspor luar negeri dalam PDRB meningkat mulai tahun 2020–2022 dan menurun pada tahun 2023–2024. Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor luar negeri berupa barang (lebih dari 99 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Nilai ekspor luar negeri dalam bentuk barang ini didominasi oleh ekspor produk besi baja (fero nikel dan stainless steel); bijih, kerak, dan abu logam (bijih nikel, aspal).

Gambar 2.43. Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri menurut Subkomponen Provinsi Sulawesi Tenggara(persen), 2020–2024



Catatan/Note: *Angka Sementara/Preliminary Figures | **Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber BPS Prov. Sultra Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Pengeluaran 2020–2024

6. Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Infrastruktur adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan infrastruktur di suatu daerah. Indeks ini dapat bervariasi dalam metodologi dan cakupannya, namun umumnya mengukur beberapa dimensi utama, seperti:

- 1) Infrastruktur Dasar: meliputi ketersediaan akses air bersih dan sanitasi. Ketersediaan jaringan listrik, kondisi jalan dan jembatan, dan ketersediaan layanan telekomunikasi
- 2) Infrastruktur Transportasi: meliputi panjang dan kualitas jalan, jaringan transportasi publik, fasilitas terminal
- 3) Infrastruktur Pendukung: meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pasar dan pusat perdagangan, dan kawasan industri

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator : **infrastruktur jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan**. pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang telah terbangun di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai akhir tahun 2023 yaitu sepanjang 12.965,24 km, yang terdiri dari 1.497,81 km jalan nasional, 1.076,94 km jalan provinsi, dan 10.384,86 km jalan kabupaten/kota. Data jalan kondisi mantap jalan provinsi di Sulawesi Tenggara: Tahun 2021: 64,64%, 2022: 73,91% dan 2023: 74,12%. Tabel di bawah menunjukkan informasi data dan kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023. Sedangkan infrastruktur pengairan pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari,

pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas, diantaranya melalui pembangunan sarana pengelolaan air minum, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai serta pembangunan/rehabilitasi bangunan penahan gelombang laut. Berikut disajikan dalam Tabel Kondisi Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022 - 2023

Tabel 2.44. Infrastruktur Jalan, Perumahan, Irigasi dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022 - 2023

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
A.	Jalan		
1.	Nasional (km)	1.497,81	1.497,81
2.	Provinsi (km)	1.076,94	1.076,94
3.	Kabupaten/ Kota (km)	10.352,21	10.384,86
B.	Perumahan		
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (persen)	87,07	88,99
2.	Persentase Penduduk berakses air minum (persen)	94,64	94,80
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (persen)	94,64	94,80
4.	Persentase areal kawasan kumuh (Ha)	6.011,84	6.011,84
5.	Persentase areal kawasan kumuh kewenangan provinsi (Ha)	646,13	646,13
C.	Irigasi		
1.	Rasio Luas Lahan Sawah Beririgasi	65,02	61,44
2.	Persentase Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	24 lok	20 lok
d.	Perhubungan		
1.	Bandara	5 lokasi	5 lokasi
2.	Pelabuhan Pengumpan Regional	7 lokasi	7 lokasi
3.	Pelabuhan Penyeberangan	13 lokasi	13 lokasi
4.	Terminal Type B	10 lokasi	10 lokasi

Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka Tahun 2023, Bappeda Sultra, 2024

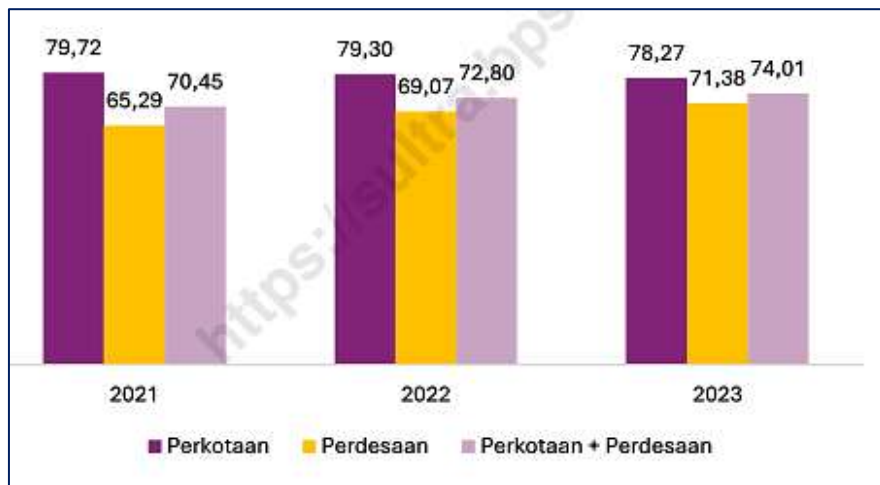
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan luas bangunan serta kesehatan penghuninya dan mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Tujuan 11 TPB yang menerapkan 5 kriteria untuk permukiman yaitu ketahanan bangunan (durable housing), kecukupan luas bangunan tempat tinggal (sufficient living space), akses terhadap air minum layak (access to improved water), akses terhadap sanitasi layak (access to adequate sanitation), dan keamanan bermukim (security of tenure). Mengacu pada definisi nasional dan global, rumah layak huni memiliki 4 kriteria yang diwajibkan untuk terpenuhi kelayakannya yaitu sebagai berikut:

- Memiliki ketahanan bangunan (durable housing)
Rumah dikatakan memenuhi syarat ketahanan bangunan apabila jenis bahan bangunan atap rumah terluasnya berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap, jenis bahan bangunan dinding rumah terluasnya berupa tembok/plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu, dan jenis bahan bangunan lantai

rumah terluasnya berupa marmer, granit, keramik, parket, vinil, karpet, ubin, tegel, teraso, , kayu, papan, semen, atau bata merah.

- Memiliki luas bangunan tempat tinggal yang cukup (sufficient living space)
Rumah dikatakan memenuhi syarat kecukupan luas bangunan tempat tinggal apabila memenuhi syarat luas lantai per kapita $\geq 7,2$ meter persegi.
- Memiliki akses air minum layak (access to improved water)
Rumah dikatakan memiliki akses air minum layak apabila sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan (bermerek maupun isi ulang), maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.
- Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation)
Rumah dikatakan memiliki akses sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat BAB yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Gambar 2.44. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni menurut Tipe Daerah (persen), 2021–2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2023

Capaian indikator rumah layak huni di Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 sebesar 74,01 persen. Persentase ini mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir dari yang sebelumnya sebesar 70,45 persen pada tahun 2021. Baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, capaian indikator ini sudah lebih dari 70 persen pada tahun 2023. Capaian indikator ini telah sejalan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024 yaitu sebesar 70 persen.

Gambar 2.45. Persentase Rumah Tangga yang Memenuhi Kondisi Rumah Layak Huni menurut Tipe Daerah (persen), 2021–2023

Kondisi Rumah Layak Huni	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan +Perdesaan
1	2	3	5
2021			
Akses terhadap sumber air minum layak	97,16	89,03	91,94
Akses terhadap sanitasi layak	91,73	82,22	85,62
Rumah layak huni	79,72	65,29	70,45
2022			
Akses terhadap sumber air minum layak	95,55	94,11	94,64
Akses terhadap sanitasi layak	90,61	85,03	87,07
Rumah layak huni	79,30	69,07	72,80
2023			
Akses terhadap sumber air minum layak	96,28	93,88	94,80
Akses terhadap sanitasi layak	91,87	87,20	88,99
Rumah layak huni	78,27	71,38	74,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2023

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan tiga dimensi utama: Ketahanan Sosial (IKS), Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Ketahanan Lingkungan (IKL). IDM telah digunakan sejak tahun 2015 sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat pembangunan desa dan mengklasifikasikan desa ke dalam lima status: Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Berdasarkan data IDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang Anda berikan untuk tahun 2023 dan 2024, berikut adalah gambaran perkembangannya.

Tabel 2.46. Status Desa di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan IDM (2023-2024)

Status Desa	Jumlah Desa (2023)	Persentase (2023)	Jumlah Desa (2024)	Persentase (2024)
MANDIRI	16	0.84%	52	2.73%
MAJU	316	16.56%	525	27.52%
BERKEMBANG	1408	73.79%	1261	66.09%
TERTINGGAL	166	8.70%	70	3.67%
SANGAT TERTINGGAL	2	0.10%	0	0.00%
Total Desa	1908	100.00%	1908	100.00%

Sumber : <https://idm.kemendes.go.id/>.

Dari tabel diatas dapat di analisis bahwa **Desa Mandiri**: Terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada jumlah desa berstatus Mandiri, yaitu dari 16 desa (0.84%) pada tahun 2023 menjadi 52 desa (2.73%) pada tahun 2024. Ini menunjukkan adanya kemajuan positif dalam kemandirian desa di Sulawesi Tenggara. Sedangkan **Desa Maju**: Jumlah desa berstatus Maju juga mengalami peningkatan yang substansial, dari 316 desa (16.56%) pada tahun 2023 menjadi 525 desa (27.52%) pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak desa yang mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. **Desa Berkembang**: Jumlah desa berstatus Berkembang mengalami penurunan, dari 1408 desa (73.79%) pada tahun 2023 menjadi 1261 desa (66.09%) pada tahun 2024. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai tren positif, di mana desa-desa yang sebelumnya Berkembang berhasil naik status menjadi Maju atau Mandiri. Dan **Desa Tertinggal**: Terdapat penurunan yang

drastis pada jumlah desa berstatus Tertinggal, dari 166 desa (8.70%) pada tahun 2023 menjadi 70 desa (3.67%) pada tahun 2024. Ini merupakan indikator keberhasilan upaya pembangunan desa dalam mengurangi ketertinggalan. **Desa Sangat Tertinggal:** Pada tahun 2024, tidak ada lagi desa yang berstatus Sangat Tertinggal, turun dari 2 desa (0.10%) pada tahun 2023. Ini adalah pencapaian yang sangat positif, menunjukkan bahwa desa-desa yang paling tertinggal telah berhasil diantarkan dari kategori tersebut.

Dari hasil analisa menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan, data IDM menunjukkan tren perkembangan desa yang sangat positif di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2023 ke 2024. Terjadi pergeseran yang jelas menuju status desa yang lebih tinggi, dengan peningkatan signifikan pada desa Mandiri dan Maju, serta penurunan drastis pada desa Tertinggal dan hilangnya desa Sangat Tertinggal. Ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan desa dalam mendorong kemajuan dan kemandirian di wilayah ini.

Perubahan dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID). Pemerintah Indonesia telah melakukan transisi signifikan dalam kerangka pengukuran pembangunan desa, dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID). Perubahan ini diatur secara mendalam dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 9 Tahun 2024, yang secara eksplisit mencabut dan menyatakan tidak berlaku Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa (ID) akan mulai digunakan secara resmi pada tahun 2025, dengan kegiatan pengumpulan data dasar telah dilakukan antara bulan April hingga Juni 2024.

Perbedaan Mendasar dan Implikasi Transisi. Transisi dari IDM ke ID merupakan lebih dari sekadar penambahan dimensi; ini merepresentasikan evaluasi ulang fundamental mengenai apa yang membentuk pembangunan desa yang komprehensif. IDM yang lebih lama berfokus pada pengukuran "ketahanan" dalam sektor-sektor tertentu, sedangkan ID yang baru secara sengaja memasukkan elemen-elemen dasar yang menjadi prasyarat untuk pertumbuhan berkelanjutan, seperti infrastruktur dan modal manusia (layanan dasar), konektivitas (aksesibilitas), serta efisiensi dan transparansi administrasi lokal (tata kelola pemerintahan desa). Perluasan ini menandakan pergeseran kebijakan yang mendalam dari pendekatan yang murni sektoral menjadi pemahaman yang lebih holistik dan terintegrasi tentang pembangunan desa. Pembobotan spesifik pada setiap dimensi dalam ID (misalnya, Layanan Dasar dan Ekonomi memiliki bobot tertinggi) menunjukkan area prioritas pemerintah untuk pembangunan desa, memungkinkan alokasi sumber daya dan intervensi kebijakan yang lebih tepat dan terarah.

Untuk itu disimpulkan bahwa Perkembangan desa di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2023 ke 2024, sebagaimana tercermin dalam data IDM, menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan, dengan peningkatan signifikan pada desa maju dan mandiri, serta penurunan drastis pada desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dengan penerapan Indeks Desa (ID) mulai tahun 2025, Provinsi Sulawesi Tenggara akan memiliki alat ukur yang lebih canggih dan komprehensif untuk mendukung pembangunan desa. Kerangka ID yang diperluas dengan enam dimensi dan metodologi pembobotan yang lebih mendalam akan memungkinkan identifikasi kekuatan dan kelemahan desa dengan lebih rinci. Hal ini akan mempermudah perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan alokasi Dana Desa yang lebih efisien, sehingga setiap intervensi pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing desa. Dengan demikian, Sulawesi Tenggara dapat terus

mempercepat pembangunan desa, mendorong lebih banyak desa untuk mencapai kemandirian, dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan.

7. Stabilitas Ekonomi Makro

Kesinambungan fiskal di Sulawesi Tenggara sangat bergantung pada kondisi ekonomi makro yang stabil dan terkelola dengan baik. Pemerintah perlu mengelola anggaran dengan bijaksana, memastikan bahwa pendapatan negara mencukupi untuk membiayai belanja yang dibutuhkan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi ekonomi makro, seperti sektor pertanian, perikanan, dan jasa, untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Berikut stabilitas ekonomi makro dilihat dari **Tingkat Inflasi**. Pada Maret 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,53 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,28 pada Maret 2024 menjadi 107,91 pada Maret 2025. Inflasi m-to-m sebesar 2,39 persen dan inflasi y-to-d sebesar 1,27 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,24 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,99 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,16 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,17 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,22 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,08 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,76 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi y-on-y, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,09 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,71 persen; kelompok transportasi sebesar 0,04 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Maret 2025, antara lain: emas perhiasan, ikan layang/ikan benggol, ikan bandeng/ikan bolu, Sigaret Kretek Mesin (SKM), cabai rawit, ikan selar/ikan tude, mobil, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan cakalang/ ikan sisik, sepeda motor, ikan katamba, ikan teri, udang basah, nasi dengan lauk, tarif dokter umum, Sigaret Putih Mesin (SPM), pisang, ikan mujair serta kelapa. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: tarif listrik, beras, angkutan udara, telur ayam ras serta sawi hijau. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Maret 2025, antara lain: tarif listrik, beras, ikan layang/ikan benggol, cabai rawit, pisang, ikan selar/ ikan tude, emas perhiasan, ikan bandeng/ikan bolu, ikan katamba, ikan mujair, udang basah serta ikan cakalang/ikan sisik. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: angkutan udara, tomat, mainan anak, kangkung, ikan tuna serta daun kelor.

Pada Maret 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,39 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,06 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,05 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,19 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,45 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,11 persen, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,55 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,01 persen. Sementara

kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi y-on-y provinsi. Berikut Perbandingan Inflasi Antar Tahun Pada Maret 2025, tingkat inflasi y-on-y Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 1,53 persen dan inflasi y-to-d sebesar 1,27 persen.

Tabel 2.47. Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tenggara bulan Maret, 2024-2025 (Persen)

Tingkat Inflasi	2024	2025
1	2	3
Month to Month (m-to-m)	0,62	2,39
Year to Date (y-to-d)	0,79	1,27
Year on Year (y-on-y)	2,93	1,53

Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2025

Gambar 2.45. Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tenggara Januari 2024-Maret 2025 (Persen)



Sumber: BPS, Sulawesi Tenggara Berita Resmi Statistik 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1. Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah dipenuhi dengan baik. Hal ini tercermin dalam adanya kebijakan internal yang mengatur pengelolaan TIK dan keamanan informasi, yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur kebijakan tata kelola SPBE, yang mencakup aspek pengelolaan data, aplikasi, infrastruktur, serta pengamanan informasi yang sangat mendukung penerapan SPBE di tingkat provinsi.

- Kekuatan Kekuatan dari penerapan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE terletak pada adanya kebijakan yang terstruktur dan jelas dalam mengelola infrastruktur TIK, serta keamanan informasi. Kebijakan tersebut mengatur dengan rinci tentang pengelolaan data, penggunaan aplikasi berbagi pakai, dan penerapan sistem keamanan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan SPBE di Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Kelemahan Namun, kelemahan yang ada adalah keterbatasan pengaturan mengenai Arsitektur SPBE secara mendalam. Meskipun sudah ada pengaturan mengenai kebijakan tata kelola, namun belum ditemukan kebijakan internal yang mengatur Arsitektur SPBE secara komprehensif dan terintegrasi, yang menghambat koordinasi yang optimal antar sistem yang ada.

Penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan pemenuhan yang baik. Hal ini tercermin dalam adanya peta rencana SPBE yang memetakan tahapan implementasi SPBE di daerah. Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2023 juga mencakup rencana strategis untuk mengembangkan SPBE secara bertahap sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan teknologi.

- Kekuatan Kekuatan dari perencanaan strategis SPBE terletak pada pemetaan yang jelas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target-target yang diinginkan dalam penerapan SPBE. Peta rencana tersebut mengidentifikasi prioritas pengembangan teknologi dan layanan berbasis elektronik yang akan dilaksanakan.

- Kelemahan Namun, kelemahan utama adalah kurangnya mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi rencana strategis tersebut. Tidak ditemukan sistem evaluasi yang memadai untuk mengukur sejauh mana pencapaian perencanaan ini, sehingga pengawasan terhadap implementasi perencanaan strategis ini menjadi terbatas

Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memiliki kebijakan internal yang memadai terkait dengan pengelolaan infrastruktur TIK dan penggunaan aplikasi berbagi pakai. Kebijakan ini tercermin dalam Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2023, yang mencakup penggunaan infrastruktur TIK untuk mendukung layanan publik berbasis elektronik.

- Kekuatan Kekuatan dari aspek ini terletak pada pengelolaan infrastruktur jaringan yang cukup baik dan telah terintegrasi dengan beberapa sistem pemerintahan daerah lainnya. Kebijakan tersebut juga sudah memperhitungkan keamanan data dan pengelolaan aplikasi berbagi pakai yang mempermudah komunikasi antar instansi.

- Kelemahan Namun, kelemahan yang terlihat adalah kurangnya integrasi sistem yang lebih mendalam di beberapa sektor, yang mengakibatkan beberapa

aplikasi masih berjalan terpisah-pisah tanpa konektivitas yang optimal. Meskipun ada infrastruktur yang memadai, pengelolaan aplikasi dan data antar unit kerja belum sepenuhnya terintegrasi.

Penyelenggara SPBE, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan upaya yang baik dalam membentuk Tim Koordinasi SPBE, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan SPBE. Hal ini terlihat pada kebijakan yang mendukung pengelolaan SPBE di tingkat provinsi, termasuk pembentukan unit kerja yang khusus menangani koordinasi antar instansi dalam penerapan SPBE sehingga memudahkan pengelolaan dan pemantauan kemajuan implementasi SPBE. Namun, kelemahan yang ada adalah keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan SPBE secara menyeluruh. Meskipun sudah ada Tim Koordinasi, tidak terlihat adanya pelatihan atau peningkatan kapasitas secara terstruktur untuk anggota tim dalam hal pengelolaan dan implementasi teknologi terkini.

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan pemenuhan yang cukup baik dengan adanya kebijakan yang mengatur pengelolaan aplikasi dan manajemen data berbasis elektronik. Terdapat upaya untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi SPBE di tingkat daerah dalam penerapan sistem aplikasi berbagi pakai juga telah diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi, Namun, kelemahan yang ada adalah kurangnya koordinasi antar instansi dalam penerapan SPBE. Beberapa aplikasi yang ada belum sepenuhnya terhubung dengan aplikasi lainnya, yang menyebabkan pengelolaan data dan informasi yang terfragmentasi.

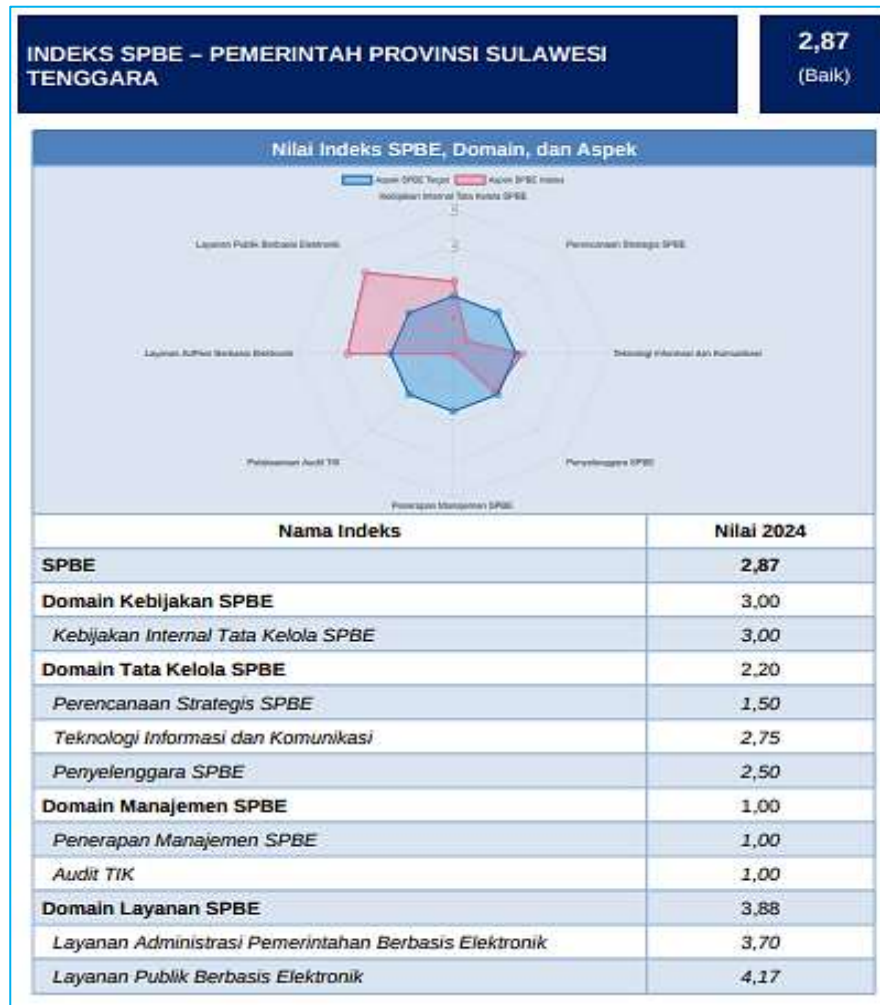
Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum menunjukkan kebijakan yang memadai terkait pelaksanaan audit TIK secara berkala. Tidak ditemukan mekanisme yang jelas mengenai audit dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK dan implementasi SPBE dikarenakan tidak adanya prosedur audit yang rutin untuk menilai kinerja SPBE dan memastikan bahwa sistem yang digunakan aman, efektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tanpa audit yang berkelanjutan, sulit untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan aplikasi yang telah diterapkan.

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya yang baik dalam mengembangkan aplikasi administrasi berbasis elektronik yang mempermudah pengelolaan administratif di berbagai instansi. Layanan administrasi, seperti pengelolaan kepegawaian dan perencanaan anggaran, sudah mulai berbasis elektronik dan Kebijakan yang telah diterapkan memungkinkan efisiensi dalam pengelolaan data administratif, namun, kelemahan yang terlihat adalah kurangnya pengintegrasian layanan administratif antara unit kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa aplikasi administrasi belum sepenuhnya terhubung, sehingga pengelolaan data dan proses administratif yang bersifat lintas sektor menjadi kurang efisien.

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah memperkenalkan berbagai layanan publik berbasis elektronik, seperti layanan administrasi kependudukan dan e-Government. Beberapa aplikasi layanan publik sudah tersedia untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah sehingga mempermudah interaksi masyarakat dengan pemerintah, namun kelemahan utama adalah kurangnya integrasi layanan publik dengan sistem lainnya yang ada di daerah. Beberapa layanan masih berjalan secara terpisah, dan belum

sepenuhnya memanfaatkan potensi transaksi data yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Gambar 2.46. Indeks dan Nilai SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber: Kemenpan RB Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2024

Pada **Indeks Pelayanan Publik**, tahun 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik atau PEKPPP. Evaluasi pelayanan publik didasarkan pada sembilan layanan yang diprioritaskan dalam arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sembilan layanan tersebut adalah layanan pendidikan, kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan kepolisian, administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, pertukaran data, serta portal layanan publik. PEKPPP merupakan Upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh nilai indeks pelayanan publik. Hasil indeks pelayanan publik dijadikan salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi,

Indikator evaluasi pelayanan publik ini adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi dari unit penyelenggara pelayanan. Nilai indeks pelayanan publik yang nantinya diterima oleh unit, dilihat pula dari penilaian atau

persepsi masyarakat, komitmen tata kelola, dan penilaian ahli sesuai bukti dukung serta kesesuaian jawaban. yang tujuan akhir dari penilaian ini adalah pelayanan publik berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Skema PEKPPP pada tahun 2024 dibagi menjadi tiga. Pertama PEKPPP nasional dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan daerah sesuai unit lokus evaluasi yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian PANRB. Sedangkan Skema kedua adalah PEKPPP mandiri. Pada skema ini, instansi pemerintah melaksanakan evaluasi kepada unit lokus diluar unit PEKPPP nasional, dan dilaporkan kepada Kementerian PANRB. Sedangkan skema ketiga adalah PEKPPP khusus. Skema ini dilakukan sesuai dengan arahan strategis pemerintah dan dalam rangka perluasan cakupan PEKPPP. Evaluator PEKPPP khusus adalah masing-masing instansi. Unit lokus evaluasi yang diusulkan adalah *core business* atau unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan pernah dievaluasi pada periode 2020-2023.

Untuk PEKPPP nasional, unit lokus evaluasi pada kementerian/lembaga adalah satu *core business* masing-masing kementerian. Sementara lokus pemerintah provinsi adalah RSUD, Dinas Sosial, dan Samsat. Sedangkan lokus bagi pemkab dan pemkot adalah RSU, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan publik pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serta kabupaten Kota pada tahun 2024 yang ditetapkan melalui Surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 659 tahun 2024 dengan kategori penilaian pelayanan publik yang menjadi lokus pada unit kerja dengan menghasilkan nilai dan kategori dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48. Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/kota Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

No	Uraian	IPP Dinas Sosial	IPP RSUD	IPP Samsat Bappenda	IPP Provinsi/ kab/kota	Kategori
1	Kabupaten Konawe	4,17	4,53	3,91	4,20	A-
2	Kota Kendari	2,87	3,55	3,90	3,44	B-
3	Kota Baubau	2,9	3,56	3,48	3,31	B-
4	Kabupaten Konawe Kepulauan	3,30	3,63	3,8	3,58	B
5	Kabupaten Konawe Selatan	2,83	4,11	3,51	3,48	B-
6	Kabupaten Kolaka	3,43	3,04	3,76	3,41	B-
7	Kabupaten Buton Utara	3,67	3,53	2,92	3,37	B-
8	Kabupaten Muna	3,27	3,03	3,75	3,35	B-
9	Kabupaten Buton	3,30	NA	3,38	3,34	B-
10	Kabupaten Bombana	3,25	3,12	3,6	3,32	B-
11	Kabupaten Kolaka Timur	3,21	3,01	3,62	3,28	B-
12	Kabupaten Wakatobi	3,27	3,37	3,04	3,23	B-
13	Kabupaten Konawe Utara	3,08	3,29	3,18	3,18	B-
14	Kabupaten Buton Tengah	2,90	2,94	2,46	2,77	C
15	Kabupaten Muna Barat	2,59	2,93	2,73	2,75	C
16	Kabupaten Kolaka Utara	1,61	3,25	3,37	2,74	C
17	Kabupaten Buton Selatan	2,90	2,85	2,22	2,66	C
18	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,32	3,91	2,25	2,83	C

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2024

2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Penegakan Perda. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan tertib dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara di dalam Penegakan Perda melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka memelihara serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada dasarnya adalah persyaratan absolute yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan supaya dapat berjalan dengan baik dan tertib sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Pembinaan serta Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, rekapitulasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan serta data capaian sebagai berikut:

Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Koordinasi, Pembinaan serta Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Koordinasi, Pembinaan serta Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	6	6	100%
Penegakan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Pergub serta Produk Hukum lainnya	Jumlah Penegakan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Pergub serta Produk Hukum lainnya.	12	18	150%

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dapat dilihat pada rekapitulasi sebagai berikut:

No.	Perda/pegub	Jumlah Kegiatan Penegakan Perda/Pegub
1.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;	6
2.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;	12
Total Jumlah Kegiatan Penegakan Perda		18
1	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.	24
Total Jumlah Kegiatan Penegakan Pergub		24

Penanganan Dampak Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dapat dilihat pada rekapitulasi sebagai berikut:

No.	Kasus/Pelanggaran	Regulasi Yang digunakan
1.	Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Asset Rumah Dinas Kehutanan Prov. Sultra oleh penghuni yang berlokasi di Jalan Sao-Sao, Kota Kendari;	1).Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 2). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.	Penertiban pedagang yang berjualan pada Jembatan Teluk Kendari yang berlokasi di Kec. Poasia, Kota Kendari.	1).Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3.	Kasus Penyalahgunaan dan pemanfaatan Asset Tanah milik Pemprov. Sultra yang diklaim sebagai tanah masyarakat yang akan dibangun sebagai Perumahan yang berlokasi de depan Kantor Dinas Perhubungan Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari	1).Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 2). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4.	Kasus Penyalahgunaan dan pemanfaatan Asset Kompleks Tugu Persatuan (Eks. Mtq) Pemprov Sultra Oleh Para Pedagang yang berlokasi di Kec. Mandonga, Kota Kendari;	1).Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 2). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5.	Kasus Penyalahgunaan dan pemanfaatan Asset oleh para pedagang yang berjualan dibahu jalan dan diatas Trotoar yang berlokasi di Kompleks Bumi Praja Kec. Anduonohu, Kota Kendari	1).Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 2). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6.	Kasus Penyalahgunaan dan pemanfaatan Asset Kompleks Tugu Persatuan (Eks. Mtq) Pemprov Sultra Oleh Para Pedagang yang berlokasi di Kec. Mandonga, Kota Kendari;	1).Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 2). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7.	Penertiban pedagang yang berjualan pada Jembatan Teluk Kendari yang berlokasi di Kec. Poasia, Kota Kendari.	1).Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
8.	Kasus Penyalahgunaan dan pemanfaatan Asset Kompleks Tugu Persatuan (Eks. Mtq) Pemprov Sultra Oleh Para Pedagang yang berlokasi di Kec. Mandonga, Kota Kendari;	1).Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 2). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010

No.	Kasus/Pelanggaran	Regulasi Yang digunakan
		Tentang Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
9.	Penertiban pedagang yang berjualan pada Jembatan Teluk Kendari yang berlokasi di Kec. Poasia, Kota Kendari.	1).Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
10.	Penertiban Alat Kampanye (Baleho, Spanduk dll) yang dipasang/tempel di Lokasi Asset Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.	1).Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 2). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
11.	Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Anggota Satpol PP Prov. Sultra	1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 48 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara.
12.	Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Asset Rumah Dinas Kehutanan Prov. Sultra oleh penghuni yang berlokasi di Jalan Sao-Sao, Kota Kendari;	1). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
Total Jumlah Penanganan Kasus/Pelanggaran dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur(Pergub) Tahun 2023		12 (Dua belas) Kasus/Pelanggaran yang tertangani

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999). Oleh sebab itu, penting bagi semua pihak untuk melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM (P5 HAM).

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk mengeluarkan produk hukum terus berupaya untuk melaksanakan P5 HAM. Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah adalah dengan melanjutkan peraturan terkait Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM Tahun 2015-2019 telah diperbaharui dengan menerbitkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021 – 2025 sebagai lanjutan dari RANHAM sebelumnya (pemerintah telah menerbitkan 4 (empat) RANHAM, yaitu generasi ke-1 diluncurkan tahun 1998, generasi ke-2 tahun 2005, generasi ke-3 tahun 2011, dan generasi ke-4 pada tahun 2015).

Pada Aksi HAM Daerah tahun 2024 sedikit berbeda dengan Aksi HAM Daerah tahun 2023. Pada tahun 2023 terdapat delapan (8) Aksi HAM untuk Pemerintah Provinsi dan tujuh (7) Aksi HAM untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sedangkan untuk tahun 2024 terdapat tujuh (7) Aksi HAM untuk Pemerintah Provinsi dan enam (6) Aksi HAM untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota. Tujuh (7) Aksi HAM untuk Pemerintah Provinsi yaitu :

- Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga dibidang usaha mikro, kecil dan menengah.
- Melakukan revidu, kajian dan perubahan terhadap kebijakan dan peraturan perundang undangan yang diskriminatif terhadap perempuan di tingkat nasional dan daerah.
- Melaksanakan program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak sesuai dengan konvensi hak anak.
- Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik Negara/daerah dan swasta.
- Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya.
- Membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Kriteria Keberhasilan AKSI 1 : Meningkatnya partisipasi dan akses perempuan kepala keluarga dibidang usaha mikro kecil dan menengah. Dengan Kelompok Sasaran : Perempuan.

Kriteria Keberhasilan AKSI 2 : Menurunnya jumlah kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang diskriminatif terhadap perempuan. Dengan kelompok sasaran: perempuan

Kriteria Keberhasilan AKSI 3 : Menurunnya jumlah pekerja anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. Dengan Kelompok Sasaran : Anak.

Kriteria Keberhasilan AKSI 4 : Meningkatnya jumlah perusahaan yang menyediakan sistem dukungan kerja (akomodasi yang layak) penyandang disabilitas di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara, daerah dan swasta sesuai dengan ragam disabilitas serta Tersedianya data jumlah penyandang disabilitas yang bekerja di sektor swasta. Dengan Kelompok Sasaran : Penyandang Disabilitas.

Kriteria Keberhasilan AKSI 5 : Meningkatnya akses layanan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas dan Meningkatnya jumlah dan kualitas sekolah inklusi dan perguruan tinggi yang sudah memiliki unit layanan disabilitas. Dengan Kelompok Sasaran : Penyandang Disabilitas.

Kriteria Keberhasilan AKSI 6 : Meningkatnya jumlah daerah yang mengalokasikan bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas. Dengan Kelompok Sasaran : Penyandang Disabilitas.

Kriteria Keberhasilan AKSI 7 : Meningkatnya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di sector transportasi darat, laut, dan udara serta Meningkatnya jumlah layanan transportasi yang akses dan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah. Dengan Kelompok Sasaran : Penyandang Disabilitas.

Secara nasional Pelaksanaan Aksi HAM Periode B08 Tahun 2024 mengalami peningkatan nilai capaiannya dari periode B04 dengan rincian sebagai berikut: Capaian Kementerian/Lembaga meningkat menjadi 95,5 yang semula mendapatkan nilai 92,2 pada periode B04 sedangkan Capaian Provinsi meningkat menjadi 74,9 yang semula

mendapatkan nilai 71,1 pada periode B04 dan Capaian Kabupaten/Kota meningkat menjadi 81,4 yang semula mendapatkan nilai 78,2 pada periode B04.

Capaian dihitung menggunakan sistem penghitungan kumulatif dari unsur-unsur capaian di setiap Aksi HAM, baik bagi Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Perhitungan di atas didasari oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berpartisipasi pada pelaksanaan Aksi HAM B08 dengan rincian partisipasi sebagai berikut:

- Partisipasi Kementerian/Lembaga sebanyak 29 dari 30.
- Partisipasi Provinsi sebanyak 34 dari 38.
- Partisipasi Kabupaten/Kota sebanyak 449 dari 508.

Untuk capaian penilaian Aksi HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**PENILAIAN CAPAIAN AKSI HAM TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

A. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

KELOMPOK SASARAN	AKSI	PERIODE			NILAI CAPAIAN TAHUN 2024 $\frac{B04 + B08 + B12}{3}$
		B04	B08	B12	
Perempuan	1	80	95	100	91.67
	2	65	95	90	83.33
Anak	3	55	100	90	81.67
	4	95	100	100	98.33
Penyandang Disabilitas	5	100	100	100	100
	6	100	85	95	93.33
	7	100	40	75	71.67
RATA-RATA CAPAIAN		85	87.9	92.9	88.6

Sumber: Biro Hukum Setda Prov Sultra

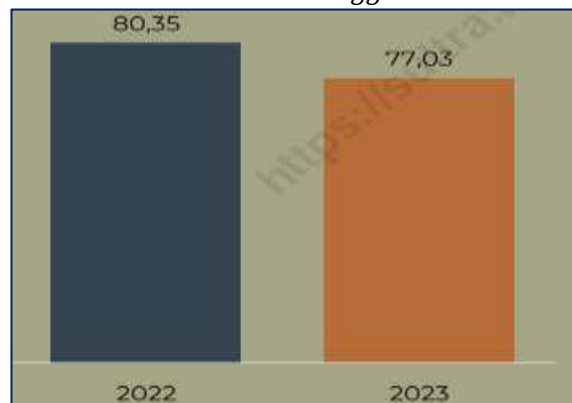
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur pembangunan demokrasi di Indonesia. Pemerintah terus mendorong pembangunan sektor ini yang antara lain dapat dilihat dengan telah memasukkan IDI sebagai salah satu target pembangunan dalam RPJMN 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, bahkan telah masuk ke dalam RPJPN 2025-2045 dan diselaraskan hingga RPJPD bagi seluruh Pemerintah Daerah. IDI disusun dalam kerangka kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu Kemenko Polhukam, BPS, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Pemerintah Provinsi, serta akademisi dan kalangan masyarakat yang dilibatkan dalam tahapan pengukuran IDI. IDI pertama kali dihitung BPS pada tahun 2009 dan yang terakhir IDI 2023. Selama 13 tahun penghitungan dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu perbaikan.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI di gunakan skala 0-100 skala ini merupakan skala normatif, dengan 0 untuk menggambarkan tingkat terendah dan 100 untuk menggambarkan tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoritik dapat terjadi bila semua semua indicator mendapatkan skor

yang paling rendah (Skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks =100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0-100 tersebut dibagi kedalam tiga kategori tingkat demokrasi. Yakni “baik” (indeks>80). “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Tenggara 2023 tercatat sebesar 77,03 (skala 0 – 100), angka ini turun 3,32 poin dibandingkan dengan IDI Sulawesi Tenggara 2022 yang ketika itu tercatat sebesar 80,35. Meskipun tingkat demokrasi Sulawesi Tenggara secara umum masih dalam kategori “sedang” namun angka ini masih di bawah angka IDI Nasional tahun 2023 yang sebesar 79,51.

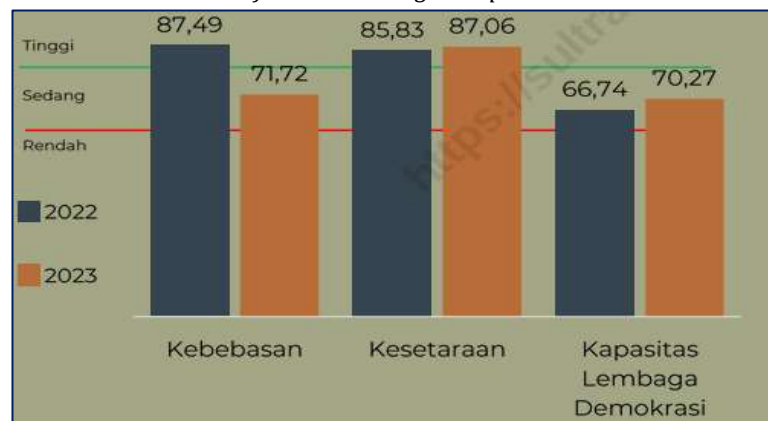
Gambar 2.47. Grafik perkembangan Nilai Indeks Demokrasi Provinsi Sulawesi Tenggara 2022-2023



Sumber BPS Sulawesi Tenggara Buklet Indeks Demokrasi Indonesia 2023

Angka IDI Sulawesi Tenggara 2023 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Jika dilihat pada grafik di bawah, terjadi peningkatan Skor IDI pada aspek kesetaraan dan aspek lembaga kapasitas demokrasi berturut-turut sebesar 1,23 poin dari 3,53 poin, namun terjadi penurunan tajam pada aspek kebebasan sebesar 15,77 poin. Perubahan ini mengubah kategori aspek kebebasan yang awalnya tinggi menjadi sedang, sedangkan aspek kesetaraan tetap berkategori tinggi dan aspek kapasitas lembaga demokrasi tetap berkategori sedang.

Gambar 2.48. Grafik Perkembangan Aspek IDI tahun 2022-2023



Sumber BPS Sulawesi Tenggara Buklet Indeks Demokrasi Indonesia 2023

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. Dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, diperlukan tolak ukur yang lebih konkrit dan komprehensif untuk menilai capaian daripada kinerja yang dimaksud. Terdapat 3 Dimensi, 7 Sub Dimensi dan 37 Indikator yang menjadi variabel dalam pengukuran Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) yang juga merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Se-Sulawesi Tenggara sehingga belum dapat menyajikan data secara utuh pada 17 Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara, pada tahun 2024 baru terdapat 2 Kabupaten yang memiliki data basic penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (IPKKU) yaitu Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna sedangkan 13 Kabupaten dan 2 Kota masih dalam tahap koordinasi dan konsultasi termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara juga masih dalam tahap konsultasi di Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada capaian 2 Kabupaten yaitu Kab. Bombana dan Kab. Muna, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum (IPKKU) karena memiliki bobot senilai 0,490 didikuti oleh dimensi Sistem dengan bobot 0,312 dan Dimensi yang terakhir adalah Strategi dengan bobot 0,198. Adapun jika dilihat lebih rinci, pada dimensi sumber daya manusia sub dimensi pemberdayaan SDM dengan sub dimensi peningkatan kapasitas SDM memiliki bobot yang sama, artinya prioritas dari kedua indikator tersebut seimbang.

Untuk dimensi sistem sub dimensi yang menjadi prioritas utama adalah perencanaan dan anggaran, sedangkan sub dimensi sarana prasarana dan sub dimensi akuntabilitas memiliki bobot yang sama dan menjadi proiritas kedua. Pada dimensi strategi, sub dimensi yang menjadi prioritas utama adalah strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas sedangkan strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada berada pada prioritas kedua. Berikut variabel capaian Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kabupaten Bombana dan Kabupaten Muna.

Tabel 2.49. Hasil Skor Sub Dimensi Pada Dimensi Strategi

INSTANSI	SUB DIMENSI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA (BOBOT 0,333)	SUB DIMENSI PENYELENGGARAAN TIBUMTRANMAS (BOBOT 0,667)	DIMENSI STRATEGI (BOBOT 1,98)
KAB. BOMBANA	100	100	100
KAB. MUNA	83,675	59,923	67,832

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sultra 2025 Diolah

Tabel 2.50 Hasil Skor Sub Dimensi Pada Dimensi SDM

INSTANSI	PEMBERDAYAAN SDM (BOBOT 0,5)	PENINGKATAN KAPASITAS SDM (BOBOT 0,5)	SDM (BOBOT 0,49)
KAB. BOMBANA	100	67,115	83,558
KAB. MUNA	33,839	0	16,919

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sultra 2025 Diolah

Tabel 2.51. Hasil Skor Sub Dimensi Pada Dimensi Sistem

INSTANSI	SARANA DAN PRASARANA (BOBOT 0,25)	PENRENCANAAN DAN ANGGARAN (BOBOT 0,5)	AKUNTABILITAS (BOBOT 0,25)	SISTEM (BOBOT 3,12)
KAB. BOMBANA	100	100	87,122	96,781
KAB. MUNA	50,586	100	72,699	80,821

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sultra 2025 Diolah

Tabel 2.52. Skor Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NO	INSTANSI	IPKKU	KATEGORI
1.	KAB. BOMBANA	90,939	PENYELENGGARAAN TRANTIBUM SANGAT BAIK
2.	KAB. MUNA	46,938	PENYELENGGARAAN TRANTIBUM CUKUP

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sultra 2025 Diolah

Setelah dilakukan proses analisis untuk menyusun formulasi indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (IPKKU), hal yang selanjutnya perlu untuk dilakukan adalah melaksanakan kegiatan lanjutan sebagai bentuk uji coba formulasi indeks yang telah terbentuk. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk pengolahan data indeks itu sendiri agar dapat mengetahui realibilitas dan visibilitas indeks guna melakukan penyempurnaan indikator pada indeks, sebelum akhirnya indeks tersebut dapat diimplementasikan.

3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah. Pengukuran IDSD 2024 ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum (WEF). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran agar relevan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data. Pada IDSD 2024 ini dilakukan penyesuaian terhadap beberapa indikator dan cara penghitungan skor sehingga lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Sebagai informasi, skor nasional IDSD (berdasarkan rata-rata skor seluruh provinsi) adalah sebesar 3,43 dari skala 5.

IDSD 2024 terdiri atas empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Kerangka IDSD 2024 secara umum sama dengan IDSD 2023. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Untuk keperluan ilustrasi, penjelasan mengenai hubungan antara komponen, pilar, dimensi dan indikator dalam IDSD 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.49. Kerangka Indeks Daya Saing Daerah 2024



Sumber : BRIN, 2024

Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam menggabungkan perspektif mikro di level industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (basic requirement factors), faktor penguat efisiensi (efficiency enhancers), dan faktor inovasi dan kecanggihan (innovation and sophistication factors). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam tiga komponen awal pembentuk daya saing.

Dalam perjalanannya, konsep dasar daya saing ini mengalami penyesuaian, terutama dengan menguatnya tuntutan untuk fokus pada kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan dalam hal ini TIK dan respon terhadap guncangan (shock), baik internal maupun eksternal yang diindikasikan oleh kestabilan ekonomi makro. Penyesuaian ini menyebabkan komponen daya saing yang semula tiga diperluas menjadi empat komponen dasar daya saing yang diadopsi menjadi kerangka pengukuran IDSD 2024, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini tetap dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Untuk tetap menjaga objektivitas pengukuran, seluruh data pada IDSD 2024 masih menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Penyusunan IDSD 2024 dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, mulai dari pemantapan kerangka konseptual, evaluasi indikator, pengumpulan data, pengolahan data, penghitungan skor akhir dengan agregasi, hingga kontrol kualitas data akhir (uji statistik). Pengukuran IDSD 2024 dilakukan pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Namun hanya 463 kabupaten/kota yang bisa dihitung skor IDSD-nya, sementara 51 kabupaten/kota yang tidak bisa dihitung skornya karena ketidaklengkapan data. Namun demikian, IDSD 2024 dilengkapi dengan kalkulator IDSD 2024 sehingga pemerintah daerah atau siapapun dapat melakukan simulasi perhitungan skor IDSD-nya sendiri. Untuk Skor IDSD Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari beberapa pilar komponen sebagai berikut:

Tabel 2.53. Skor Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten Kota Tahun 2024

NASIONAL/PROVINSI /KABUPATEN DAN KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Institusi	Infrastruktur	Adopsi TIK	Stabilitas Ekonomi Makro	Kesehatan	Keterampilan	Pasar Produk	Pasar Tenaga Kerja	Sistem Keuangan	Ukuran Pasar	Dinamisme Bisnis	Kapabilitas Inovasi	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROV. SULAWESI TENGGARA	4,23	2,79	3,41	4,18	3,88	4,33	2,24	3,10	2,54	4,32	3,02	3,11	3,43
RATA-RATA KAB/KOTA	4,39	2,89	4,07	3,75	3,78	4,13	3,31	3,50	1,89	3,76	3,79	1,93	3,44
BUTON	3,94	2,94	3,72	3,24	3,63	4,16	3,22	3,02	2,77	3,58	4,13	2,25	3,38
MUNA	4,34	2,72	4,10	3,31	3,80	4,16	4,77	3,84	2,39	3,85	2,68	2,29	3,52
KONAWE	4,58	3,05	3,78	2,55	3,79	4,23	2,11	3,96	1,52	4,16	2,93	1,52	3,18
KOLAKA	4,73	2,86	3,91	4,25	3,87	4,06	1,91	3,57	1,42	4,42	4,04	2,36	3,45
KONAWE SELATAN	4,67	3,11	4,30	3,80	3,84	4,01	4,37	3,75	1,55	4,09	4,14	1,49	3,59
BOMBANA	4,77	2,63	4,19	3,92	3,69	4,12	2,72	4,21	2,07	3,82	3,80	1,45	3,45
WAKATOBI	4,26	2,91	4,21	3,47	3,81	4,11	3,77	3,08	1,40	3,64	4,43	2,14	3,44
KOLAKA UTARA	4,40	2,68	3,84	3,90	3,80	4,18	2,52	2,63	1,62	3,95	4,08	1,47	3,26
BUTON UTARA	4,19	2,38	3,59	3,96	3,84	4,13	3,50	3,60	1,40	3,49	4,20	2,06	3,36
KONAWE UTARA	4,09	2,78	3,64	4,07	3,72	4,27	2,47	3,86	1,79	3,61	2,76	0,81	3,16
KOLAKA TIMUR	4,21	3,16	3,60	3,93	4,01	4,14	3,70	3,09	2,17	3,65	2,60	1,55	3,32
KONAWE KEPULAUAN	-	3,06	4,20	3,84	3,62	4,20	2,67	2,28	2,24	3,14	4,10	2,63	-
MUNA BARAT	4,35	2,78	4,26	4,03	3,79	4,06	2,80	3,69	0,58	3,41	4,07	1,21	3,25
BUTON TENGAH	4,42	2,80	4,12	4,05	3,57	3,94	3,37	3,11	0,76	3,36	4,34	1,34	3,27
BUTON SELATAN	4,33	3,07	4,13	3,66	3,57	3,84	2,35	3,19	1,23	3,43	4,42	1,98	3,27
KOTA KENDARI	4,74	2,92	4,91	3,90	4,09	4,25	5,00	4,38	4,26	4,38	3,46	3,62	4,16
KOTA BAU BAU	4,16	3,31	4,71	3,82	3,88	4,35	5,00	4,30	2,92	3,97	4,29	2,73	3,95

Sumber Badan Riset dan Inovasi Nasional 2024 diolah

4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah adalah hasil dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang diukur dari berbagai aspek seperti masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampaknya. Ini mencakup berbagai bidang seperti perencanaan pembangunan, tata ruang, ketertiban umum, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memenuhi tujuan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci, atau yang lebih dikenal dengan singkatan IKK, adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pemerintahan, IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. IKK tidak hanya sekadar angka atau statistik, melainkan cerminan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintahan. Indikator ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang tingkat pencapaian suatu program atau kebijakan. Berikut indikator Kinerja Kunci Hasil Outcome Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

Tabel 2.54 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan	Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah menengah atas	148.262	x 100%	96,85%
				Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan	153.091		
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus	2.034	x 100%	71,97%
				Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan	2.826		
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung Rumah Sakit Rujukan di seluruh provinsi	4.053	x 100%	0,14%
				Jumlah penduduk provinsi	2.824.589		
		2	Presentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	37	x 100%	92,50%
				Jumlah RS provinsi	40		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$	100,00%	
		4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	$\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$	100,00%	
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan provinsi (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha)}} \times 100\%$	97,79%	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan provinsi (m)}} \times 100\%$	97,79%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan provinsi}} \times 100\%$	$\frac{11,776}{12,543} \times 100\%$	93,89%	
		4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kab/kota}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00%	IKK tersebut merupakan kewenangan Kementerian PUPR (Surat Keterangan)
		5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	$\frac{\text{Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional}}{\text{Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional}} \times 100\%$	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00%	IKK tersebut merupakan kewenangan Kementerian PUPR (Surat Keterangan)
		6	Rasio Kemantapan Jalan	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi}} \times 100\%$	$\frac{720,3}{1.076,94} \times 100\%$	66,88%	
		7	Rasio tenaga kerja kontruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan asli	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja kontruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli}}{\text{Total tenaga kerja kontruksi}} \times 100\%$	$\frac{129}{132} \times 100\%$	97,73%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi	132		
4	Perumahan Rakyat	1	Presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun N}} \times 100\%$	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00%	Surat Keterangan bahwa pada tahun 2024 tidak terjadi bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara
		2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi Kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$	$\frac{2}{2} \times 100\%$	100,00%	
		3	Presentase Luas Kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas Kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani}}{\text{Luas Kawasan kumuh 10 - 15 Ha}} \times 100\%$	$\frac{8,4 \text{ Ha}}{319,18 \text{ Ha}} \times 100\%$	2,63%	
		4	Presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	$\frac{\text{Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah total satuan perumahan}} \times 100\%$	$\frac{29}{197} \times 100\%$	14,22%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				Jumlah satuan perumahan	204		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah gangguan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{64}{64} \times 100\%$	100,00%	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{8}{38} \times 100\%$	21,05%	
		3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100,00%	
		4	Persentase penanganan pra bencana	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana}}{\text{Jumlah kabupaten kota di wilayah provinsi}} \times 100\%$	$\frac{17}{17} \times 100\%$	100,00%	
		5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana}} \times 100\%$	$\frac{1}{17} \times 100\%$	5,88%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tepenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tepenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti}}{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$	79,14%	
		2	Persentase anak terlantar yang tepenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar di dalam panti yang tepenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti}}{\text{Jumlah anak terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$	100,00%	
		3	Persentase lanjut usia terlantar yang tepenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar yang tepenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti}}{\text{Pupulasi lanjut usia terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$	90,00%	
		4	Persentase gelandang dan pengemis yang tepenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang tepenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Pupulasi gelandangan dan pengemis terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti}} \times 100\%$	100,00%	
		5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tepenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tepenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Pupulasi}} \times 100\%$	100,00%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			tanggap darurat bencana provinsi			
				$\frac{\text{Pupulasi korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi}}{\text{-----}}$	9.897	
7	Tenaga Kerja	1	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja}}{\text{-----}} \times 100\%$	$\frac{1}{17} \times 100\%$	5,88%
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi}}{\text{-----}} \times 100\%$	$\frac{3.865}{1.476.461} \times 100\%$	0,26%
		3	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{-----}} \times 100\%$	$\frac{113.989.490.0}{1.476.461} \times 100\%$	77204538 44,70%
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{-----}} \times 100\%$	$\frac{7}{24} \times 100\%$	29,17%
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan}}{\text{-----}} \times 100\%$	$\frac{5.973}{\text{-----}} \times 100\%$	43,76%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah pencaker yang terdaftar 13.648		
		6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan ketenagakerjaan pada tahun n}}{\sum \text{Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{24}{29.396} \times 100\%$	0,08%
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di provinsi}} \times 100\%$	$\frac{3.381.020.358}{2.509.797.412.816,50} \times 100\%$	0,13%
		2	Rasio kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	$\frac{358}{888.373} \times 100\%$	0,040%
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 perempuan	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan di provinsi}} \times 100\%$	$\frac{145}{1.397.211} \times 100\%$	0,0104%
9	Pangan	1	Persentase cadangan pangan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan provinsi (Ton)}}{\text{-----}} \times 100\%$	$\frac{84,203}{\text{-----}} \times 100\%$	88,74%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				Jumlah kebutuhan pangan provinsi (Ton)	94,89		
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi	3.859 m	100,00%	
				----- x100% ----- x 100 %			
		Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	3.859 m				
		2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas Pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu	3.859 m	100,00%	
				----- x100% ----- x 100 %			
		Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum	3.859 m				
3	Tersedianya lokasi pembangunan lintas Kabupaten/Kota	Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi lintas Kab/Kota	x100% 0 m 100 %	0,00%	Surat Keterangan bahwa Tidak Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota di Sultra Tahun 2024		
		----- ----- x					
Luas izin lokasi yang diterbitkan	1 m						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	$\text{IKLH Prov} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$ $= 80,39$ <p> IKA = Indeks Kualitas Air = 65,32 IKU = Indeks Kualitas Udara = 94,04 IKL = Indeks Kualitas Lahan = 74,31 IKAL = Indeks Kualitas Air Laut = 81,29 </p>	80,39%	
		2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\% = \frac{0}{14} \times 100\%$	0,00%	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	$\frac{\text{Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun (2 Buku)}}{2} \times 100\% = \frac{2}{2} \times 100\%$	100,00%	
		2	Pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{OPD provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (17 PD)}}{\text{-----}} \times 100\% = \frac{17}{\text{-----}} \times 100\%$	42,50%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Seluruh OPD Provinsi (40 PD)	40	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per awal tahun -n)}} \times 100\%$	$\frac{98}{166} \times 100\%$	59,04%
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun -n)}} \times 100\%$	$\frac{281}{1.408} \times 100\%$	19,96%
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)			2,48
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	$\frac{254.658}{393.127} \times 100\%$	64,78%
		3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB}} \times 100\%$	$\frac{37.460}{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB}} \times 100\%$	9,53%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah pasangan usia subur	393.127	
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan)	46,7	
				<ul style="list-style-type: none"> ● IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah Trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi (jumlah kebutuhan lintas trayek pada provinsi tersebut) ● IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyebrangan) = Jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi pada provinsi tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada provinsi tersebut) 		
		2	V/C Ratio di jalan provinsi	V/C ratio di jalan provinsi	0,24	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{1}{41} \times 100\%$	2,44%
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$	$\frac{10}{12} \times 100\%$	83,33%
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lainnya}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	$\frac{72.490}{1.892.593} \times 100\%$	3,83%
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	$\frac{2.050}{4.767} \times 100\%$	43,00%
		2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha kecil keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{869}{15.647} \times 100\%$	5,55%
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun N Rp}11.053.608.541.212) - (\text{Jumlah investasi tahun N-1 Rp}14.369.593.070.000)}{\text{di provinsi}} \times 100\%$	$\frac{(3.315.984.528.788)}{\text{di provinsi}} \times 100\%$	-23,08%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah investasi tahun N-1 (Rp14.369.593.070.000) di provinsi	14.369.593.070.000	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{(Jumlah pemuda(16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi)}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi}} \times 100\%$	$\frac{93.874}{747.541} \times 100\%$	12,56%
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{(Jumlah pemuda(16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organberwirausaha di provinsi)}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi}} \times 100\%$	$\frac{1.243}{747.541} \times 100\%$	0,17%
	3	Peningkatan presetas olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		34 Medali	
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{39}{41} \times 100\%$	95,12%
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	$\frac{39}{41} \times 100\%$	95,12%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				----- Jumlah OPD -----	41	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- Jumlah area penilaian -----	195 x100% ----- x 100% 645	30,23%
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikannya ----- Jumlah cagar budaya yang ditetapkan -----	5 x100% ----- x 100% 5	100,00%
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		66,02%
		2	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensu dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)		72,31%
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang	$T = (a + i + s + j) / 4$ T = Tingkat ketersediaan arsip		24,5%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		
				s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK		Surat Keterangan Terlampir

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				<p>b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</p>		
				<p>a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>		
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	$\frac{\text{Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Provinsi (Ton)}}{\text{Target produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan (Ton)}} \times 100\%$	$\frac{695.645,56}{670.000} \times 100\%$	103,83%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	----- x 100 %	89,36%	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n (3.617) - Jumlah wisatawan tahun n-1 (2.154)}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1 (2.154)}} \times 100\% = \frac{1.463}{2.154} \times 100\%$	67,92%	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n (12.946.373) - Jumlah wisatawan tahun n-1 (12.804.460)}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1 (12.804.460)}} \times 100\% = \frac{141.913}{12.804.460} \times 100\%$	1,11%	
		3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\% = \frac{4.740}{9.619} \times 100\%$	49,28%	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB berlaku}} \times 100\% = \frac{950.000.000.000}{189.480.000.000.000} \times 100\%$	0,50%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ha)}}{\text{Luas panen (Ha)}} \times 100\%$	$\frac{470,56}{176.008} \times 100\%$	0,27%
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (1.749) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (1.659)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (1659)}} \times 100\%$	$\frac{90}{1.659} \times 100\%$	5,42%
28	Kehutanan	1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal}}{\text{Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi}} \times 100\%$	$\frac{203}{473} \times 100\%$	42,92%
		2	Persentase tingkat kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	$\frac{\text{Jumlah hutan yang rusak}}{\text{Jumlah hutan keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{7.321,64}{2.309.589,07} \times 100\%$	0,32%
		3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	$\frac{\text{Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha)}}{\text{Luas lahan kritis di provinsi (ha)}} \times 100\%$	$\frac{66}{311.732} \times 100\%$	0,02%

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	$\frac{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda}}{\text{Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi}} \times 100\%$	100,00%	
		2	Persentase desa yang teraliri listrik	$\frac{\text{Jumlah desa yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	100,00%	
30	Perdagangan	1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	$\frac{\text{Nilai ekspor non migas tahun berjalan/Tahun 2024 (USD. 4.346.961.168,98) - nilai ekspor non migas tahun sebelumnya/Tahun 2023 (USD. 3.925.144.860,85)}}{\text{Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya/tahun 2023 (USD. 3.925.144.860,85)}} \times 100\%$	10,75%	
		2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	$\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dina Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan}} \times 100\%$	83,33%	
		3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun}} \times 100\%$	23,53%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		4	Tertib Usaha	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB}}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}} \times 100\%$	$\frac{0}{1} \times 100\%$	0,00%
		5	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$	$\frac{68.509,80}{94.625} \times 100\%$	72,40%
		6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah barang yang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}} \times 100\%$	$\frac{200}{201} \times 100\%$	99,50%
		7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok harga barang kebutuhan pokok			
31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	$\frac{\text{Jumlah industri besar tahun n (26) - Jumlah industri besar tahun n - 1 (25)}}{\text{Jumlah industri besar tahun n - 1 (25)}} \times 100\%$	$\frac{1}{25} \times 100\%$	4,00%
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%		0

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut		
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	100,00%	Surat Keterangan
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	100,00%	Surat Keterangan
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	100,00%	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Ketentuan informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	85%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1+2)		
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (Realisasi)}}{\text{Jumlah APBD (Realisasi)}} \times 100\%$ $\frac{1.797.435.095,839,00}{4.832.228.211,378,00} \times 100\%$	37,20%	
		2	Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD (Realisasi)}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD (Realisasi)}} \times 100\%$ $\frac{1.644.433.708,802,94}{4.918.179.154,515,94} \times 100\%$	33,44%	
		3	Rasio belanja urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditure}}{\text{Jumlah APBD (Realisasi)}} \times 100\%$ $\frac{3.553.700.141,000,00}{4.832.228.211,378,00} \times 100\%$	73,54%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				Jumlah belanja APBD (Realisasi)	4.832.228.211 .378,00		
		4	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 Tahun terakhir		1. WTP TAHUN 2014 2. WTP TAHUN 2015 3. WTP TAHUN 2016 4. WTP TAHUN 2017 5. WTP TAHUN 2018 6. WTP TAHUN 2019 7. WTP TAHUN 2020 8. WTP TAHUN 2021 9. WTP TAHUN 2022 10. WTP TAHUN 2023	
		5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		Level 3	
		6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		Level 3	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas	x100%	4.973	x	100%	551,94%
				-----	-----				
			Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah		901				
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	x100%	432	x	100%	7,35%
-----	-----								
	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		5874						
3			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi		432			
				-----	x100%	-----	x	100%	100,00%
	Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		432						
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	x100%	0	x	100%	0,00%
				-----	-----				
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		195			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$	$\frac{221}{6.742} \times 100\%$	3,28%	
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$	$\frac{1.206.628.358,092}{4.507.624.935,141} \times 100\%$	26,77%	
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n (1.216.296.773.237) - Jumlah nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n-1 (1.312.218.476.364)}}{\text{Jumlah nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (1.312.218.476.364)}} \times 100\%$	$\frac{(95.921.703.127,00)}{1.312.218.476,364} \times 100\%$	-7,31%	
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	1	Budget execution : Deviasi relaisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{(\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}) - 1}{\text{Total belanja APBD}} \times 100\%$	$\frac{4.832.228.211,378,00}{4.983.955.882,836,00} \times 100\%$	96,96%	
		2	Revenue mobilization : Deviasi	$\frac{(\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}) - 1}{100} \times 100\%$	$\frac{100}{100} \times 100\%$	96,22%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{1.644.433.708}{1.709.059.682} \times 100\% = 96,19\%$		
			Total PAD dalam APBD	1.709.059.682,981		
		3	Assets Managements	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar assets tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	
		4	Cash Management : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{21.496.886.952,94}{4.912.167.261,707} \times 100\% = 0,44\%$	0,44%	
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan partisipasi publik)	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	$\frac{2.404.164.938,522}{2.803.939.422,700} \times 100\%$	85,74%	
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal Information)	$\frac{7}{12} \times 100\%$	58,33%	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci	12	

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam rangka memenuhi urusan wajib daerah terkait pelayanan dasar, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menerapkan 6 (enam) bidang urusan SPM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), berikut Standar Pelayanan Minimal (SPM) hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, yang dilaporkan pada Pada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan SPM.

1. Urusan Pendidikan

- A. Jenis Pelayanan Dasar
 1. Pendidikan Menengah
 2. Pendidikan Khusus (Luar Biasa)
- B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Bidang Urusan / Indikator	No	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan	100%
	2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	100%
Menguatkan Budaya dan Tradisi Lokal	1	Terlestarinya Cagar Budaya	40%

C. Realisasi Anggaran

Bidang Urusan / Indikator	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan	100%	92,03%
	2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	100%	47,96%
Menguatkan Budaya dan Tradisi Lokal	1	Terlestarinya Cagar Budaya	40%	20,54%

D. Alokasi Anggaran

Bidang Urusan / Indikator	No	Indikator Kinerja Utama	Alokasi Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan	967.584.521.298	905.489.097.840
	2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus		
Menguatkan Budaya dan Tradisi Lokal	1	Terlestariannya Cagar Budaya	6.223.214.490	5.671.608.405

E. Dukungan Personil

Berdasarkan data jumlah pegawai yang melaksanakan urusan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara hingga 31 Desember 2024, menunjukkan jumlah pegawai sebanyak 10.478 orang.

F. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

- Permasalahan :
 - a. Tingkat Partisipasi Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan (Usia 16-18 Tahun);
 - Target : 100%, realisasi : 92,03%
 - Terdapat kesenjangan 7,97% target dan realisasi. Ini menunjukkan masih ada sebagian warga usia 16-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas/kejuruan.
 - b. Tingkat Partisipasi Pendidikan Khusus (Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas);
 - Target : 100%, realisasi : 47,96%
 - Kesenjangan yang sangat besar, yaitu 52,04%. Ini menunjukkan rendahnya akses pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas.
 - c. Permasalahan Anggaran;
 - Terdapat selisih antara Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran. Ini dapat menjadi indikasi adanya hambatan dalam proses pelaksanaan program
- Solusi
 - a. Peningkatan Akses
 - Membangun lebih banyak sekolah, terutama di daerah terpencil;

- Menyediakan transportasi yang memadai bagi siswa;
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah khusus, serta meningkatkan jumlah tenaga pendidik khusus yang berkompeten;
 - Melakukan pendataan yang lebih akurat mengenai penyandang disabilitas usia sekolah;
- b. Peningkatan Mutu;
- Meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional;
 - Memperbarui kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman;
 - Meningkatkan fasilitas dan sarana pembelajaran;
 - Memperkuat program literasi dan numerasi di semua jenjang pendidikan.
- c. Efisiensi Anggaran;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan;
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program-program pendidikan.
2. Penguatan Budaya dan Tradisi Lokal
- Permasalahan :
 - a. Terlestarinya Cagar Budaya;
 - Target : 40%, realisasi : 20,54%
 - Kesenjangan yang signifikan, yaitu 19,46%. Ini menunjukkan upaya pelestarian cagar budaya belum optimal.
 - b. Permasalahan anggaran;
 - Terdapat selisih antara Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran. Ini dapat menjadi indikasi adanya hambatan dalam proses pelaksanaan program.
 - Solusi
 - a. Peningkatan Pelestarian
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya cagar budaya;
 - Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait pelestarian cagar budaya;
 - Meningkatkan anggaran untuk pelestarian cagar budaya;
 - Melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian cagar budaya;
 - Melakukan inventarisasi dan dokumentasi cagar budaya secara komprehensif.
 - b. Efisiensi Anggaran
 - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran kebudayaan;
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program-program pelestarian cagar budaya.
3. Kesimpulan
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu meningkatkan upaya dalam mencapai target-target kinerja di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antar instansi, peningkatan kapasitas SDM, dan efisiensi penggunaan anggaran.

2. Urusan Kesehatan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan disusun Standar Teknis Penerapan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

Berdasarkan PMK Nomor 6 Tahun 2024 dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan terdiri dari 2 Indikator SPM yakni pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi.

1. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau berpotensi Bencana Provinsi

a) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa.

Ketersediaan logistik untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dapat dilihat pada tabel berikut

No	Jenis Kebutuhan	Kondisi saat ini
1	Obat-obatan dan baham medis habis pakai	Jenisnya tersedia dengan jumlah yang terbatas sesuai kebutuhan
2	Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan	Tersedia dengan jumlah terbatas
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	Belum tersedia

b) Standar Jumlah dan Kualitas Personei/Sumber daya manusia.

Saat ini tersedia SDM Kesehatan yang siap memberikan pelayanan kesehatan 24 jam di Pos Kesehatan bagi penduduk terdampak bekerjasama dengan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah bencana tersebut. SDM kesehatan dimaksud adalah dokter umum, perawat, bidan, sanitarian dan gizi. Khusus untuk pengiriman Tim penanggulangan krisis juga sudah dibentuk di Provinsi.

2. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi (KLB)

a) Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa. Ketersediaan logistik penunjang pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kebutuhan	Kondisi saat ini
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Tersedia dengan jumlah memadai
2	Profilaksis / Vitamin/ Obat / vaksin	Tersedia sesuai dengan kasus dan sasaran terdampak

No	Jenis Kebutuhan	Kondisi saat ini
3	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, termometer badan, tensimeter, senter, test diagnostik cepat)	Tersedia dengan jumlah cukup
4	Alat dan bahan pengambilan spesimen (tabung, pot, media amies, dll) untuk specimen yang berasal dari manusia dan lingkungan sesuai jenis penyakit	Tersedia dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan
5	Wadah pengiriman spesimen (<i>Specimen carrier</i>)	Tersedia dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan
6	Tempat sampah biologis	Tersedia dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan
7	Formulir: <ul style="list-style-type: none"> - Form penyelidikan epidemiologi - Lembar KIE - Alat tulis 	Tersedia sesuai dengan kebutuhan

- b) Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini tersedia SDM Kesehatan yang tergabung dalam Tim Manajemen Krisis Kesehatan/kluster Kesehatan dengan No. SK : 0009 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Penilaian Kesehatan Cepat (Rapid Health assessment/RHA) Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisiskesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100

C. Realisasi Anggaran

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	REALISASI		
		Jumlah orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang terlayani	Capaian (4):(3)x100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	8.587	8.587	100
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	2.824.589	2.824.589	100

Kinerja Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 adalah 100%, dimana pelayanan bencana dilakukan melalui kegiatan pra krisis yaitu pemetaan risiko kesehatan di wilayah yang beresiko bencana. Adapun penanganan KLB adalah melalui penanganan kasus pertusis, campak, keracunan serta kasus difteri yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi SPM bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	318,229,000	236,396,765	74.29
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	225,193,000	207,020,765	91.93
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15,525,000	0	0.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	228,000	228,000	100.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan	440,000	440,000	100.00

Kode Rek	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
	Kantor- Bahan Cetak			
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9,000,000	8,890,765	98.79
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14,000,000	14,000,000	100.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	109,200,000	109,060,000	99.87
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76,800,000	74,402,000	96.88
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	28,800,000	17,076,000	59.29
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,800,000	17,076,000	59.29
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kab/Kota	168,936,000	164,670,000	97.47
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	236,000		0.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168,400,000	164,370,000	97.61
5.1.02.01.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	300,000	100
1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/nasional	64,000,000	12,300,000	19,22
5.1.02.01.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	64,000,000	12,300,000	19.22
1.02.02.1.02.26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	30,200,000	5,735,000	18,99
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5,737,700	5,735,000	99,95
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	390,000	0	0.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	672,300	0	0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,400,000	0	0.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,000,000	0	0.00

E. Dukungan Personil

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara :

No	Keterangan	Dinkes Provinsi	Balab Kes	Bapelkes	Farmasi	Total
1	PNS berdasarkan pendidikan					
	- S3	0	0	1	0	1
	- S2	80	2	11	4	97
	- S1	127	24	21	11	183
	- D3	21	5	5	0	31
	- D1	2	1	0	0	3
	- SLTA	12	1	10	2	25
	Jumlah	242	33	48	17	340

Berikut data jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara :

No	SDM Kesehatan	Jumlah SDM	Keterangan
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana		
	Dokter	9	
	Perawat	10	
	Bidan	8	
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	
	Tenaga Penyuluh	13	
	Tenaga Keswa	3	
II	Kejadian Luar Biasa		
	Dokter	6	
	Tenaga Kesmas Epidemiologi	6	
	Tenaga Kesmas Kesling	11	
	Tenaga Kesmas Entomologi	1	
	Tenaga Laboratorium	10	
	Tenaga Penyuluh/Promosi Kesehatan	12	
	Tenaga Kesehatan Yang terlibat dalam penyelidikan epidemiologi yang disesuaikan dengan jenis KLB	10	
	Jumlah	115	

F. Permasalahan, Solusi, Kesimpulan dan Saran

Permasalahan :

1. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana dan KLB merupakan data prediksi berdasar data kejadian sebelumnya sehingga data sasaran pelayanan digunakan prediksi;
2. Belum ada data sasaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
3. Keterbatasan dalam sistem pelaporan, sarana mobilitas, dan anggaran.

Solusi :

1. Penghitungan sasaran menggunakan sumber data pemetaan wilayah risiko bencana dari BPBD Provinsi dan Data BPS;
2. Data sasaran ditetapkan oleh Kepala Daerah;
3. Pada penghitungan capaian akhir menggunakan data riil.
4. Penguatan manajemen KLB di Provinsi.

Kesimpulan :

1. Indikator capaian pada pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi mencapai target sebesar 100%.
2. Indikator capaian pada pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) provinsi juga mencapai target sebesar 100%.
3. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB) merupakan data prediksi berdasar data kejadian sebelumnya sehingga data sasaran pelayanan digunakan prediksi.
4. Belum ada data sasaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
5. Keterbatasan dalam sistem pelaporan, sarana mobilitas, Logistik dan anggaran

Saran :

1. Untuk penghitungan sasaran dapat menggunakan sumber data pemetaan wilayah risiko bencana dari BPBD Provinsi dan Data BPS.
2. Data sasaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Pada penghitungan capaian akhir menggunakan data riil.
4. Pengelolaan logistik yang memadai
5. Penguatan manajemen Kejadian Luar Biasa (KLB) di Provinsi.

3. Urusan Pekerjaan Umum

A. Jenis Pelayanan Dasar

Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara bertugas mengkoordinir pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tahun 2024 pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas daerah di Kabupaten / Kota sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Daerah Kabupaten / Kota;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Daerah Kabupaten / Kota

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pembangunan dibidang Cipta Karya selain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bidang air minum dan air limbah, juga diarahkan untuk mendukung program pemerintah untuk lima tahun kedepan. Dari data yang ditampilkan table 3.1 dibawah ini, untuk presentase rumah tinggal bersanitasi dan presentase penduduk berakses air minum walaupun belum mencapai level 100 persen tetapi telah terjadi peningkatan,. Hal ini semua terjadi karena adanya peningkatan pembangunan infrastruktur baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bidang sanitasi dan air minum pada kurun waktu tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2018, Pekerjaan Umum juga memiliki fungsi Standar Pelayanan Minum (SPM), yaitu: Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah Kabupaten/Kota, namun sampai saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara belum ada yang terbangun.

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan Proporsi Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (persen)	82,38	85,62	87,07	88,99	90,62
2.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (persen)	92,49	91,94	94,64	94,80	95,31

C. Alokasi Anggaran

Alokasi pagu anggaran untuk kegiatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Cipta Karya dalam DPA Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024 untuk SPAM sebesar Rp.3.088.6440.660, yang terdiri atas SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Sumur Bor) dan Jaringan Perpipaan (Optimalisasi Jaringan) dan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi sebesar Rp.1.832.005.524, untuk Pembangunan MCK. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Dikawasan Strategis Provinsi Sebesar Rp.1.480.037.060.

D. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara didukung sumber daya aparatur sebanyak 164 orang, terdiri dari 113 orang ASN dan 80 orang Non PNS yang berstatus honorer.

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya peraturan sebelumnya yaitu Permen PU No 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum, Dimana perhitungan capaian SPM Provinsi Dibatasi pada SPAM dan Sanitasi Regional.
- b. Tidak semua Provinsi memiliki sarana prasarana SPAM dan Sanitasi Regional karena membutuhkan nilai investasi yang besar dan kondisi topografi suatu daerah belum tentu membutuhkan infrastruktur skala regional, dan Pola permukiman yang sporadik dan berjauhan, sehingga menyulitkan pemenuhan infrastruktur.
- c. Permendagri 050.5889 tentang Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang membatasi kewenangan Provinsi.
- d. Dengan nomenklatur yang membatasi kewenang provinsi menjadi isu utama permasalahan SPM Tingkat provinsi, karena Provinsi tidak dapat melakukan intervensi pada Pembangunan sarana dan prasarana SPAM dan Sanitasi di wilayah administrasinya selain yang berskala regional.

2. Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas, maka Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengalokasikan dana cadangan untuk pemenuhan SPM yang bersifat mendesak.
- b. Untuk kegiatan pemenuhan SPM yang dilaksanakan secara rutin, maka dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan fasilitas.
- c. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan air minum lintas kabupaten/kota dan air limbah domestik regional.
- d. Dengan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan umum dan Bidang Perumahan Rakyat Dimana Capaian SPM Provinsi sudah dapat di hitung dengan agregrat capaian kabupaten/kota (Kumulatif) maka Dinas Cipta Karya menganggarkan kegiatan monitoring di tahun 2024 untuk melakukan pendataan kebutuhan dan perhitungan capaian di kabupaten/kota.

4. Urusan Perumahan Rakyat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara selalu berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, meskipun terdapat banyak kendala dan kelemahan yang dimiliki baik dari factor sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Berdasarkan jenis pelayanan dasar SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, maka OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan target capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Indikator	SPM Standar Nasional	Realisasi Capaian		Proyeksi	Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Jumlah rumah layak huni yang tersedia bagi korban bencana provinsi	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	-	-	30 Unit	10 Unit	Tidak terjadi bencana
	Jumlah rumah layak huni yang direhabilitasi bagi korban bencana provinsi		-	-	20 Unit	5 Unit	Tidak terjadi bencana
2	Jumlah masyarakat yang mendapat fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi	-	-	300 KK	10 KK	Tidak terjadi relokasi program pemerintah

C. Realisasi

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sultra telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi:

1. Korban Bencana Sosial Tahun 2019 di Desa Gunung Jaya Kec. Siontapina Kab. Buton Pembangunan Rumah Baru sebanyak 58 Unit dan Renovasi 15 Unit dengan total 73 unit rumah; Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan melakukan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, dukungan anggaran sebesar Rp.121.247.000,00 ;
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan melakukan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan, dukungan anggaran sebesar Rp.107.219.000,00 .
3. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp107.350.250,00 dan melaksanakan Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp450.000.000,00.
4. Program dan Kegiatan Pemenuhan SPM

No	Nama Program/Kegiatan	Realisasi		Ket
		Fisik	Keuangan	
1.	Program Pengembangan Perumahan			
	- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%	88,49%	
	- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100%		
2.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan			
	- Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	100%	99,23%	

D. Alokasi Anggaran

Alokasi pagu anggaran untuk kegiatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam DPA Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebesar Rp.785.816.250,00 dengan realisasi sebesar Rp.755.235.676,00 atau (96,11%).

E. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat, kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara didukung sumber daya aparatur sebanyak 79 orang, terdiri dari 65 orang PNS dan 14 orang P3K.

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami beberapa permasalahan sebaga iberikut:

- 1) Kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal adalah kegiatan yang berkaitan dengan bencana provinsi yang merupakan kegiatan yang tidak dapat diprediksi serta kegiatan pemerintah provinsi;
- 2) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat harus menunggu status kebencanaan yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3) Layanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Relokasi Program Pemerintah Provinsi selama ini yang dilakukan hanya melakukan ganti rugi atas tanah/lahan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi yang intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang bencana provinsi yang terjadi;
- 2) Mengalokasikan dana cadangan untuk pemenuhan SPM yang bersifat mendesak;
- 3) Melakukan pendataan daerah-daerah yang rawan bencana dan terkena program pemerintah;
- 4) Untuk kegiatan pemenuhan SPM yang dilaksanakan secara rutin, maka dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan fasilitas;
- 5) Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi korban relokasi akibat kegiatan pemerintah agar konflik yang terjadi dapat diminimalisir.

5. Urusan Sosial

A. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi berdasarkan Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM pusat yaitu kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, sehingga disusun target capaian SPM sebagaimana pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target Capaian (%)	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar didalam panti	100	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar didalam Panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar	100	Setiap Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target Capaian (%)	
		didalam panti		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar didalam Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut usia terlantar didalam panti	100	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti	Jumlah warga negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial didalam panti	100	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga negara korban bencana Provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	Setiap Tahun

C. Realisasi

Untuk Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial saat ini belum maksimal dilaksanakan karena Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara saat ini baru memiliki 1 (satu) UPTD Panti Sosial yang menangani Anak Terlantar sehingga dari total 5 Indikator SPM yang ada baru dilaksanakan 2 yaitu Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dalam Panti dan Penanganan Korban Bencana Alam skala Propinsi yang tertuang pada tabel berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target Capaian Nilai (%)	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam Panti	110/139x100%	79,14%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar didalam Panti	50/50x100%	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar didalam Panti	90/100x100%	90%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis didalam Panti	50/50x100%	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	9.897/9.897x100	100%	Setiap Tahun

D. Alokasi Anggaran

Sasaran pembangunan sosial dari segi keuangan adalah diarahkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial secara optimal. Secara umum anggaran Dinas Sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk pencapaian sasaran belum menunjukkan angka yang signifikan atau bahkan masih rendah untuk mencapai sasaran/target dalam upaya mengurangi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Sulawesi Tenggara. Pada Tahun Anggaran 2024 APBD Dinas Sosial setelah perubahan untuk alokasi anggaran yang secara langsung berkontribusi pada penerapan SPM adalah sebesar Rp.4.422.247.625 dan terealisasi Rp.3.821.851.925,- yang terinci sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar dalam Panti Rp. 100,845,000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 99.916.000,- atau 99.08 %.
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar dalam Panti Rp. 1,113.149.625,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1,066.185.625,- atau 95.78 %.
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia terlantar dalam Panti Rp. 68.637.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 65.190.000,- atau 95.35 %.
4. Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan Pengemis dalam Panti Rp. 2.927.257.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.391.641.950,- atau 81.70%
5. Perlindungan Sosial korban bencana Alam Rp. 207.229.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 193.518.350 atau 93.38 %.

E. Dukungan Personil

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Organisasi perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang Kesejahteraan sosial Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu

mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mencapai target kinerjanya. Jumlah Pegawai yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang PNS dan 10 (sepuluh) Tenaga Honorer.

F. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Melihat capaian target SPM bidang Sosial untuk Pelayanan Panti yang belum dapat memenuhi semua aspek maka dapat kami uraikan masalah pokok yang menghambat dalam pelaksanaan target adalah sebagai berikut :

- a). Masalah yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain adalah terkait pelaksanaan SPM Bidang Sosial yang dari 5 Indikator yang ditetapkan 4 diantaranya merupakan Penanganan di dalam Panti Sosial, sementara Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai pemangku SPM Bidang Sosial hanya memiliki 1 (Satu) UPTD Panti yang menangani Anak dan Remaja terlantar, sedangkan 3 (Tiga) lainnya yaitu Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Tuna Sosial terlantar belum dapat ditangani karena belum adanya Panti untuk penanganan, penanganan yang dilaksanakan saat ini dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau panti milik swasta namun fasilitas dan jenis layanan yang bisa dilaksanakan juga sangat terbatas masalah yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain adalah terkait pelaksanaan SPM Bidang Sosial yang dari 5 Indikator yang ditetapkan 4 diantaranya merupakan Penanganan di dalam Panti Sosial, sementara Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai pemangku SPM Bidang Sosial hanya memiliki 1 (Satu) UPTD Panti yang menangani Anak dan Remaja terlantar, sedangkan 3 (Tiga) lainnya yaitu Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Tuna Sosial terlantar belum dapat ditangani karena belum adanya Panti untuk penanganan.
- b). Kondisi logistik dan sarana prasarana untuk Kesiapsiagaan bencana terbatas sehingga sebagai upaya lebih memaksimalkan SPM untuk penanggulangan bencana dimana saat ini Intensitas bencana baik bencana alam maupun bencana sosial cukup tinggi maka perlu alokasi anggaran yang lebih proporsional khususnya guna mengakomodir pendanaan untuk kegiatan yang bersifat penanggulangan maupun kesiapsiagaan bencana alam.
- c). Belum tersedia data update yang akurat dan terpilah untuk klien dalam panti dan luar panti sehingga penanganan dan pelayanan yang lebih baik masih belum terpenuhi.

2. Solusi

- a). Melakukan upaya koordinasi untuk menggagas pembentukan Panti Tambahan yang menangani Lanjut Usia terlantar, Penyandang Disabilitas terlantar dan Tuna Sosial terlantar sehingga target Indikator SPM Bidang Sosial bisa lebih maksimal atau melakukan Multi Layanan pada UPTD yang ada.
- b). Memasukkan Penanganan Bencana sebagai Program Prioritas yang terintegrasi dengan penerapan SPM Skala Propinsi sehingga dari segi pendanaan diharapkan juga akan menjadi Prioritas.
- c). Mengusulkan Percepatan rehabilitasi dan Pembangunan Sarana Prasarana UPTD baik melalui APBD maupun Dana Alokasi Khusus kementerian Sosial Republik Indonesia.

6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sedangkan pelayanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan jenis pelayanan dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemenuhan Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan tahapan :

- a. Pengumpulan data, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik;
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir;
- c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran pemerintah daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD, sedangkan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD;
- d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dilaksanakan dengan cara Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.

Adapun mutu pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi :

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP adalah merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara meliputi pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan. Kerugian materi berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang

diakibatkan dari penegakan pelanggaran perda dan perkada. Kerugian materil terdiri atas: rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5 persen dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan dan rusak sedang dan atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan atau lebih dari 2,5 persen dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan. Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan perda dan perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan atau berat.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target capaian SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah 100 % (seratus persen) dari jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dampak penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara, artinya bahwa setiap warga negara yang terdampak atau berada pada radius 0-50 meter dari lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur wajib mendapatkan pelayanan kerugian materil maupun cedera fisik

a. Form 5.E.1 Capaian Target Capaian SPM Sub Urusan Trantibum

Capaian terhadap target capaian SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2024 capaiannya adalah 100% terhadap target capaian Tahun 2024 dengan capaian pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada adalah 100% serta tidak ada warga negara yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada yang berhak mendapat layanan sehingga capaiannya pun 100%.

Capaian Target SPM Sub Urusan Trantibum

No	Jenis Layanan Dasar	Jumlah Penegakan Perda/Perkada Sesuai Mutu		
		Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada	Jumlah Penegakan Perda/Perkada Sesuai Mutu Layanan Dasar	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	8	100%

No	Jenis Layanan Dasar	Pelayanan Ganti Rugi			Capaian SPM	Kategori
		Jumlah Warga Negara Yang Terkena Dampak Penegakkan Perda dan Perkada Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Dampak Penegakkan Perda dan Perkada Yang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Orang	0 Orang	100%		

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pada tahun 2024 terdapat **64 kali** pengaduan atau laporan perihal pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang ditujukan kepada instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan telah terlaksana sejumlah **64 kali** kegiatan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut semuanya berlangsung aman dan kondusif serta pada radius 0-50 meter tidak terdapat warga/masyarakat yang mengalami kerugian materiil maupun cedera fisik.

Selain itu, pada Tahun 2024 telah dilakukan identifikasi dan validasi data Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara dan terdapat sejumlah 38 (tiga puluh delapan) Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara yang memuat sanksi dan dari 38 (tiga puluh delapan) perda yang memuat sanksi tersebut telah dilakukan penegakan terhadap 8 (delapan) peraturan daerah dalam bentuk Non Yustisi dengan melibatkan TNI/Polri dan dari serangkaian kegiatan tersebut pula pada radius 0-50 meter dari titik maupun lokasi penegakan peraturan daerah tidak terdapat korban/masyarakat yang mengalami kerugian materiil maupun cedera fisik. Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masyarakat penerima layanan dampak penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur sehingga capaian SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar **100%** dengan rumusan indikatornya adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada sebagaimana tabel dibawah ini:

Capaian SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Formulasi Indikator	Capaian	Capaian Target (%)	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah warga negara penerima layanan X 100 % Jumlah warga negara terdampak	0 0	X 100%	100 % Setiap Tahun

Pelayanan kerugian materiil adalah berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.

1. Pelayanan kerugian materiil terdiri atas :
 - a. Rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan;

- b. Rusak sedang dan/atau berat yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkara yang sedang dilakukan.

Data Kerugian Materill Akibat Dari Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2024			
Sedang		Berat	
Jumlah Kasus	Total Kerugian (Rp)	Jumlah Kasus	Total Kerugian (Rp)
0	0	0	0

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang/berat.

Data Pelayanan Pengobatan Akibat Dari Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2024			
Pertolongan Pertama		Rujuk ke Pusat Kesehatan/Rumah Sakit	
Jumlah Kasus	Biaya Perawatan (Rp)	Jumlah Kasus	Biaya Perawatan (Rp)
0	0	0	0

Adapun realisasi anggaran sehubungan dengan pelaksanaan SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 5.477.990.850,- (lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 97.18 %, akan di rinci berdasarkan program dan kegiatan seperti pada tabel di bawah ini :

Target dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Satpol Pamong Praja Prov. Sultra T.A 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi	
			Jumlah (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.577.083.000	5.420.753.350	97,20
02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.502.583.000	5.354.393.350	97,31
02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini	538.136.000	477.535.000	88,74

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana (Rp)	Realisasi	
			Jumlah (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan			
02.1.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	4.813.083.000	4.733.774.000	98,35
02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73.290.000	66.138.150	90,24
02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelsaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	64.800.000	64.800.000	100
02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	13.274.000	12.146.200	91,50
02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	74.500.000	66.360.000	89,07
02.1.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	74.500.000	66.360.000	89,07
03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	59.990.000	57.237.500	95,41
03.1.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	59.990.000	57.237.500	95,41
03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	59.990.000	57.237.500	95,41

D. Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, di tunjang oleh 2 (dua)

Program, 3 (tiga) kegiatan serta 7 (tujuh) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp**5.477.990.850,-** (lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Target dan Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Satpol PP Prov. Sultra T.A 2024

No.	Program / Kegiatan	Target Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3	4
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	5.577.083.000
II.1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	203 Orang	5.502.583.000
	a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	150 Kegiatan	538.136.000
	b) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Peertiban dan Penagamanan Unjuk Rasa dan kerusuhan Massa	200 Kegiatan	4.813.083.000
	c) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Kegiatan	73.290.000
	d) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1 Kegiatan	64.800.000
	e) Penyusunan SOP Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	13.274.000
II.2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	80 %	74.500.000
	a) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	20 Kegiatan	74.500.000
III	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100 %	48.210.000

No.	Program / Kegiatan	Target Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3	4
III.1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1 Dokumen	59.990.000
	a) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1 Kegiatan	59.990.000
Jumlah			5.477.990.850,-

E. Dukungan Personel

Adapun personel/aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2024 adalah sejumlah 455 orang yang terdiri dari ASN/PNS sejumlah 67 orang dan tenaga PHTT sejumlah 388 orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

Komposisi Jumlah dan Golongan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024		
No.	Uraian	Jumlah Pegawai
1.	Kualifikasi Pendidikan	
	a. SD	-
	b. SMP	-
	c. SLTA/SMA	369
	d. Sarjana Muda (D-III)	3
	e. S1 dan D- IV	76
	f. S2	7
	Jumlah	455
2.	Pangkat / Golongan Ruang	
	a. PHTT	388
	b. Golongan I	-
	c. Golongan II	17
	d. Golongan III	45
	e. Golongan IV	5
	Jumlah	455
3.	Jabatan	
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	4
	c. Eselon IV	10
	d. PPNS	2
	e. Fungsional	3
	f. Staf	47
	g. PHTT	388
	Jumlah	455

F. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara sehubungan dengan pencapaian SPM Ketenteraman

dan Ketertiban Umum Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun anggaran 2024, ditemukan hambatan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan baik dalam kegiatan maupun dalam penanganan masalah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Kurangnya sarana penunjang Satuan Polisi Pamong Praja seperti kendaraan operasional dan kendaraan – kendaraan pendukung lainnya;
3. Belum maksimalnya pemberdayaan PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja meskipun pelimpahan wewenang dari Biro Hukum telah diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Belum maksimalnya anggaran yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat terutama untuk biaya kendaraan dinas/operasional.

Adapun yang menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mendata segala kebutuhan terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satpol PP seperti pelaksanaan diklat – diklat maupun melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana, mendata segala kebutuhan mengecek jumlah aset yang masih bisa dipakai dan tidak dipakai, melaksanakan pengadaan alat – alat yang dibutuhkan selama penanganan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Lebih memaksimalkan PPNS dalam pelaksanaan tugasnya membantu menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemberdayaan Satlinmas dengan tetap melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PPNS;
4. Memaksimalkan Anggaran untuk dialokasikan pada kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat terutama untuk biaya kendaraan dinas/operasional.

2.1.6 Kerjasama Daerah

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 1 Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyelaraskan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di dalam maupun luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah

Untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan bersama, bahwa pada tingkat lokal dan nasional terdapat lembaga dan filantropi yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan TPB yang meliputi perguruan tinggi, bank dan lembaga keuangan lainnya, KADIN, WALHI, HPMP, Gamal, YKL dan YKAN. Pada tingkat internasional, terdapat lembaga seperti USAID, RARE, NSLIC/NSELRED, dan WWF.

Tabel 2.55. kerjasama Daerah Tingkat Nasional dan Internasional

No	Instansi/Lembaga Non Pemerintah	No. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Peran	Keterangan
Tingkat Lokal & Nasional				
1.	Perguruan Tinggi a. Universitas Halu Oleo b. Universitas Muhammadiyah Kendari c. Universitas Sulawesi Tenggara d. Universitas Mandala Waluya e. Universitas Nahdatul Ulama f. Institut Agama Islam Negeri Kendari g. Politeknik Kesehatan Kendari h. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari i. STIKES Pelita Ibu j. Sekolah tinggi lainnya di Sulawesi Tenggara	1. Tanpa Kemiskinan 4. Pendidikan Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat - Membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan pengajaran dan penelitian mahasiswa serta alokasi bantuan pendidikan (beasiswa) 	<ul style="list-style-type: none"> - Universitas Muhammadiyah Kendari mengalokasikan anggaran sebesar Rp13.412.915.000, - dengan tingkat realisasi 100% - Universitas Mandala Waluya mengalokasikan anggaran sebesar Rp387.563.000, - dengan tingkat realisasi 100%
2.	Perbankan dan Lembaga Keuangan a. Bank Sultra b. Bank Rakyat Indonesia c. Bank Negara Indonesia d. Bank Mandiri e. Bank Tabungan Negara f. Lembaga keuangan lainnya	1. Tanpa Kemiskinan 2. Tanpa Kelaparan 3. Kehidupan Sehat & Sejahtera 4. Pendidikan Berkualitas 5. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu mengurangi tingkat kemiskinan melalui penyaluran dana CSR - Membantu mengurangi kelaparan melalui penyaluran bantuan Sembako 	Bank Sultra mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.985.973.113, - dengan tingkat realisasi 100%

No	Instansi/Lembaga Non Pemerintah	No. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Peran	Keterangan
<i>Tingkat Lokal & Nasional</i>				
		6. Ekonomi Industri, Inovasi dan Infrastruktur	<p>pada program CS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membantu akses pelayanan masyarakat terhadap kesehatan melalui program asuransi dan bantuan sarana kesehatan (Mobil Ambulance) - Menyediakan Beasiswa bagi pelajar/mahasiswa serta layanan tabungan khusus bagi pelajar/mahasiswa - Menyediakan kredit stimulan usaha bagi interpreneur sehingga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi - Membantu mengembangkan industri, inovasi dan infrastuktur wilayah melalui penyaluran dana CSR 	
3.	KADIN Sulawesi Tenggara	13. Penanganan Perubahan Iklim	Membantu upaya penanganan perubahan iklim melalui program penghijauan; dan mendorong program perdagangan	KADIN Sultra mengalokasikan anggaran Rp. 5.000.000.000,- dengan realisasi 100%

No	Instansi/Lembaga Non Pemerintah	No. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Peran	Keterangan
	<i>Tingkat Lokal & Nasional</i>			
			karbon	
4.	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tenggara	12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab 15. Ekosistem Daratan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadvokasi dan mengawasi pengelolaan sumberdaya untuk meminimalisasi dampak terhadap lingkungan hidup - Mengadvokasi dan mengawasi kegiatan pertambangan dan bentuk usaha lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan 	
5.	Himpunan Pemuda Mahasiswa Pemerhati Lingkungan (HPMPL) Sulawesi Tenggara	14. Ekosistem Laut 15. Ekosistem Daratan	Mewadahi aspirasi masyarakat terkait pencemaran lingkungan di laut dan darat pada wilayah perairan dan pesisir Sulawesi Tenggara	
6.	Lembaga Keprihatikan Manusia dan Lingkungan (Gamal) Kendari	5. Kestetaraan Gender 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyuluhan terkait hak-hak yang melekat pada diri manusia - Penyediaan sarana produksi dan bantuan modal bagi petani dan nelayan - Memfasilitasi pembentukan organisasi 	

No	Instansi/Lembaga Non Pemerintah	No. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Peran	Keterangan
	<i>Tingkat Lokal & Nasional</i>			
			rakyat	
7.	Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia	14. Ekosistem Laut	Memfasilitasi masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil (Kab.Wakatobi) dalam mengelola sumberdayanya	
8.	Yayasan Konervasi Alam Nusantra (YKAN)	8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan ekowisata berbasis Masyarakat di Pulau Tomia, Kab.Wakatobi - Bekerjasama dengan Asuransi Jasa Raharja untuk mendukung pengelolaan sumberdaya hayati di Kab.Wakatobi melalui Program TJSL	
	<i>Tingkat Internasional</i>			
1.	USAID Indonesia	13. Penanganan Perubahan Iklim	Membantu dalam menangani perubahan iklim melalui program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) di Kota Kendari dan Kab.Konawe Selatan	
2.	RARE Indonesia	14. Ekosistem Laut	Memfasilitasi pengelolaan kelautan dan perikanan yang	

No	Instansi/Lembaga Non Pemerintah	No. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Peran	Keterangan
Tingkat Lokal & Nasional				
			berkelanjutan di Sulawesi Tenggara melalui program “Fish Forever”	
3.	NSLIC/NSELRED	5. Kesetaraan Gender 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Memfasilitasi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan bagi laki-laki dan perempuan miskin melalui peningkatan iklim investasi dan mendukung pengembangan ekonomi lokal dan regional di Kab.Bombana, Kab.Wakatobi, Kota Kendari, Kab.Konawe Selatan; dan Kota Bau- Bau	
4.	WWF	14. Ekosistem Laut 15. Ekosistem Darat 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi dalam menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan laut di Taman Nasional Wakatobi - Memfasilitasi dalam memelihara keanekaragaman hayati di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai - Membuka ruang terbuka bagi masyarakat untuk terlibat 	

No	Instansi/Lembaga Non Pemerintah	No. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Peran	Keterangan
Tingkat Lokal & Nasional				
			dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan lewat donasi, dukungan kampanye, bergabung sebagai volunteer, dan mantra yang berkomitmen untuk melangkah bersama menyelamatkan bumi	

Sumber: Laporan Kegiatan Tahunan RARE Indonesia, 2022; Laporan Pelaksanaan Project NSLIC 2017- juni 2022; Daftar Dokumen Pencapai APIK USAID Sultra, 2022; <https://economicreview.id/jasa-raharja./>; <https://www.wwf.id/publikasi/berbagi-pengetahuan...>; <https://sultra.papernews.id/tag/hpmp-sultra/>; <https://ngodata.smeru.or.id/ngodb/739>, masing-masing diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan tridharma yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pelaksanaan tridharma berkaitan langsung dengan pencapaian TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dan TPB 4 (Pendidikan Berkualitas) pada konteks pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. TPB 1 diwujudkan pada konteks penelitian dengan melaksanakan riset untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang- bidang kehidupan masyarakat. Demikian pula pada konteks pengabdian, perguruan tinggi melaksanakan kegiatan pendampingan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang bermuara pada upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Sementara itu, TPB 4 diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan pengajaran dan penelitian mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta adanya lokasi bantuan pendidikan (beasiswa). Adapun perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tenggara antara lain Universitas Universitas Halu Oleo; Universitas Muhammadiyah Kendari; Universitas Sulawesi Tenggara; Universitas Mandala Waluya; Universitas Nahdatul Ulama; Institut Agama Islam Negeri Kendari; Politeknik Kesehatan Kendari; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari; dan STIKES Pelita Ibu. Dua diantara sejumlah perguruan tinggi tersebut telah menyampaikan alokasi dan realisasi anggarannya pada tahun 2022 untuk mendukung pencapaian TPB yaitu Universitas Muhammadiyah Kendari sebesar Rp13.412.915.000, - dan Universitas Mandala Waluya Rp387.563.000,- dengan realisasi masing-masing sebesar 100 persen.

Selanjutnya ditunjukkan pula bahwa penyelenggaraan TPB dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Lembaga keuangan tersebut meliputi Bank Sultra; Bank Rakyat

Indonesia; Bank Negara Indonesia; Bank Mandiri; Bank Tabungan Negara dan Lembaga keuangan lainnya. Bank dan lembaga keuangan mendukung pencapaian TPB 1; TPB 2; TPB 3; TPB 4; TPB 8 dan TPB 9. Pencapaian TPB tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sejumlah kegiatan yang menggunakan alokasi dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* seperti peningkatan kapasitas UMKM, stimulant bagi entrepreneur muda, pemberian beasiswa, dan penyediaan sarana kesehatan umum (mobil ambulance). Salah satu Bank yang menyampaikan alokasi anggarannya untuk mendukung pencapaian TPB adalah Bank Sultra dengan pembiayaan sebesar Rp1.985.973.113, - yang seluruhnya direalisasikan (100 persen).

Sementara itu, lembaga non pemerintah seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) juga turut berkontribusi dalam pencapaian TPB di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lembaga ini mendukung pencapaian TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dengan melaksanakan program penghijauan; dan mendorong program perdagangan karbon. Untuk melaksanakan program tersebut, KADIN Sulawesi Tenggara mengalokasikan anggaran sebesar Rp5.000.000.000, - dengan realisasi 100 persen.

Demikian pula dengan lembaga non pemerintah seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tenggara; Himpunan Pemuda Mahasiswa Pemerhati Lingkungan (HPMPL) Sulawesi Tenggara; Lembaga Keprihatinan Manusia dan Lingkungan (Gamal) Kendari; Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia; dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). WALHI Sultra melaksanakan TPB 14 dan 15 yang berkaitan dengan “Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab”; dan “Ekosistem daratan”. WALHI berkontribusi dalam berperan untuk melaksanakan advokasi dan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya untuk meminimalisasi dampak terhadap lingkungan hidup, termasuk terhadap kegiatan pertambangan dan bentuk usaha lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan.

Himpunan Pemuda Mahasiswa Pemerhati Lingkungan (HPMPL) Sulawesi Tenggara merupakan lembaga yang *care* terhadap lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. Lembaga ini mendukung pencapaian TPB 14 dan 15 yang berkaitan dengan ekosistem laut dan daratan, dengan Mewadahi aspirasi masyarakat terkait pencemaran lingkungan di laut dan darat pada wilayah perairan dan pesisir Sulawesi Tenggara. Sedikit berbeda dengan HPMPL, Lembaga Keprihatinan Manusia dan Lingkungan (Gamal) Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kendari memiliki kontribusi pada pencapaian TPB 6 “Kesetaraan Gender”, TPB 8 “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi” dan TPB 17 “Kemitraan untuk Mencapai Tujuan”. TPB 6 dilaksanakan melalui penyuluhan terkait hak-hak yang melekat pada diri manusia. TPB 8 diwujudkan dengan menyediakan sarana produksi dan bantuan modal bagi petani dan nelayan sehingga pendapatan petani dan nelayan dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. TPB 17 dilaksanakan dengan cara memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat seperti koperasi dan komunitas petani atau nelayan.

Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tenggara berkontribusi dalam pencapaian TPB 14 “Ekosistem Laut”. Lembaga ini banyak berperan dalam memfasilitasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengelola sumber dayanya, misalnya yang dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi. Selaras dengan lembaga tersebut, terdapat Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang berkontribusi pada pencapaian TPB 8 “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”; dan TPB 17 “Kemitraan untuk mencapai tujuan”. TPB 8 teraktualisasi melalui peran lembaga ini dalam Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan ekowisata berbasis Masyarakat di Pulau Tomia, Kab.

Wakatobi. Sedangkan TPB 14 direalisasikan melalui jalinan kerjasama dengan Asuransi Jasa Raharja untuk mendukung pengelolaan sumberdaya hayati di Kab. Wakatobi melalui Program TJSJL.

Pada tabel di atas juga ditampilkan bahwa terdapat lembaga non pemerintah pada tingkat internasional yang juga bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan TPB. Beberapa lembaga internasional yang dimaksud adalah USAID, RARE, NSCLIC/NSELRED, dan WWF. USAID atau *United States Agency for International Development* (USAID) merupakan badan independen dari pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain didunia dalam mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Di Sulawesi Tenggara, lembaga ini mendukung pencapaian TPB 13 “Penanganan Perubahan Iklim” dengan berperan dalam merealisasikan program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) di Kota Kendari dan Kab. Konawe Selatan.

RARE merupakan lembaga konservasi internasional yang mendukung Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mencapai TPB 14 “Ekosistem Laut”. Pencapaian TPB dilaksanakan melalui kerjasama yang berjalan dalam kurun waktu tahun 2021-2022 pada program “*Fish Forever*”. Dukungan tersebut diaktualisasikan dengan adanya beberapa highlight kegiatan dan pencapaian besar di Sulawesi Tenggara, yaitu profil perikanan yang telah dilakukan di 34 lokasi PAAP, kegiatan penyadartahuan di tingkat tapak dan di tingkat provinsi, 16 dokumen Rencana PAAP di Sulawesi Tenggara, pelatihan pendamping untuk memfasilitasi pertemuan masyarakat di 16 kawasan PAAP yang sudah berjalan di 10 Kabupaten, kegiatan pengawasan berbasis masyarakat, kegiatan sinkronisasi pendekatan PAAP ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 untuk 5 Kabupaten di Sulawesi Tenggara dan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan usaha mikro, seperti pelatihan literasi keuangan dan terbentuknya 31 kelompok simpan pinjam masyarakat di 7 lokasi PAAP yang tersebar di 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.

NSLIC/NSELRED atau *National Support for Local Investment Climates* (NSLIC)/*National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development* (NSELRED) adalah program kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Pemerintah Kanada melalui *Global Affairs Canada* (GAC). Lembaga ini bertujuan mengembangkan kapasitas para pihak untuk meningkatkan iklim investasi lokal, serta mengembangkan ekonomi lokal dan daerah di beberapa kabupaten/kota terpilih di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Gorontalo. Secara khusus, NSLIC/NSELRED berkontribusi dalam pencapaian TPB 6 “Kesetaraan Gender” dan TPB 8 “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi” melalui pelaksanaan beberapa program kegiatan mulai Januari 2017 hingga Juni 2022. TPB 6 diwujudkan dengan melaksanakan peran dalam Memfasilitasi peningkatan lapangan kerja dan pendapatan bagi laki-laki dan perempuan miskin melalui peningkatan iklim investasi dan mendukung pengembangan ekonomi lokal dan regional di Kab. Bombana, Kab. Wakatobi, Kota Kendari, Kab. Konawe Selatan; dan Kota Bau-Bau.

WWF atau *World Wide Fund for Nature* merupakan salah satu lembaga konservasi terbesar dan paling berpengalaman di dunia, yang didirikan secara resmi tahun 1961. Lembaga ini mulai beroperasi di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2022 dan fokus pada tata kelola sumber daya alam yang adil untuk menjamin manfaat konservasi di masa depan. WWF secara khusus mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mencapai TPB 14 “Ekosistem Laut”; TPB 15 “Ekosistem

Darat” dan TPB 17 “Kemitraan untuk mencapai tujuan”. TPB 14 diaktualisasikan dengan berperan dalam Memfasilitasi dalam menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan laut di Taman Nasional Wakatobi. Peran yang sama juga dilakukan untuk mencapai TPB 15 yang fokus pada upaya memelihara keanekaragaman hayati di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Sedangkan TPB 17 diwujudkan melalui peran dalam Membuka ruang terbuka bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan lewat donasi, dukungan kampanye, bergabung sebagai volunteer, dan mantra yang berkomitmen untuk melangkah bersama menyelamatkan bumi.

Disisi lain pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Rare dalam mengembangkan kawasan konservasi lainnya yang berdampak konservasi di luar kawasan Konservasi formal yang disebut dengan OECM (*Other Effective Area-Based Consevattion Masure*) dengan luas 339.953 Ha melalui Program Pengelolaan Area Akses Perikanan (PAAP) untuk kebutuhan perlindungan nutfah, terumbu karang dan sumber daya hayati untuk kelangsungan produksi.

OECM merupakan pendekatan konservasi berbasis kawasan yang tidak dikelola langsung oleh pemerintah, namun tetap efektif dalam menjaga keanekaragaman hayati. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada hasil produksi perikanan, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekologis, sosial, serta jasa ekosistem lainnya. OECM memperluas cakupan perlindungan alam dan membuka ruang bagi peran serta masyarakat lokal dalam pelestarian sumber daya alam. Keterlibatan para pihak dalam pendekatan ini dapat mendorong konservasi spesies endemik, habitat penting, restorasi ekosistem, serta perikanan berkelanjutan.

Dalam konteks RPJMD yang disusun, arah kebijakan ini sudah sejalan dengan Perpres No. 12/2025 tentang RPJMN 2025–2029, khususnya dalam poin 1.3.1 tentang Kawasan Lindung Darat dan Laut, yang menargetkan konservasi 30% wilayah darat dan laut pada 2045. OECM, termasuk areal preservasi, telah dimasukkan dalam dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 sebagai bagian dari kawasan berdampak konservasi (KBK). Hal ini selaras dengan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program ekonomi biru, terutama target pertama terkait perluasan kawasan konservasi.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada terjadinya dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan ini termasuk dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyempurnaan pengaturan dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dengan tujuan agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara maksimal dan dapat menjawab tantangan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang ada saat ini.

Keuangan Daerah didefenisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah akan dilakukan terhadap APBD dan Laporan Keuangan Daerah pada umumnya. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari (1). Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (2). Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (3). Penerimaan daerah; (4). Pengeluaran daerah; (5). Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau (6). Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Adapun norma umum yang digunakan dalam dalam penyusunan APBD adalah:

- a. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum;
- b. Setiap tindakan dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- c. Menghindari kerugian negara;

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka **Analisis Keuangan Daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029** meliputi analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran umum keuangan daerah lima tahun terakhir terhadap jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai kewenangan, susunan/struktur APBD dan neraca daerah yang meliputi aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Analisis juga dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah karena pada dasarnya kapasitas keuangan diarahkan untuk melihat sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan Proyeksi Keuangan Tahun Anggaran 2025-2029 untuk menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah daerah dan proyeksi ini membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara optimal, mengidentifikasi potensi pendapatan dan belanja, serta mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

2.2.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara konsisten melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan kemampuan fiskal serta komitmen daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan pembangunan.

Realisasi APBD merupakan indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk dalam menilai sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan mampu dilaksanakan secara optimal. Selain itu, capaian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan juga mencerminkan stabilitas fiskal dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan data realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Data ini meliputi komponen utama dalam struktur APBD, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan netto, yang diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tren kinerja keuangan daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal tersebut dapat dilihat melalui Tabel 2.55 berikut ini :

Tabel 2.56. Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN	4.012.335.036.317,18	4.529.251.153.804,50	4.497.953.162.940,09	4.610.446.114.003,99	4.918.179.154.515,94
	A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.017.138.016.007,18	1.373.793.724.628,50	1.419.667.152.161,09	1.619.936.693.724,99	1.644.307.401.947,94
	B. Pendapatan Transfer	2.871.712.575.673,00	3.119.960.554.389,00	2.979.353.296.423,00	2.988.466.397.679,00	3.272.375.355.010,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	74.551.023.637,00	35.496.874.787,00	98.932.714.356,00	2.043.022.600,00	1.370.090.703,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.012.335.036.317,18	4.529.251.153.804,50	4.497.953.162.940,00	4.610.446.114.003,99	4.918.052.847.660,94
2	BELANJA	3.792.420.304.742,00	4.495.870.207.049,00	4.862.530.576.022,00	5.000.414.624.756,00	4.832.228.211.378,00
	A. Belanja Operasi	2.692.850.494.992,00	2.754.858.067.032,00	2.693.121.520.974,00	3.054.495.074.258,00	3.238.357.734.045,00
	B. Belanja Modal	1.048.329.030.395,00	1.246.770.023.310,00	1.599.982.654.743,00	1.232.325.698.819,00	929.627.577.933,00
	C. Belanja Tak Terduga	51.240.779.355,00	238.208.325,00	56.532.093,00	215.084.242,00	2.878.111.450,00
	D. Belanja Transfer	406.009.914.371,00	494.003.908.382,00	569.369.868.212,00	713.378.767.437,00	605.630.685.193,00
	JUMLAH BELANJA	3.792.420.304.742,00	4.495.870.207.049,00	4.862.530.576.022,00	5.000.414.624.756,00	4.776.494.108.621,00
	SURPLUS/DEFISIT	-186.095.182.795,82	33.380.946.755,50	-364.577.413.081,91	-389.968.510.752,01	141.558.739.039,94
3	PEMBIAYAAN	544.530.631.415,61	791.223.101.701,79	1.244.446.265.610,29	653.016.653.647,38	258.939.966.631,94
	A. Penerimaan Pembiayaan	563.493.624.089,61	816.223.101.701,79	1.293.103.189.002,29	968.423.814.579,38	258.939.966.631,94
	B. Pengeluaran Pembiayaan	18.962.992.674,00	25.000.000.000,00	48.656.923.392,00	315.407.160.932,00	327.502.199.080,00
	PEMBIAYAAN NETO	544.530.631.415,61	791.223.101.701,79	1.244.446.265.610,29	653.016.653.647,38	-68.562.232.448,06
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	358.435.448.619,79	824.604.048.457,29	879.868.852.528,38	263.048.142.895,37	72.996.506.591,88

Sumber: Data LRA APBD Sulawesi Tenggara Tahun 2020 s.d 2024 (data diolah)

Pada tabel 2.55 disajikan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode Tahun 2020 hingga 2024. Informasi ini mencakup perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi cerminan kapasitas fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Pendapatan Transfer dan (3) Pendapatan lain yang sah.

Pendapatan daerah merupakan pilar utama dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kinerja pendapatan menjadi indikator penting bagi kapasitas fiskal serta tingkat kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja publik. Oleh karena itu, analisis terhadap pertumbuhan dan struktur pendapatan menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Total pendapatan daerah mengalami tren pertumbuhan yang stabil, yakni dari Rp4,01 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,92 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah yang ditopang oleh tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Khusus untuk PAD, terjadi peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir, dari Rp1,01 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,64 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak. Meskipun secara proporsional kontribusi PAD masih lebih kecil dibandingkan pendapatan transfer, tren positif ini menjadi indikator membaiknya kemandirian fiskal daerah.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi sumber pendapatan terbesar, dengan nilai relatif stabil dari Rp2,87 triliun pada 2020 menjadi Rp3,27 triliun pada 2024. Ketergantungan terhadap transfer pusat yang masih cukup tinggi perlu menjadi perhatian dalam kerangka penguatan otonomi fiskal ke depan. Komponen lain-lain pendapatan yang sah mengalami fluktuasi dan kontribusinya relatif kecil, meskipun tetap berperan dalam menambah struktur pendapatan daerah secara keseluruhan.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri dari: (1) Belanja Operasi, (2) Belanja Modal, (3) Belanja Tidak Terduga dan (4) Belanja Transfer.

Belanja daerah mencerminkan perwujudan kebijakan pembangunan yang telah direncanakan dan merupakan instrumen utama dalam mendistribusikan sumber daya ke berbagai sektor prioritas. Analisis terhadap tren dan struktur belanja sangat penting untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran serta konsistensinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Realisasi belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam periode 2020–2024 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Total belanja meningkat dari Rp3,79 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,78 triliun pada tahun 2024, dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp5 triliun. Peningkatan belanja ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendorong pertumbuhan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

Struktur belanja daerah didominasi oleh belanja operasi yang secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan besarnya kebutuhan untuk mendukung operasional pemerintahan dan layanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik. Sementara itu, belanja modal yang sempat meningkat secara signifikan pada 2022, justru mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, dan hanya mencapai Rp929 miliar pada 2024. Penurunan ini berpotensi memengaruhi kualitas dan cakupan pembangunan infrastruktur daerah ke depan.

Selain itu, belanja tak terduga dan belanja transfer turut mewarnai struktur belanja daerah, meskipun kontribusinya lebih kecil secara nominal. Belanja transfer kepada kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan meningkat dan menggambarkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam memperkuat koordinasi pembangunan antarwilayah di Sulawesi Tenggara. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi adalah menjaga proporsi belanja yang seimbang antara kebutuhan operasional dan investasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

C. Pembiayaan Daerah

Analisis terhadap Belanja Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Sulawesi Tenggara Periode tahun 2020 s.d. 2024. Analisis ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran periode tahun 2025 s.d. 2029 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan di Sulawesi Tenggara.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari: (a). Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dan Penerimaan Pinjaman Daerah dan (b) Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pembiayaan daerah berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam menjaga keseimbangan fiskal, khususnya ketika terjadi defisit anggaran atau terdapat kebutuhan pembiayaan di luar belanja reguler. Evaluasi terhadap realisasi pembiayaan selama periode RPJMD penting untuk menilai efektivitas strategi pengelolaan fiskal daerah serta kapasitas daerah dalam mempertahankan kesinambungan anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan memegang peran penting sebagai instrumen untuk menutup defisit anggaran dan mengatur pengeluaran strategis yang tidak dapat dibiayai dari pendapatan rutin. Selama tahun 2020–2024, struktur pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan dinamika yang cukup bervariasi, dengan pembiayaan neto tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp1,24 triliun. Pembiayaan tersebut berperan dalam menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh tingginya kebutuhan belanja pembangunan.

Namun pada tahun 2024, pembiayaan netto tercatat negatif sebesar Rp68,56 miliar. Hal ini terjadi karena besarnya pengeluaran pembiayaan melebihi penerimaan pembiayaan, yang mengindikasikan tekanan pada pengelolaan fiskal daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap mampu menjaga stabilitas fiskal secara umum melalui penyesuaian belanja dan optimalisasi pendapatan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai hasil akhir dari pengelolaan fiskal menunjukkan tren penurunan dari Rp879 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp72,99 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini dapat diartikan sebagai hasil dari meningkatnya penyerapan anggaran yang lebih efektif, namun juga menandakan terbatasnya ruang fiskal yang tersedia untuk pembiayaan awal tahun berikutnya. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan di masa mendatang perlu diarahkan pada upaya efisiensi, efektivitas, dan kehati-hatian dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah.

2.2.2 Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Neraca keuangan daerah merupakan salah satu laporan utama dalam akuntansi pemerintahan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir suatu periode anggaran. Laporan ini mencerminkan informasi tentang **aset**, **kewajiban**, dan **ekuitas**, yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kemampuan fiskal dan keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah. Penyajian data neraca secara periodik memungkinkan untuk mengamati perkembangan struktur keuangan daerah dari tahun ke tahun, serta menilai efektivitas pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah daerah.

Penyajian data neraca dalam dokumen RPJMD bertujuan untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah selama periode pelaksanaan RPJMD sebelumnya, sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan fiskal lima tahun ke depan. Informasi neraca sangat penting dalam menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan sumber daya ekonomi daerah telah dilaksanakan secara akuntabel, serta mengidentifikasi potensi dan keterbatasan fiskal dalam mendukung prioritas pembangunan daerah.

Analisis terhadap neraca keuangan tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja keuangan pada masa lalu, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam menetapkan kebijakan pembiayaan dan pengelolaan aset daerah ke depan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap tren aset, kewajiban, dan ekuitas daerah dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan dalam subbab berikut sebagai bagian dari analisis kapasitas dan keberlanjutan fiskal daerah. Berikut ini akan diuraikan Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 s.d 2024.

Tabel 2.57. Neraca Daerah Tahun 2020-2024

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET	11.519.140.228.331,90	13.254.413.167.336,90	14.378.579.468.941,20	15.004.191.305.160,00	14.805.561.100.253,80
	A. ASET LANCAR	530.743.348.706,15	971.220.410.028,89	1.006.583.860.897,93	396.526.154.194,54	154.661.935.653,71
	B. INVESTASI JANGKA PANJANG	559.854.362.573,09	646.726.881.510,17	697.050.155.007,25	765.389.124.208,85	774.248.903.918,67
	C. ASET TETAP	9.874.267.847.537,57	11.060.104.104.833,20	12.061.691.944.892,40	12.974.478.805.566,20	13.027.704.468.582,00
	D. ASET LAINNYA	554.274.669.515,06	576.361.770.964,65	613.253.508.143,64	867.797.221.190,39	657.867.351.098,39
	E. PROPERTI INVESTASI	0	0	0	0	191.078.441.001,04
	JUMLAH ASET	11.519.140.228.331,90	13.254.413.167.336,90	14.378.579.468.941,20	15.004.191.305.160,00	14.805.561.100.253,80
2	KEWAJIBAN	633.698.873.802,90	1.365.524.267.824,75	1.590.602.470.016,53	1.152.224.757.386,29	901.744.790.936,20
	A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	175.378.775.641,51	427.964.893.435,77	532.527.552.877,57	637.152.716.275,33	762.590.887.343,24
	B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	458.320.098.161,39	937.559.374.388,98	1.058.074.917.138,96	515.072.041.110,96	139.153.903.592,96
	JUMLAH KEWAJIBAN	633.698.873.802,90	1.365.524.267.824,75	1.590.602.470.016,53	1.152.224.757.386,29	901.744.790.936,20
3	EKUITAS	10.885.441.354.529,00	11.888.888.899.512,20	12.787.976.998.924,70	13.851.966.547.773,70	13.903.816.309.317,60
	EKUITAS	10.885.441.354.529,00	11.888.888.899.512,20	12.787.976.998.924,70	13.851.966.547.773,70	13.903.816.309.317,60
	JUMLAH EKUITAS	10.885.441.354.529,00	11.888.888.899.512,20	12.787.976.998.924,70	13.851.966.547.773,70	13.903.816.309.317,60
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	11.519.140.228.331,90	13.254.413.167.337,00	14.378.579.468.941,20	15.004.191.305.160,00	14.805.561.100.253,80

Sumber: BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara, 2025 (Data Neraca Daerah Tahun 2020 s.d. 2024, data diolah)

Neraca keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan stabil pada sisi aset dan ekuitas, disertai dengan penurunan kewajiban pada akhir periode. Total aset pemerintah daerah mengalami peningkatan dari sebesar Rp11,52 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp14,81 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama bersumber dari peningkatan nilai aset tetap, yang menunjukkan pertumbuhan aset produktif daerah seiring dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang milik daerah.

Aset tetap meningkat dari Rp9,87 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp13,03 triliun pada tahun 2024, dan menjadi komponen paling dominan dalam struktur aset. Di samping itu, investasi jangka panjang juga menunjukkan peningkatan yang stabil dari Rp559,85 miliar menjadi Rp774,25 miliar, mencerminkan strategi penguatan kapasitas fiskal jangka panjang daerah. Sementara itu, terdapat **penambahan kategori baru dalam neraca daerah, yaitu properti investasi**, dengan nilai sebesar **Rp191,08 miliar**. Masuknya properti investasi ke dalam struktur aset mencerminkan langkah strategis pemerintah dalam mengelola aset secara lebih produktif, di mana aset yang tidak dipergunakan secara langsung untuk pelayanan publik namun memiliki potensi menghasilkan pendapatan mulai dicatat dan dioptimalkan.

Pada sisi kewajiban, total kewajiban pemerintah daerah sempat meningkat hingga Rp1,59 triliun pada tahun 2022, sebelum mengalami penurunan menjadi Rp901,74 miliar pada tahun 2024. Penurunan kewajiban ini sebagian besar terjadi pada kelompok kewajiban jangka panjang, yang turun dari Rp1,05 triliun menjadi hanya Rp139,15 miliar. Hal ini menunjukkan adanya langkah-langkah konsolidasi fiskal dan upaya pelunasan kewajiban jangka panjang. Namun demikian, kewajiban jangka pendek justru mengalami peningkatan selama periode yang sama, yang mengindikasikan adanya beban jangka pendek yang perlu dikelola secara cermat dalam penyusunan anggaran tahunan.

Selanjutnya, ekuitas dana sebagai representasi kekayaan bersih pemerintah daerah setelah dikurangi kewajiban, mengalami peningkatan dari Rp10,88 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp13,90 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya akumulasi nilai bersih dari hasil pengelolaan aset dan belanja daerah secara berkelanjutan serta mencerminkan kondisi keuangan yang sehat dan kredibel. Secara keseluruhan, posisi neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode 2020–2024 menunjukkan arah pertumbuhan positif dengan struktur keuangan yang 182fiskal kuat. Namun demikian, fluktuasi pada aset lancar dan peningkatan kewajiban jangka pendek perlu menjadi perhatian dalam perencanaan fiskal ke depan.

2.2.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2026-2030

Dalam rangka memastikan kesinambungan 182 fiskal dan mendukung perencanaan pembangunan jangka menengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 182menyusun proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk periode tahun 2026 hingga 2030. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan tren historis, asumsi makro, arah kebijakan nasional dan daerah, serta potensi ekonomi lokal. Penyajian proyeksi 182fiskal ini menjadi bagian penting dalam kerangka pendanaan RPJMD, guna menjamin bahwa seluruh rencana program dan kegiatan dapat didukung dengan 182 fiskal yang realistis dan berkelanjutan.

Tabel 2.58. Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN	5.329.268.121.471,00	6.657.303.767.139,71	7.620.773.531.759,50	8.711.538.999.989,71	9.168.320.686.769,95	9.417.418.738.490,94
	A. Pendapatan Asli Daerah	1.774.198.822.247,00	2.386.853.239.109,38	2.707.958.751.622,32	2.937.895.224.843,13	3.170.499.830.457,25	3.155.243.985.887,53
	B. Pendapatan Transfer	3.553.700.141.000,00	4.269.096.945.869,78	4.911.476.596.840,87	5.772.320.815.531,19	5.996.512.947.187,86	6.260.881.722.749,03
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah	1.369.158.224,00	1.353.582.160,55	1.338.183.296,31	1.322.959.615,39	1.307.909.124,84	1.293.029.854,38
	JUMLAH PENDAPATAN	5.329.268.121.471	6.657.303.767.140	7.620.773.531.760	8.711.538.999.990	9.168.320.686.770	9.417.418.738.491
2	BELANJA	5.256.114.065.286,00	6.655.596.305.385,58	7.982.283.743.895,92	8.670.039.073.003,10	9.100.576.156.117,75	9.558.519.876.379,18
	A. Belanja Operasi	3.421.072.789.424,12	3.723.229.977.811,91	4.078.535.706.900,00	4.459.354.963.963,28	4.871.730.682.492,23	5.309.970.888.861,08
	B. Belanja Modal	1.086.552.145.717,88	2.093.689.174.375,69	2.963.633.400.282,79	3.156.455.490.053,34	3.171.052.722.611,36	3.186.351.096.908,42
	C. Belanja Tak Terduga	18.818.942.194,00	18.818.942.194,00	18.818.942.194,00	18.818.942.194,00	18.818.942.194,00	18.818.942.194,00
	D. Belanja Transfer	729.670.187.950,00	819.858.211.003,98	921.295.694.519,12	1.035.409.676.792,47	1.038.973.808.820,16	1.043.378.948.415,68
	JUMLAH BELANJA	5.256.114.065.286,00	6.655.596.305.385,58	7.982.283.743.895,92	8.670.039.073.003,10	9.100.576.156.117,75	9.558.519.876.379,18
	SURPLUS/DEFISIT	73.154.056.185,00	1.707.461.754,13	-361.510.212.136,42	41.499.926.986,61	67.744.530.652,20	-141.101.137.888,24
3	PEMBIAYAAN	-73.154.056.185,00	-1.707.461.754,13	361.510.212.136,42	-41.499.926.986,61	-67.744.530.652,20	141.101.137.888,24
	Penerimaan Pembiayaan	263.048.142.895,00	62.992.538.245,87	370.210.212.136,42	125.000.073.013,39	146.155.469.347,80	149.801.137.888,24
	Pengeluaran Pembiayaan	336.202.199.080,00	64.700.000.000,00	8.700.000.000,00	166.500.000.000,00	213.900.000.000,00	8.700.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	-73.154.056.185,00	-1.707.461.754,13	361.510.212.136,42	-41.499.926.986,61	-67.744.530.652,20	141.101.137.888,24

Sumber: BPKAD dan Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, 2025 (data diolah Bappeda)

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah serta menjamin kesinambungan pengelolaan keuangan yang sehat dan terukur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk periode tahun 2026 hingga 2030. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan capaian realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, asumsi makro ekonomi nasional dan regional, serta arah kebijakan strategis kepala daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Proyeksi ini menjadi bagian integral dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah dan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam RPJMD dapat dibiayai secara memadai dan bertanggung jawab. Perencanaan 184fiskal jangka menengah juga memperhitungkan berbagai dinamika 184fiskal, seperti potensi peningkatan PAD, belanja pelayanan dasar, kebutuhan infrastruktur strategis, serta strategi pengelolaan pinjaman dan pembiayaan utang yang mencerminkan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penjabaran berikut disusun secara sistematis untuk menggambarkan tren, prioritas, serta implikasi kebijakan dari masing-masing komponen keuangan daerah.

A. Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten. Dari baseline sebesar Rp5,33 triliun pada tahun 2024, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp6,65 triliun pada tahun 2026 dan terus meningkat hingga mencapai Rp9,42 triliun pada tahun 2030. Pertumbuhan ini mencerminkan optimisme terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah, baik dari sisi pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah.

Secara umum, tren kenaikan ini didorong oleh kebijakan fiskal yang diarahkan pada peningkatan kemandirian daerah. Gubernur Sulawesi Tenggara menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 40% dalam lima tahun mendatang. Target tersebut akan dicapai melalui berbagai strategi, antara lain: penguatan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, digitalisasi layanan pendapatan, peningkatan pemanfaatan aset daerah secara produktif, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang dapat memberikan kontribusi fiskal secara langsung.

Selain upaya penguatan PAD, pendapatan daerah juga akan tetap ditopang oleh transfer dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana transfer lainnya. Stabilitas dan kesinambungan transfer pusat tetap menjadi komponen penting dalam menjaga kapasitas fiskal daerah, khususnya untuk membiayai pelayanan dasar dan program prioritas nasional di tingkat daerah. Dengan strategi pendapatan yang lebih terarah dan efisien, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap dapat menciptakan struktur pendapatan yang lebih seimbang dan berkelanjutan ke depan.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara diproyeksikan meningkat secara bertahap, seiring dengan peningkatan pendapatan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Dari posisi sebesar Rp5,26 triliun pada tahun 2024, belanja daerah diperkirakan mencapai Rp6,65 triliun pada tahun 2026 dan terus naik

hingga Rp9,56 triliun pada tahun 2030. Kenaikan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama.

Salah satu penyumbang utama kenaikan belanja adalah belanja pegawai, yang diperkirakan meningkat secara signifikan. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan penambahan formasi ASN baru dan perpindahan ASN dari kabupaten/kota ke lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan, pemerataan distribusi SDM aparatur, dan peningkatan kapasitas layanan publik di tingkat provinsi.

Selain belanja operasional, belanja infrastruktur juga mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan provinsi. Hal ini sejalan dengan target strategis Gubernur untuk memastikan 95% jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2030. Investasi infrastruktur jalan tidak hanya berdampak langsung pada perbaikan aksesibilitas, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam membuka keterisolasian wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta mempercepat mobilisasi hasil produksi dari sentra pertanian, perikanan, dan industri ke pasar.

Secara keseluruhan, proyeksi belanja daerah mencerminkan strategi alokasi anggaran yang difokuskan pada upaya memperbaiki kualitas layanan publik, mempercepat pembangunan wilayah, serta meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan infrastruktur dasar dan reformasi kelembagaan.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dalam periode proyeksi 2026–2030 dirancang untuk mendukung kesinambungan fiskal dan kelancaran implementasi pembangunan strategis. Setelah realisasi pinjaman daerah tahun anggaran 2025 dinyatakan selesai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merencanakan pembukaan kembali ruang pembiayaan pada tahun 2027 sebesar Rp300 miliar dengan fokus pada pendanaan pembangunan infrastruktur yang bersifat produktif dan mendesak. Pinjaman dirancang secara selektif, berdasarkan analisis kebutuhan dan kemampuan membayar, serta mempertimbangkan rasio fiskal daerah agar tetap dalam batas aman.

Penerimaan pinjaman pada tahun 2027 dan 2028 akan digunakan untuk mendukung target-target pembangunan utama yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh pendapatan rutin. Namun demikian, Pemerintah Provinsi berkomitmen bahwa seluruh pembayaran pokok pinjaman dan belanja bunga ditargetkan selesai sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2029. Strategi ini dilakukan agar tidak meninggalkan beban fiskal jangka panjang bagi pemerintahan berikutnya dan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal daerah.

Dengan kebijakan pembiayaan yang terukur, Pemerintah Provinsi tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal. Pembiayaan diarahkan tidak hanya untuk menutup defisit anggaran, tetapi juga untuk mendanai kegiatan prioritas yang memiliki dampak luas dan nilai tambah tinggi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi yang terjadi saat ini. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kinerja di masa lalu yang berkaitan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan dan potensi yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan secara menyeluruh terhadap semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan baik secara terpisah maupun beberapa urusan. Hal ini dilakukan agar dapat dipetakan terkait permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan melalui masing-masing urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan gambaran umum kondisi pembangunan Sulawesi Tenggara beberapa tahun terakhir, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi permasalahan pokok pembangunan. Penentuan permasalahan ini dilakukan melalui pemilahan dimana permasalahan yang dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dalam RPJMD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional yang bersifat mandatori. Permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain:

1. *Pertumbuhan PDRB sektor unggulan masih rendah.*

Pada Tahun 2023, sektor lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi yang mendukung pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (23,02 persen); lapangan usaha pertambangan dan penggalan (21,44 persen); lapangan usaha konstruksi (12,62 persen); lapangan usaha perdagangan besar dan eceran (12,71 persen) dan lapangan usaha industri pengolahan (8,77 persen). Dominasi tersebut masih di bawah ekspektasi, hal ini terlihat dari pertumbuhan PDRB masing-masing sektor yang berjalan lambat dan cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan PDRB dari Tahun 2022 hingga 2023 (data tahunan) untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 0,23 persen. Sedangkan untuk lapangan usaha pertambangan dan penggalan, laju pertumbuhannya sebesar 1,17 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan juga terjadi pada lapangan usaha konstruksi yaitu sebesar 0,93 persen dibandingkan Tahun 2022. Lapangan usaha perdagangan mengalami penurunan 0,1 persen dibandingkan Tahun 2022, dan pada industri pengolahan terjadi kenaikan sebesar 0,41 persen dibandingkan Tahun 2022.

2. *Tingkat kemiskinan masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional*

Tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 mencapai 11,21 persen. Angka ini berkurang 0,22 persen dibandingkan Maret 2023 yang tercatat 11,43 persen. Sementara, dibandingkan dengan September 2022, angkanya turun 0,06 persen. Sedangkan kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 mencapai angka 1,06 persen. Angka ini mengalami penurunan dari Tahun 2023 yaitu sebesar 1,65 persen. Namun capaian tersebut masih berada di bawah capaian nasional yaitu tingkat kemiskinan sebesar 8,57 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,83 persen pada tahun 2024. Penyebabnya antara lain ketimpangan pengeluaran per kapita

terutama di wilayah perkotaan masih tinggi, tenaga kerja masih di dominasi sektor pertanian dan menyumbang angka kemiskinan paling tinggi, kemiskinan di wilayah perkotaan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, wilayah yang PDRBnya didominasi sektor pertambangan pertumbuhan ekonominya meningkat namun berbanding terbalik dengan persentase penduduk miskin dalam wilayah tersebut, belum tepatnya penerima manfaat yang diberikan pemerintah/stakeholders lainnya, dan ketidakakuratan data.

3. Masih tingginya ketimpangan masyarakat dan antarwilayah

Tingginya ketimpangan masyarakat dan antarwilayah disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain: masih tingginya ketimpangan pendapatan ditandai dengan indeks gini (gini ratio) yang masih tinggi, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, potensi sumber daya alam tidak merata antardaerah, masih adanya Komunitas Adat Terpencil.

4. Produktivitas dan daya saing tenaga kerja belum optimal

Kondisi produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Sulawesi Tenggara yang belum optimal disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain: masih banyaknya pengangguran terdidik, kapasitas calon tenaga kerja masih rendah, tenaga kerja sebagian besar berada di sektor pertanian yang memiliki tingkat pendidikan rendah, serapan tenaga kerja di sektor pertambangan masih rendah, terjadi fenomena fatamorgana, banyak tenaga unskilled yang menjadi pekerja outsourcing tambang, penyerapan tenaga kerja usia produktif yang bekerja adalah yang paling banyak lulusan SMA kebawah, belum ada lembaga sertifikasi, dan terjadi mismatch antara keahlian tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, masih belum optimalnya link and match dunia usaha dan dunia industri, pelatihan vokasi yang telah dilaksanakan lebih banyak seperti di tingkat SMK, minimnya materi pelatihan yang berbasis digitalisasi atau materi pelatihan yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru, kualitas tenaga kerja dan pelatih/instruktur pelatihan vokasi masih terbatas, serta keterbatasan guru vokasi.

5. Kualitas pembangunan manusia masih berada di bawah rata-rata nasional

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai indikator untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki yang cukup baik dengan kategori “Tinggi”. Pada Tahun 2024 IPM Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 73,62, angka tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan IPM Nasional yang mencapai 75,02. Terdapat selisih 1,40 poin antara capaian Nasional dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika memperhatikan komponen pembentuk IPM, dari ketiga komponen pembentuk tersebut, yaitu: komponen pendidikan/pengetahuan, komponen kesehatan/lama hidup, dan komponen daya beli masyarakat, maka komponen pendidikan/pengetahuan memiliki capaian yang lebih baik dibandingkan capaian nasional. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 9,74 Tahun, dibandingkan capaian nasional selama 9,22 Tahun. Masing-masing angka tersebut jika dikonversikan ke dalam jenjang pendidikan formal maka rata-rata penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara pada usia sekolah mencapai jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara, sedangkan capaian nasional masih pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setara. Sementara untuk capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 13,71 Tahun, lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 13,21 Tahun. Namun, capaian dari komponen pendidikan/pengetahuan tersebut belum dapat diikuti komponen pembentuk lainnya, seperti Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 71,88 Tahun, lebih rendah dibandingkan capaian nasional

sebesar 74,15 Tahun. Demikian pula Pengeluaran Per Kapita Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara hanya mencapai 10,606 juta/tahun, lebih rendah dibanding capaian nasional sebesar 12,231 juta/tahun. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya menyamai capaian nasional, namun diharapkan dapat lebih baik dari capaian nasional untuk semua komponen pembentuk IPM, maka beberapa permasalahan telah teridentifikasi, antara lain: masih rendahnya kompetensi guru, sarana prasarana bidang pendidikan dan kesehatan belum memadai, akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah, persebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang belum merata, angka melanjutkan sekolah masih rendah, sementara angka putus sekolah tinggi, insentif untuk tenaga pendidik di daerah 3T dan daerah yang jauh dari pusat kota/zonasi domisili masih terbatas, tingginya usia pernikahan dini karena keterbatasan pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan belum efektifnya program Gerakan Masyarakat Sehat.

6. Pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang lainnya belum optimal.

Penyebab dari permasalahan terkait pemerataan infrastruktur yang belum optimal, antara lain karena keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman, belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman, belum memadainya kualitas prasarana jalan, masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah, keterbatasan moda angkutan laut dalam melayani wilayah 3T dan belum memadainya fasilitas pelabuhan, masih terbatasnya konektivitas multimoda dan antarmoda pada pelabuhan, pengembangan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan masih terbatas, khususnya untuk mendukung kawasan pariwisata dan daerah 3T yang berbasis kepulauan, belum memadainya ketersediaan sistem angkutan umum massal perkotaan, belum optimalnya penggunaan energi baru terbarukan, belum optimalnya penyediaan infrastruktur mitigasi dan penanganan bencana, dan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi belum memadai. Selain permasalahan-permasalahan di atas, penyebab lainnya juga munculnya permasalahan terkait keselamatan dalam transportasi, antara lain: a) belum optimalnya fungsi kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi secara terintegrasi; b) minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi; c) belum optimalnya pengawasan dan penegakkan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan transportasi; d) belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan transportasi dari segi ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan; e) minimnya kualitas dan kuantitas SDM transportasi sesuai dengan potensi standar keselamatan; f) belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk edukasi keselamatan transportasi; dan g) masih maraknya kendaraan angkutan barang yang overdimensi dan overload yang berlintas di jalan raya.

7. Belum optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pada tahun 2022 mencapai 65,93 atau kategori B. Berbagai macam permasalahan terkait birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang perlu segera diatasi, antara lain: belum optimalnya penerapan sistem merit, terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar perangkat daerah, belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), belum optimalnya penyelenggaraan Satu Data, minimnya inovasi pelayanan publik, belum optimalnya pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan, belum optimalnya perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada

hasil, belum optimalnya sistem pengendalian internal, masih berjalannya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi.

8. Kapasitas fiskal daerah belum optimal dalam menunjang pembiayaan pembangunan.

Kapasitas fiskal daerah belum optimal dalam menunjang pembiayaan Pembangunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain: sumber-sumber penerimaan pajak yang diserahkan ke daerah sangat terbatas, potensi penerimaan pajak belum dioptimalkan, belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD belum optimalnya pendayagunaan aset daerah, optimalisasi peran BUMD dalam meningkatkan PAD, dan minimnya inovasi daerah dalam upaya meningkatkan PAD.

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Perumusan isu strategis adalah bagian yang penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis yang dirumuskan secara tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, memperhatikan dampak yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Berdasarkan pemahaman di atas, dan jika memperhatikan setiap permasalahan utama dan perkembangan kondisi global, nasional dan regional/provinsi yang dapat mempengaruhi dinamika pembangunan jangka panjang daerah, maka rumusan isu strategis diuraikan sebagai berikut:

A. ISU GLOBAL

Isu strategis global adalah hal-hal yang mempengaruhi kondisi secara global yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan karena berdampak bagi pembangunan secara global. Secara garis besar, beberapa isu global yang terjadi saat ini, antara lain:

1. Krisis Lingkungan

Isu global saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*), yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Perubahan iklim global adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca di seluruh dunia, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor alami dan aktivitas manusia. Penyebab utama perubahan iklim adalah pemanasan global, yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida dan metana. Dampak nyata dari perubahan iklim termasuk kenaikan suhu ekstrem, cuaca yang tidak teratur, kekeringan, krisis air, dan kelangkaan pangan. Perubahan iklim berkaitan erat dengan kondisi cuaca ekstrem, perubahan kritis terhadap ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*) dan gangguan ekosistem, krisis sumber daya alam dan polusi.

Menurut Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyebarluasan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem menyebutkan definisi cuaca ekstrem adalah kejadian fenomena

alam yang tidak normal dan tidak lazim yang ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Penyebab cuaca ekstrem bisa bermacam-macam, mulai dari aktivitas manusia seperti polusi udara dan pemanasan global, hingga siklus alam seperti El Nino dan La Nina yang memengaruhi suhu dan pola hujan di berbagai wilayah. Ciri-ciri cuaca ekstrem antara lain adalah fluktuasi suhu yang ekstrem, curah hujan yang tidak normal, angin kencang, atau perubahan cuaca yang tiba-tiba dan drastis. Dampak dari cuaca ekstrem sangat serius, mulai dari kerugian ekonomi akibat bencana alam, terganggunya produksi pertanian, hingga ancaman langsung terhadap keselamatan dan kehidupan manusia.

Selain cuaca ekstrem, perubahan iklim juga menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Pertama, peningkatan suhu akibat pemanasan global dapat memberikan dampak serius pada kehidupan spesies dan ekosistem. Perubahan suhu yang signifikan dapat memicu adaptasi yang sulit bagi berbagai makhluk hidup, dengan potensi mengganggu rantai makanan dan keseimbangan alam. Curah hujan intens sebagai dampak perubahan iklim juga menjadi ancaman nyata. Pola curah hujan yang ekstrem dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, mengancam kelangsungan hidup spesies serta menyebabkan degradasi ekosistem. Spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan ini dapat terancam punah. Pengaruh perubahan iklim terhadap ekosistem menjadi aspek yang sangat kritis. Degradasi hutan dan lahan sebagai akibat perubahan iklim dapat merusak ekosistem, menyebabkan kehilangan habitat, dan mengancam keanekaragaman hayati. Perubahan ini dapat menciptakan tekanan besar pada populasi spesies tertentu dan mengganggu ekosistem secara keseluruhan. Hal ini dapat berdampak terhadap hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*) dan gangguan ekosistem.

Perubahan iklim juga memperburuk kondisi sumber daya alam secara global. Kerawanan pangan, kekurangan air, bencana alam yang disertai juga dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, dapat menyingkirkan orang-orang yang rentan. Perubahan iklim yang didukung dengan rusaknya lingkungan akibat rusaknya ekologis, termasuk dampak ekstraktivisme. Pendekatan pembangunan belum mengedepankan masalah lingkungan hingga memberikan kontribusi besar atas bencana. Eksploitasi terhadap tambang yang tidak memperhatikan resiko lingkungan memperparah kondisi ini. Selain itu juga dampak polusi baik itu polusi udara, suara, maupun air juga menjadi dampak atas Pembangunan yang belum mengedepankan prinsip Pembangunan berkelanjutan yang akhirnya membawa dampak krisis sumber daya alam dan rusaknya ekologi.

Kondisi perubahan iklim dan krisisnya sumber daya alam secara global menjadi salah satu isu strategis yang harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan, secara khusus untuk menentukan pendekatan dan arah pembangunan. Selain itu juga agar memperhatikan dampak lingkungan.

2. Pengembangan Teknologi

Teknologi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan modern. Kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas dari peran dan manfaat teknologi. Teknologi meningkatkan efisiensi di berbagai sektor dari manufaktur hingga layanan pelanggan, dengan otomatisasi yang menghemat waktu dan biaya. Selain itu teknologi melalui jaringan internet mempermudah akses informasi secara luas terhadap informasi dan sumber daya pendidikan, sehingga memungkinkan semua orang dapat mengakses secara online. Teknologi juga memberikan perubahan dalam dunia kerja. Sebagai contoh semakin umumnya praktek kerja jarak jauh (*remote work*)

melalui aplikasi. Teknologi juga sangat bermanfaat secara optimal untuk perkembangan ekonomi, melalui revolusi industri 4.0 (otomatisasi, kecerdasan buatan, dan Internet of things) yang akan semakin matang. Selain itu Industri 5.0 (kolaborasi manusia dan mesin membuka peluang efisiensi tinggi di berbagai sektor seperti manufaktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan) dan pemanfaatan *artificial intelligence* (AI) dalam memprediksi dan mengelola risiko teknologi, serta memprediksi potensi bencana alam dengan memberikan mitigasi risiko yang lebih baik.

Teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan mulai jamak dimanfaatkan oleh pengguna secara umum dalam membantu mengerjakan berbagai tugas. Saat ini, ada banyak program AI yang bisa diakses pengguna dengan mudah. Ketergantungan manusia pada teknologi kian meningkat, menghadirkan tantangan seperti *missinformasi* dan *disinformasi*, dampak buruk teknologi *Artificial Intellegency* (AI), dan keamanan *syber*.

Teknologi yang berperan dalam penyebaran informasi membawa tantangan baru, salah satunya adalah munculnya *misinformasi* dan *disinformasi*. *Misinformasi* adalah informasi yang keliru, tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa itu benar. Menurut *The Debunking Handbook* (2020), *misinformasi* disebar karena kesalahan atau tanpa maksud untuk menyesatkan. Sebarannya bisa dari berita lawas yang awalnya dianggap benar dan disebarluaskan dengan itikad baik. Secara teknis itu benar tetapi menyesatkan, karena orang tersebut tidak tahu fakta terbarunya atau keliru menangkap informasi. *Disinformasi* adalah informasi yang keliru, dan orang yang menyebarkannya tahu bahwa itu salah, tetapi tetap menyebarkannya. Ini berpotensi menjadi masalah global, karena bisa mencakup berbagai aspek informasi, termasuk perubahan iklim, hiburan, dan yang paling sering, propaganda politik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, isu mengenai perkembangan teknologi menjadi salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam merencanakan pembangunan, hal ini diperkuat dengan pengaruh teknologi dalam semua aspek.

3. Geopolitik dan Geoekonomi

Kondisi geopolitik global menjadi tantangan dan berdampak dalam berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Hal yang harus diantisipasi adalah adanya eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang memunculkan kekuatan baru. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia dan Laut China Selatan. Dampak dari adanya perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Selain itu kondisi geopolitik juga berdampak pada adanya migrasi paksa (*involuntary migration*). Migrasi paksa, perpindahan paksa individu atau populasi dari satu wilayah ke wilayah lain, terjadi karena berbagai alasan. Pengungsian yang disebabkan oleh konflik politik, di mana individu terpaksa melarikan diri karena perang, penganiayaan, atau pelanggaran hak asasi manusia, merupakan penyebab yang signifikan. Bencana lingkungan, seperti bencana alam atau kecelakaan industri, dapat memicu migrasi yang tidak disengaja karena individu mencari lingkungan yang lebih aman. Migrasi paksa, di mana orang dipindahkan secara paksa oleh pemerintah atau entitas lain karena alasan ekonomi atau politik, adalah bentuk lain dari gerakan yang tidak disengaja. Akhirnya, perdagangan orang, pengangkutan individu secara ilegal untuk eksploitasi, merupakan bentuk migrasi paksa yang serius yang mempengaruhi populasi rentan di seluruh dunia. Persaingan geopolitik terutama

di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antar negara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan. Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global.

4. *Polarisasi Sosial*

Polarisasi sosial adalah segregasi dalam masyarakat yang muncul akibat ketidaksetaraan pendapatan, fluktuasi properti, dan pergeseran ekonomi. Hal ini terjadi ketika kelompok-kelompok sosial terbagi berdasarkan nilai-nilai, keyakinan, atau identitas mereka. Polarisasi ini dapat menyebabkan perpecahan dalam hubungan sosial dan kerukunan antar warga. Perwujudan atas adanya sikap polarisasi sosial di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kajian perekonomian adanya kasus misal polarisasi sosial misalnya saja terjadinya kekuasaan yang dimiliki pemilik modal dengan tenaga kerja maupun kelompok yang mengarah pada proses yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dalam bidang politik yang hubungannya dengan polarisasi sosial misalnya saja kekuasaan dalam sistem sosial pemerintahan demokrasi dimana partai yang menang pemilu akan memiliki kekuasaan mengatur aturan serta perundang-undangan tidak mengedepankan pada kepentingan masyarakat.

Fenomena polarisasi sosial menimbulkan tingginya angka *disparitas*. Selain itu munculnya polarisasi sosial disebabkan oleh faktor pergeseran sosial sebagai dampak dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja yang disebabkan rendahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha. Hal ini menjadi isu secara global, karena akan berpengaruh terhadap kondisi stabilitas ekonomi secara global.

B. ISU STRATEGIS NASIONAL

Isu strategis nasional adalah hal-hal yang mempengaruhi kondisi secara nasional yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan karena berdampak bagi pembangunan nasional. Secara garis besar, beberapa isu nasional yang terjadi saat ini, antara lain:

1. *Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia*

Kondisi produktivitas yang rendah di Indonesia disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal terutama pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang tertinggal, serta kondisi kelembagaan yang mengatur regulasi serta kebijakan yang masih lemah. Rendahnya produktivitas SDM perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk bertahan di pasar kerja, sebagai contoh norma budaya yang membebani pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang tidak fleksibel, dan minimnya ruang bekerja yang ramah

anak. Hal lainnya yang mempengaruhi rendahnya produktivitas adalah modal manusia yang meliputi pendidikan dan kesehatan. Keduanya adalah hal fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Produksi tenaga kerja Indonesia rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Sumber daya manusia yang tidak memadai dianggap sebagai penyebab rendahnya produktivitas. Hal ini didasarkan pada gagasan Mankiw (2018) bahwa setiap komponen produktivitas dipengaruhi oleh sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, dan pengetahuan teknologi yang mendukung proses produksi. Indonesia seharusnya menjadi negara pertama yang memulainya. mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan profesional. Produktivitas yang rendah berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung tumbuh secara lambat.

2. *Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah*

Salah satu isu nasional yang perlu menjadi perhatian adalah terkait kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Hal ini terlihat dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment* siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* sebesar 488,33. Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat kebawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada penyerapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. *Kebutuhan hidup yang tinggi pada usia produktif*

Struktur demografi nasional pada kurun waktu jangka menengah ke depan didominasi oleh kelompok usia produktif. Kondisi ini dihadapkan pada tingginya kebutuhan hidup yang berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya alam berupa pangan, energi, air, serta lahan. Selain itu kebutuhan terhadap kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, perlindungan kesehatan, pendidikan dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu pemerintah perlu memperhatikan kondisi ini, dimana diperlukan strategi dalam penentuan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang besar.

4. *Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas*

Korupsi menjadi salah satu permasalahan yang muncul dalam birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi isu strategis, mengingat dengan terberantasnya

korupsi, maka dapat mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Selain itu, hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi. Tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Tata kelola pemerintahan yang baik mencakup berbagai aspek, mulai dari integritas para pemimpin, penegakan hukum yang transparan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, hingga pengendalian korupsi yang ketat. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik menjadi penting karena dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebuah tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Keputusan yang adil dan transparan akan mengundang investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan adanya kepastian hukum dan pengurangan praktik korupsi, bisnis akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintahan yang baik juga turut meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan akan memungkinkan kepentingan publik lebih terakomodasi.

2. ISU STRATEGIS REGIONAL WILAYAH SULAWESI

Isu strategis regional wilayah merupakan isu yang menjadi perhatian regional. Berikut isu regional wilayah Sulawesi, antara lain:

1. Meskipun sektor pertambangan dan industri pengolahan tumbuh pesat, dampaknya terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja belum optimal.

Industri pertambangan dan pengolahan memiliki dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat karena sumberdaya mineral memberikan harapan terhadap upaya pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, mengurangi pengangguran, memperluas lapangan kerja dan harapan hidup yang lebih baik. Namun pada kenyataannya masih banyaknya tenaga kerja asing dan tenaga kerja dari luar daerah yang mendominasi sehingga masih belum menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal. Hal ini tentunya berdampak pada kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah pertambangan dan industri pengolahan. Isu ini menjadi perhatian daerah di regional Sulawesi, agar mampu merumuskan strategi melalui kerjasama dalam menangani penyerapan tenaga kerja lokal terutama di daerah pertambangan dan industri pengolahan.

2. Produktivitas dan daya saing tenaga kerja belum optimal, sebagian karena ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan lapangan kerja.

Kondisi produktivitas tenaga kerja di wilayah Sulawesi masih belum optimal. Rendahnya produktivitas pekerja, hal tersebut disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan menyebabkan banyak permasalahan ketenagakerjaan dan juga menurunkan keterampilan dan kemampuan pekerja. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung menyebabkan pekerja kurang memiliki keterampilan (kompetensi) untuk

memasuki bidang pekerjaan yang memerlukan keterampilan tertentu, seperti keterampilan dan keterampilan berpikir yang kuat, keterampilan interpersonal, dan keterampilan digital. Seimbangkan dengan wawasan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan alam, teknik dan matematika. Selain itu ketidaksesuaian keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja dibandingkan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh pasar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal. Perlu adanya kerjasama daerah-daerah di Sulawesi dalam hal peningkatan kapasitas dan penyediaan keterampilan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.

3. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi disebabkan oleh struktur tenaga kerja yang didominasi oleh sektor pertanian.

Struktur tenaga kerja di Regional Sulawesi didominasi oleh sektor pertanian, walaupun sektor pertambangan dan industri pengolahan juga menjadi sektor yang mendukung perekonomian di Regional Sulawesi. Hal ini berdampak pada tingkat kemiskinan di Regional Sulawesi masih dalam kategori tinggi. Perlu adanya transformasi struktural tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian (modern). Hal ini disebabkan sektor non pertanian memberikan upah lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja di sektor pertanian. Sektor non-pertanian yang merupakan sektor dengan produktivitas tinggi menjadi tempat untuk menampung surplus tenaga kerja dari sektor pertanian. Perpindahan tenaga kerja ini tidak menyebabkan menurunnya produktivitas sektor pertanian. Transformasi struktur tenaga kerja ini dapat dilakukan dengan adanya kerjasama antardaerah di Regional Sulawesi melalui proses hilirisasi dari hulu ke hilir yang terintegrasi.

4. Kurang memadainya sarana dan prasarana dasar dan belum meratanya konektivitas antardaerah.

Sulawesi memiliki potensi yang cukup besar, baik dari sektor perikanan, pariwisata, perkebunan, pertambangan dan industri pengolahan. Perlu adanya konektivitas yang menghubungkan dari satu daerah ke daerah lainnya baik darat, laut maupun udara. Namun konektivitas di Sulawesi masih belum merata. Masih banyak konektivitas terhambat baik itu melalui darat, laut dan udara. Selain itu sarana dan prasarana dasar yang mendukung juga masih kurang memadai. Perlu adanya koordinasi baik itu antardaerah di regional Sulawesi maupun dengan pemerintah pusat terkait pemenuhan sarana dan prasarana dasar dan konektivitas antardaerah.

3. ISU STRATEGIS SULAWESI TENGGARA

Dari uraian permasalahan pokok pembangunan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis baik itu isu global, nasional dan regional, serta mempertimbangkan potensi daerah yang dapat dikembangkan, dapat disimpulkan, isu strategis daerah sebagai berikut:

Tabel 2.59. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sulawesi Tenggara

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Peran Strategis Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Sulawesi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), ditetapkan sebagai "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Pertambangan Nikel. Selain itu, dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Sulawesi Tenggara diarahkan sebagai Sentra Pengolahan Hasil Pertambangan, Perkebunan dan Destinasi Pariwisata Bahari.</p> <p>2. Potensi SDA darat dan laut di Sulawesi Tenggara tersebar merata hampir diseluruh kabupaten/Kota, mulai dari tanaman pangan, perkebunan, Holtikultura, peternakan dan perikanan. Sulawesi Tenggara juga dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam pertambangan yaitu cadangan nikel, aspal alam dan kandungan emas.</p> <p>3. Potensi Sumber Daya Manusia yaitu terkait komposisi penduduk berdasarkan usia didominasi oleh penduduk umur 15-65 tahun yang tergolong usia produktif dengan rata-rata 66.98 persen</p>	1. Pertumbuhan PDRB sektor unggulan masih rendah	1. Transformasi ekonomi yang belum optimal	1. Krisis Lingkungan	1. Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia	Meskipun sektor pertambangan dan industri pengolahan tumbuh pesat, dampaknya terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja belum optimal.	Inklusivitas pertumbuhan ekonomi
	2. Tingkat kemiskinan masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional		2. Polarisasi Sosial			
	3. Masih tingginya ketimpangan masyarakat dan antarwilayah	2. Infrastruktur yang belum memadai	3. Geopolitik dan Geoekonomi. 2. Polarisasi Sosial		Kurang memadainya sarana dan prasarana dasar dan belum meratanya konektivitas antardaerah.	Ketimpangan antarkelompok dan antarwilayah
	4. Produktivitas dan daya saing tenaga	3. Rendahnya kualitas sumber	4. Pengembangan Teknologi		2. Kualitas Sumber Daya Manusia	Produktivitas dan daya saing tenaga

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kerja belum optimal	daya manusia (SDM)		yang masih rendah; Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia	kerja belum optimal, sebagian karena ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan lapangan kerja; Meskipun sektor pertambangan dan industri pengolahan tumbuh pesat, dampaknya terhadap kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja belum optimal.	tenaga kerja di Sulawesi Tenggara
	5. Kualitas pembangunan manusia masih berada di bawah rata-rata nasional	5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi	2. Polarisasi Sosial	3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah; Kebutuhan hidup yang tinggi pada usia produktif	Produktivitas dan daya saing tenaga kerja belum optimal, sebagian karena ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan lapangan kerja.	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
	6. Pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar,	2. Infrastruktur yang belum memadai	1. Krisis Lingkungan		Kurang memadainya sarana dan prasarana dasar	Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan

Potensi Daerah (1)	Permasalahan (2)	Isu KLHS (3)	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah (7)
			Isu Global (4)	Isu Nasional (5)	Isu Regional (6)	
	infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang lainnya belum optimal				dan belum meratanya konektivitas antardaerah.	infrastruktur penunjang lainnya
	7. Belum optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	6. Transformasi tata kelola pemerintahan	4. Pengembangan Teknologi	4. Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas		Tata kelola pemerintahan yang baik
	8. Kapasitas fiskal daerah belum optimal dalam menunjang pembiayaan pembangunan					
		4. Ketahanan sosial budaya dan ekologi	1. Krisis Lingkungan			Mitigasi bencana menuju pembangunan keberlanjutan

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2025.

1. *Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi*

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan belum cukup apabila tidak diikuti dengan pembangunan ekonomi yang memperhatikan kualitas kehidupan, yaitu pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang menuntut adanya partisipasi bagi semua pihak agar turut andil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika perekonomian mulai tumbuh maka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akan mengalami penurunan. Pertumbuhan inklusif juga merupakan pertumbuhan yang menyangkut partisipasi semua masyarakat. Semua pihak dapat memperoleh manfaat yang sama rata dan berpihak kepada masyarakat miskin atau *proo poor growth*. Pertumbuhan inklusif bukan hanya pertumbuhan yang menciptakan peluang ekonomi baru saja melainkan juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, pertumbuhan inklusif memiliki beberapa indikator, antara lain pertumbuhan yang tinggi, kemiskinan, ketimpangan, serta tingkat pengangguran yang rendah.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun sejak tahun 2009 mengalami fluktuatif, namun tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Pada tahun 2009 mencapai 7,78 persen, kemudian naik cukup signifikan sebesar 11,65 persen pada tahun 2012. Kenaikan cukup signifikan tersebut disebabkan oleh dampak ekspor besar-besaran komoditas tambang ore. Pasca penetapan Undang-Undang Mineral dan Batubara yang mewajibkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral yang dihasilkan dari perusahaan pertambangan sehingga para pengusaha wajib membangun smelter untuk pengelolaan hasil pertambangan tersebut. Akibat menerapkan regulasi tersebut, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 7,50 persen pada tahun 2013 dan terus menurun hingga tahun 2014 sebesar 6,26 persen. Terjadi peristiwa pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 merupakan capaian pertumbuhan yang terendah hingga terjadi kontraksi pertumbuhan di bawah 0 persen yaitu sebesar minus 0,65 persen. Kejadian tersebut tidak hanya dialami perekonomian Sulawesi Tenggara saja, namun dialami di semua wilayah nusantara, bahkan perekonomian global mengalami goncangan yang sangat besar dan masif. Namun dengan upaya penanganan yang serius oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga pandemi Covid-19 dapat tertangani dan masyarakat dapat kembali hidup normal dan kembali menata perekonomiannya yang sempat terpuruk dalam dan jatuh dalam jurang kemiskinan. Kebangkitan perekonomian daerah dan masyarakat pasca Pandemi Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kembali meningkat sebesar 5,53 persen pada tahun 2022 dan dapat dipastikan perekonomian kembali menguat pada tahun 2024 dengan capaian 5,40 persen (*c-to-c*).

Pertumbuhan ekonomi tersebut, jika dikaitkan dengan capaian tingkat kemiskinan atau presentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2009 mencapai 17,44 persen. Penurunannya cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2005 sebagai awal RPJPD periode sebelumnya yaitu sebesar 21,45 persen. Namun jika kita melihat tren penurunan tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara memiliki korelasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari penurunan persentase penduduk miskin, namun penurunan tersebut mengalami perlambatan sejak tahun 2015 sebesar 13,74 persen hingga tahun 2023 sebesar 11,43 atau hanya mencapai penurunan sebesar 2,31 persen. Diketahui pada awal tahun 2020 penurunan persentase penduduk miskin mengalami pencapaian terendah sebesar 11,0 persen, namun kondisi pandemi Covid-19 pada tahun yang sama mengakibatkan

peningkatan jumlah penduduk miskin hingga mencapai angka 11,66 persen pada tahun 2021.

Pada sisi ketimpangan, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kondisi yang fluktuatif. Selama lima tahun terakhir, ketimpangan penduduk Sulawesi Tenggara yang diukur dengan indikator Gini Ratio atau Koefisien Gini mengalami ketimpangan tertinggi pada awal tahun 2018 sebesar 0,409. Kondisi tersebut menunjukkan jika distribusi pendapatan penduduk Sulawesi Tenggara tidak merata. Pada akhir tahun 2023 mencapai 0,366, ketimpangan semakin menipis hingga tahun 2023 mencapai 0,371. Sedangkan pada tahun 2024, ketimpangan mencapai 0,370. Jika mengacu pada perhitungan versi Bank Dunia yaitu mengukur ketimpangan dengan cara perhitungan pengeluaran pada kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah, maka ketimpangan pengeluaran penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah pada tahun 2024 mencapai 18,06 persen atau kategori ketimpangan “rendah”. (kategori ketimpangan “tinggi” berada di bawah 12 persen, kategori ketimpangan “sedang” pada kisaran 12-17 persen, dan kategori ketimpangan “rendah” berada di atas 17 persen).

Laju tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2005 hingga 2024 berfluktuatif namun trendnya mengalami penurunan. Pada tahun 2005 mencapai 8,92 persen terus mengalami penurunan sebesar 2,72 pada tahun 2016. TPT kembali meningkat pada sebesar 5,55 persen pada tahun 2015 dan kembali turun pada tahun berikutnya hingga naik mencapai 4,58 persen pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, dimana penduduk yang rentan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau tidak memiliki mata pencaharian tetap menjadi penduduk yang terdampak. Pada tahun berikut TPT terus membaik hingga tahun 2024 mencapai 3,09 persen.

Kemiskinan di Sulawesi Tenggara belum mengalami penurunan yang berarti atau signifikan, sementara pengangguran dan ketimpangan sedikit terkendali. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama terjadinya pembangunan ekonomi dimana ditekankan kepada siapa yang akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian orang, maka manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu pun hanya dinikmati oleh sebagian orang tersebut, sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatpun semakin parah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena dengan pertambahan jumlah penduduk disetiap tahunnya, maka dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga akan bertambah, dan dibutuhkanlah adanya penambahan pendapatan di setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan adanya penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian pendapatan tersebut.

Pertumbuhan inklusif bukanlah merupakan pembahasan isu baru lagi. Berdasarkan penelitian terdahulu juga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pencapaian pertumbuhan inklusif. Faktor pertama, yaitu pendapatan per kapita. pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Faktor kedua yaitu peran pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyusun strategi kebijakan yang mengarah pada fokus pencapaian pertumbuhan inklusif. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif. Faktor ketiga yaitu, kualitas sumber daya manusia atau human capital. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kemampuan masyarakat dalam mengakses perekonomian menjadi lebih baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, isu pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi strategis di Sulawesi Tenggara, hal ini

diperkuat dengan tumbuh pesatnya industri pertambangan di Sulawesi Tenggara, sehingga diharapkan selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, namun juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan serapan tenaga kerja.

2. Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Tenggara

Kemiskinan tidak hanya merupakan isu daerah atau nasional, bahkan merupakan isu global yang menjadi kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2015. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs)) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

TPB/SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universalitas, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorangpun yang terlewatkan atau “No one is Left Behind.” Salah satu yang menjadi tujuan utama Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah kemiskinan, berdasarkan komitmen global bahwa kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty).

Kondisi penduduk miskin di Sulawesi Tenggara secara faktual masih mengalami keterbatasan akses pelayanan dasar meliputi akses pendidikan, kesehatan, air bersih, rumah yang layak, dan pangan. Selain itu, pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan dirasakan masih sangat rendah, dibuktikan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Keterbatasan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil ditambah dengan akses pemasaran masih dirasakan pada kalangan masyarakat miskin hasil produksi belum layak untuk dipasarkan, sehingga akibatnya rumah tangga miskin tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dampak Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 dirasakan sangat berpengaruh pada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan yaitu dari 3,19 persen pada Agustus 2018 menjadi 3,52 persen pada Agustus 2019 dan di tahun 2020 menjadi 4,58 persen, Kenaikan TPT pada tahun 2020 ini menjadi bukti nyata dampak COVID-19 pada keadaan ketenagakerjaan. Faktor lain ketidakberdayaan masyarakat miskin disebabkan karena kondisi jasmani, psikologi, lingkungan yang terisolasi, kultur yang wajib diikuti sebagai suatu komunitas tertentu, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran atau bahkan untuk kepentingan tertentu dengan memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat miskin.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada Maret 2020 naik 1,85 ribu orang, walaupun secara persentase menurun dibandingkan periode sebelumnya. Rilis BPS menyebut bahwa Sulawesi Tenggara adalah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang persentase penduduk miskinnya turun. Bertolak belakang dengan kondisi secara nasional. Sebagian besar provinsi lainnya langsung merespon pandemi ini dengan kenaikan persentase penduduk miskin. Kemiskinan Sulawesi Tenggara turun menjadi 11 persen pada periode Maret 2020.

Bertambahnya penduduk miskin di Sultra hanya terjadi di perkotaan. Sebanyak 4,35 ribu penduduk di perkotaan berubah status dari sebelumnya tidak miskin menjadi

miskin. Sementara itu, penduduk miskin di perdesaan berkurang, baik secara jumlah maupun persentase. Kenaikan cepat angka kemiskinan di perkotaan tentu di luar perkiraan. Survei Susenas sebagai dasar penghitungan angka kemiskinan dilaksanakan pada Bulan Maret. Sementara kasus Covid-19 pertama kali di Sulawesi Tenggara juga baru ditemukan pada Maret 2020. Saat itu, jumlah kasus covid-19 masih diangka 2 digit. Namun angka kemiskinan sudah melonjak tajam. Bisa dibayangkan kondisi kemiskinan perkotaan saat ini, setelah penemuan kasus covid sudah merata di hampir semua kab kota di Sultra.

Penduduk perkotaan ternyata lebih rentan dalam merespon perubahan cepat kondisi ekonomi dan sosial, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk perkotaan tergantung pada upah harian. Kebijakan Pemerintah yang menerapkan aturan Work From Home (WFH) dan penutupan Sekolah maupun kampus dengan menerapkan pengajaran secara Virtual, tanpa disadari sangat berdampak pada penghasilan masyarakat di perkotaan yang kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek, sopir angkot maupun pedagang-pedagang makanan. Selain itu adanya kebijakan pengurangan jam operasional bagi pedagang, juga berdampak pada kurangnya penghasilan atau omset pedagang, yang berpengaruh pada melambatnya perputaran uang di Sulawesi Tenggara. Adanya kebijakan pembatasan transportasi dan aturan ketat di bidang transportasi berdampak ada wilayah yang mengalami kekurangan stok bahan pangan dan kenaikan harga barang karena kurangnya stok barang yang beredar.

Pasca pandemi Covid-19, penduduk yang terdampak masih berusaha untuk bangkit kembali dari perekonomian keluarga yang terpuruk akibat peristiwa yang tidak pernah diduga sebelumnya dan tidak pernah dipersiapkan oleh siapapun khususnya penduduk Sulawesi Tenggara. Meskipun melambat, capaian persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara terus menurun, namun capaiannya masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi pada Maret 2023 dengan capaian tingkat kemiskinan sebesar 11,43 persen atau sebanyak 321,53 ribu jiwa penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan, dengan persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan masih mendominasi yaitu sebesar 13,94 persen atau sebanyak 241,64 ribu jiwa dan sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan penduduk di wilayah perkotaan mencapai 7,40 persen atau sebanyak 79,89 ribu jiwa penduduk yang bermata pencaharian di sektor jasa, administrasi, dll. Sehingga kemiskinan di Sulawesi Tenggara menjadi isu penting untuk segera ditangani oleh berbagai pihak, karena kemiskinan merupakan isu multidimensi yang perlu ditangani secara terpadu dan berkesinambungan agar tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

3. Ketimpangan Antarkelompok dan Antarwilayah

Ketimpangan antarkelompok meliputi ketimpangan sosial dan ekonomi mencakup akses terhadap pendidikan yang kurang merata, kesenjangan dalam akses kesehatan dan pelayanan medis, serta ketimpangan lapangan kerja dan upah yang tidak adil. Infrastruktur yang tidak merata juga menjadi faktor yang memperburuk kesenjangan antar daerah. ketimpangan sosial dan ekonomi ini menghambat potensi pembangunan sosial dan mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Faktor penyebab yang menjadi ketimpangan tersebut antara lain kondisi demografi yang memiliki perbedaan, kondisi pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja, dan perbedaan status sosial di masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar,

diimplementasikan melalui program-program bantuan sosial yang ditargetkan kepada masyarakat terpinggirkan dan rentan. Berbagai kebijakan publik juga telah diterapkan guna mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir ketimpangan sosial dan ekonomi, masih ada tantangan yang harus diatasi. Beberapa tantangan tersebut termasuk ketidakmerataan dalam pelaksanaan kebijakan di berbagai wilayah. Terlebih lagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang cukup luas dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil menjadi penyebab sulitnya melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur dan terbatasnya akses terhadap berbagai pelayanan seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan, sehingga dampaknya menimbulkan ketimpangan antarkelompok dan wilayah. Masih adanya masalah ini juga disebabkan karena ketidaktepatan kebijakan yang tidak mempertimbangkan perbedaan konteks sosial dan ekonomi di berbagai daerah sehingga mengurangi efektivitas dalam mengatasi ketimpangan. Anggaran yang kurang memadai juga menjadi faktor utama dalam kegagalan implementasi kebijakan.

4. Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi didasarkan pada sistem ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor unggulan, terutama yang banyak menyerap tenaga kerja dan berorientasi pada ekspor yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing serta berorientasi pada globalisasi ekonomi.

Jika pemerintah daerah menginginkan daerahnya berdaya saing, maka program pembangunannya harus berasal dari pengembangan potensi ekonomi unggulannya. Pengembangan potensi ekonomi dapat ditempuh melalui riset dan inovasi untuk mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki daya saing yang tinggi secara umum didominasi oleh Provinsi yang memiliki basis ekonomi yang bersumber pada kekayaan sumber daya alam dan/atau daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis sektor industri dan sektor jasa. Sedangkan Provinsi yang memiliki posisi daya saing relatif rendah umumnya merupakan daerah dengan basis ekonomi yang bersandar pada sektor primer (khususnya pertanian).

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, meliputi: sektor pertanian (tanaman pangan) dengan komoditi utama: padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar, sektor perkebunan dengan komoditi unggulan: kakao, jambu mete, kelapa dalam, cengkeh, lada, kopi, dan pala, sektor perikanan dengan perikanan tangkap dan budidaya, sektor pertambangan memiliki nikel dengan ratusan ribu hektar yang tersebar di beberapa wilayah dan aspal buton yang tersebar di Pulau buton, dan sektor pariwisata memiliki wisata alam yang indah seperti wisata alam bawah laut di Pulau Wakatobi. Kawasan wisata Wakatobi merupakan bentang kepulauan yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawasan

ini terkenal sebagai salah satu tujuan wisata menarik di Indonesia, khususnya wisata bahari. Wakatobi memiliki beragam destinasi wisata baik alam maupun budaya serta beragam keunikan. Potensi Pulau Wakatobi yang sering dijuluki sebagai “surganya” para penyelam dari berbagai penjuru dunia.

Begitu beragamnya potensi sumber daya alam Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat dikembangkan agar mampu meningkatkan perekonomian daerah dan dapat pula menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan wilayah di kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya untuk meningkatkan daya saing tersebut tidaklah mudah. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan wilayah antara lain kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah dengan sebagian besar tenaga kerja berpendidikan setingkat sekolah menengah ke bawah dan rendahnya kualitas hidup masyarakat serta kurangnya prasarana dan sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Sulawesi Tenggara dan produktivitas tenaga kerja perlu menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

5. Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara. IPM Sultra meningkat dari 65,99 pada 2010 menjadi 72,94 pada 2023. Selama periode 2012 hingga 2017 pembangunan manusia di Sultra berstatus “sedang”, pada 2018-2023 pembangunan manusia Sultra bersatus “tinggi”. Capaian IPM tahun 2023 tumbuh 0,71 poin dibanding 2022 yang tercatat sebesar 72,23. Berdasarkan dimensinya yang terdiri dari dimensi pengetahuan/pendidikan, dengan komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) selama 9,31 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,70 tahun. Sementara dimensi kesehatan atau lama hidup pada komponen Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) mencapai 71,79 tahun. Capaian RLS dan HLS Sulawesi Tenggara telah melebihi capaian nasional dengan capaian masing-masing: RLS (8,77 tahun) dan HLS (13,15 tahun). Sedangkan capaian UHH Sulawesi Tenggara belum dapat melebihi capaian nasional sebesar 73,93 tahun.

Meningkatnya angka RLS dan HLS ini tentunya seiring dengan memadainya fasilitas pendidikan. Kedepan, fasilitas pendidikan harus semakin baik karena dilembaga itulah akan melahirkan manusia yang menjadi masa depan bangsa.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan. Pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan kompetensi individu. Kompetensi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong peningkatan pendapatan, sehingga tidak akan ada lagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang tidak mempunyai kesempatan berusaha dan bekerja hanya karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pembangunan manusia di bidang pendidikan harus mengedepankan pada akses dan mutu pendidikan untuk semua yaitu setiap penduduk usia sekolah memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi gender dan sosial ekonomi serta mendapatkan pendidikan budaya dan karakter dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Tidak hanya itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang di sertai dengan perubahan proses berbagai aspek kehidupan sosial menuntut terciptanya masyarakat yang gemar membaca. Perpustakaan sebagai organisasi publik memiliki peranan strategis untuk turut mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maju mundurnya perpustakaan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat, bahkan minat baca dijadikan salah satu indikator yang dapat menunjukkan maju tidaknya suatu bangsa. Peran penting perpustakaan dalam membina dan meningkatkan minat baca masyarakat, karena dengan membaca diharapkan seseorang akan memperoleh informasi dari bahan pustaka yang dibaca dan memperoleh pengertian mendalam tentang suatu peristiwa atau gejala. Dengan adanya minat baca akan diperoleh hasil yang maksimal, baik itu informasi, pengertian, pengetahuan, keterampilan, motivasi atau fakta seperti yang disajikan oleh bahan bacaan. Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai dengan jumlah koleksi bahan pustaka yang lengkap menjadi hal penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Ditengah Pandemi Covid-19, dimana proses pembelajaran dilakukan secara virtual dengan keterbatasan waktu dan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, Perpustakaan dapat menjadi alternatif solusi bagi para siswa untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait pelajaran mereka, sehingga tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai ditengah pademi Covid-19 ini.

Di bidang kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Siapapun mempunyai kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Beberapa fasilitas kesehatan diakui belum memadai sesuai dengan standar pelayanan. Ketersediaan fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit dan puskesmas saat ini tentunya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.

Di Sulawesi Tenggara, Kasus Ibu Hamil Kekurangan asupan Gizi untuk bayi yang dikandungnya masih tergolong tinggi. Kasus tersebut menyebabkan anak yang dilahirkan mengalami stunting (postur badan anak lebih pendek dari anak seusianya). Beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah lokus stunting. Stunting sangat berdampak pada tumbuh kembang anak, bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik tapi juga berdampak pada perkembangan otak anak. Dimana gangguan perkembangan otak akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan seseorang bahkan yang terburuk akan berdampak pada kematian.

UHH merupakan ukuran yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam pembangunan manusia. Dengan UHH Sulawesi Tenggara 71,79 tahun pada tahun 2023, dapat diartikan bahwa bayi yang baru lahir diharapkan hidup sampai mencapai umur 71 tahun lebih. Semakin meningkatnya UHH mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Meskipun UHH semakin meningkat namun angka kesakitan dan kematian masih cukup tinggi, sehingga perlu tetap fokus pada penanganan kesehatan masyarakat. Pada sisi lain, setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena Penyakit Tidak Menular (PTM) (63 persen dari seluruh kematian). Lebih dari 9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun, dan 90 persen dari kematian “dini” tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Secara global PTM penyebab kematian nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti : Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung atau Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke. Paradigma pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif, yang kedepan seharusnya mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut tetap harus didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan

sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

6. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Penunjang lainnya.

Pembangunan ekonomi sering didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan struktur sosial dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat, perbaikan sistem kelembagaan (ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Adanya pembangunan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan merupakan kesenjangan sosial yang kompleks di seluruh negara dengan melibatkan faktor-faktor yang saling berkaitan, antara lain: pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Sasaran pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Upaya untuk mencapai sasaran tersebut diarahkan pada empat fokus kebijakan yang sampai saat ini masih dijalankan oleh pemerintah, yaitu ; (1) Perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar (2) Perlindungan sosial, (3) Penanganan masalah gizi kurang dan rawan pangan, serta (4) Perluasan kesempatan berusaha.

Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memenuhi pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan turunannya serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penyediaan pelayanan dasar, antara lain: infrastruktur pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur air minum serta air limbah merupakan salah satu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang wajib disiapkan oleh pemerintah serta berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Berbagai program dan kebijakan pemerintah di bidang infrastruktur telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yaitu menurunkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, antara lain: penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem persampahan, program padat karya, program kota tanpa kumuh, dll. Selain itu, Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menunjang pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pelayanan distribusi barang dan jasa.

Di samping itu, untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan karakteristik daerah kepulauan, maka tantangan yang dihadapi adalah peningkatan konektivitas antar wilayah dan sistem transportasi, baik transportasi darat, laut maupun udara, melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai, meliputi: jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.

7. Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Titik krusial dalam tata kelola pemerintahan adalah keterbukaan informasi dan transparansi publik, akuntabilitas kinerja pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kebijakan, dan adanya koordinasi antara pemangku kebijakan

dalam mencapai tujuan dalam mewujudkan visi. Kondisi tersebut harus didukung dengan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Penyediaan ruang informasi dan pengaduan masyarakat harus semakin transparan dan mudah diakses. Pelayanan publik secara langsung melalui perijinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kemudahan berusaha serta hak-hak sipil lainnya semakin ditingkatkan tanpa mengabaikan regulasi yang ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan tersebut.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat mengimplementasikannya pada semua struktur pemerintahan, meliputi : akuntabilitas kinerja pembangunan dibangun dimulai dari proses perencanaan partisipatif dan terukur, penganggaran, implementasi, evaluasi hingga pelaporan kinerja. Beberapa indikator atau parameter pengukuran akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin meningkat hingga target yang ingin dicapai bernilai A. Target tersebut dapat tercapai jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara konsisten terhadap siklus manajemen tersebut. Penilaian hasil pengelolaan keuangan negara berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus dipertahankan pada penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mendapatkan opini WTP tersebut wajib memenuhi beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja tersebut tentunya harus didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang semakin pesat agar memudahkan proses kerja untuk memperoleh capaian kinerja yang optimal dan mendukung e-government.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas, mampu menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang berkembang pesat dalam menunjang kinerja individu dan lembaganya, disamping kelembagaan yang tertata dengan baik. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai dengan penempatan ASN pada posisi yang tepat dan mampu produktif dan berkinerja baik pada instansi kerjanya. Penataan kelembagaan yang baik akan mampu bekerja secara efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan penguatan kelembagaan mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan untuk memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan bersama dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Koordinasi yang dilakukan meliputi : upaya menjaga keamanan wilayah tetap kondusif dalam kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan tetap menjaga norma-norma dalam masyarakat serta norma hukum yang berlaku. Upaya lain yang harus dilakukan yaitu menekan kriminalitas dan aksi-aksi lain yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga dengan situasi yang kondusif dapat menciptakan iklim yang sejuk, rasa aman, kehidupan masyarakat yang harmonis, perlindungan terhadap hak-hak sipil terjaga dan program-program pembangunan di Sulawesi Tenggara dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target.

8. Mitigasi Bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya. Bisa dikatakan, mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi.

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang dikategorikan wilayah rawan bencana, antar lain: bencana tanah longsor, gelombang pasang, rawan banjir, rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, rawan tsunami, dan rawan abrasi. Selain itu, kecelakaan laut juga sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalulintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu. Di sisi lain, pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara pada awal tahun 2020 hingga tahun 2022 merupakan bencana non alam yang tidak pernah diduga akan terjadi, sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar, tidak hanya pada aspek kesehatan masyarakat hingga menyebabkan kematian sekitar ratusan ribu jiwa di Indonesia, bahkan berdampak pada terpuruknya perekonomian global, nasional dan daerah dan kemiskinan yang meningkat signifikan. Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam dan non alam tersebut dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap fokus dalam upaya mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut yang dapat terjadi setiap saat dan dapat berdampak besar yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka harus terus melakukan Mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu krusial yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam RPJPD. Isu pembangunan berkelanjutan merupakan isu TPB/SDGs yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Mitigasi bencana sangat berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan karena mitigasi bencana terdapat upaya untuk melestarikan lingkungan hidup agar dapat mengurangi risiko terhadap bencana khususnya bencana alam.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Sulawesi Tenggara, disebabkan oleh pengelolaan air yang belum optimal, terganggunya kawasan tangkapan air/catchment area, eksploitasi air tanah oleh industri dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daerah pesisir yang menjadi konsentrasi hunian para nelayan kecil sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Abrasi, badai, pemutihan

karang, dan gejala lainnya membutuhkan peningkatan kapasitas adaptif masyarakat pesisir yang berbasis pada kesehatan ekosistem laut dan perubahan perilaku memanfaatkan dan mengelola sumberdaya laut masyarakat pesisir. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat daya lenting sosial (social resilience) yang menjadi landasan dalam menghadapi guncangan eksternal (external shock) akibat bencana terkait iklim (climate-related disaster).

Dalam pengelolaan hutan, berbagai permasalahan masih terjadi seperti tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan, kurang terpenuhinya kebutuhan hasil hutan berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pengelolaan hutan negara belum mampu memenuhi standar pengelolaan hutan lestari. Masih maraknya kegiatan pertambangan tanpa ijin yang berpotensi merusak lahan didorong meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur, disisi lain perijinan belum banyak dipahami oleh masyarakat karena berpindahnya kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin yang melibatkan penegak hukum. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi menunjukkan bahwa pemanfaatan energi fosil masih tinggi, menjadi pendorong tingginya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Pengembangan pemanfaatan EBT masih banyak mengalami kendala-kendala tentang karena teknologi yang mahal sehingga belum menarik bagi investor. Sedangkan dari sisi kesadaran buang masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup antara lain kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengolahan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air serta budaya hemat energi dan air sehingga masih terdapat penggunaan energi yang tidak efisien.

Meningkatnya kejadian bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan kekeringan disebabkan perubahan iklim global, rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya SDM dan sarpras dalam penanganan bencana, dan perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan, penggundulan hutan). Masih kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat dan tanggap bencana masyarakat untuk mengantisipasi bencana tsunami, banjir, kekeringan, longsor yang belum optimal, hal ini disebabkan koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah, serta kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan kurangnya keterlibatan masyarakat, selain itu masih perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, memperkuat peringatan dini bencana, memperkuat manajemen kedaruratan dan melakukan percepatan pemulihan pasca bencana.

BAB III

VISI MISI, TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2025–2030. Visi dan misi ini akan menjadi landasan strategis yang akan memandu penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan jangka menengah daerah dengan mengacu pada Visi Misi Gubernur Sulawesi Tenggara hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah merupakan salah satu Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara geografis berada di Kawasan Timur Indonesia dan sebagai bagian dari kawasan regional Pulau Sulawesi sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-2029 harus disusun berdasarkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan kendala yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dengan berpedoman dan menyelaraskannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi sekitar serta regulasi lainnya baik yang diatur secara nasional maupun secara regional serta pengaruh lingkungan lainnya (global, nasional, regional dan lokal).

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

A. Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Sebelum menjabarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2029, terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap visi, misi, dan pentahapan Pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan pembangunan dan keselarasan pembanguan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama lima tahun kedepan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam lima tahun kedepan akan mendukung dan menjadi bagian dari Pembangunan Nasional Republik Indonesia dengan melibatkan semua kekuatan dan potensi yang dimiliki dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 adalah :

**“Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,
Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Negara Kesatuan Republik Indonesia : Adalah merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoeкономи serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

Bersatu : Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu system hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional. Walaupun memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata diseluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga tercipta keseimbangan dan

kesetaraan serta kesatuan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia

Berdaulat

: Pada Tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai NKRI yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Maju

: Pada Tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara beradab, berkarakter, berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Berkelanjutan

: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Sedangkan Visi RPJMN 2024-2029 adalah :

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

<p>ASTA CITA</p> <p>1</p>	<p>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</p>	<p>ASTA CITA</p> <p>5</p>	<p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p>
<p>ASTA CITA</p> <p>2</p>	<p>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p>	<p>ASTA CITA</p> <p>6</p>	<p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan Pemberantasan kemiskinan.</p>
<p>ASTA CITA</p> <p>3</p>	<p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p>	<p>ASTA CITA</p> <p>7</p>	<p>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p>
<p>ASTA CITA</p> <p>4</p>	<p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p>	<p>ASTA CITA</p> <p>8</p>	<p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>

Adapun Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-2045 :

“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing : didefinisikan sebagai kemampuan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menunjukkan keunggulan Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompetitif, pengembangan keunggulan Sumber Daya Alam secara

optimal untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, mampu beradaptasi pada perubahan global, mampu bertransformasi di bidang sosial, ekonomi dan tata kelola, pengembangan riset dan inovasi diberbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna.

Sulawesi Tenggara yang Maju : didefinisikan sebagai pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang unggul, adaptif dan inklusif, menjadi daerah *high income* dan memiliki pengaruh besar dalam perekonomian nasional. Menjadi daerah tangguh dalam menghadapi segala tantangan dan situasi krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan keamanan, serta memiliki pertahanan yang tangguh dari segala ancaman dari dalam dan luar negeri. Sebagai daerah yang modern dengan sarana dan prasarana yang canggih dan mutakhir, dan tetap menjaga kohesi sosial dan mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa di tengah peradaban modern. Memiliki sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sulawesi Tenggara yang Berkelanjutan : didefinisikan sebagai Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dari berbagai aspek yang harmoni ditandai dengan kehidupan yang sejahtera dan merata serta lingkungan yang asri dan lestari, menerapkan pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan yang lebih baik, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik. Pemanfaatan sumber daya alam yang seimbang dan berkelanjutan.

Substansi Visi RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029 RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara di atas menjadi pijakan dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih agar Sasaran Pokok RPJPD ditahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Adapun Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA MAJU YANG AMAN, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”.

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1. Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

No	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1.	SULAWESI TENGGARA MAJU	Dalam lima tahun ke depan adalah daerah yang memiliki ekonomi kuat dan berdaya saing, SDM unggul, konektivitas antar pulau, infrastruktur yang merata, pemerintahan bersih, serta lingkungan yang lestari. Pencapaian ini akan mewujudkan masyarakat yang lebih aman, sejahtera, dan semakin religius, serta berkelanjutan, menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di kawasan timur Indonesia.
2.	SULAWESI TENGGARA AMAN	Dalam lima tahun ke depan adalah daerah yang memiliki stabilitas sosial dan politik, ketertiban masyarakat yang terjaga, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Dengan kondisi ini, masyarakat dapat hidup dengan lebih tenang, nyaman, dan produktif, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
3.	SULAWESI TENGGARA SEJAHTERA	Dalam lima tahun ke depan adalah daerah yang memiliki ekonomi yang berkembang, masyarakat yang sehat dan berpendidikan dan taraf hidup meningkat, serta pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan kesejahteraan yang meningkat, diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat hidup lebih adil, makmur, dan berdaya saing, serta menikmati pembangunan yang merata di seluruh wilayah.
4.	SULAWESI TENGGARA RELIGIUS	Dalam lima tahun ke depan adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan sosial, kehidupan yang harmonis, dan toleransi yang tinggi, tanpa mengesampingkan keberagaman. Dengan pendekatan religius yang inklusif, diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat hidup dengan lebih harmonis, berakhlak, dan sejahtera, serta menjadikan agama sebagai pilar utama dalam menciptakan daerah yang aman, adil, dan berkualitas.

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan Misi yang baik akan membantu lebih jelas penggambaran Visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu

dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam upaya mengoperasionalkan Visi *“Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju Yang Aman, Sejahtera dan Religius”*, dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Provinsi Sulawesi Tenggara pada masa yang akan datang, maka dirumuskan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Yang terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya.
2. Menumbuhkan Perekonomian melalui Konektivitas dan Penguatan Potensi Pertanian dalam arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha.
3. Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Religius.

Secara singkat maksud pelaksanaan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Yang terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya.
Dalam Misi ini dibagi menjadi 2 (dua) prioritas :
 - 1) Pemenuhan Hak Dasar Sosial Masyarakat Sultra .
Sampai saat ini, sebagian masyarakat belum merasakan kesejahteraan. Salah satu penyebabnya ialah sebagian hak sosial belum tertunaikan dengan baik. Oleh sebab itu, pada misi ini akan fokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terkait (a) kesehatan, (b) pendidikan, serta (c) pemuda dan perempuan, Dalam misi ini juga membuka Ruang Ekspresi dan Kreasi, karena Kemajemukan masyarakat Sulawesi Tenggara merupakan anugerah dan berkah yang dapat dijadikan modal sosial di dalam menjalankan aktivitas pembangunan karakter dan infrastruktur , untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat dan antaretnis.
 - 2) Jaminan Perlindungan Sosial
Selain memberikan jaminan perlindungan sosial kepada Masyarakat secara umum, misi ini juga menekankan bantuan sosial terhadap Masyarakat yang tertimpa bencana, hal ini didasarkan karena menurut kajian risiko bencana nasional menyatakan bahwa "Sultra masih rendah dari sisi kapasitas indeks ketahanan bencana" (BNPB, 2021). Oleh sebab itu, dibutuhkan jaminan sosial kebencanaan yang berfokus pada masyarakat yang lemah secara fisik dan lemah finansial. Misi ini juga memastikan masyarakat Sultra yang terdampak bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya serta pulih kondisi psikologi dan ekonominya.
2. Menumbuhkan Perekonomian Melalui Konektivitas dan Penguatan Potensi Pertanian Dalam Arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sultra, disebabkan oleh konektivitas, infrastruktur, dan keberlanjutan usaha yang belum optimal, serta kebijakan yang belum berpihak secara utuh terhadap UMKM. Selain itu, sektor pariwisata dan industri kreatif belum teroptimalkan. Dengan demikian, seluruh sektor tersebut akan menjadi perhatian dalam misi ini.
3. Menguatkan Birokrasi Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Budaya Kearifan Lokal dan Religius

Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas menyebabkan stabilnya kinerja aparat dan tumbuhnya kepercayaan publik. Oleh sebab itu, misi ini difokuskan pada (a) manajemen ASN/P3K, dan (b) tata kelola pemerintahan.

Tabel 3. 2. Keterkaitan Antara Visi dan Misi RJPD 2025-2045 dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029

RPJPD PROV.SULTRA TAHUN 2025-2045	RPJMD PROV.SULTRA TAHUN 2025-2029
Visi : Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Berdaya Saing, Maju dan Berkelanjutan	Visi : Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju Yang Aman, Sejahtera dan Religius
Misi :	Misi :
Transformasi :	
1. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Cerdas, Sehat, Kreatif Unggul, dan Berdaya Saing.	1. Mewujudkan Masyarakat Yang terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.	2. Menumbuhkan Perekonomian Melalui Konektivitas dan Penguatan Potensi Pertanian Dalam Arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha.
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Inovatif.	3. Memperkuat Birokrasi Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Budaya Kearifan Lokal dan Religius
Landasan Transformasi	
4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.	
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.	
Kerangka Implementasi Transformasi	
6. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Konektivitas Antarwilayah.	
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.	
8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan.	

3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang dianalisis berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan menunjukkan tingkat

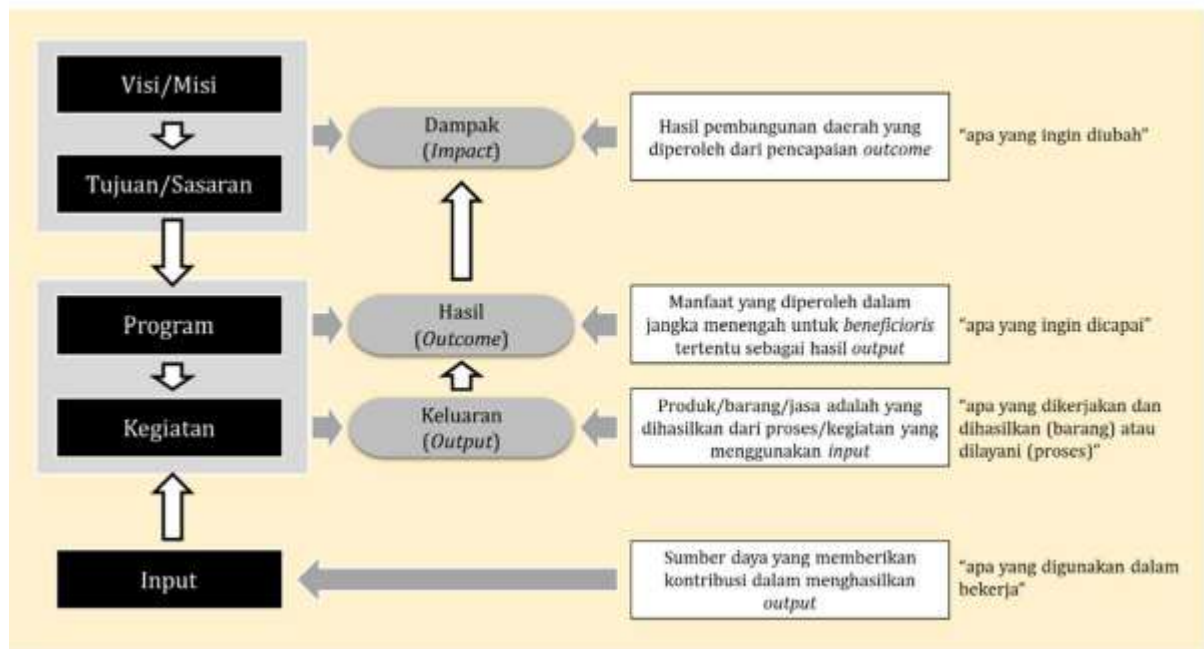
kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan RPJMD dirumuskan dengan mengacu pada misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah yang dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Penyelarasan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN menjadi hal penting pula dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan kedalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3. 1. Skema Visi Misi dengan perumusan Tujuan dan Sasaran, Program dan kegiatan



Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2029 dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut :

Misi 1	: Mewujudkan Masyarakat Yang terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya.
	Tujuan 1: Terwujudnya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 1.1: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas

	<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran 1.2: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Berkualitas dan Merata. • Sasaran 1.3: Meningkatkan Cakupan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat. • Sasaran 1.4: Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana. • Sasaran 1.5: Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah. • Sasaran 1.6: Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Misi 2	<p>: Menumbuhkan Perekonomian Melalui Konektivitas dan Penguatan Potensi Pertanian Dalam Arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha</p> <hr/> <p>Tujuan 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran 2.1: Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah. • Sasaran 2.2: Meningkatkan Konektivitas Wilayah dan Kualitas Infrastruktur Daerah. • Sasaran 2.3: Meningkatkan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. • Sasaran 2.4: Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan.
Misi 3	<p>: Menguatkan Birokrasi Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Religius.</p> <p>Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan responsif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran 3.1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pengelolaan Pemerintahan

Tabel 3. 3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI: TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA MAJU YANG AMAN, SEJAHTERA DAN RELIGIUS										
MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG TERJAMIN HAK DAN PERLINDUNGAN SOSIALNYA.	TUJUAN 1: Terwujudnya pemuahan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat	Tingkat Kemiskinan	10,63	10,04-10,54*	10,30 -10,50	8,32-8,62	7,41-7,66	6,60-6,70***	5,69-5,74	
		IMM	0,51 (2023)	0,53***	0,54	0,55	0,555	0,560***	0,565	
	SASARAN 1.1: Meningkatnya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas	Indeks Pendidikan	N/A	0,711	0,716	0,722	0,727	0,733	0,738	
	SASARAN 1.2: Meningkatnya pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan merata	Usia Harapan Hidup	71,88	72,86*	73,09	73,32	73,55	73,78***	74,01	
		Prevalensi Stunting	26,1	26,1*	24,55	23	21,45	19,9***	18,35	
	SASARAN 1.3: Meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat	Cakupan Kepesertaan JKN	100,11	98,0*	98,25	98,5	98,75	99***	99,25	
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	38,17	34,11*	37,84	41,56	45,29	49,02***	52,75	
	SASARAN 1.4: Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Indeks Risiko Bencana	151,77	150,00	149,00	148,00	147,00	146,00	145,00	

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SASARAN 1.5: Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	Indeks Ketimpangan Gender	0,460	0,467-0,464*	0,460-0,457	0,453-0,451	0,446-0,444	0,439	0,432	
	SASARAN 1.6: Meningkatnya penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Demokrasi Daerah	78,31/ Tinggi	81.48 - 84.73/ Tinggi*	82,07-85,32/ Tinggi	82,66-85,91/ Tinggi	83,25-86,5/ Tinggi	83.84 - 87.09***/Tinggi	84,43-87,68/ Tinggi	* Perubahan Numenklatur dari Indeks Demokrasi Indonesia
MISI 2: MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN MELALUI KONEKTIVITAS DAN PENGUATAN POTENSI PERTANIAN DALAM ARTI LUAS, MARITIM, SERTA DUNIA USAHA.	TUJUAN 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah.	Pertumbuhan Ekonomi	5,4	5,96 -6,46*	5,5-6,5	6,75-7,78	7,53-8,44	9,1***	9,88-9,76	
		PDRB Per Kapita	67,84	70,1 – 70,49*	77,1 – 79,5	93,1- 99,49	104,6- 113,99	116,1- 128,49***	127,6- 142,99	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,09	2,54-3,04*	2,25-2,50****	2,43-2,92	2,38-2,86	2,32 - 2,80***	2,27-2,74	
	SASARAN 2.1. Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,85	4,04	4,24	4,46	4,68	4,91	5,16	
		Pertumbuhan PDRB LU Pertambangan dan Penggalian	6,24	6,55	6,88	7,22	7,58	7,96	8,36	
		Pertumbuhan PDRB LU Industri Pengolahan	12,98	13,63	14,31	15,03	15,78	16,57	17,39	
		Pertumbuhan PDRB LU Akomodasi dan Makan Minum	4,24	4,45	4,67	4,91	5,15	5,41	5,68	

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Pertumbuhan PDRB LU Perdagangan	3,71	3,90	4,09	4,29	4,51	4,74	4,97	
	SASARAN 2.2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur	N/A	0,45	0,47	0,51	0,54	0,57	0,60	
		Indeks Konektivitas	0,67	0,68	0,69	0,73	0,75	0,77	0,79	
	SASARAN 2.3. Meningkatnya ekonomi hijau dan ekonomi biru	Indeks Ekonomi Biru	N/A	80,80*	81,47	82,14	82,82	83,49***	84,16	
		Indeks Ekonomi Hijau	N/A	49,72**	51,66	53,6	55,54	57,48	59,42	
	SASARAN 2.4. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan	IKLH	80,39	82,39	82,55	82,72	82,89	83,06	83,23	
		Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	N/A	28,93*	33,99 – 40,17*****	38,39	44,62	49,86****	55,08	
MISI 3: MENGUATKAN BIROKRASI YANG AKUNTABEL DAN BERINTEGRITAS DENGAN BERPEGANG TEGUH PADA NILAI-NILAI BUDAYA, KEARIFAN LOKAL, DAN RELIGIUS	TUJUAN 3: Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	CC/58,93	B/64,53	B/68,14	BB/72,38	BB/76,82	A/81,05	A/86,28	
	SASARAN 3.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pengelolaan pemerintahan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82,99	83	83,5	83,75	84	84,85	85	
		Nilai SAKIP Pemda	B/65, 71	B/89,80	B/68.23	BB/76,38	A/82,12	A/86,41	AA/91,34	
		Indeks Pelayanan Publik	2,83	3,57*	3,6	3,63	3,66	3,69***	3,72	

KETERANGAN

* = Sesuai dengan target pada RPJPD Prov. Sultra (imperatif dari pusat)

** = Sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Indikator Makro Daerah Tahun 2024

*** = Sesuai dengan hasil exercise Bappenas pada paparan Kick Off Penyelarasan RPJMD

**** = Sesuai dengan surat edaran/exercise/ Rencana Induk kementerian/lembaga terkait

***** = Sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2026

3.2. Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029, dirumuskan strategi pembangunan daerah. Berikut strategi pembangunan Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029:

Tabel 3.4. Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
TUJUAN 1: TERWUJUDNYA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT	SASARAN 1.1: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
		Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan
		Penguatan sarana dan prasarana pendidikan
		Digitalisasi dan inovasi dalam pembelajaran
		Penguatan tata kelola dan manajemen pendidikan
	SASARAN 1.2: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Berkualitas dan Merata	Peningkatan ketersediaan dan kompetensi tenaga kesehatan
		Penguatan sarana dan prasarana kesehatan
		Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan
		Penguatan pencegahan penyakit dan promosi kesehatan
		Digitalisasi layanan kesehatan dan penerapan teknologi kesehatan
	SASARAN 1.3: Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	Optimalisasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
		Memperluas kesempatan akses jaminan kesehatan nasional terutama bagi kelompok rentan
		Memperkuat program bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
	SASARAN 1.4: Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan sosial.
		Penguatan sistem pencegahan dan mitigasi risiko bencana berbasis teknologi.
		Peningkatan kualitas infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.
		Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam penanggulangan bencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	SASARAN 1.5: Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Daerah	Penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup perempuan
	SASARAN 1.6: Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat.
		Peningkatan kualitas dialog dan mediasi konflik sosial-keagamaan
		Penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
		Penguatan peran lembaga keagamaan dan sosial dalam pembangunan daerah
		Optimalisasi ruang publik untuk interaksi sosial yang harmonis
TUJUAN 2: TERWUJUDNYA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT	SASARAN 2.1. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	Optimalisasi produksi dan produktifitas sektor unggulan daerah
		Optimalisasi pengendalian stabilitas ekonomi
		Optimalisasi pengelolaan investasi daerah
		Optimalisasi kapasitas fiskal daerah
		Peningkatan kemampuan kewirausahaan dan ekonomi kreatif
		Meningkatkan keterampilan dan peluang kerja
		Peningkatan produktifitas UMKM
		Penguatan konektivitas antara dunia pendidikan dengan dunia industri
	SASARAN 2.2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatkan kualitas, layanan, dan keterpaduan moda transportasi
		Meningkatkan kualitas dan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
		Pengembangan infrastruktur hijau dan energi terbarukan
	SASARAN 2.3. Meningkatnya Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
	SASARAN 2.4. Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
TUJUAN 3: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN RESPONSIF	SASARAN 3.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pengelolaan Pemerintahan	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
		Penguatan sistem pengukuran kinerja dan evaluasi aparatur.
		Penerapan budaya kinerja berbasis hasil (<i>performance-based governance</i>).
		Meningkatkan kapasitas sdm aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.
		Peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik.
		Penyederhanaan birokrasi dan proses pelayanan publik.
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan layanan publik.
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
		Penerapan teknologi digital dan inovasi dalam pelayanan publik.
		Pengembangan budaya anti korupsi
		Peningkatan kapasitas aparatur dalam mendeteksi dan mencegah korupsi
		Penguatan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan bukti.
		Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
		Penguatan kapasitas sdm dalam pengelolaan keuangan daerah.
Optimalisasi sumber pendapatan daerah.		
Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah di sektor pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.		

3.2.1. Tahapan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029



Pentahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Fokus kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Tenggara pada Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut.

Tahap 1 (Tahun 2026): Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Sosial Masyarakat

Tahun 2026 difokuskan untuk memenuhi hak dasar masyarakat baik dan perlindungan sosial masyarakat. Hak dasar tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Selain itu perlindungan sosial yang dimaksud meliputi jaminan sosial, jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.

Tahap 2 (Tahun 2028): Penguatan Birokrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal, dan Religius

Tahun 2027 difokuskan penguatan birokrasi dan pengembangan SDM masyarakat. Penguatan birokrasi ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat lebih baik melalui proses birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan pengembangan SDM masyarakat bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan perkapita seluruh masyarakat.

Tahap 3 (Tahun 2027): Pemerataan Akses Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Tahun 2028 difokuskan pemerataan akses pelayanan dasar untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara yang ditunjang dengan konektivitas infrastruktur baik itu wilayah daratan maupun kepulauan, sehingga mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Tahap 4 (Tahun 2029): Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Fiskal Daerah

Tahun 2029 difokuskan untuk peningkatan daya saing dan kemandirian fiskal daerah. Peningkatan daya saing ini berkaitan erat dengan pengembangan kualitas SDM masyarakat yang didukung pemanfaatan teknologi. Sedangkan kemandirian fiskal yang daerah yang dimaksud adalah dengan optimalisasi pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Tahap 5 (Tahun 2030): Perwujudan Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius

Tahun 2030 diharapkan terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius.

3.2.2. Pengembangan Wilayah

I. Kebijakan Pengembangan Wilayah

A. Arah Kebijakan Kewilayahan pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045

Berdasarkan arahan potensi wilayah dan sistem pusat permukiman di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diterjemahkan arah pengembangan dan pusat pertumbuhan yang dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan kewilayahan maupun kebijakan sektoral. Arah pengembangan dan pusat

pertumbuhan wilayah menjadi acuan dalam menentukan pengembangan kawasan secara terintegrasi khususnya dalam mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dalam upaya menciptakan pemerataan pembangunan yaitu:

1. Kawasan Industri Pertambangan, meliputi :
 - ❑ Koridor Barat, meliputi Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara
 - ❑ Koridor Timur, meliputi Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara
 - ❑ Koridor Selatan, meliputi Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Selatan
 - ❑ Pulau Buton, meliputi Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Buton Selatan
2. Kawasan Industri Terpadu Kendari (Kota Kendari);
3. Kawasan Sistem Agropolitan Sultra (Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan); dan
4. Kawasan Sistem Minapolitan, meliputi:
 - ❑ Buton (Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Baubau);
 - ❑ Muna (Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat); dan
5. Kawasan Pesisir Kendari dan sekitarnya di Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Kepulauan
6. Kawasan pariwisata terdapat di Kabupaten Wakatobi yang didukung koridor pariwisata pendukung Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Kendari dan sekitarnya serta Baubau dan sekitarnya.

Tabel 3.5. Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Provinsi Sulawesi Tenggara

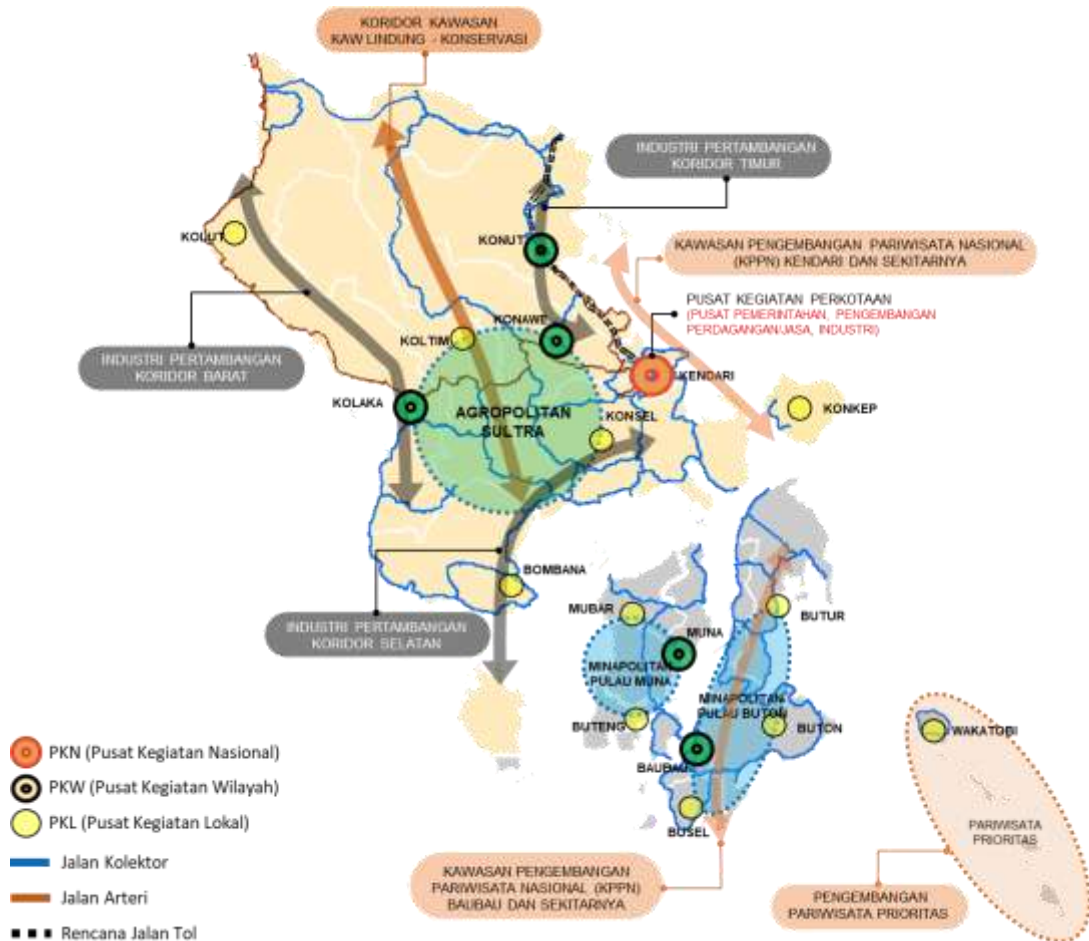
No	Kawasan	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
1	Kawasan Industri Pertambangan	Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berupa kawasan industri berbasis potensi sumber daya alam pada sektor pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil tambang (smelter) yang terintegrasi dengan kawasan pertambangan; b. Pengembangan pelabuhan khusus/terminal khusus mendukung kegiatan pokok industri pertambangan; c. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan khusus, sistem pengolahan air baku dan penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan; dan d. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi kawasan lindung yang ada di sekitar kawasan industri pertambangan.

No	Kawasan	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
2	Kawasan Industri Terpadu	Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berupa kawasan industri terpadu yang fokus pada industri pengolahan berbasis teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan; b. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan, sistem pengolahan air baku dan penataan Kawasan permukiman di sekitar kawasan; dan c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi Kawasan Lindung yang ada di sekitar kawasan industri terpadu.
3	Kawasan Sistem Agropolitan Sultra	Mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian lahan sawah dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional dengan sistem perkotaan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan perwujudan peningkatan ekonomi di wilayah perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan sebagai sentra produksi hasil pertanian; b. Menetapkan pusat pengolahan pertanian di Kabupaten Kolaka Timur dengan dukungan produksi dari Wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan; dan c. Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran.
4	Kawasan Sistem Minapolitan	Mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional keruangan dengan sistem perkotaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan Kawasan sentra produksi perikanan tangkap di Wilayah perairan Pulau Buton dan Pulau Muna, serta sentra produksi perikanan budidaya di Wilayah Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Muna; b. Menetapkan Kawasan pusat pengolahan komoditas perikanan di Wilayah Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna; c. Mengembangkan sarana penunjang industri perikanan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan di Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, dan Kota Baubau; dan d. Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran.
5	Kawasan Pesisir Kendari dan Sekitarnya	Mengembangkan kawasan pesisir Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan destinasi wisata potensial di Wilayah pesisir dan Pulau Kecil termasuk di sekitar Jembatan Teluk Kendari dan sepanjang jaringan jalan Kendari – Toronipa;

No	Kawasan	Tujuan Pengembangan	Arah Pengembangan
		Kepulauan dengan fungsi sebagai pusat pengolahan industri perikanan dan Kawasan pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> b. Mengembangkan kegiatan perikanan tangkap di perairan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai pendukung industri pengolahan perikanan; c. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan perikanan di Kota Kendari yang menjadi bagian dari Pelabuhan Perikanan Samudera; d. Mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Wilayah darat, pesisir dan Pulau Kecil yang dapat berpotensi menghambat pengembangan destinasi wisata dan menyebabkan penurunan fungsi ekosistem laut sebagai kawasan perikanan tangkap; dan e. Mengembangkan infrastruktur penunjang Kawasan pariwisata khususnya di Wilayah Pulau Kecil.
6	Kawasan Pariwisata	Mengembangkan kawasan yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata yang mengedepankan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kawasan pengembangan akomodasi pariwisata prioritas di gugusan kepulauan Wakatobi (Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, Pulau Binongko dan pulau kecil lainnya) dan pengembangan koridor pendukung sebagai KPPN di Kendari dan sekitarnya serta Baubau dan sekitarnya; b. Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan pariwisata; c. Mengembangkan destinasi wisata buatan di wilayah darat yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi wisata laut; dan d. Mengendalikan dan mengawasi Pemanfaatan Ruang Laut pada Kawasan konservasi Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi

Sumber: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045.

Gambar 3.2. Peta Arah Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber: RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045

B. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada RPJMN 2025-2029

Pada Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada terdapat Arah Pembangunan Kewilayahan yang setidaknya terdapat 4 pembagian kawasan di Sulawesi Tenggara, yaitu:

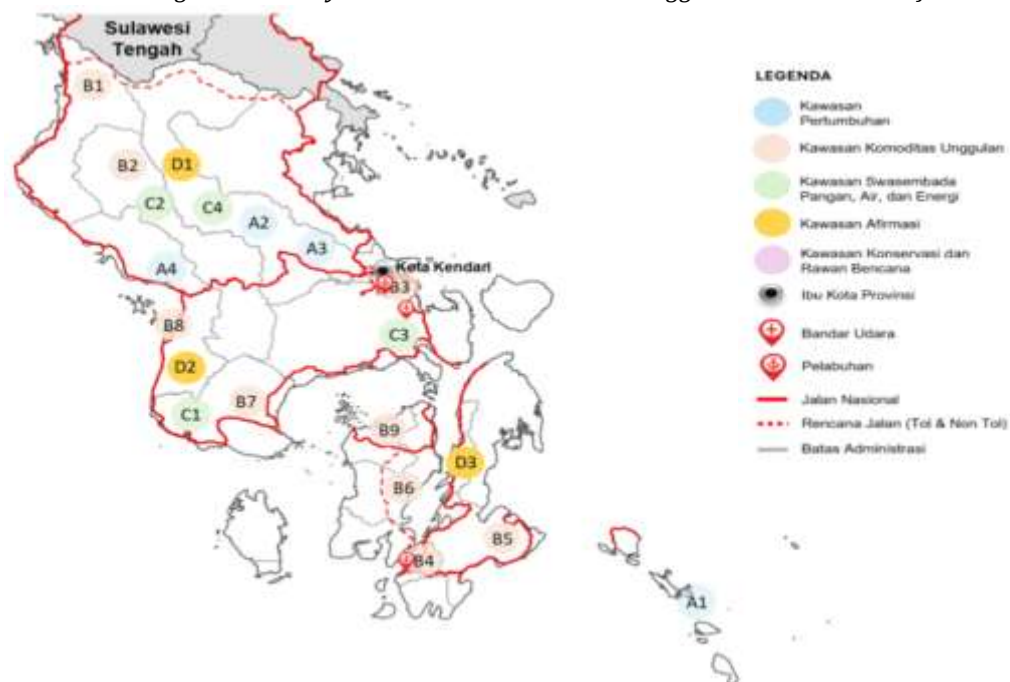
- 1) Kawasan Pertumbuhan (A)
 - ❖ Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi (A.1)
 - ❖ Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe (A.2)
 - ❖ Kawasan Industri Pengelolaan Hasil Tambang Konawe (A.3)
 - ❖ Kawasan Industri Pengelolaan Hasil Tambang Kolaka (A.4)
- 2) Kawasan Komoditas Unggulan (B)
 - ❖ Kawasan Perkebunan Kakao Kolaka Utara (B.1)
 - ❖ Kawasan Perkebunan Kakao Kolaka Timur (B.2)

- ❖ Kawasan Perikanan Tangkap Kota Kendari (B.3)
 - ❖ Kawasan Perikanan Tangkap Kota Baubau (B.4)
 - ❖ Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Buton (B.5)
 - ❖ Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Muna (B.6)
 - ❖ Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Bombana (B.7)
 - ❖ Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Kolaka (B.8)
 - ❖ Kawasan Perikanan Tangkap Kabupaten Muna Barat (B.9)
- 3) Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi (C)
- ❖ Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara Kabupaten Bombana (C.1)
 - ❖ Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara Kabupaten Kolaka Timur (C.2)
 - ❖ Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Selatan (C.3)
 - ❖ Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe (C.4)
- 4) Kawasan Afirmasi (D)
- ❖ Kawasan Transmigrasi Asinua, Kabupaten Konawe (D.1)
 - ❖ Kawasan Transmigrasi Anawua, Kabupaten Kolaka (D.2)
 - ❖ Kawasan Transmigrasi Mutiara, Kabupaten Muna (D.3)

Pada RPJMN Tahun 2025-2029, juga terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di Sulawesi Tenggara, antara lain:

- 1) Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park
- 2) Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park
- 3) Kawasan Industri ASPIRE Stargate
- 4) Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara

Gambar 3.3. Arah Pembangunan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029

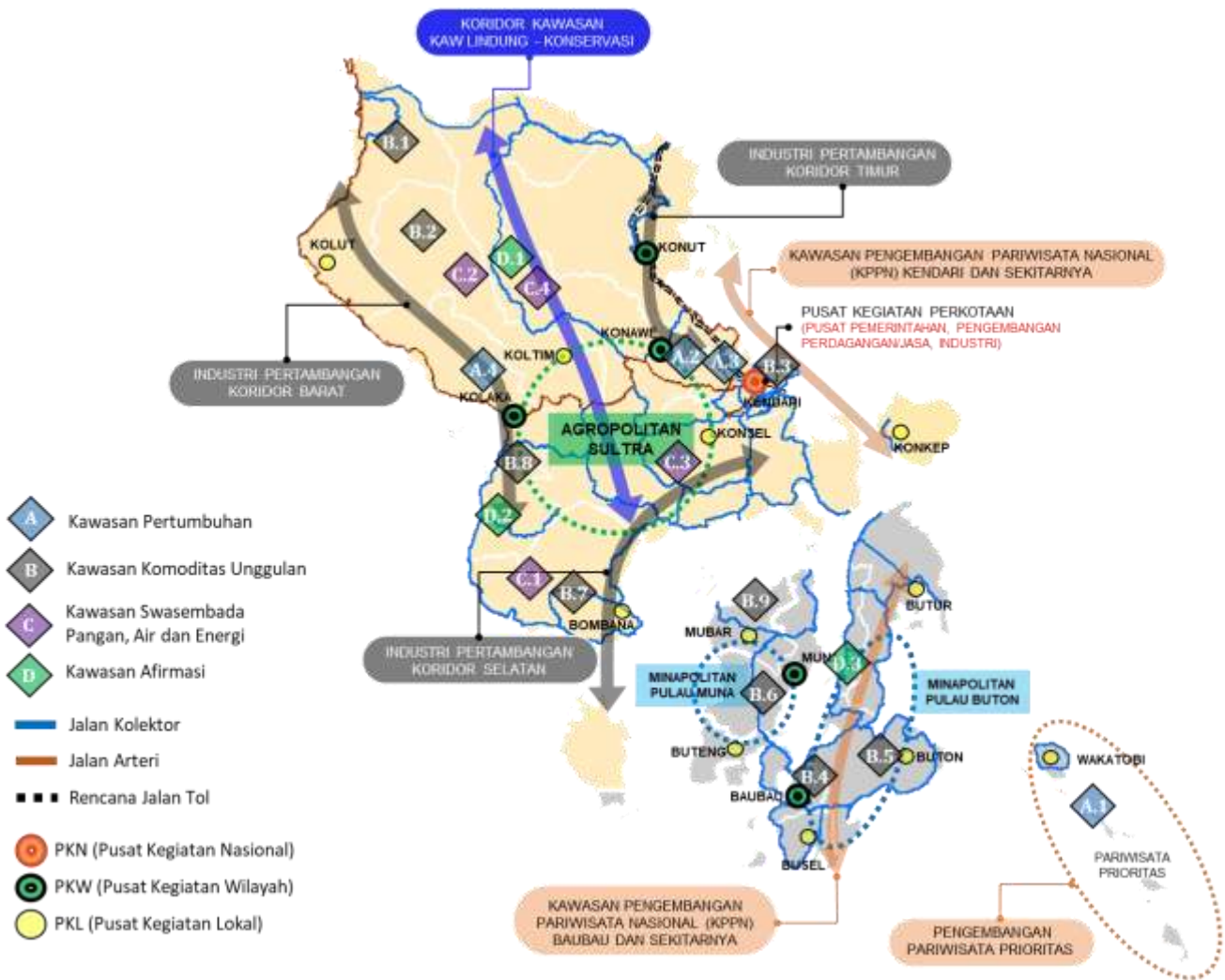


Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

C. Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

Kebijakan kewilayahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan Pembangunan yang didasarkan pada fokus pengembangan pada setiap wilayah yang disesuaikan dengan kebijakan kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045. Rumusan kebijakan kewilayahan Provinsi Sulawesi Tenggara dan indikasi intervensinya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4. Arah Kebijakan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029



Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2025.

Tabel 3.6. Matriks Arah Pengembangan Kewilayahan Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
1	Wilayah Daratan - Kota Kendari - Kabupaten Konawe - Kabupaten Konawe Kepulauan - Kabupaten Konawe Utara - Kabupaten Konawe Selatan - Kabupaten Kolaka - Kabupaten Kolaka Timur - Kabupaten Bombana - Kabupaten Kolaka Utara	- Kawasan Pesisir Kendari dan Sekitarnya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan kawasan yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata yang mengedepankan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau kecil ▪ Mengembangkan kawasan pesisir Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan fungsi sebagai pusat pengolahan industri perikanan dan Kawasan pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi Wilayah 	Pengembangan Pariwisata: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan koridor pendukung sebagai KPPN di Kendari dan sekitarnya melalui pengembangan destinasi wisata buatan di wilayah darat yang terintegrasi dengan pengembangan destinasi wisata laut di Kawasan Pantai Toronipa, Pulau Bukori dan gugusan pulau lainnya di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe b. Mengembangkan infrastruktur mendukung aksesibilitas penunjang kawasan pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jalan penghubung ke destinasi wisata di Kawasan Toronipa dan Sekitarnya ▪ Pembangunan moda transportasi untuk melayani aksesibilitas ke wilayah pulau-pulau kecil di sekitar Kendari dan Konawe ▪ Pembangunan dan pengembangan infrastruktur air bersih dan sanitasi di kawasan pariwisata termasuk pulau-pulau kecil c. Pemasaran Pariwisata Kendari dan Sekitarnya: publikasi, promosi terpadu, konten promosi wisata minat khusus, jejaring promosi wisata minat khusus. d. Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata: SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja dan masyarakat yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan peningkatan kapasitas SDM. e. Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata: fasilitasi akses pembiayaan digital, pembiayaan startup, pembiayaan pasar modal, dan pembiayaan pariwisata berkualitas, rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif, advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi, promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif, promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif, transformasi digital industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dan penerapan pariwisata berkelanjutan. f. Mengendalikan Pemanfaatan Ruang di wilayah darat, pesisir dan Pulau Kecil yang dapat berpotensi menghambat pengembangan destinasi wisata.

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
			<p>Industri Perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan kegiatan perikanan tangkap di perairan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai pendukung industri pengolahan perikanan. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan perikanan di Kota Kendari yang menjadi bagian dari Pelabuhan Perikanan Samudera. Mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Wilayah darat, pesisir dan Pulau Kecil yang dapat berpotensi menyebabkan penurunan fungsi ekosistem laut sebagai kawasan perikanan tangkap. Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap melalui penyediaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, pengembangan pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan (Eco Fishing Port). Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan, melalui penyiapan sarana penyimpanan produk kelautan perikanan, sarana distribusi logistik produk kelautan perikanan, serta gudang beku dan kelengkapannya. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan, melalui fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan, pembinaan wirausaha kelautan perikanan, peningkatan kapasitas eksportir dan kelembagaan usaha kelautan perikanan, promosi usaha dan investasi kelautan perikanan. Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan: pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan.
		<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Perikanan Tangkap - Pengembangan kawasan perikanan tangkap sebagai ekonomi biru berkelanjutan di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka 	<ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap melalui penyediaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, pengembangan pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan (Eco Fishing Port). Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan, melalui penyiapan sarana penyimpanan produk kelautan perikanan, sarana distribusi logistik produk kelautan perikanan, serta gudang beku dan kelengkapannya.

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
			<p>c. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan, melalui fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan, pembinaan wirausaha kelautan perikanan, peningkatan kapasitas eksportir dan kelembagaan usaha kelautan perikanan, promosi usaha dan investasi kelautan perikanan.</p> <p>d. Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan: pengembangan pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan.</p>
		<p>- Kawasan Industri Pertambangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis mineral dan sumber daya alam (nikel dan logam dasar) di Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Bombana 	<p>a. Pembangunan/pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan Shortcut Kawasan Industri Konawe dan Jembatan Tabangele-Pebunooha <p>b. Pembangunan industri Stainless Steel: monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian dalam negeri.</p> <p>c. Pengembangan industri nikel Sulfat: monitoring dan evaluasi perkembangan Industri smelter/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi.</p> <p>d. Fasilitasi dalam rangka peningkatan investasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Industri Battery Precursor berbasis NMC (Nikel-Mangan-Kobalt) ▪ Pengembangan Industri Katoda berbasis Nikel <p>e. Penguatan struktur industri dalam negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Industri Battery Pack berbasis NMC <p>f. Tata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi: rekomendasi keprospekan sumber daya mineral.</p> <p>g. Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen peta jalan dekarbonisasi industri nikel nasional untuk mewujudkan komitmen Net Zero Emissions (NZE) nasional.</p> <p>h. Harmonisasi kebijakan industri nikel: kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel.</p> <p>i. Peningkatan penerapan standarisasi di industri nikel: standar dalam rangka mendukung ekspor dan pengawasan produk.</p>

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
			<ul style="list-style-type: none"> j. Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan Sumber Daya Manusia: fasilitasi pendampingan SMK yang <i>link and match</i> dengan industri, pelatihan vokasi industri upskilling dan reskilling, serta <i>asesor</i> lisensi dan <i>asesor</i> kompetensi. k. Ketersediaan bahan baku industri logam dasar yang berkualitas dan kompetitif: neraca penyediaan dan permintaan besi baja, baja paduan, dan produk turunannya nasional. l. Kepastian pasokan dan harga energi untuk industri logam dasar: evaluasi pemanfaatan HGBT di industri logam dasar. m. Peningkatan utilitas kapasitas terpasang industri besi-baja: fasilitasi industri logam dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN. n. Pengembangan Industri <i>Special Steel</i>: fasilitasi Industri <i>Special Steel</i> dalam rangka peningkatan investasi. o. Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) di Industri Logam Dasar: fasilitasi investasi untuk Industri Pemotongan <i>Scrap Logam</i>. p. Optimalisasi penerapan standarisasi di Industri Logam Dasar: penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Logam. q. Pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan serta peningkatan keselamatan angkutan darat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jalan akses KI Konawe ▪ Peningkatan dan preservasi jalan akses KI Pomalaa (Kolaka), KI di Konawe Utara, kawasan pendukung industri dan kawasan pertambangan termasuk akses jalan yang menghubungkan KI dengan kawasan perkotaan di sekitarnya di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana (akses ke Kota Kendari) r. Pengembangan Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industrial Park dan Kawasan Industri Virtue Dragon Nickel Industry. s. Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI prioritas. t. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan khusus yang memperhatikan keberlanjutan wilayah pesisir sebagai pendukung industri pertambangan yang terintegrasi dengan jaringan jalan.

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
			<ul style="list-style-type: none"> u. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan khusus, sistem pengolahan air baku, pengelolaan persampahan, dan penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan.
		<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe (Morosi) Pengembangan kawasan perkotaan kecil berbasis industri di Kabupaten Konawe 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan masterplan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu di kota kecil Kabupaten Konawe. b. Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun. c. Penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, bantuan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pekerja serta bantuan pembangunan rumah swadaya. d. Pemugaran permukiman kumuh. e. Penataan kawasan perkotaan dengan fokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau serta pemenuhan layanan dasar air minum. f. Peningkatan kualitas lingkungan melalui pemenuhan layanan persampahan, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
		<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Swasembada Pangan 1. Kawasan Agropolitan Sultra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian lahan sawah dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional dengan sistem perkotaan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan perwujudan peningkatan ekonomi di wilayah perdesaan ▪ Pengembangan Kawasan Agropolitan di Wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan lahan sawah pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan sebagai sentra produksi hasil pertanian; b. Menetapkan pusat pengolahan pertanian di Kabupaten Kolaka Timur dengan dukungan produksi dari wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan; dan c. Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran.

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
		<p>dan Kabupaten Konawe Selatan</p> <p>2. Kawasan Lumbung Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan lumbung pangan Sulawesi Tenggara dengan hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berkelanjutan ▪ Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan di Wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan 	<p>a. Penerapan teknologi dan penyediaan bahan baku bioindustri agro: kawasan kakao, kawasan karet, sarana pasca panen dan pengolahan tanaman perkebunan, serta prasarana pasca panen dan pengolahan tanaman Perkebunan.</p> <p>b. Penguatan SDM pertanian dan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan: perguruan tinggi sarjana terapan pertanian, SMK pertanian, rekomendasi perlindungan LP2B dan alih fungsi lahan pertanian, dan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim.</p> <p>c. Peningkatan produksi dan pascapanen pangan nabati: alat dan mesin pertanian, sarana pengolahan dan pascapanen, dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier.</p> <p>d. Penguatan pangan lokal: sarana pengolahan hasil tanaman pangan dan sarana pascapanen tanaman pangan.</p> <p>e. Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani: pengembangan ekonomi petani, fasilitasi dan pembinaan lembaga peternakan, fasilitasi dan pembinaan nilai tambah dan daya saing peternakan, <i>Horticulture Development of Dryland Areas Project, Integrated Corporation Agriculture Resources Empowerment</i>.</p> <p>f. Pembangunan tampungan air: Bendungan Pelosika.</p>
		<p>- Kawasan Perkebunan Kakao</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kawasan perkebunan kako di Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Kolaka Timur 	<p>Pengembangan Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara dengan penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah:</p> <p>a. <i>On Farm</i> penguatan produksi pertanian bahan baku industri prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan kawasan kakao ▪ pengembangan area penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman Perkebunan ▪ pengadaan alat dan mesin pertanian pra panen sub sektor perkebunan <p>b. Pembangunan dan pengembangan bandara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan bandara di Kabupaten Kolaka Utara
		<p>- Kawasan Afiriasi: Kawasan Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kawasan Transmigrasi Asinua di Kabupaten Konawe dan Kawasan Transmigrasi Anawua di Kabupaten Kolaka 	<p>a. Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman. <p>b. Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bantuan sarana produksi pertanian. <p>c. Redistribusi aset (tanah) transmigrasi</p>

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi. <p>d. Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ perpindahan dan penempatan transmigran.
		- Peningkatan Konektivitas dan Layanan Transportasi Wilayah Daratan	<p>a. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan fasilitas Pelabuhan Lapuko ▪ pengembangan fasilitas Pelabuhan Sikeli <p>b. Pembangunan dan pengembangan bandara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan Bandar Udara Sangia Nibandera di Kabupaten Kolaka. <p>c. Pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan sistem angkutan umum massal. <p>d. Pembangunan jalan lingkar perkotaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jalan perkotaan - Provinsi Sulawesi Tenggara <p>e. Pembangunan, peningkatan, dan preservasi jalan serta peningkatan keselamatan angkutan darat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ peningkatan keselamatan angkutan darat dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan ▪ pembangunan jalan dengan ruas BTS. Kab.Kolaka/Kab.Bombana-Boepinang, Wolo-BTS. Kota Kolaka, Boepinang-Bambaea ▪ pembangunan jembatan strategis ▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah ▪ terminal barang dan penumpang ▪ pembangunan terminal barang internasional ▪ pengembangan terminal Tipe A. <p>f. Pembangunan sarana angkutan penyeberangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan kapal penyeberangan
2	Wilayah Kepulauan - Kota Baubau - Kabupaten Buton - Kabupaten Buton Utara - Kabupaten Buton Selatan - Kabupaten Wakatobi - Kabupaten Muna - Kabupaten Muna Barat	- Pengembangan Kawasan Minapolitan Buton <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional keruangan dengan sistem perkotaan yang mendorong 	Hilirisasi Perikanan <p>a. Menetapkan kawasan sentra produksi perikanan tangkap di wilayah perairan Pulau Buton.</p> <p>b. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan perikanan di Kota Baubau yang menjadi bagian dari Pelabuhan Perikanan Nusantara.</p> <p>c. Mengembangkan sarana penunjang industri perikanan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan di Kota Baubau.</p>

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
	- Kabupaten Buton Tengah	pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> d. Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan, melalui penyiapan sarana penyimpanan produk kelautan perikanan, sarana distribusi logistik produk kelautan perikanan, serta gudang beku dan kelengkapannya. e. Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan: pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi f. Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran. g. Mengendalikan Pemanfaatan Ruang di Wilayah darat, pesisir dan Pulau Kecil yang dapat berpotensi menyebabkan penurunan fungsi ekosistem laut sebagai kawasan perikanan tangkap. h. Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap melalui penyediaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, pengembangan pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan (Eco Fishing Port). i. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan, melalui fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan, pembinaan wirausaha kelautan perikanan, peningkatan kapasitas eksportir dan kelembagaan usaha kelautan perikanan, promosi usaha dan investasi kelautan perikanan.
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Kawasan Minapolitan Muna <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan sistem pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan dalam rangka mendukung keterkaitan fungsional keruangan dengan sistem perkotaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir. ▪ Wilayah cakupan kawasan adalah Kabupaten Muna, 	<p>Hilirisasi Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kawasan sentra produksi perikanan tangkap di wilayah perairan Pulau Muna. b. Mengembangkan kegiatan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Muna yang menjadi bagian dari Pelabuhan Perikanan. c. Mengembangkan sarana penunjang industri perikanan yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan di Kabupaten Muna. d. Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan, melalui penyiapan sarana penyimpanan produk kelautan perikanan, sarana distribusi logistik produk kelautan perikanan, serta gudang beku dan kelengkapannya.

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
		Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah	<ul style="list-style-type: none"> e. Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi f. Mengembangkan jaringan infrastruktur jalan sebagai penunjang aksesibilitas antar sentra produksi (kawasan perdesaan) dan pusat pengolahan serta pemasaran. g. Mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayah darat, pesisir dan pulau kecil yang dapat berpotensi menyebabkan penurunan fungsi ekosistem laut sebagai kawasan perikanan tangkap. h. Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap melalui penyediaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, pengembangan pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan (Eco Fishing Port). i. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan, melalui fasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan, pembinaan wirausaha kelautan perikanan, peningkatan kapasitas eksportir dan kelembagaan usaha kelautan perikanan, promosi usaha dan investasi kelautan perikanan. j. Pengembangan klaster ikan air tawar (ikan nila) dan revitalisasi tambak udang dan bandeng
		<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Industri Pertambangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis pertambangan batubara (aspal) di Kabupaten Buton ▪ Pengembangan industri pertambangan didukung dengan kawasan pertambangan di Kabupaten Buton Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan pembangunan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil tambang yang terintegrasi dengan kawasan pertambangan b. pengembangan pelabuhan khusus/terminal khusus mendukung kegiatan pokok industri pertambangan c. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan seperti jaringan jalan khusus, sistem pengolahan air baku dan penataan kawasan permukiman di sekitar kawasan pertambangan d. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan potensial pertanian dan menjaga fungsi kawasan lindung yang ada di sekitar kawasan e. Fasilitasi dalam rangka peningkatan investasi f. Penguatan struktur industri dalam negeri

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
		- Kawasan Pertumbuhan: Destinasi Pariwisata Proiritas Wakatobi	<p>Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi dengan implementasi <i>blue, green, circular economy</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan Aksesibilitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi b. pengembangan Atraksi termasuk event berkualitas dan warisan Geologi Wakatobi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dukungan pelaksanaan event daerah ▪ pelaksanaan kegiatan nasional dan internasional ▪ penyusunan dan implementasi rencana aksi destinasi wisata yang disusun provinsi ▪ pengembangan jejaring destinasi pariwisata di Sulawesi Tenggara c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas Pariwisata Wakatobi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota d. pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata Wakatobi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pelatihan terhadap SDM pariwisata untuk pembekalan kerja ▪ fasilitasi dan pembinaan peningkatan kapasitas SDM bagi masyarakat e. pemasaran Pariwisata Wakatobi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ publikasi ▪ promosi terpadu ▪ konten promosi wisata minat khusus ▪ jejaring promosi wisata minat khusus f. pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Wakatobi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ fasilitasi akses pembiayaan digital ▪ pembiayaan startup, pembiayaan pasar modal, dan pembiayaan pariwisata berkualitas ▪ rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif ▪ advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi ▪ promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif ▪ transformasi digital industri pariwisata dan ekonomi kreatif ▪ penerapan pariwisata berkelanjutan g. keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana Wakatobi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pelaksanaan operasi SAR Wakatobi
		- Pengembangan Kawasan Pariwisata Pulau Buton <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kawasan pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> e. mengembangkan kawasan yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan destinasi wisata di Pulau Buton untuk mendukung koridor

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
		<p>pendukung pariwisata prioritas Wakatobi di Kota Baubau, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan</p>	<p>atau jejaring pariwisata Sulawesi Tenggara</p> <p>f. mengembangkan konsep pariwisata yang mengedepankan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau kecil</p> <p>g. pemasaran Pariwisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ publikasi ▪ promosi terpadu ▪ konten promosi wisata minat khusus ▪ jejaring promosi wisata minat khusus <p>h. pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata</p> <p>i. mengembangkan infrastruktur penunjang Kawasan pariwisata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ peningkatan kualitas jaringan jalan ▪ pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenities pariwisata <p>j. pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi pariwisata Pulau Buton:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fasilitasi akses pembiayaan digital ▪ pembiayaan startup, pembiayaan pasar modal, dan pembiayaan pariwisata berkualitas ▪ rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif ▪ advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi ▪ promosi investasi pariwisata dan ekonomi kreatif ▪ transformasi digital industri pariwisata dan ekonomi kreatif
		<p>- Kawasan Afiriasi: Kawasan Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna 	<p>a. Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman. <p>b. Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bantuan sarana produksi pertanian. <p>c. Redistribusi aset (tanah) transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi. <p>d. Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ perpindahan dan penempatan transmigran.
		<p>- Peningkatan Konektivitas dan Layanan Transportasi Wilayah Kepulauan</p>	<p>a. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan fasilitas Pelabuhan Raha <p>b. Pembangunan dan pengembangan bandara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan Bandar Udara Matahora di Kabupaten Wakatobi

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan Bandar Udara Betoambari di Kota Baubau c. Penanganan konektivitas jalan mendukung wilayah tertinggal dan perbatasan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Provinsi Sulawesi Tenggara d. Pembangunan jalan lingkaran perkotaan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Jalan Perkotaan - Provinsi Sulawesi Tenggara e. Pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan sistem angkutan umum massal f. Pembangunan, peningkatan, dan preservasi jalan serta peningkatan keselamatan angkutan darat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ peningkatan keselamatan angkutan darat dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan ▪ pembangunan jembatan strategis ▪ peningkatan dan preservasi jalan daerah ▪ terminal barang dan penumpang g. Pembangunan sarana angkutan penyeberangan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan kapal penyeberangan
3	Provinsi Sulawesi Tenggara	- Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaminan ketersediaan bahan baku rumput laut yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas sektor hulu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rekomendasi tata kelola bidang budidaya rumput laut, ▪ penyaluran bibit rumput laut kultur jaringan ke masyarakat, ▪ penyaluran sarana budidaya rumput laut ke masyarakat, ▪ pembangunan infrastruktur kawasan budidaya rumput laut -'Ocean for Prosperity-Infrastructure for Coral Reefs Areas ▪ pembangunan klaster rumput laut berbasis kawasan oleh masyarakat. b. Pengembangan industri hilir rumput laut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ fasilitasi investasi industri rumput laut bernilai tinggi (Karagenan/polisakarida, agar, kosmetik, biofuel, dan bioplastik) ▪ pengembangan Biostimulan berbasis rumput laut c. Peningkatan rantai nilai rumput laut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ memperkuat koperasi rumput laut untuk memperkuat posisi tawar petani rumput laut

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut. <p>d. Peningkatan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pelatihan dan pendampingan pengolah rumput laut terkait praktik produksi dan pelatihan manajemen usaha rumput laut dengan memprioritaskan peran perempuan <p>e. Peningkatan dukungan finansial bagi pembudidaya rumput laut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Insentif fiskal bagi petani yang menggunakan bibit berkualitas dan menerapkan teknik ramah lingkungan dan penyediaan skema kredit mikro dengan bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha rumput laut
		- Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai	<p>a. Penguatan rantai pasok industri di dalam negeri (termasuk IKM):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hilirisasi grait untuk mendukung ekosistem industri Electric Vehicle (EV) Nasional ▪ fasilitasi dan pendampingan teknologi dan <i>skill-set</i> bagi IKM tier 2 dan tier 3 untuk transisi ke teknologi EV <p>b. Pengembangan infrastruktur pengisian daya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Insentif untuk investasi SPKLU ▪ Insentif untuk mendorong peningkatan daya listrik rumah tangga <p>c. Pengembangan ekosistem industri EV Industri KBLBB yang terfasilitasi investasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi untuk transisi ke arah industri ▪ perjanjian perdagangan untuk kemudahan bahan baku litium, mangan, dan kobalt <p>d. Penerapan Ekonomi Sirkular pada Industri Baterai: fasilitasi investasi untuk industri baterai <i>recycling</i>.</p>
		- Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan	<p>a. Peningkatan penyediaan dan layanan listrik:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengendalian pembangunan pembangkit listrik ▪ rumusan kebijakan pembinaan BLIMN dalam rangka kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik ▪ pembangunan infratsruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk ▪ pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
			<ul style="list-style-type: none"> b. Peningkatan konektivitas ketenagalistrikan dan digitalisasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengawasan dan pengendalian efisiensi penyediaan tenaga listrik, jaringan transmisi, gardu induk ▪ rekomendasi kebijakan transmisi energi global ▪ pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T ▪ peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari c. Dekarbonisasi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik termasuk terbarukan beban dasar dan variabel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan PLTMH dan PLTS ▪ rekomendasi pengendalian pembangkit ▪ pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk d. Penguatan infrastruktur telekomunikasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ OM Pala Ring ▪ kerjasama badan usaha ▪ dibangunnya 4G oleh operator percepatan teknologi dan pos digital ▪ pembangunan transmisi ▪ regulasi dan dukungan infrastruktur digital e. Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ penyediaan fiber optik pada daerah (kecamatan) di kawasan prioritas ▪ OM pusat monitoring telekomunikasi, pos dan penyiaran ▪ layanan publik bidang telekomunikasi ▪ fasilitas kabupaten/kota yang menerapkan infrastruktur pasif bersama f. Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat g. Perluasan layanan penyiaran digital h. Pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik i. Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman (air minum, sanitasi aman dan pengelolaan persampahan) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi dari hulu ke hilir: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan SPAM kabupaten/kota ▪ pembangunan SPAM regional ▪ peningkatan SPAM kabupaten/kota ▪ peningkatan SPAM regional ▪ perluasan SPAM kabupaten/kota ▪ pembinaan teknis bidang air minum

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ fasilitasi pengembagn teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum b. Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan SPAM: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembinaan dan pengawasan pengembangan SPAM ▪ fasilitasi daerah dalam penerapan SPAM urusan pekerjaa umum berdasarkan tiptologi daerah c. Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk berkelanjutan dan berketahanan iklim masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala regional, skala kota, skala permukiman, dan berbasis masyarakat ▪ sistem pengelolaan air limbah domestik skala kota d. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rehabilitasi daerah irgasi multikomoditas e. Pengembangan kebijakan, teknologi dan fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip sikular: <ul style="list-style-type: none"> ▪ persiapan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 (e-waste) ▪ pemanfaatan teknologi <i>recycling</i> plastik daur ulang ▪ fasilitas pengelolaan sampah spesifik f. Penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R dan peningkatan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) ▪ pembangunan fasilitas pengolahan sampah spesifik ▪ pembangunan jumlah fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R oleh pemerintah pusat ▪ sistem pengelolaan persampahan skala regional ▪ sistem pengelolaan persampahan skala kota ▪ sistem pengelolaan persampahan skala kawasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit menular lainnya, 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan digital: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
		<p>pengecahan dan penurunan stunting dan bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ penyusunan NSPK pelayanan Kesehatan bergerak ▪ penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin ▪ peningkatan RSUD tipe D menjadi C ▪ peningkatan penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN <p>b. Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, termasuk untuk menekan angka kematian ibu dan anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak) ▪ peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA, ▪ fasilitasi pengelolaan manakemen proyek penguatan pelayanan KIA ▪ pemenuhan SPA dan pengampunan untuk pelayanan KJSU-KIA ▪ fasilitasi dan pembinaan Lembaga ▪ alat Kesehatan layanan kanker terpadu <p>c. Peningkatan produksi SDM kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis ▪ bantuan Pendidikan PPDS ▪ bantuan program pendidikan SDM Kesehatan ▪ beasiswa dokter spesialis ▪ penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan ▪ pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama ▪ sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspecialis ▪ bantuan biaya pendidikan studi/profesi/spesialis.subspecialis dengan wajib penempatan <p>d. Penguatan intervensi spesifik dan sensitif stunting:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pemberian makanan tambahan dari <i>buffer stock</i> kepada ibu hamil dan balita ▪ peningkatan kapasitas tenaga kesehatan/non-kesehatan ▪ pengembangan infrastruktur air minum berbasis masyarakat ▪ pemberian bantuan sosial bersyarat ▪ penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi ▪ layanan imunisasi pendukung pencapaian <i>stunting</i> <p>e. Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta):</p>

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengadaan alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian ▪ penyediaan obat ▪ pendampingan dan pemantauan penderita
		- Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman	<p>a. Fasilitasi dan penyaluran subsidi/bantuan pembiayaan perumahan, peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ penyediaan rumah khusus reguler dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) ▪ rumah susun hunian ASN/TNI/Polri dan MBR/pekerja ▪ fasilitasi subsidi dan bantuan uang muka ▪ pembiayaan rumah swadaya dan pembiayaan mikro perumahan ▪ fasilitasi pembiayaan perumahan terjangkau dan berwawasan lingkungan <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bantuan PSU Bidang Perumahan <p>c. Penanganan permukiman kumuh:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pemugaran dan peremajaan permukiman kumuh <p>d. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi z</p>
		- Penguatan pendidikan, pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal	<p>a. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan perguruan tinggi berbasis teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ revitalisasi sarana perguruan tinggi ▪ pembangunan prasarana perguruan tinggi, ▪ pemenuhan sarana dan prasarana sekolah <p>b. Pemagangan industri di dalam dan luar negeri</p> <p>c. Pelatihan vokasi di sektor strategis yang didukung penjaminan mutu pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pelatihan vokasi bidang pertanian dan perikanan ▪ pelatihan peningkatan produktivitas ▪ pelatihan vokasi industri upskilling dan reskilling <p>d. Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri</p> <p>e. Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK</p>

No	Lokasi	Kebijakan Kewilayahan	Highlight Indikasi Intervensi
			f. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2025.

3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

A. Program Prioritas Daerah

Program Prioritas Daerah, dipahami sebagai program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan Sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik *cascading* kinerja daerah. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, maka tersusunlah program prioritas sebagai berikut:

Tabel 3.7. Program Prioritas Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
VISI: "TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA MAJU YANG AMAN, SEJAHTERA DAN RELIGIUS".					
MISI 1: Mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosialnya.	Tujuan 1: 1. Terwujudnya pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi masyarakat		Tingkat Kemiskinan		
			IMM		
	Sasaran 1.1. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas		Indeks Pendidikan		
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	1.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 4 - 18 Tahun Penyandang Disabilitas		
		Meningkatnya Mutu dan distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidik	Indeks Pemerataan Guru	1.01.04. Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	1.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Frekuensi Membaca	2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan	2.23.24. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Durasi Membaca		
Jumlah Bahan Bacaan					
Frekuensi Akses Internet					
Durasi Akses Internet					
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	2.24.03. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2.23.24. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Usia Harapan Hidup			

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
	Sasaran 1.2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan merata	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi Stunting	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02. DINAS KESEHATAN
			1. Prevalensi Depresi pusa Usia ≥ 15 Tahun		1.02. DINAS KESEHATAN
			2. Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita		1.02. DINAS KESEHATAN
			3. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat		1.02. DINAS KESEHATAN
			4. Prevalensi Obesitas >18 Tahun		1.02. DINAS KESEHATAN
			5. Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan		1.02. DINAS KESEHATAN
			6. Persentase lanjut usia mandiri		1.02. DINAS KESEHATAN
			7. Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		1.02. DINAS KESEHATAN
			8. Kabupaten/Kota dengan eliminasi Kusta		1.02. DINAS KESEHATAN
			9. Persentase Fasyankes Terkoneksi ke SIKN		1.02. DINAS KESEHATAN
			10. Persentase Fasyankes dengan perbekalan Kesehatan sesuai Standar		1.02. DINAS KESEHATAN
			11. Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1.02. DINAS KESEHATAN
			12. Persentase Fasyankes Terakreditasi Paripurna		1.02. DINAS KESEHATAN

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			13. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ kelurahansesuai Standar		1.02. DINAS KESEHATAN
			14. Tingkat Kepuasan Pasien di RS Jiwa		1.02. RS JIWA
			15. Tingkat Kepuasan Pasien di RSUD Bahteramam		1.02. RSUD BAHTERAMAM
			16. Tingkat Kepuasan Pasien di RS Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo		1.02. RSJPD OPUTA YI KOO
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	1. Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap populasi	1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02. DINAS KESEHATAN
			2. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan		
			3. Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar		
			4. Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		
		Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	1. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02. DINAS KESEHATAN

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	2.14.03. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.8.14. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)			
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase kampung Keluarga (Kampung KB) Berkualitas yang Mandiri	2.14.04. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan		2.09. DINAS KETAHANAN PANGAN
		Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	2.09.03. Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09. DINAS KETAHANAN PANGAN	
	Sasaran 1.3. Meningkatkan cakupan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat		Cakupan Kepesertaan JKN			
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1. Persentase masyarakat miskin yang menerima pembiayaan kesehatan dari Jaminan Kesehatan Sultra	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02. DINAS KESEHATAN	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	1.06. 04. Program Rehabilitasi Sosial	1.06. DINAS SOSIAL	

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
			3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
			4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
			5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
		Terlindunginya Hak-Hak Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	3.32.04. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	2.07.3.32. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Sasaran 1.4. Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana		Indeks Risiko Bencana		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi rawan Bencana Provinsi	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03. Program Penanggulangan Bencana	1.05. BPBD
		Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
		Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	1.06. 06. Program Penanganan Bencana	1.06. DINAS SOSIAL
			2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya		
			3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	1.06. 05. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06. DINAS SOSIAL
			2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		
			3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin		
	Sasaran 1.5. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah		Indeks Ketimpangan Gender		
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	2.08.02. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.8.14. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)			

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	2.08.07. Program Pemenuhan Hak Anak	2.8.14. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak	2.8.14. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	2.07. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.3.32. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	2.07. Program Penempatan Tenaga Kerja	2.07.3.32. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Sasaran 1.6. Meningkatnya penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Indeks Demokrasi Daerah		
		Meningkatnya Ketertiban Organisasi Masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif	8.01.04. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	BADAN KESBANGPOL
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	BADAN KESBANGPOL
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	1.05.02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.05. SATPOL PP

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Misi 2: Menumbuhkan Perekonomian melalui Konektifitas dan Penguatan Potensi Pertanian dalam arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha	Tujuan 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah		Pertumbuhan Ekonomi		
			Tingkat Pengangguran Terbuka		
			PDRB Per Kapita		
	Sasaran 2.1. Meningkatnya produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah		Pertumbuhan PDRB LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		
			Pertumbuhan PDRB LU Pertambangan dan Penggalian		
			Pertumbuhan PDRB LU Industri Pengolahan		
			Pertumbuhan PDRB LU Akomodasi dan Makan Minum		
			Pertumbuhan PDRB LU Perdagangan		
		Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura	3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
			Peningkatan Produksi Perkebunan		
Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Sektor Perkebunan dan Hortikultura					
Persentase Peningkatan Ketersediaan Sarana Pertanian					
				3.27. DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
				3.27. DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan yang Dimanfaatkan untuk Prasarana Pertanian Sub Sektor Perkebunan	3.27.03. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27. DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
			Cakupan Luas Lahan yang Dimanfaatkan untuk Prasarana Pertanian Sub Sektor Hortikultura		
			Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Sektor Perkebunan dan Hortikultura		
			Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian		
		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27. DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Meningkatnya Konsumsi Ikan Oleh Masyarakat	Konsumsi Ikan Masyarakat	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Rata-rata lama Tinggal Wisatawan	3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.26. DINAS PARIWISATA		

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Jumlah Produk Kreatif Difasilitasi Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	3.26.03. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI	3.26. DINAS PARIWISATA
		Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	3.28.03. Program Pengelolaan Hutan	3.28. DINAS KEHUTANAN
		Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18. DINAS PMPTSP
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	2.17.08. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.17. DINAS KOPERASI DAN UMKM
		Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	2.17.07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.17. DINAS KOPERASI DAN UMKM
		Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.19. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	3.31.02. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.30.31. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Meningkatnya Kelancaran distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.30.31. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	2.07. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.3.32. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	2.07. Program Penempatan Tenaga Kerja	2.07.3.32. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
	Sasaran 2.2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Kualitas Infrastruktur Daerah		Indeks Infrastuktur		
			Indeks Konektivitas		
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	1.04.03 Program Kawasan Permukiman	1.04. DINAS PRKPP
		Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana dan warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang Memperoleh Rumah Layak Huni	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	1.04. DINAS PRKPP
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03. DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
		Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	1.03.04 Program Pengembangan Sistem dan Pengelola Persampahan Regional	1.03. DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Kebutuhan Kapasitas Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yang Terpenuhi	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03. DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	1.03.07 Program Pengembangan Permukiman	1.03. DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	-Persentase Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang Dibangun - Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dalam Kondisi Baik	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03. DINAS SDA BM
		Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	1.03. DINAS SDA BM
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	- Rasio Konektivitas Transportasi Laut	2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran	2.15. DINAS PERHUBUNGAN
			- Persentase Pelabuhan dalam kondisi mantap		
			- Tingkat Keselamatan Transportasi Laut		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	- Rasio Konektivitas Transportasi Darat	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.15. DINAS PERHUBUNGAN
	- Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang di Jalan Provinsi				
- Tingkat Keselamatan Transportasi Darat					
Sasaran 2.3. Meningkatnya ekonomi hijau dan ekonomi biru		Indeks Ekonomi Biru			
		Indeks Ekonomi Hijau			
	Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Luas Kawasan Konservasi	3.25.02. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Indeks Kualitas Udara		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	2.07. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.3.32. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	3.28.03. Program Pengelolaan Hutan	3.28. DINAS KEHUTANAN
		Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Luas Pengelolaan Kawasan Konservasi	3.28.04. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	3.28. DINAS KEHUTANAN
		Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Tingkat Pertumbuhan EBT	3.29.05. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3.29. DINAS ESDM
	Sasaran 2.4. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
			Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK		
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		Luas Pengelolaan Kawasan Konservasi	3.28.04. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	3.28. DINAS KEHUTANAN	

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Indeks Kualitas Udara		
		Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan	2.11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Tingkat Pertumbuhan EBT	3.29.05. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	3.29. DINAS ESDM
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Rasio Ketersediaan Daya	3.29.06. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	3.29. DINAS ESDM
MISI 3: Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas yang Berpegang Teguh pada. Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Religius	Tujuan 3: 3. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan responsif		Indeks Reformasi Birokrasi		
		Sasaran 3.1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi pengelolaan pemerintahan	Nilai AKIP		
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Indeks Pelayanan Publik				
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah		Indeks Kematangan Organisasi		
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	4.01.03. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.01. SEKRETARIAT DAERAH	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks tata kelola pengadaan (ITKP)*	4.01.07. Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01. SEKRETARIAT DAERAH		

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	4.01.08. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	4.01. SEKRETARIAT DAERAH
		1. Meningkatkan Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4.02. SEKRETARIAT DPRD
			2. Persentase Penetapan Ranperda TahunN		
			3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
		2. Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pengawasan			
		Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	5.03.02. Program Kepegawaian Daerah	5.03. BKD
		Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04. BPSDM
		Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan		
		Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar, Serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis				

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	1. Persentase Aparatur Desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.13. DPMD
			2. Jumlah Pemerintah Desa dan BPD yang Mendapatkan Manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Berupa Kesehatan dan Ketenagakerjaan		
			3. Cakupan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Terbentuk dan Aktif		
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	2.12.03. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	2.12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Cakupan Penggunaan Aplikasi SPBE oleh Perangkat Daerah secara Aktif dan Efektif	2.16.03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.16. DINAS KOMINFO
		Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sisten Statistik Nasional	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Menyusun Perencanaan dan Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.19.01. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.16. DINAS KOMINFO
		Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	06.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan	06.01.INSPEKTORAT
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPDP 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	05.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.01. BAPPEDA		

VISI/ MISI	TUJUAN/SASARAN RPJMD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
		Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan dan laporan keuangan yang akuntabel	5,02.02. Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02. BPKAD
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelibangan dalam perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	5.05.02. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.05. BRIDA
		Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	5.05.03. Program Riset dan Inovasi Daerah	5.05. BRIDA
		Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapat	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02. BAPENDA
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	1.06. 02. Program Pemberdayaan Sosial	1.06. DINAS SOSIAL
3. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial					

Untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara Maju yang Aman, Sejahtera dan Religius, maka Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara memfokuskan pembangunan daerah menjadi 4 Prioritas Utama, yang dijabarkan dalam Program-Program Unggulan sebagai Berikut:

Tabel 3.8. Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR		DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		KET.	
	BIDANG PRIORITAS	PROGRAM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH		
1	PENDIDIKAN	Pengembangan Sekolah Unggulan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
		Pemberian Beasiswa Berprestasi	Bantuan beasiswa bagi mahasiswa S1, S2, S3 Sultra yang berprestasi		SEKRETARIAT DAERAH	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN		
		PENGGARIS (PERLENGKAPAN DAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Sub Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Siswa (SMA, SMK, SLB)	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur	
		Pemberian Bonus Atlet Berprestasi				
		Evaluasi Fasilitas Asrama Dayung				
SPORTIKA (SPORT CENTER TIAP KOTA DAN KABUPATEN)			Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur			
2	KESEHATAN	Program Jaminan Kesehatan Sultra untuk Memperkuat Perlindungan Asuransi Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Menyediakan Jaminan Kesehatan yang tidak di	DINAS KESEHATAN		

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR		DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		KET.
	BIDANG PRIORITAS	PROGRAM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
			tanggung dalam Mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
		LARIS (LAYANAN AMBULANS DARAT DAN LAUT GRATIS)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Menyediakan Pelayanan Ambulance gratis untuk masyarakat merujuk pasien	DINAS KESEHATAN	Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur
		Peningkatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG	

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR		DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		KET.
	BIDANG PRIORITAS	PROGRAM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG	
		Pembangunan Rumah Sakit daerah di Kab. Buton Tengah, Buton utara, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur dan Muna Barat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pembangunan lima rumah sakit merupakan pembangunan untuk meningkatkan tipe rumah sakit dari tipe D meningkat menjadi Tipe C. Lokasi di Konawe Kepulauan(DAK) , Kolaka Timur(DAK), Buton Tengah(DAK), Buton Utara (DAK), Muna Barat (APBN) sesuai Program Presiden RI dalam Program PHTC dukungan Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :	DINAS KESEHATAN	

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR		DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		KET.
	BIDANG PRIORITAS	PROGRAM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
			1. Melakukan Pembinaan teknis dan supervisi kepada rumah sakit, pemenuhan standar, Proses Persiapan dan persyaratan kenaikan kelas. 2. Melakukan Pengawasan klasifikasi dan reviu kelas rumah sakit sesuai aturan berlaku, dan memastikan rumah sakit memenuhi standar pelayanan yang dipersyaratkan untuk kenaikan kelas		
3	INFRASTRUKTUR	JAMA'AH (JALAN MULUS ANTAR WILAYAH): 1) Rehabilitasi Jalan (Luas Jalan Alangga-Tinanggea); 2) Rekonstruksi Jalan (Ruas Jalan Lambale-Ereke); 3) Rekonstruksi Jalan (Ruas Motoha Alangga) 4) Peresmian Terminal Tipe B Lacararia Kolaka Utara).	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan: Rehabilitasi jalan; Rekonstruksi Jalan;	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA	Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur
		Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Kolaka Timur.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang terkena relokasi program provinsi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap	Dukungan Perangkat Daerah terhadap Program Pendaftaran Tanah Sertifikat Gratis Lengkap berupa Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memfasilitasi Penyerahan Sertifikat Gratis .	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		Mudik Gratis	Fasilitasi sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan	DINAS PERHUBUNGAN	

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR		DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		KET.
	BIDANG PRIORITAS	PROGRAM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
4	KETAHANAN PANGAN (AGROMARITIM)	Gerakan Pangan Murah	<p>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT.</p> <p>Sub Kegiatan: Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi</p> <p>(Berangkat dari bagaimana menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Bentuk kegiatannya berupa Pasar Murah dijadwalkan sesuai keadaan. Manfaat yang dirasakan masyarakat diukur dari GPM dilakukan untuk menyediakan harga pangan murah di bawah harga pasar)</p>	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			<p>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING ,</p> <p>Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR		DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		KET.
	BIDANG PRIORITAS	PROGRAM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
		Budidaya Manggot	<p>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Sub Kegiatan: 1. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK</p>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			<p>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sub Kegiatan: 1. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional 2. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional 3. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus 4. Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 5. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi 6. Pengelolaan sampah regional 7. Koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota</p>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR		DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		KET.
	BIDANG PRIORITAS	PROGRAM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
			<p>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <p>1. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</p>		
		Penanaman Seribu Bibit Tanaman	<p>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <p>Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung; pertanianPerbanyak Benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/ benih;</p> <p>Pengawasan mutudan peredaran benih tanaman pangan.</p> <p>(bibit=peternakan; benih= tanaman pangan)</p> <p>Berupa peningkatan mutu dan penambahan jumlah benih tanaman untuk mencapai produksi 1 juta ton. Berkaitan dengan Program Nasional Cetak Sawah.</p> <p>Kendala: Penyediaan pupuk masih 50 persen. Dampak di masyarakat, apabila 1 juta ton tercapai maka akan meningkatkan NTP, berdasarkan trend data yang disajikan BPS, capaian belum mencapai angka 100.</p>	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR		DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		KET.
	BIDANG PRIORITAS	PROGRAM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
		Pasar Tani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		Bantuan Benih dan Pupuk	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Sub Kegiatan: Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung;	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	
		- Benih	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Sub Kegiatan : 1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Hortikultura Sub Kegiatan : 2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Perkebunan	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		- Pupuk	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	
		Peninjauan TPI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Sub Kegiatan: Pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG	

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR		DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		KET.
	BIDANG PRIORITAS	PROGRAM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Pelatihan Penyelia dan Juru Sembelih Halal (JULEHA)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Sub Kegiatan: Penanggulangan Daerah terdampak wabah penyakit hewan menular ; Pengawasan peredaran produk hewan. Kerjasama dengan kementerian agama, merupakan pelatihan juru sembelih halal. Pengelolaan penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner terhadap RPH.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur
		SETARA (SERATUS JUTA ASURANSI UNTUK PETANI SULTRA)	Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi. (80 Persen dibayarkan APBN, 20 persen disubsidi oleh APBD). Tahun 2026 akan dikawal agar kelompok tani PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN. Sub Kegiatan: Pengendalian OPT Tanaman Pangan ,Hortikultura dan Perkebunan; Penanganan Dampak Perubahan Iklim	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR		DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		KET.
	BIDANG PRIORITAS	PROGRAM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
		REHABILITASI DAS UNTUK Mendukung KETAHANAN PANGAN	<p>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</p> <p>Sub kegiatan :</p> <p>a. penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan</p> <p>b. penyiapan dan pengembangan Perhutanan sosial</p> <p>Menyiapkan lahan untuk ketahanan pangan</p>	DINAS KEHUTANAN	
5	LAINNYA	MANTU (MODAL USAHA UNTUK IBUIBU)	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HKI</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>Fasilitasi Kekayaan Intelektual</p> <p>Dukungan perangkat daerah terhadap program MANTU merupakan dukungan tidak langsung berupa Fasilitasi HKI kepada pelaku-pelaku kreatif</p> <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) dalam bentuk pemberian modal usaha.</p> <p>Sub kegiatan : pemulihan usaha</p>	<p>DINAS PARIWISATA</p> <p>DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SULAWESI TENGGARA</p>	Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR		DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		KET.
	BIDANG PRIORITAS	PROGRAM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas, Perluasan Akses Permodalan, Promosi dan Pemasaran Bagi Perempuan Pelaku Industri Rumah Tangga (IR)	DINAS P3APPKB	
		SAMUDRA (SEMUA DAPAT KERJA)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA. Sub Kegiatan : Kegiatan <i>Job Fair</i> untuk Penempatan Tenaga Kerja	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur
		SATRIA KEPULAUAN (SATU TRILIUN ANGGARAN UNTUK KEPULAUAN)			
		Peluncuran <i>Roadmap Blue Economy</i>			Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur
		Penandatanganan Pakta Integritas			
		Manajemen Talenta	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1. Sosialisasi Mengenai Manajemen Talenta bagi PNS 2. Pelaksanaan Tes (CACT) Manajemen Talenta bagi PNS	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

NO.	PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR		DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		KET.
	BIDANG PRIORITAS	PROGRAM	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	
		Sertifikasi Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA. Sub Kegiatan : Penciptaan Lapangan Kerja untuk Warga Rentan Kemiskinan	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tahap II	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Hibah Ormas dan Subuh Keliling	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan dan Ormas Asing di Daerah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Selain prioritas daerah seperti dijelaskan di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga mendukung Direktif Presiden, Kegiatan Prioritas Utama dan Proyek Strategis Nasional, antara lain:

Tabel 3.9. Dukungan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Direktif Presiden

NO.	DIREKTIF PRESIDEN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
		BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi	Ketersediaan 1 Posko SPPG untuk Sulawesi Tenggara dan melaksanakan Koordinasi dengan tim SPPG terkait program MBG serta titik-titik yang menjadi lokasi pelaksanaan MBG.	PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT; Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Dinas Ketahanan Pangan

NO.	DIREKTIF PRESIDEN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
		BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
		Pengawasan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	PROGRAM PENGAWASAN PEREDARAN MUTU HEWAN	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
		<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk menunjang ketersediaan produk perikanan yang bernilai gizi tinggi; <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Benih dan Pakan; Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan Melalui Rangkaian Kegiatan Gemar Ikan, Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan dan Promosi Produk Hasil Perikanan 	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Sub kegiatan: Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Saran Pembudidayaan Ikan Di air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Di Laut PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Sub Kegiatan: Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penanganan terhadap dampak MBG (apabila terdapat kasus keracunan sebagai dampak pelaksanaan MBG)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan: Penanggulangan Kejadian Luar Biasa	Dinas Kesehatan

NO.	DIREKTIF PRESIDEN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
		BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
		Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	<p>PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</p> <p>Kegiatan: Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Dalam rangka Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Bimbingan Teknis/Pelatihan Olahan Pangan yang Sehat dan Bergizi bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)	<p>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI,</p> <p>Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi,</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</p>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Koordinasi Penyediaan Data Siswa (Jumlah dan Lokasi);	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.	Koordinasi kesesuaian ruang dan konstruksi bangunan; Pematangan Lahan dan jalan akses sekolah rakyat dan sekolah unggulan*	<p>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</p> <p>Sub Kegiatan: Penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya Kabupaten/Kota.</p>	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang

NO.	DIREKTIF PRESIDEN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
		BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
		Hibah Aset Daerah untuk Sekolah Rakyat	Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah Tanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	BPKAD
		Seleksi dan Assesment Calon Siswa	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga Sub Kegiatan : Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kab/Kota	Dinas Sosial
		Pemenuhan Kebutuhan Guru Sekolah Rakyat (Jenjang SMA, SMK dan SLB)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan output Platform Digital Pendidikan.	Sarana WiFi, Sarana Komputer, dan Pendaftaran Anggota Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Sub Kegiatan: 1. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi; 2. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; 3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi; 4. Pengembangan Perpustakaan Deposit; 5. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Cetak/Digital oleh Masyarakat; 6. Pengukuran tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Provinsi; 7. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi; 8. Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi; 9. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

NO.	DIREKTIF PRESIDEN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
		BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
			<p>Perpustakaan Elektronik; 10. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan; 11. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi; 12. Sosialisasi Budaya dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat; 13. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi; 14. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca; 15. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial; 16. Pemilihan Duta Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi.</p> <p>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Sub Kegiatan: 1. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Daerah Provinsi; 2. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi; 3. Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota; 4. Penilaian dan Penetapan Autenyifikasi Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip;</p>	

NO.	DIREKTIF PRESIDEN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
		BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
		Pemberikan pendampingan teknis secara langsung kepada tim pengembang atau instansi pendidikan dalam membangun dan mengoperasikan Platform Digital Pendidikan yang efektif, aman, dan berkelanjutan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Sub Kegiatan: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pelatihan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terkait Pemanfaat Platform Digital Pembelajaran.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran.	Penyediaan infrastruktur TIK, Pendampingan Pemanfaatan platform digital, serta Peningkatan literasi digital di lingkungan sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Sub Kegiatan: - Penyediaan Akses Internet Sub Kegiatan: Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPB	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengadaan Sarana Pendukung digitalisasi Pembelajaran.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Fasilitasi musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Sub: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 3.11. Dukungan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Kegiatan Prioritas Utama Nasional

NO.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PADA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		
		BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Tahun 2026 direncanakan untuk menyusun dokumen perencanaan persampahan regional	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Sub Kegiatan: - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan teknis Sistem Pengelolaan Persampahan; - Pembangunan TPA/ TPST/SPA</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Sub Kegiatan: - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R /TPS di kawasan strategis provinsi</p>	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
2	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Meningkatkan Produksi rumput Laut Melalui Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut Sebagai Bahan Baku hilirisasi	<p>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut</p>	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Peta Potensi Investasi, Promosi Potensi dan Peluang Investasi Hilirisasi Rumput Laut	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL, Sub Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</p> <p>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN PROVINSI Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</p>	DPMPSTP

NO.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PADA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		
		BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
		Bentuk dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melakukan Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengembangan/Diversifikasi Produk IKM olahan hasil laut (rumput laut) di wilayah pesisir	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	- Sosialisasi dan Advokasi Terhadap Pelayanan Pendidikan terkait penanganan Anak Tidak Sekolah; - Verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah.;	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Pengembangan Pangan Hewani	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi;	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Sub Kegiatan: Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
5	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	- Pembentukan Gerakan Seni Masuk Sekolah (GSMS)	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Pemberian pelatihan informal yang dilaksanakan sesuai kurikulum masing-masing; Pemberian beasiswa untuk dokter spesialis dan sub spesialis; Pemberian pelatihan bagi tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan formal (contoh: direncanakan pelatihan kejadian luar biasa untuk Kabupaten/Kota) dan frontline oleh head security partner	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM KESEHATAN Sub Kegiatan: Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan;	Dinas Kesehatan

NO.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PADA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		
		BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
7	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	1. Tahun 2024 menyusun RISPAM Prov. Sultra 2. Tahun 2025 menyusun DED SPAM Prov. Sultra 3. Tahun 2026-2030 direncanakan melaksanakan konstruksi SPAM Prov. Sultra	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
		1. Melakukan Pembinaan teknis dan supervisi kepada rumah sakit, pemenuhan standar, Proses Persiapan dan persyaratan kenaikan kelas. 2. Melakukan Pengawasan klasifikasi dan reviu kelas rumah sakit sesuai aturan berlaku, dan memastikan rumah sakit memenuhi standar pelayanan yang dipersyaratkan untuk kenaikan kelas 3. Menyusun rekomendasi hasil penilaian dan verifikasi kelayakan rumah sakit untuk kenaikan kelas Menyediakan Anggaran untuk Peningkatan Mutu sumberdaya manusia Pelayanan Fasilitas Kesehatan Di provinsi Sulawesi Tenggara, Pembinaan dan pengawasan rumah sakit	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan

NO.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PADA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		
		BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
8	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Penataan Tanaman Sagu, hilirisasi, penguatan data dan kelembagaan petani sagu	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Hortikultura
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Sub Kegiatan: Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
		Memaksimalkan pengembangan pangan lokal dengan melaksanakan Bimtek Diversifikasi produk lokal dan pengembangan kemasan produk lokal	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Pelatihan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (Gadar matneo); Pengadaan Buku KIA; Pelatihan penggunaan alat kesehatan USG untuk kesehatan ibu hamil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan: Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
10	Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	Upaya Peningkatan Produksi Kelautan di Program Pengelolaan Perikanan Tangkap meliputi penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap dan sarana prasarana pelabuhan perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PADA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		
		BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
11	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dilokasi Perumahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
12	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Pembangunan lima rumah sakit merupakan pembangunan untuk meningkatkan tipe rumah sakit dari tipe D meningkat menjadi Tipe C. Lokasi di Konawe Kepulauan(DAK) , Kolaka Timur(DAK), Buton Tengah(DAK), Buton Utara (DAK), Muna Barat (APBN) sesuai Program Presiden RI dalam Program PHTC dukungan Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut : 1. Melakukan Pembinaan teknis dan supervisi kepada rumah sakit, pemenuhan standar, Proses Persiapan dan persyaratan kenaikan kelas. 2. Melakukan Pengawasan klasifikasi dan reviu kelas rumah sakit sesuai aturan berlaku, dan memastikan rumah sakit memenuhi standar pelayanan yang dipersyaratkan untuk kenaikan kelas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO.	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL PADA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		
		BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
13	Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Peningkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (e.g. Pelatihan, in Service Training), Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	- Melakukan Rekrutmen, Peningkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (e.g. Pelatihan, in Service Training), Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3.12. Dukungan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Proyek Strategis Nasional

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	Pengentasan Kemiskinan	1. Penanggulangan Kemiskinan	Fasilitasi pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
			Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan dukungan kepada Industri Kecil, Dinas Perindag melaksanakan kegiatan : 1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana industri berupa pemberian bantuan mesin dan peralatan bagi pelaku industri kecil 2. Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Bimbingan Teknis bagi masyarakat miskin	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pelatihan peningkatan kompetensi bagi pencari kerja dan warga transmigrasi	1.PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Fasilitasi pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan dukungan kepada Industri Kecil, Dinas Perindag melaksanakan kegiatan : 1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana industri berupa pemberian bantuan mesin dan peralatan bagi pelaku industri kecil	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
			2. Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Bimbingan Teknis bagi masyarakat miskin	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		3. Sekolah Rakyat	Koordinasi kesesuaian ruang dan konstruksi bangunan; Pematangan Lahan dan jalan akses sekolah rakyat dan sekolah unggulan*	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Sub Kegiatan: Penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya Kabupaten/Kota.	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
			Hibah Aset Daerah untuk Sekolah Rakyat	Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah Tangan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	BPKAD
			Seleksi dan Assesment Calon Siswa	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga Sub Kegiatan : Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kab/Kota	Dinas Sosial

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
			Pemenuhan Kebutuhan Guru Sekolah Rakyat (Jenjang SMA, SMK dan SLB)	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan 1.01.04. Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4. Pembangunan 3 Juta Rumah	Bentuk dukungan berupa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dialokasikan sebanyak 20 Unit T.A. 2025.	Program Kawasan Permukiman Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 ha-dibawah 15 ha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Menerbitkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Ketahanan Pangan	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan: Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani	Dinas Tanaman Pangan dan Ternakan

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan; 2. Pembangunan Bendung Irigasi; 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; 4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak; 5. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan; 6. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa; 7. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak; 8. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi; 9. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa; 10. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi; 11. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi; 	<p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air</p> <p>Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 ha dari Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
		2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Sekolah Lapang, FGD Balai penyuluhan pertanian se Sultra	Program Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan: Penguatan kel;embagaan penyuluhan pertanian; Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian; Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
		3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Pengadaan dan penyaluran Cadangan Pangan pemerintah Daerah Provinsi (CPPD)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sub Kegiatan: Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara
		4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian. Akan melakukan penetapan kawasan pertanian terpadu sebagai pilot project di Puriala, mujlai dari ketersediaan alat mesin pertanian, kelembagaan kelompok tani.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan: Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
3	Kesehatan untuk semua	1. Stunting	<p>1. Tahun 2026 direncanakan untuk menyusun dokumen perencanaan persampahan regional</p> <p>2. Tahun 2024 menyusun RISPAM Prov. Sultra</p> <p>3. Tahun 2025 menyusun DED SPAM Prov. Sultra</p> <p>4. Tahun 2026-2030 direncanakan melaksanakan konstruksi SPAM Prov. Sultra</p> <p>5. Tahun 2024 menyusun RISPALD Prov. Sultra</p> <p>6. Tahun 2025 menyusun DED SPALD Prov. Sultra</p> <p>7. Tahun 2026-2030 direncanakan melaksanakan konstruksi SPALD Prov. Sultra</p>	<p>1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</p> <p>2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelola Persampahan Regional Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA</p> <p>3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota</p> <p>4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Sub Kegiatan: Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</p> <p>5. Program Pengembangan Permukiman</p>	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
				Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	
			Intervensi pemberian makanan tambahan bergizi, edukasi mengenai gizi dan kesehatan. 1. Pemberian tablet tambah darah untuk remaja 2. Melaksanakan kegiatan aksi bergizi di kabupaten/kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Failitasi peningkatan Lembaga dan Kader PKK dan Posyandu	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
			Mengawal penggunaan benih bersertifikat unggul		Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
			Fasilitasi Peningkatan Pengetahuan Serta Penguatan Sistem Dukungan Keluarga dan Kader agar Mampu Memberikan Pengasuhan Terbaik pada Periode Emas 1000 HPK yang Secara Keseluruhan Berkontribusi pada Penurunan Stunting	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Menyediakan Buffer Stock Untuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis; Monitoring Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di kabupaten/ Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan: Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dinas Kesehatan

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
		3. Jaminan Kesehatan Nasional	<p>1. Alokasi Anggaran untuk Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah</p> <p>2. Pendataan dan Integrasi Data Kependudukan dengan Menyelaraskan data kependudukan dengan BPJS Kesehatan secara berkala.</p> <p>1. Edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban peserta JKN serta manfaat kepesertaan</p> <p>2. Memberikan Kemudahan Akses Pendaftaran dengan menyediakan pusat informasi pembiayaan kesehatan daerah (Call Center)</p> <p>3. Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan termasuk melakukan identifikasi dan tindak lanjut terhadap warga yang belum terdaftar.</p>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		4. Penuntasan TBC	<p>1. Skrining TBC dan investigasi kontak secara masif untuk menemukan kasus sedini mungkin dan memutus rantai penularan</p> <p>2. Validasi data Program TB terhadap indikator utama sampai ke level fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>3. Mendorong implementasi seluruh kebijakan program TB baik di faskes pemerintah maupun swasta</p>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
		5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	<p>Pembangunan empat rumah sakit merupakan pembangunan untuk meningkatkan tipe rumah sakit dari tipe D meningkat menjadi Tipe C. sesuai Program Presiden RI dalam Program PHTC dukungan Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pembinaan teknis dan supervisi kepada rumah sakit, pemenuhan standar, Proses Persiapan dan persyaratan kenaikan kelas. 2. Melakukan Pengawasan klasifikasi dan reviu kelas rumah sakit sesuai aturan berlaku, dan memastikan rumah sakit memenuhi standar pelayanan yang dipersyaratkan untuk kenaikan kelas 	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sub Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Perluasan Akses Pendidikan	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	1. Pembentukan/Penguatan Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Kerjasama Program Anak Usia Dini Holistik Integratif	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Jenjang Menengah.	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
		3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	Hibah Aset Daerah untuk Sekolah Garuda	Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah Tangan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	BPKAD
		4. Makan Bergizi Gratis	Penyediaan Guru dan Tenaga Kependidikan.	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Ketersediaan 1 Posko SPPG untuk Sulawesi Tenggara dan melaksanakan Koordinasi dengan tim SPPG terkait program MBG serta titik-titik yang menjadi lokasi pelaksanaan MBG.	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Penanganan Daerah Kerawanan Pangan Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan
				Program Penanganan Daerah Rawan Pangan Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Dinas Ketahanan Pangan
			Pengawasan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Program Pengawasan Peredaran Mutu Hewan	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
			<p>Penyediaan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk menunjang ketersediaan produk perikanan yang bernilai gizi tinggi;</p> <p>Penyediaan Benih Dan Pakan;</p> <p>Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan Melalui Rangkaian Kegiatan Gemar Ikan, Kegiatan Lomba Masak Serba Ikan dan Promosi Produk Hasil Perikanan</p>	<p>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Sub kegiatan: Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Saran Pembudidayaan Ikan Di air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Di Laut</p> <p>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sub Kegiatan: Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan
			<p>Penanganan terhadap dampak MBG (apabila terdapat kasus keracunan sebagai dampak pelaksanaan MBG)</p>	<p>Program UKP UKM</p> <p>Sub Kegiatan: Penanggulangan Kejadian Luar Biasa</p>	Dinas Kesehatan

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
			Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan: Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Sub Kegiatan: Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Dalam rangka Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Bimbingan Teknis/Pelatihan Olahan Pangan yang Sehat dan Bergizi bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Koordinasi Penyediaan Data Siswa (Jumlah dan Lokasi);	1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengendalian Inflasi	Memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Kegiatan: Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
			<p>Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;</p> <p>Mendukung Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan Khususnya Protein Hewani</p>	<p>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Sub kegiatan: Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap</p> <p>Program pengelolaan Perikanan Budidaya Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Saran Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar lintas Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut</p>	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
			Pengendalian Inflasi dengan melaksanakan : 1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok (Bapok) 2. Pelaksanaan Pasar Murah 3. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya, Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2. Percepatan Pembentukan Koperasi	Fasilitasi musyawarah pembentukan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan	Program Penataan Desa Sub: Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
		Desa/Kelurahan Merah Putih			
			Sosialisasi, fasilitasi, pendampingan dan pelatihan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Sub Kegiatan: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam Satu Daerah Provinsi	Dinas Koperasi dan UMKM
		3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Optimalisasi Terkait Penerimaan Daerah dari sektor PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan: 1. Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,)	Pembinaan Investor, Bimtek Pelaku Usaha dan Pelayanan Perizinan Teintegrasi Berbasis Elektronik, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Sub Kegiatan : Pengawasan Penanaman Modal, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya dan Bimbingan Teknis Pada Pelaku Usaha Program Pelayanan Penanaman Modal Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP

NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL (ProSN)	PROYEK/KEGIATAN	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH
			BENTUK DUKUNGAN/ KETERLIBATAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
			Fasilitasi Industrialisasi dan Hilirisasi dengan melaksanakan: 1. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Industri di Kab/Kota 2. Penerapan Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota (RPIK) 3. Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	1. Memberikan sarana prasarana pengelolaan sampah 2. Memfasilitasi bimbingan teknis dan penyuluhan lingkungan hidup 3. Melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Berdasarkan perumusan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029, maka arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 3.13. Arah Kebijakan Pembangunan Sulawesi Tenggara

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
1.	MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG TERJAMIN HAK DAN PERLINDUNGAN SOSIALNYA.	<ul style="list-style-type: none"> •Membangun sekolah di daerah tertinggal dan wilayah dengan akses terbatas. •Menyediakan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. •Meningkatkan jumlah sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. •Merehabilitasi sekolah yang tidak layak guna meningkatkan kenyamanan belajar. •Menyediakan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai standar nasional. •Meningkatkan ketersediaan akses listrik, internet, dan fasilitas sanitasi di sekolah. •Meningkatkan jumlah rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan di daerah dengan akses terbatas. •Memastikan ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan di seluruh fasilitas kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> •Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi tenaga pendidik dan kependidikan. •Memperluas program sertifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. •Memberikan insentif bagi tenaga pendidik yang berprestasi dan bertugas di daerah terpencil. •Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sekolah. •Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi tenaga kesehatan. •Memberikan insentif dan tunjangan bagi tenaga kesehatan •Meningkatkan rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan daerah yang bertugas di daerah terpencil. •Mengembangkan program edukasi kesehatan di sekolah dan komunitas. 	<ul style="list-style-type: none"> •Memperluas penggunaan sistem pembelajaran digital dan e-learning. •Meningkatkan akses internet di sekolah untuk mendukung pembelajaran daring. •Menyediakan perangkat teknologi untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan. •Mengoptimalkan sistem klaim dan administrasi JKN agar lebih transparan dan efisien. •Meningkatkan edukasi masyarakat tentang manfaat dan mekanisme JKN. •Memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun sistem peringatan dini terhadap bencana seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. •Membangun dan merehabilitasi infrastruktur yang tahan 	<ul style="list-style-type: none"> •Mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan secara efektif dan transparan •Mengintegrasikan materi mitigasi bencana dalam kurikulum pendidikan di tingkat sekolah dasar hingga menengah. •Mengembangkan sistem simulasi dan latihan tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapan masyarakat. •Mengembangkan pusat data dan informasi kebencanaan berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat. •Memperkuat integrasi sistem pemantauan cuaca dan geologi dengan sistem informasi penanggulangan bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> •Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data •Memperluas penggunaan rekam medis elektronik (<i>e-Medical Record</i>). •Meningkatkan layanan konsultasi kesehatan berbasis <i>telemedicine</i>. Mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah untuk perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> •Memperbaiki infrastruktur pendukung layanan kesehatan, seperti ambulans dan sistem rujukan. •Menyediakan program layanan kesehatan keliling bagi masyarakat di daerah sulit dijangkau. •Meningkatkan cakupan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. •Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan primer dan spesialis •Meningkatkan cakupan imunisasi dasar dan program kesehatan ibu-anak. •Meningkatkan upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui skrining dan pemeriksaan berkala. •Memberikan akses gratis layanan kesehatan penyakit lain yang tidak masuk dalam cakupan BPJS. •Memastikan cakupan jaminan sosial dan 	<ul style="list-style-type: none"> •Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. •Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. •Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan pada berbagai sektor produktif dan memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan •Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan. •Mengembangkan komunitas tangguh bencana (KTB) yang aktif dalam upaya mitigasi dan rehabilitasi pasca-bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> bencana seperti bendungan, tanggul, dan bangunan anti-gempa. •Meningkatkan tata ruang berbasis mitigasi bencana untuk mengurangi risiko kawasan rawan bencana. •Mendorong penggunaan material ramah lingkungan dan teknologi bangunan hijau dalam proyek pembangunan daerah. •Memperkuat mekanisme penyelesaian konflik berbasis dialog dan musyawarah guna mencegah potensi gesekan/konflik sosial. •Membangun dan mengembangkan fasilitas umum yang mendorong interaksi sosial positif antarwarga dan pemeluk agama yang berbeda 		

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
		<p>kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektivitas program bantuan pangan dan kesejahteraan sosial berbasis data terpadu. • Mengembangkan program edukasi kebencanaan bagi masyarakat melalui sekolah, komunitas, dan media informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan dampak bencana. • Meningkatkan peran relawan dalam upaya penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca-bencana. • Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan keberagaman dalam kehidupan sosial. • Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam membangun keharmonisan sosial. 			
2.	MISI 2: MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN MELALUI KONEKTIVITAS DAN PENGUATAN POTENSI PERTANIAN DALAM ARTI LUAS, MARITIM	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sektor pertanian dan perkebunan. • Pengembangan Industri pengolahan • Memberikan fasilitasi akses permodalan melalui skema kredit bunga rendah. • Peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan investasi di Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan bisnis bagi pelaku UMKM. • Mendorong pengembangan keterampilan wirausaha dan ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal untuk mengurangi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau, ekonomi biru dan keberlanjutan. • Pembangunan infrastruktur transportasi diseluruh wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan riset, inovasi, teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan komoditas unggulan. • Pengembangan pertanian moderen. • Stabilitas ekonomi ditekankan pada menjaga stabilitas harga yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pembangunan kota hijau dengan memperbanyak ruang terbuka hijau dan taman kota. • Meningkatkan investasi dan insentif bagi energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan biogas.

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
	SERTA DUNIA USAHA	<ul style="list-style-type: none"> •Mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan mendorong praktik pertambangan berkelanjutan. •Mengembangkan program rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan kawasan perkotaan dan pedesaan. •Mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan mendorong praktik pertambangan berkelanjutan. •Memfasilitasi program rekrutmen tenaga kerja lokal melalui job fair dan bursa tenaga kerja daerah. 	<p>ketergantungan pada sektor formal.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Mengembangkan program inkubasi bisnis dan pelatihan kewirausahaan di sektor industri kreatif. •Memfasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif melalui digitalisasi dan e-commerce •Menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dan pasar kerja lokal. •Memperkuat program magang dan link-and-match antara dunia pendidikan dan industri. •Memberikan sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja lokal agar lebih kompetitif. •Penguatan UMKM melalui peningkatan kapasitas SDM, dukungan permodalan, dan penguatan pada rantai nilai industri domestic dan global. •Meningkatkan kerja sama antara sekolah, perguruan tinggi, dan industri dalam 	<p>khususnya di wilayah kepulauan.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pemeliharaan infrastruktur transportasi. •Peningkatan layanan penggunaan TIK untuk mendukung pelayanan publik •Pengembangan dan peningkatan layanan transportasi publik yang terjangkau. •Meningkatkan keterpaduan moda transportasi. •Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur TIK 	<p>dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. 	<p>Mengembangkan transportasi umum berbasis energi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.</p>

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
			<p>menciptakan tenaga kerja siap pakai.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Memperkuat kemitraan antara sektor pendidikan dan industri dalam penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar. 			
3.	<p>MISI 3: MENINGKATKAN BIROKRASI YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN BERITEGRITAS YANG BERPEGANG TEGUH PADA NILAI-NILAI BUDAYA, KEARIFAN LOKAL DAN RELIGIUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem pengukuran kinerja berbasis data dan indikator yang terukur. •Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja untuk menilai efektivitas kerja aparatur pemerintah daerah. •Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. •Menerapkan sistem e-Government yang mencakup e-Planning, e-Budgeting, dan e- Reporting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi daerah • Mengembangkan sistem perencanaan berbasis e- 	<ul style="list-style-type: none"> •Meningkatkan peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengawasi kinerja aparatur. •Mengembangkan sistem pelaporan kinerja berbasis digital untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban. •Memastikan aparatur yang menangani pelayanan publik memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai. •Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas pelayanan publik agar lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. •Mengurangi prosedur yang berbelit dan menyederhanakan perizinan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> •. Memperkuat sistem keterbukaan informasi publik terkait anggaran daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> •Mengembangkan aplikasi berbasis data untuk memudahkan pemantauan capaian kinerja aparatur. •Memanfaatkan big data dan artificial intelligence dalam analisis kebijakan pemerintahan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. •Mengembangkan sistem pelaporan korupsi yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat •Mendorong inovasi dalam manajemen keuangan daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> •Mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital (e-Government) untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan efektivitas layanan. •Mendorong penggunaan aplikasi layanan publik berbasis online untuk mempercepat proses administrasi. •Mengembangkan pusat layanan terpadu berbasis teknologi informasi untuk mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
		<p>Planning untuk memastikan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran daerah melalui sistem berbasis data untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. • Mengembangkan sistem e-Budgeting dan e-Reporting untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. 	<p>meningkatkan efisiensi pelayanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat waktu penyelesaian layanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). • Mengembangkan layanan satu pintu (One Stop Service) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. • Mengembangkan layanan berbasis daring untuk mempercepat akses layanan masyarakat. • Membangun sistem pengaduan dan aspirasi masyarakat yang mudah diakses dan transparan. • Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. • Mengembangkan kampanye anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. 			

NO.	MISI	ARAH KEBIJAKAN				
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kapasitas aparatur untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mendeteksi dan mencegah korupsi. • Meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan aparat mematuhi kode etik • Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan keuangan • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah • Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur yang menangani perencanaan dan keuangan daerah. • Memastikan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki SDM yang kompeten dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. 			

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta Indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program Perangkat Daerah merupakan keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta unsur penunjang pemerintahan.

Tabel 4. 1. Rencana Program Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	URUSAN PEMERINTAHAN															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
1	01	URUSAN PENDIDIKAN														
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100,00	846.657.565.000	100,00	906.023.525.000	100,00	969.555.029.800	100,00	1.037.544.723.380	100,00	1.110.305.812.918	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun	Persen	74,59	75,73	849.060.000.000	79,23	1.135.699.000.000	82,73	1.522.193.000.000	86,23	2.044.477.000.000	89,73	2.769.139.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Warga Negara Usia 4 - 18 Tahun Penyandang Disabilitas	Persen	42,76	42,76		42,76		42,76		42,76				
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM													
		Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Menggunakan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	0,00	3,00	1.284.000.000	4,00	1.373.880.000	5,00	1.470.048.000	6,00	1.572.948.000	7,00	1.683.048.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN													
		Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	0,27	0,38	344.304.383.000	0,49	368.405.689.000	0,60	394.194.087.000	0,71	421.787.672.000	0,82	451.312.808.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN													
		Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Yang Diterbitkan / Diperbaharui	Persen	20	100,00	1.070.000.000	100,00	1.144.900.000	100,00	1.225.040.000	100,00	1.310.790.000	100,00	1.402.545.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA														
			Terlestarinya Bahasa dan Sastra Daerah	Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	Persen	36,64	37,84	5.000.000.000	39,04	8.200.000.000,00	40,24	11.000.000.000	41,44	13.700.000.000	42,64	13.750.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	02		URUSAN KESEHATAN														
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	313.500.000.000	100,00	342.000.000.000	100,00	370.500.000.000	100,00	399.000.000.000	100,00	427.500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Persen	0,8	0,8	209.000.000.000	0,8	227.920.000.000	0,8	246.900.000.000	0,8	266.000.000.000	0,8	285.000.000.000	DINAS KESEHATAN
				2. Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	Persen	8,9	7		6,5		6		5,5		5		
				3. Persentase Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat	Persen	n/a	17,64		24,41		47,05		58,82		58,82		
				4. Prevalensi Obesitas >18 tahun	Persen	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		
				5. Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Persen	n/a	17,65		29,41		41,18		47,06		47,06		
				6. Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen	n/a	75		80		85		90		95		
				7. Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persen	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		
				8. Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta	Kab/Kota	10	12		14		15		16		17		
				9. Proporsi Fasyankes terintegrasi SIKN	Persen	80	100		100		100		100		100		
				10. Persentase fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	86		89		92		95		98		
				11. Tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan	Indeks	n/a	≥76,61		≥76,61		≥76,61		≥76,61		≥76,61		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
		12. Persentase fasyankes terakreditasi paripurna	Persen	80	82		84		86		88		90				
		13. Persentase kabupaten/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persen	n/a	30		40		50		60		70				
		14. Persentase masyarakat miskin yang menerima pembiayaan kesehatan dari Jaminan Kesehatan Sultra	Persen	n/a	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
		Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1. Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio	7,3 :1.000	12: 10.000	15: 1.000	2.390.000.000	15: 1.000	2.590.000.000	15: 1.000	2.790.000.000	15: 1.000	2.990.000.000			
			2. Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	n/a	47	50		55		60		65				
			3. Persentase Puskesmas dengan SDMk sesuai standar	Persen	58,77	80	80		80		80		80				
			4. Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	persen	55	75	75		75		75		75				
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
		Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan dan Minuman	1. Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persen	100,00	100,00	100,00	220.000.000	100,00	240.000.000	100,00	260.000.000	100,00	280.000.000	100,00	300.000.000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	100,00	5.163.934.951	100,00	5.767.275.194	100,00	6.443.991.473	100,00	7.203.377.694	100,00	8.055.950.598	RSUD BAHTERAMAS

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	85%	>95%	274.230.000.000	>95%	305.364.500.000	>95%	340.169.175.000	>95%	379.094.551.250	>95%	422.648.733.938	RSUD BAHTERAMAS
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terperuhnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	26.339.738.500	100,00	24.799.954.850	100,00	13.295.782.385	100,00	20.416.943.619	100,00	19.796.670.480	RS JIWA
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	100,00	128.960.000.000	100,00	129.400.000.000	100,00	111.955.000.000	100,00	110.995.000.000	100,00	127.360.000.000	RS JIWA
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	100,00	100,00	810.000.000	100,00	810.000.000	100,00	972.000.000	100,00	972.000.000	100,00	1.053.000.000	RS JIWA
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	100,00	100,00	275.000.000	100,00	300.000.000	100,00	340.000.000	100,00	340.000.000	100,00	340.000.000	RS JIWA
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terperuhnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	75,00	85,00	44.117.929.050	90,00	62.748.537.147	95,00	63.790.283.476	98,00	66.148.290.306	100,00	66.268.290.306	RS JANTUNG, PEMBULUH DARAH, DAN OTAK OPU TA YI KOO

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	90,00	93,00	35.300.000.000	95,00	35.450.000.000	98,00	35.450.000.000	100,00	35.450.000.000	100,00	35.450.000.000	RS JANTUNG, PEMBULUH DARAH, DAN OTAK OPU TA YI KOO
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Kompetensinya Meningkat	Persen	52,00	65,00	1.826.000.000	70,00	1.826.000.000	75,00	1.826.000.000	80,00	1.826.000.000	85,00	1.826.000.000	RS JANTUNG, PEMBULUH DARAH, DAN OTAK OPU TA YI KOO
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Frekuensi Pemasaran Layanan Jantung per Tahun	Kali	1	5	350.000.000	6	400.000.000	7	400.000.000	8	450.000.000	9	450.000.000	RS JANTUNG, PEMBULUH DARAH, DAN OTAK OPU TA YI KOO
1	03		URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	94,00	100,00	52.354.000.000	100,00	53.932.000.000	100,00	55.149.000.000	100,00	56.488.000.000	100,00	57.409.000.000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dalam Kondisi Baik	Persen	60,76	66,00	50.629.800.000	66,75	86.912.861.000	68,50	76.483.611.000	70,00	76.372.528.000	71,25	95.274.000.000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	66,57	73,00	232.137.564.000	79,00	237.515.552.000	84,00	239.265.552.000	89,00	240.955.552.000	95,00	282.864.090.000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
			Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase SDM yang Kompeten dan Profesional di Bidang Konstruksi	Persen	-	62,00	550.000.000	64,00	580.000.000	65,00	600.000.000	67,00	630.000.000	70,00	650.000.000	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	23.080.800.000	100,00	24.235.300.000	100,00	25.447.100.000	100,00	26.719.600.000	100,00	28.055.500.000	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM														
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Kebutuhan Kapasitas Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yang Terpenuhi	Persen	100,00	20,00	29.400.000.000	20,00	28.080.000.000	20,00	24.150.000.000	20,00	23.400.000.000	15,00	31.500.000.000	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL														
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persen		20,00	2.500.000.000	20,00	18.462.500.000	20,00	21.812.500.000	20,00	25.662.500.000	20,00	26.722.500.000	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	100,00	20,00	7.350.000.000	20,00	7.560.000.000	20,00	9.200.000.000	20,00	8.190.000.000	15,00	6.300.000.000	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														
			Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	20,00	2.100.000.000	20,00	2.160.000.000	20,00	3.450.000.000	20,00	5.850.000.000	20,00	6.300.000.000	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN														
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	20,00	5.250.000.000	20,00	7.560.000.000	20,00	9.200.000.000	20,00	4.680.000.000	20,00	7.560.000.000	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	30.450.000.000	100,00	31.320.000.000	100,00	25.300.000.000	100,00	28.080.000.000	100,00	27.720.000.000	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														
			Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Tertata	Persen	100,00	100,00	18.900.000.000	100,00	15.120.000.000	100,00	24.150.000.000	100,00	23.400.000.000	100,00	20.160.000.000	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
			Meningkatnya Kompetensi Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	60,50	73,63	2.000.000.000	80,23	2.250.000.000	80,86	2.300.000.000	93,40	2.400.000.000	100,00	2.500.000.000	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	Persen	-	60,00	4.655.000.000	100,00	4.955.000.000	100,00	3.505.000.000	100,00	3.555.000.000	100,00	3.605.000.000	DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG
1	04		URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terpenuhiya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	100,00	11.899.080.824	100,00	13.058.624.406	100,00	14.333.786.840	100,00	15.736.465.524	100,00	17.279.412.078	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												
		Terpenuhiya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persen	100,00	100,00	1.519.185.150	100,00	1.671.103.665	100,00	1.838.214.032	100,00	2.022.035.435	100,00	2.242.389.780	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persen	3,89	4,28	16.463.892.850	4,71	18.110.282.135	5,18	19.921.310.349	5,70	21.913.441.383	6,26	24.104.785.522	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												
		Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persen	15,64	17,20	66.153.603.595	18,92	72.768.963.954	20,82	80.045.860.350	22,90	88.050.446.384	25,19	96.855.491.023	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	05		URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
		Terpenuhiya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	100,00	34.756.082.737	100,00	38.231.691.011	100,00	42.054.860.112	100,00	46.260.346.123	100,00	50.886.380.735	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
			Meningkatnya Penanggulangan Gangguan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	6.270.493.035	100	6.897.542.339	100	7.587.296.572	100	8.346.026.230	100	9.180.628.853	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	862.632.777	100	948.896.055	100	1.043.785.660	100	1.148.164.226	100	1.262.980.649	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	81,10	100,00	7.529.496.000	100	7.955.970.800	100	8.403.769.340	100	8.403.769.340	100	8.403.769.340	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
			Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi rawan Bencana Provinsi	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persen	80,63	100,00		100		100		100		100		
			Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	17,58	100,00		100		100		100		100		
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	60,00	100,00	4.000.000.000	100	4.000.000.000	100	4.200.000.000	100	4.210.000.000	100	4.210.500.000	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
			Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	60,00	100,00		100		100		100		100		
1	06		URUSAN SOSIAL														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	80,00	100,00	20.814.419.000	100,00	22.895.850.900	100,00	25.185.446.990	100,00	27.703.991.689	100,00	29.474.390.858	DINAS SOSIAL
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persen	30,00	45,00	500.000.000	45,00	550.000.000	50,00	644.800.000	55,00	750.000.000	55,00	800.000.000	DINAS SOSIAL
				2. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persen	30,00	45,00	500.000.000	45,00	525.000.000	50,00	550.000.000	55,00	570.200.000	55,00	585.000.000	
				3. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persen	30,00	45,00	454.000.000	45,00	524.400.000	50,00	550.000.000	55,00	570.000.000	55,00	650.600.000	
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN														
			Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2. Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persen	50,00	50,00	175.000.000	50,00	192.500.000	60,00	210.000.000	60,00	227.500.000	70,00	245.000.000	DINAS SOSIAL
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	87,00	87,00	800.375.000	88,00	950.000.000	88,00	965.000.000	90,00	980.000.000	90,00	985.000.000	DINAS SOSIAL
				2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	96,00	96,00	2.000.000.000	96,00	2.930.487.500	97,00	2.950.000.000	97,00	3.140.562.500	98,00	3.560.600.000	
				3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	92,00	92,00	900.000.000	92,00	950.000.000	93,00	970.000.000	93,00	980.000.000	94,00	980.000.000	
				4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	93,00	93,00	600.000.000	93,00	700.000.000	94,00	1.055.525.000	94,00	1.100.000.000	95,00	1.120.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	25,00	25,00	300.000.000	25,00	450.000.000	30,00	500.000.000	30,00	700.000.000	32,00	715.000.000	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial													
		1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	30,00	30,00	500.000.000	30,00	600.000.000	32,00	625.000.000	35,00	650.000.000	35,00	675.000.000	
		2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen	25,00	25,00	750.000.000	25,00	780.000.000	27,00	800.000.000	30,00	825.000.000	30,00	875.000.000	DINAS SOSIAL
		3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin	Persen	80,00	80,00	275.000.000	80,00	297.500.000	85,00	405.000.000	85,00	507.500.000	90,00	585.000.000	
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana													
		1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	58,00	100,00	367.000.000	100,00	450.000.000	100,00	473.800.000	100,00	505.500.000	100,00	600.000.000	DINAS SOSIAL
		2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	Persen	58,00	100,00	250.000.000	100,00	300.000.000	100,00	350.000.000	100,00	370.000.000	100,00	350.000.000	
		3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persen	58,00	100,00	300.000.000	100,00	442.100.000	100,00	460.000.000	100,00	500.000.000	100,00	517.200.000	
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN												
		Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan													
		Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik	Persen	100,00	100,00	785.000.000	100,00	863.500.000	100,00	942.000.000	100,00	1.020.500.000	100,00	1.099.000.000	DINAS SOSIAL
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR												
2	07		URUSAN TENAGA KERJA												

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	20.367.500.000	100	21.205.990.000	100	21.373.404.701	100	22.066.191.841	100	22.614.812.596	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
			Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	17	29	200.000.000	41	200.000.000	58	200.000.000	76	200.000.000	100	200.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	62	67	1.999.590.000	75	2.031.312.500	80	2.115.378.125	83,33	2.228.647.031	86	2.346.329.383	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	3,80	4,18	1.238.750.000	4,39	1.300.687.500	4,61	1.365.721.875	4,84	1.434.007.969	5,08	1.505.708.367	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
			Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	102.113	107.219	1.303.250.000	112.580	1.694.225.000	118.209	1.850.000.000	124.119	1.900.000.000	130.325	1.950.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN														
			Terlindunginya Hak- Hak Para Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Orang	2.018	2.727	1.100.000.000	2.864	1.430.000.000	3.007	1.520.000.000	3.157	1.570.000.000	3.315	1.630.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	08		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	8.605.704.107	100,00	9.035.989.300	100,00	9.713.688.500	100,00	10.685.057.300	100,00	11.913.838.900	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	60,30	62,15	774.753.600	63,40	813.459.000	64,91	863.985.700	65,66	906.613.000	66,75	953.560.300	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	Persen	0,13	2,50		3,00		3,50		4,00		4,50		
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	80,00	85,00	759.306.000	90,00	792.230.500	95,00	824.609.200	100,00	865.839.600	100,00	909.131.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan Lembaga Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang persepektif gender dan anak sesuai standar	Persen	5,88	11,76	528.346.900	17,64	601.274.300	23,53	633.587.900	29,41	667.266.600	35,29	700.878.900	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK												
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang terlibat dalam Pengelolaan Data Gender dan Anak	Persen	10,00	20,00	303.975.600	25,00	364.770.700	30,00	437.724.400	40,00	459.611.500	50,00	528.552.800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)												
	Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persen	41,18	47,06	555.744.100	52,94	587.681.200	58,82	614.905.100	70,59	645.710.100	82,35	679.996.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												
	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan, dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	90,00	95,00	518.500.000	100,00	558.350.000	100,00	598.685.000	100,00	628.619.200	100,00	660.050.300	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	09		URUSAN PANGAN												

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	9.850.000.000	100,00	10.342.500.000	100,00	10.859.625.000	100,00	11.402.606.250	100,00	11.972.736.563	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN														
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Ton	400.595,00	416.678,00	490.000.000	433,283,00	514.500.000	450.614,00	540.225.000	468.639,00	567.236.250	487,385,00	595.598.063	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	82,20	84,60	2.810.000.000	85,80	3.193.291.221	86,00	3.581.465.167	87,20	3.689.129.243	88,40	3.230.903.060	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	Persen	2,71	2,71	650.000.000	2,26	682.500.000	2,26	716.625.000	1,81	752.456.250	1,35	790.079.063	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	85,46	82,72	1.200.000.000	82,76	1.260.000.000	82,85	1.323.000.000	82,92	1.389.150.000	83,13	1.458.607.500	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	10		URUSAN PERTANAHAN														
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Meningkatnya Ketersediaan Lahan untuk Kepentingan Umum	Persen	100,00	100,00	120.000.000	100,00	130.000.000	100,00	141.000.000	100,00	153.100.000	100,00	166.410.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN												
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persen	100,00	100,00	27.500.000	100,00	30.250.000	100,00	33.275.000	100,00	36.602.500	100,00	40.262.750	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN												
		Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persen	100,00	100,00	313.650.000	100,00	345.015.000	100,00	379.516.500	100,00	417.468.150	100,00	459.214.965	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE												
		Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persen	-	20,00	47.500.000	30,00	27.500.000	40,00	30.250.000	50,00	33.275.000	50,00	36.602.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT												

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Tata Kelola Tanah Ulayat	Persentase Meningkatnya Tata Kelola Tanah Ulayat	Persen	-	20,00	30.000.000	30,00	30.000.000	40,00	33.000.000	50,00	36.300.000	50,00	39.930.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG												
	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persen	-	20,00	50.000.000	30,00	55.000.000	40,00	60.500.000	50,00	66.550.000	50,00	73.205.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH												
	Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak atas Tanah	Persentase Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persen	-	20,00	45.000.000	30,00	49.500.000	40,00	54.450.000	50,00	59.895.000	50,00	65.884.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH												
	Meningkatnya Kejelasan Hak-hak atas Tanah bagi Pemerintah dan Masyarakat Miskin	Persentase Meningkatnya Kejelasan Hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin	Persen	-	20,00	50.000.000	30,00	55.000.000	40,00	60.500.000	50,00	66.550.000	50,00	73.205.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	13	PROGRAM SURVEL, PENGUKURAN DAN PEMETAAN												
	Meningkatnya Kejelasan Hak Milik atas Tanah	Persentase Meningkatnya Kejelasan hak Milik Atas Tanah	Persen	-	20,00	37.500.000	30,00	37.500.000	40,00	41.250.000	50,00	45.375.000	50,00	49.912.500	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2	10	14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN														
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bidang Pertanahan	Persentase Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan SDM Bidang Pertanahan	Persen	-	20,00	50.000.000	30,00	55.000.000	40,00	60.500.000	50,00	66.550.000	50,00	73.205.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU														
			Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau	Persentase Meningkatnya Tata kelola Pertanahan di Wilayah Pesisir, laut dan Pulau	Persen	-	20,00	100.000.000	30,00	100.000.000	40,00	100.000.000	50,00	100.000.000	50,00	100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	16	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN														
			Meningkatnya Tata Kelola Sistem Informasi Manajemen Pertanahan	Persentase Meningkatnya tata Kelola Sistem Informasi Manajemen Pertanahan	Persen	-	20,00	85.000.000	30,00	85.000.000	40,00	85.000.000	50,00	85.000.000	50,00	85.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	10	17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persentase Meningkatnya penyelesaian Konflik, Sengketa dan perkara Pertanahan	Persen	-	20,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	1	1		URUSAN LINGKUNGAN HIDUP											
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
	Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	15.691.325.000	100,00	18.057.267.500	100,00	20.654.214.300	100,00	24.423.286.000	100,00	27.394.415.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP											
	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Hidup untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	1.200.000.000	100,00	697.375.000	100,00	264.500.000	100,00	1.107.775.000	100,00	599.802.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											
	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	Nilai	65.32 94.04	76.83 87.36	1.300.000.000	77.03 87.56	1.414.500.000	77.23 87.76	1.618.049.000	77.43 87.96	1.870.674.000	77.63 88.16	2.151.282.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH	Persen	NA	9,00	592.000.000	10,00	680.800.000	12,00	452.295.000	16,00	520.140.000	30,00	598.161.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persen	NA	20,00	462.875.000	40,00	509.162.500	60,00	560.079.000	70,00	616.147.000	100,00	677.762.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												
		Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Persen	80,00	50,00	190.000.000	70,00	218.500.000	85,00	251.274.500	90,00	288.967.000	100,00	332.312.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH												
		Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persen	20,00	50,00	200.000.000	50,00	230.000.000	60,00	264.495.000	80,00	304.174.000	100,00	349.801.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persen	20,00	60,00	150.000.000	70,00	172.500.000	90,00	198.375.000	100,00	228.088.000	100,00	262.302.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100,00	52,00	100.000.000	56,00	115.000.000	68,00	132.250.000	80,00	152.087.000	80,00	174.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP												
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	100,00	100,00	132.500.000	100,00	152.375.000	100,00	175.232.000	100,00	201.517.000	100,00	231.469.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
		Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persen	40,00	50,00	1.607.500.000	55,00	1.791.125.000	57,00	2.059.794.000	60,00	2.368.765.000	65,00	2.724.081.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	12		URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
		Terperuhnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	82,00	87,00	9.500.000.000	90,00	10.000.000.000	92,00	10.500.000.000	94,00	11.000.000.000	96,00	11.500.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persen	30,00	35,00	400.000.000	40,00	450.000.000	45,00	500.000.000	50,00	550.000.000	55,00	600.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	50,00	60,50		62,00		63,00		65,00		67,00		
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	50,00	60,50		62,00		63,00		65,00		67,00		
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persen	100,00	100,00	300.000.000	100,00	350.000.000	100,00	400.000.000	100,00	450.000.000	100,00	500.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN
		Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00	100,00	300.000.000	100,00	350.000.000	100,00	400.000.000	100,00	450.000.000	100,00	500.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	60,20	70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persen	72,00	78,00	450.000.000	80,00	500.000.000	82,00	550.000.000	84,00	600.000.000	86,00	650.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN												
		Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persen	85,00	90,00	80.000.000	92,00	90.000.000	94,00	100.000.000	96,00	110.000.000	98,00	120.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13		URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98,00	60,00	15.950.979.903	70,00	18.343.626.889	80,00	21.095.170.923	90,00	24.259.446.562	90,00	27.898.363.546	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA												
		Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persen	6,00	10,00	200.000.000	15,00	230.000.000	20,00	264.500.000	30,00	304.175.000	40,00	349.801.250	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA												

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Persen	20,00	20,00	229.427.000	40,00	263.841.050	50,00	303.417.208	60,00	348.929.789	70,00	401.269.257	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA													
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	85,00	50,00	410.589.500	60,00	472.177.925	70,00	543.004.614	80,00	624.455.306	90,00	718.123.601	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Jumlah Pemerintah Desa dan BPD yang Mendapatkan Manfaat Perlindungan Jaminan Sosial Berupa Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Orang	0	200		400			600	800		1.000			
		Cakupan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Terbentuk dan Aktif	Persen	0	50		60,00			70,00	80,00		90,00			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Persen	95,00	50,00	4.117.791.761	60,00	4.267.791.761	70,00	4.417.791.761	80,00	4.567.791.761	90,00	4.717.791.761	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	1	4	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK													

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 - 19 Tahun	31,20	30,70	491.860.100	30,60	670.746.400	30,40	737.821.100	30,20	774.712.100	30,10	813.447.700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)													
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persen	77,10	78,90	653.406.000,00	79,70	695.230.800	80,60	749.110.700	81,50	786.566.200	82,20	825.894.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	12,20	11,13		10,83		10,52		10,21		9,98			
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)													

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET (6)	PAGU (Rp) (7)	TARGET (8)	PAGU (Rp) (9)	TARGET (10)	PAGU (Rp) (11)	TARGET (12)	PAGU (Rp) (13)	TARGET (14)	PAGU (Rp) (15)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Pembedayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	Persentase kampung Keluarga (Kampung KB) Berkualitas yang Mandiri	Persen	27,80	29,49	529.329.000,00	30,37	555.795.400	31,28	583.585.200	32,21	612.764.400	33,17	643.402.800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	1	5	URUSAN PERHUBUNGAN												
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
	Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	92,05	95,00	41.652.295.692	97,00	45.652.295.692	98,00	46.652.295.692	99,00	48.652.295.692	100,00	50.652.295.692	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	- Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Rasio	0,29	0,33	8.600.000.000	0,35	19.100.000.000	0,40	26.600.000.000	0,45	32.100.000.000	0,50	35.600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		- Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang di Jalan Provinsi	Persen	14,51	21,50		32,50		40,00		45,00		47,00		

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		- Tingkat Keselamatan Transportasi Darat	Persen	n/a	96,50		97,00			97,50		98,00		98,50		
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	- Rasio Konektivitas Transportasi Laut	Rasio	0,88	0,90	45.400.000.100	0,92	55.400.000.100	0,94	65.400.000.100	0,95	75.400.000.100	0,97	80.400.000.100	DINAS PERHUBUNGAN
			- Tingkat Keselamatan Transportasi Laut	Persen	n/a	97,50		98,00		98,50		99,00		99,50		
			- Persentase Pelabuhan Dalam Kondisi Mantap	Persen	49,75	54,07		60,28		65,81		71,35		74,7		
2	16		URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	8.543.404.042	100,00	8.970.574.244	100,00	9.419.102.957	100,00	9.890.058.104	100,00	10.384.561.010	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK													
		Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	3,83	20,00	8.468.160.000	30,00	8.891.568.000	50,00	9.336.146.400	60,00	9.802.953.720	70,00	10.293.101.406	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA													
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Penggunaan Aplikasi SPBE oleh Perangkat Daerah secara Aktif dan Efektif	Persen	50,00	70,00	5.237.746.500	80,00	5.499.633.825	90,00	5.774.615.516	100,00	6.063.346.292	100,00	6.366.513.607	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2	17	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	94,00	95,00	10.000.000.000	97,00	10.000.000.000	97,00	10.000.000.000	97,00	10.000.000.000	97,00	10.000.000.000	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM														
			Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	0,70	0,70	600.000.000	0,70	600.000.000	0,70	600.000.000	0,70	600.000.000	0,70	600.000.000	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI														
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	12,13	15,00	600.000.000	15,00	600.000.000	15,00	600.000.000	15,00	600.000.000	15,00	600.000.000	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI														
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase koperasi Aktif	Persen	43,00	50,00	800.000.000	50,00	1.000.000.000	50,00	1.000.000.000	50,00	1.000.000.000	50,00	1.000.000.000	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	34,58	42,00	15.000.000.000	44,00	15.000.000.000	46,00	15.000.000.000	48,00	15.000.000.000	50,00	15.000.000.000	DINAS KOPERASI DAN UMKM

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	68,93	70,00	1.500.000.000	70,00	1.500.000.000	70,00	1.500.000.000	70,00	1.500.000.000	70,00	1.500.000.000	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
			Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase pertumbuhan wirausaha	Persen	5,50	5,00	1.500.000.000	5,00	1.500.000.000	5,00	1.500.000.000	5,00	1.500.000.000	5,00	1.500.000.000	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi Jumlah UKM	Persen	1,60	2,25	1.200.000.000	2,25	1.200.000.000	2,25	1.200.000.000	2,25	1.200.000.000	2,25	1.200.000.000	DINAS KOPERASI DAN UMKM
2	18		URUSAN PENANAMAN MODAL														
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	76,32	84,21	21.499.532.632	92,11	22.477.532.632	94,74	22.677.532.632	97,37	23.055.532.632	100,00	23.255.532.632	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persen	-23,05	20,18	710.000.000	20,18	176.000.000	20,18	171.000.000	20,18	199.100.000	20,18	196.410.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL												
	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi	Persen	14,79	19,71	300.000.000	19,71	150.000.000	19,71	150.000.000	19,71	150.000.000	19,71	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												
	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	-64,41	28,15	460.000.000	28,15	560.000.000	28,15	660.000.000	28,15	760.000.000	28,15	860.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												
	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	Persen	100,00	100,00	1.649.986.000	100,00	1.814.984.600	100,00	1.996.483.060	100,00	2.196.131.366	100,00	2.415.744.502	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Pemanfaatan dan informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal		13,00	13,00	10.000.000	13,00	11.000.000	13,00	12.100.000	13,00	13.310.000	13,00	14.641.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	19														
2	19	01													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
	Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	98,25	100,00	13.168.496.610	100,00	13.795.567.877	1,00	14.422.639.144	1,00	15.049.710.412	1,00	15.676.781.679	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	02													
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														
	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	0,21	0,22	1.457.191.208	0,22	1.526.581.265	0,23	1.595.971.323	0,24	1.675.769.889	0,24	1.734.751.438	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	03													
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														
	Meningkatnya Budaya dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	Persen	10,00	12,00	14.911.065.914	13,00	15.621.116.672	13,00	16.331.167.429	14,00	17.041.218.187	15,00	17.751.268.945	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	19	04													
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN														
	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan	Persen	100,00	100,00	2.100.000.000	100,00	2.200.000.000	1,00	2.300.000.000	1,00	2.400.000.000	1,00	2.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	20														
	URUSAN STATISTIK														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														
			Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Menyusun Perencanaan dan Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	95,00	97,00	527.825.000	100,00	554.216.250	100,00	581.927.063	100,00	611.023.416	100,00	641.574.586	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21		URUSAN PERSANDIAN														
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	30,00	35,00	270.350.000	37,00	283.867.500	40,00	298.060.875	43,00	312.963.919	45,00	328.612.115	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2	2	URUSAN KEBUDAYAAN														
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pencatatan	Persen	16,67	17,50	2.904.245.000	18,20	3.107.541.000	18,80	3.325.059.000	19,30	3.557.803.000	19,70	3.806.842.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	3,36	6,54	374.500.000	15,00	400.715.000	25,00	428.763.000	30,00	458.775.000	50,00	490.887.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH														
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengunjungi Peninggalan Sejarah/Warisan Dunia dalam Setahun Terakhir	Persen	4,66	6,66	1.155.600.000	8,78	1.236.492.000	10,90	1.323.041.000	13,02	1.415.650.000	15,14	1.514.740.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
			Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Pendaftaran	Persen	7,50	9,50	1.786.900.000	11,62	1.911.983.000	13,74	2.045.819.000	15,86	2.189.023.000	17,98	2.342.251.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN														
			Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	95,00	100,00	845.300.000	100,00	904.471.000	100,00	967.781.000	100,00	1.035.522.000	100,00	1.108.006.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	2	3	URUSAN PERPUSTAKAAN														
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	20.000.000.000	100,00	22.500.000.000	100,00	25.000.000.000	100,00	27.500.000.000	100,00	30.000.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. SULTRA
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	1. Frekuensi Membaca (FM)	Nilai	70,96	75,50	2.500.000.000	76,50	3.000.000.000	77,00	3.500.000.000	78,00	3.750.000.000	78,50	4.000.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. SULTRA
				2. Durasi Membaca (DM)	Nilai	59,26	70,50		71,50		72,50		73,50		74,00		
				3. Jumlah Bahan Bacaan (JB)	Nilai	66,74	70,00		71,00		72,00		73,00		73,50		
				4. Frekuensi Akses Internet (FAI)	Nilai	74,55	80,50		81,50		83,00		84,50		85,00		
				5. Durasi Akses Internet (DAI)	Nilai	64,12	71,00		72,00		73,00		73,50		74,00		
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO														
			Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	Persen	11,00	13,04	300.000.000	17,39	400.000.000	21,74	500.000.000	26,09	600.000.000	21,74	500.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. SULTRA
2	24		URUSAN KEARSIPAN														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP														
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelematan Arsip	Persen	12,00	13,33	200.000.000	16,67	250.000.000	20,00	300.000.000	23,33	350.000.000	26,67	400.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. SULTRA
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP														
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai dengan ketentuan	Persen	12,00	12,00	300.000.000	16,00	400.000.000	20,00	500.000.000	24,00	600.000.000	28,00	700.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. SULTRA
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25		URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	24.703.054.000	100,00	24.950.084.000	100,00	25.199.584.000	100,00	25.451.580.000	100,00	25.706.090.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL														
			Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Luas Kawasan Konservasi	Km2	19.603,18	19.603,18	1.677.160.000	19.603,18	1.693.931.000	19.603,18	1.710.870.000	19.603,18	1.727.979.000	19.603,18	1.745.258.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	277.168	279.000,00	57.863.086.000	280.000,00	58.441.716.000	281.000,00	59.026.134.000	282.000,00	59.616.395.000	283.000,00	60.212.559.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET (6)	PAGU (Rp) (7)	TARGET (8)	PAGU (Rp) (9)	TARGET (10)	PAGU (Rp) (11)	TARGET (12)	PAGU (Rp) (13)	TARGET (14)	PAGU (Rp) (15)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	418.476	422.000,00	17.501.556.000	424.000,00	17.676.572.000	426.000,00	17.853.338.000	428.000,00	18.031.871.000	430.000,00	18.212.190.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Persen	89,36	91,00	7.044.306.000	92,00	7.114.749.000	93,00	7.185.897.000	94,00	7.257.756.000	95,00	7.330.334.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												
	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kap/Tahun	44,48	44,48	3.447.250.000	45,21	3.481.723.000	45,95	3.516.540.000	46,66	3.551.706.000	47,30	3.587.223.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	26		URUSAN PARIWISATA												
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
	Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	14.993.779.000	100,00	15.366.746.000	100,00	15.754.592.000	100,00	16.158.027.000	100,00	16.577.786.000	DINAS PARIWISATA
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												
	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata - Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	4,89	2,48	16.610.709.000	2,73	17.441.242.000	3,00	18.313.303.000	3,35	19.228.966.000	3,48	20.190.415.000	DINAS PARIWISATA
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	12.949.990,00	6.935.987,00	4.506.018.000	7.074.706,00	4.731.318.000	7.428.442,00	4.967.884.000	7.577.010,00	5.216.277.000	7.728.550,20	5.477.091.000	DINAS PARIWISATA

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
			Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Jumlah Produk Kreatif Difasilitasi Mendapatkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Produk	88,00	25,00	1.869.795.000	25,00	1.963.285.000	25,00	2.061.448.000	25,00	2.164.520.000	25,00	2.272.745.000	DINAS PARIWISATA
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Diberikan Pelatihan Tingkat Lanjutan dan Difasilitasi Sertifikasi	Orang	242,00	200,00	752.457.000	200,00	790.080.000	200,00	829.584.000	200,00	871.062.000	200,00	914.614.000	DINAS PARIWISATA
3	27		URUSAN PERTANIAN														
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terperuhnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	53.099.405.000	100	55.754.405.000	100	58.942.890.000	100	61.470.085.000	100	65.043.898.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Sarana Pertanian	Persen	5	5	11.374.000.000	5	11.947.700.000	5	12.549.585.000	5	13.181.400.000	5	13.845.260.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	Persen	3	3	14.505.000.000	3	15.230.250.000	3	15.991.775.000	3	16.791.385.000	3	17.723.885.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persen	90	90	1.270.000.000	90	1.389.500.000	90	1.511.475.000	90	1.636.100.000	90	1.759.405.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal yang Terkendali dan Tertanggulangi dari OPT dan DPI	Persen	95	95	1.500.000.000	95	1.575.000.000	95	1.658.000.000	95	1.740.500.000	95	1.830.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	Persen	5	6	1.624.750.000	7,00	1.705.990.000	7,00	1.791.290.000	7,00	1.880.863.000	7,00	1.974.941.000	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	29.381.976.618	100	30.513.028.923	100	33.502.840.298	100	36.070.500.371	100	38.942.798.451	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
			Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	80	100	18.357.700.000	100	41.300.708.000	100	44.476.035.400	100	48.161.645.740	100	51.856.823.714	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
			Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	50	50	50		50								
			Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Sektor Perkebunan dan Hortikultura	Persen	100	100	100		100								
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan yang Dimanfaatkan untuk Prasarana Pertanian Sub Sektor Perkebunan	Hektar	95	622	17.446.700.000	624	18.951.370.000	626	20.606.507.000	628	22.427.157.700	628	24.429.873.470	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
		Cakupan Luas Lahan yang Dimanfaatkan untuk Prasarana Pertanian Sub Sektor Hortikultura	Hektar	80	340		340		340		340		340		
		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub Sektor Perkebunan dan Hortikultura	Persen	100	100		100		100		100		100		
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												
	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Sub Sektor Perkebunan dan Hortikultura yang dilaksanakan	Persen	100	100	862.000.000	100	892.000.000	100	922.000.000	100	952.000.000	100	992.000.000	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												
	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan	Persen	100	100	509.743.000	100	465.326.000	100	492.603.000	100	524.460.000	100	524.460.000	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
3	28		URUSAN KEHUTANAN												
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
	Terperuhnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100,00	80.295.169.023	100,00	88.324.685.926	100,00	97.157.154.518	100,00	106.872.869.970	100,00	117.560.156.967	DINAS KEHUTANAN
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
	Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persen	1,36	1,86	8.974.676.900	2,11	9.872.144.590	2,36	10.859.359.049	2,61	11.945.294.954	2,86	13.139.824.449	DINAS KEHUTANAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA														
			Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Luas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Hektar	5,0	25,00	988.256.225	25,00	1.087.081.848	15,00	1.195.790.032	15,00	1.315.369.035	15,00	1.446.905.939	DINAS KEHUTANAN
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN														
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Persen	100	20,00	3.950.326.400	20,00	4.345.359.040	20,00	4.779.894.944	20,00	5.257.884.438	20,00	5.783.672.882	DINAS KEHUTANAN
				Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Persen	0	0,012		0,025		0,025		0,025		0,025		
3	28	07	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)														
			Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Evaluasi Pengelolaan DAS	Dokumen	1	1	505.982.510	1	556.580.761	1	612.238.837	1	673.462.721	1	740.808.993	DINAS KEHUTANAN
3	29		URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL														
3	29	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	85,82	100,00	16.913.683.313	100,00	20.296.419.975	100,00	24.355.703.970	100,00	29.226.844.765	100,00	35.072.213.717	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Meningkatnya Tata Kelola Kegeologian	Persen	8,00	35,00	402.922.303	45,00	463.360.648	65,00	556.032.778	85,00	639.437.695	100,00	767.325.234	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA												
		Meningkatnya Tata Kelola Mineral dan Batubara	Persen	100,00	45,00	1.072.353.125	60,00	1.233.206.094	75,00	1.418.187.008	90,00	1.630.915.059	100,00	1.794.006.565	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN												
		Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan	Persen	4,81	3,85	15.220.000.000	11,11	17.670.000.000	16,67	19.770.000.000	5,71	25.470.000.000	2,70	22.470.000.000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	29	06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN												
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan	Gwh	24.497,41	27.076,09	1.950.000.000	28.429,89	2.340.000.000	29.851,39	3.042.000.000	31.343,95	3.650.400.000	32.911,15	4.380.480.000	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3	30		URUSAN PERDAGANGAN												
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	94,59	99,00	18.000.000.000	99,00	18.500.000.000	99,00	19.000.000.000	99,00	19.500.000.000	99,00	20.000.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												
		Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persen	50,00	60,00	325.000.000	65,00	390.000.000	70,00	468.000.000	75,00	561.000.000	75,00	561.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
		Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang	Persen	50,00	60,00	220.000.000	65,00	264.000.000	70,00	315.000.000	75,00	378.000.000	75,00	378.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		Efisien, Merata dan Terintegrasi														
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING													
		Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	6,00	8,00	990.000.000	9,00	1.100.000.000	10,00	1.320.000.000	11,00	1.584.000.000	11,00	1.584.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR													
		Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Milyar USD	3,90	4,90	834.000.000	5,30	1.000.000.000	5,90	1.200.000.000	6,50	1.440.000.000	6,50	1.440.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN													
		Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	95,00	97,00	1.000.000.000	98,00	1.200.000.000	99,00	1.440.000.000	100,00	1.728.000.000	100,00	1.728.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI													
		Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Persen	50,00	60,00	780.000.000	65,00	936.000.000	70,00	1.100.000.000	75,00	1.320.000.000	75,00	1.320.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31		URUSAN PERINDUSTRIAN													
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													
		Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	19,13	20,66	5.400.000.000	21,48	6.500.000.000	22,38	7.700.000.000	23,39	9.300.000.000	24,44	9.300.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI														
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase izin Usaha Industri yang di terbitkan	Persen	86,00	93,00	163.000.000	97,00	196.000.000	98,00	235.000.000	98,00	282.000.000	98,00	282.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Persen	100,00	100,00	435.000.000	100,00	525.000.000	100,00	630.000.000	100,00	756.000.000	100,00	756.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	32		URUSAN TRANSMIGRASI														
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
			Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	Persen	64,71	67,94	150.000.000	71,34	195.000.000	74,91	225.000.000	78,65	275.000.000	82,58	300.000.000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persen	58,82	60,33	865.750.000	62,46	982.287.500	58,82	1.049.651.000	64,41	1.167.884.469	65,57	1.312.028.692	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan	Persen	5,117	5,33	727.500.000	8,529	803.550.000	8,96	889.353.750	9,382	989.291.265	9,851	1.095.946.922	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01		SEKRETARIAT DAERAH														
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
	Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	95,00	96,00	54.619.982.448	98,00	59.350.981.570	100,00	63.318.530.649	100,00	67.484.457.181	100,00	71.858.680.040	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI													
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Kategori/ Nilai	N/A (Tidak Tersedia)	B / 68,23	2.744.750.448	BB / 70,05	3.019.225.493	BB / 75,00	3.321.148.042	BB / 78,49	3.653.262.486	A / 80,58	4.018.589.131	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH													
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentas e	85,00	90,00	886.570.650	95,00	930.899.183	97,00	977.444.142	98,00	1.026.316.349	100,00	1.077.632.166		
		2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai	2,84	2,86	3.200.000.000	2,87	3.360.000.000	2,88	3.528.000.000	2,89	3.704.400.000	2,90	3.889.620.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT													
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Peleaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.	Persen	0,91	0,95	31.568.276.675	0,97	33.725.104.343	0,97	36.097.614.777	0,98	38.707.376.255	1,00	40.142.745.068	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM													
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Dihasilkan.	Persen	0,79	0,95	4.700.240.790	0,97	4.935.252.830	0,98	5.182.015.471	0,98	5.441.116.245	1,00	5.713.172.057	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Persen	0,95	0,96	5.040.000.000	0,97	5.292.000.000	0,98	5.556.600.000	1,00	5.834.430.000	1,00	6.126.151.500	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA													
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks tata kelola pengadaan (ITKP)*	Persentas e*	81,08	85,13	3.221.239.270	89,39	3.382.301.234	93,86	3.551.416.296	97,61	3.728.987.111	99,57	3.915.436.467	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	0,95	0,95	2.769.302.725	0,97	2.907.767.000	0,98	3.053.156.250	1,00	3.205.814.350	1,00	3.366.104.000	SEKRETARIAT DAERAH
4	02	SEKRETARIAT DPRD													
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												SEKRETARIAT DPRD
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95,36%	100	93.141.625.056	100	102.455.787.562	100	112.701.366.318	100	123.971.502.949	100	136.368.653.244	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			38.675.042.924		42.542.547.217		46.796.801.938		51.476.482.132		56.624.130.345	SEKRETARIAT DPRD
		1. Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100,00%	100		100		100		100,00		100		
		2. Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persen	48,00%	100		100		100		100,00		100		
		3. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	99,93%	100		100		100		100,00		100		
		2. Persentase Penetapan Ranperda TahunN	Persen												
		3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen												
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01	PERENCANAAN													
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	23.711.236.567	100	24.896.798.395	100	26.141.638.315	100	27.448.720.231	100	28.821.156.242	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH													
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	2.518.684.429	100	2.644.618.650	100	2.776.849.583	100	2.915.692.062	100	3.061.476.665	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100		100		100		100		100			
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	1.455.827.239	100	1.528.618.601	100	1.605.049.531	100	1.685.302.007	100	1.769.567.107	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan	Persen	100		100		100		100		100			
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100		100		100		100		100			
5	02		KEUANGAN													
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	17.182.536.096	100	18.900.789.706	100	20.790.868.676	100	22.869.955.544	100	25.156.951.098	BADAN PENGELOLAAN ASET DAN KEUANGAN DAERAH	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030				
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Pelaksanaan Panganggaran APBD tepat waktu, ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan dan laporan keuangan yang akuntabel	Persen	100	100	643.596.990.517	100	707.956.689.568	100	778.752.358.525	100	856.627.594.378	100	942.290.353.816	BADAN PENGELOLAAN ASET DAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, fisik dan hukum	Persen	100	100	3.420.509.235	100	3.762.560.159	100	4.138.816.174	100	4.552.697.792	100	5.007.967.571	BADAN PENGELOLAAN ASET DAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	94,99	100,00	85.617.424.719	100,00	89.700.834.108	100,00	93.790.886.930	100,00	97.877.619.037	100,00	101.964.349.143	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	33,39	36,91	4.141.701.900	38,75	4.338.925.800	40,69	4.536.149.700	42,73	4.733.373.600	44,86	4.930.597.500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	03		KEPEGAWAIAN														
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI														
			Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	97,91	100	16.360.485.960	100	17.996.534.556	100	19.796.188.011	100	21.775.806.812	100	23.953.387.494	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	56,70	62,80	3.310.708.555	65,85	3.641.779.411	68,9	4.005.957.352	71,95	4.406.553.087	75	4.847.208.395	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
5	04															
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
5	04	01														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	93,66	80,00	21.682.511.971	85,00	22.604.685.350	90,00	23.699.578.118	95,00	24.893.765.524	100,00	26.073.162.300	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02														
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persen	11,00	12,00	20.750.000.000	15,00	4.600.000.000	17,00	4.600.000.000	18,00	10.750.000.000	20,00	12.600.000.000	
		Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persen	75,00	80,00	560.000.000	85,00	760.000.000	87,00	810.000.000	88,00	860.000.000	90,00	910.000.000	
		Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar, Serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	8,00	10,00	2.497.108.228	11,00	2.277.108.228	12,00	2.652.108.228	13,00	2.377.108.228	15,00	2.532.108.228	
		Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	10,00	15,00	560.000.000	17,00	760.000.000	19,00	810.000.000	21,00	860.000.000	23,00	910.000.000	
5	05															
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
5	05	01														
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	6.900.000.000	100,00	8.800.000.000	100,00	9.680.000.000	100,00	10.648.000.000	100,00	11.712.800.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02														
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam perencanaan Pembangunan	Persen	100,00	40,00	3.000.000.000	60,00	3.410.000.000	80,00	3.457.000.000	100,00	3.762.700.000	100,00	4.088.970.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH												
		Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persen	N/A	50,00	1.100.000.000	75,00	1.100.000.000	100,00	1.210.000.000	100,00	1.331.000.000	100,00	1.464.100.000	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	07		PENGLOLAAN PENGHUBUNG												
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	85,67	1,00	17.765.200.000,00	1,00	18.653.460.000	1,00	19.586.133.000	1,00	20.565.439.650	1,00	21.593.711.633	BADAN PENGHUBUNG
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG												
		Meningkatnya Pelayanan Penghubung	Persen	89,43	1,00	250.000.000,00	1,00	262.500.000	1,00	275.625.000	1,00	289.406.250	1,00	303.876.563	BADAN PENGHUBUNG
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01		PENGAWASAN												
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	93,00	94,00	23.500.000.000	95,00	28.200.000.000	96,00	33.840.000.000	97,00	40.608.000.000	98,00	48.729.600.000	INSPEKTORAT
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN												

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
					TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		Menurunnya Terjadinya Penyimpangan atau Penyimpangan, Baik yang bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	71,18	80,00	10.500.000.000	84,00	12.600.000.000	89,00	15.120.000.000	93,00	18.144.000.000	98,00	21.772.800.000	INSPEKTORAT
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI													
		Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	3.500.000.000	3,00	4.200.000.000	4,00	5.040.000.000	4,00	6.048.000.000	4,00	7.257.600.000	INSPEKTORAT
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
		Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100,00	100,00	8.565.000.000	100,00	8.993.250.000	100,00	9.442.912.500	100,00	9.915.058.125	100,00	10.410.811.031	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN													
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Orang	100,00	200,00	3.607.000.000	200,00	3.787.350.000	200,00	3.976.717.500	200,00	4.175.553.375	200,00	4.384.331.043	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													
		Meningkatnya Etika dan budaya Politik	Persentase Pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	90,00	95,00	1.157.000.000	95,00	1.214.850.000	95,00	1.275.592.500	95,00	1.339.372.125	95,00	1.406.340.731	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
					TARGET (6)	PAGU (Rp) (7)	TARGET (8)	PAGU (Rp) (9)	TARGET (10)	PAGU (Rp) (11)	TARGET (12)	PAGU (Rp) (13)	TARGET (14)	PAGU (Rp) (15)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													
			Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	11,00	20,00	1.157.000.000	24,00	1.214.850.000	30,00	1.275.592.500	36,00	1.339.372.125	40,00	1.406.340.731	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA													
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persen	60,00	70,00	1.157.000.000	70,00	1.214.850.000	70,00	1.275.592.500	70,00	1.339.372.125	75,00	1.406.340.731	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	70,00	75,00	1.357.000.000	75,00	1.424.850.000	75,00	1.496.092.500	75,00	1.570.897.125	75,00	1.649.441.981	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah serta indikator kinerja penyelenggara pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Berikut merupakan indikator kinerja utama Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029:

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Tingkat Kemiskinan	10,63	10,04-10,54*	10,30 - 10,50	8,32-8,62	7,41-7,66	6,60-6,70***	5,69-5,74	
2.	IMM	0,51 (2023)	0,53****	0,54	0,55	0,555	0,560***	0,565	
3.	Pertumbuhan Ekonomi	5,4	5,96 -6,46*	5,5-6,5	6,75-7,78	7,53-8,44	9,1***	9,88-9,76	
4.	PDRB Per Kapita	67,84	70,1 -70,49*	77,1 - 79,5	93,1-99,49	104,6-113,99	116,1-128,49***	127,6-142,99	
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,09	2,54-3,04*	2,25 - 2,50*****	2,43-2,92	2,38-2,86	2,32 - 2,80***	2,27-2,74	
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC/58,93	B/64,53	B/68,14	BB/72,38	BB/76,82	A/81,05	A/86,28	
7.	Indeks Pendidikan	N/A	0,711	0,716	0,722	0,727	0,733	0,738	
8.	Usia Harapan Hidup	71,88	72,86*	73,09	73,32	73,55	73,78***	74,01	
9.	Prevalensi Stunting	26,1	26,1*	24,55	23	21,45	19,9***	18,35	
10.	Cakupan Kepesertaan JKN	100,11	98,0*	98,25	98,5	98,75	99***	99,25	
11.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	38,17	34,11*	37,84	41,56	45,29	49,02***	52,75	
12.	Indeks Risiko Bencana	151,77	171,32	169,26	167,23	165,22	163,24	161,28	-Capaian Target IRB Prov.Sultra Tahun 2024, adalah 151,77 dengan menggunakan data komponen IRB berdasarkan Baseline Tahun 2019.

NO.	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									sedangkan Target Nasional (Bappenas dan BNPB) Pada Tahun 2025 nilai IRB Prov.Sultra Berada pada Nilai 171,32 Hal ini di lakukan Berdasarkan perhitungan Komponen Indeks Risiko Berdasarkan Baseline Tahun 2021. dan Untuk Capaian Target 2026 sd 2030 adalah Penurunan Nilai IRB Prov.Sultra Sebesar 1,2 % Setiap Tahunnya. hal ini sudah sesuai dengan target nasional dengan target persentase Penurunan IRB selama 5 Tahun Sebesar 4 s/d 8 %, hal ini merupakan kesepakatan rakortek PB Wilayah Timur Di Prov.BALI Bulan Agustus 2025.
13.	Indeks Ketimpangan Gender	0,460	0,467-0,464*	0,460-0,457	0,453-0,451	0,446-0,444	0,439	0,432	

NO.	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14.	Indeks Demokrasi Daerah	78,31/ Tinggi	81.48 - 84.73/ Tinggi*	82,07- 85,32/ Tinggi	82,66- 85,91/ Tinggi	83,25- 86,5/ Tinggi	83.84 - 87.09***/ Tinggi	84,43- 87,68/ Tinggi	Perubahan Numenklatur dari Indeks Demokrasi Indonesia
15.	Pertumbuhan PDRB LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,85	4,04	4,24	4,46	4,68	4,91	5,16	
16.	Pertumbuhan PDRB LU Pertambangan dan Penggalian	6,24	6,55	6,88	7,22	7,58	7,96	8,36	
17.	Pertumbuhan PDRB LU Industri Pengolahan	12,98	13,63	14,31	15,03	15,78	16,57	17,39	
18.	Pertumbuhan PDRB LU Akomodasi dan Makan Minum	4,24	4,45	4,67	4,91	5,15	5,41	5,68	
19.	Pertumbuhan PDRB LU Perdagangan	3,71	3,90	4,09	4,29	4,51	4,74	4,97	
20.	Indeks Infrastruktur	N/A	0,45	0,47	0,51	0,54	0,57	0,6	
21.	Indeks Konektivitas	0,67	0,68	0,69	0,73	0,75	0,77	0,79	
22.	Indeks Ekonomi Biru	N/A	80,80*	81,47	82,14	82,82	83,49***	84,16	
23.	Indeks Ekonomi Hijau	N/A	49,72**	51,66	53,6	55,54	57,48	59,42	
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,39	82,39	82,55	82,72	82,89	83,06	83,23	
25.	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	N/A	28,93*	33,99 - 40,17*****	38,39	44,62	49,86****	55,08	
26.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82,99	83	83,5	83,75	84	84,85	85	
27.	Nilai SAKIP Pemda	B/65,71	B/89,80	B/68.23	BB/76,38	A/82,12	A/86,41	AA/91,34	
28.	Indeks Pelayanan Publik	2,83	3,57*	3,6	3,63	3,66	3,69***	3,72	

KETERANGAN

* = Sesuai dengan target pada RPJPD Prov. Sultra (imperatif dari pusat)

** = Sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Indikator Makro Daerah Tahun 2024

*** = Sesuai dengan hasil exercise Bappenas pada paparan Kick Off Penyelarasan RPJMD

**** = Sesuai dengan surat edaran/exercise kementerian/lembaga terkait atau Rencana Induk

***** = Sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2026

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

Tabel 4.3. Matriks Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	76,68	66,7	67,69	68,7	69,73	70,78	71,78	
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Persen	10,25	9,42*	8,74	8,06	7,37	6,693177***	6,01	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
3.	Ketahanan Energi:									
	a) Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/ka pita	N/A		3369.60					- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD) -Target Tahun 2025 dan 2026 berdasarkan hasil rakortekrenbangnas, target 2027-2030 mempertimbangkan capaian 2024 dan target 2025-2026
	b) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	SBM/Rp milyar*	N/A		174.72					- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD) -Target Tahun 2025 dan 2026 berdasarkan hasil rakortekrenbangnas, target 2027-2030 mempertimbangkan capaian 2024 dan target 2025-2026
4.	Ketahanan Air									

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	a) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	m ³ /detik	N/A	0,47*	0,69	0,91	1,13	1,35***	1,57	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
	b) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen	N/A	31,77	35,01	38,39	41,69	45,00***	48,3	
5.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	80,39	82.39 *****	82.56 *****	82.72 *****	82.89 *****	83.06 *****	83,23	Permendagri No.19/2024 Target mengikuti Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025 dan Sesuai dengan Kepdirjen PPKL No. SK 129 Tahun 2024 tentang Target IKLH Tahun 2025-2029
6.	Indeks Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Indeks	N/A	0,531*	0,536	0,541	0,546	0,549***	0,556	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
7.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Persen	N/A	5***	6,25	7,5	8,75	10,00***	11,25	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
8.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	N/A	13***	15,75	18,5	21,25	24***	24,75	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
9.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	Persen	N/A	55***	61	67	73	79***	85	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
10.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%):									

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	a) Kumulatif	Persen	0,189	9,73*	10,19	10,65	11,11	11,58***	12,03	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
	b) Tahunan	Persen	2,88	16,69*	17,85	19,00	20,16	21,31***	22,46	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
11.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	N/A	28,93*	33,99 – 40,17*****	38,39	44,62	49,86****	55,08	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
12.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	151,77	171,32	169,26	167,23	165,22	163,24	161,28	-Capaian Target IRB Prov.Sultra Tahun 2024, adalah 151,77 dengan menggunakan data komponen IRB berdasarkan Baseline Tahun 2019. sedangkan Target Nasional (Bappenas dan BNPB) Pada Tahun 2025 nilai IRB Prov.Sultra Berada pada Nilai 171,32 Hal ini di lakukan Berdasarkan perhitungan Komponen Indeks Risiko Berdasarkan Baseline Tahun 2021. dan Untuk Capaian Target 2026 sd 2030 adalah Penurunan Nilai IRB Prov.Sultra Sebesar 1,2 % Setiap Tahunnya. hal ini sudah sesuai dengan target

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										nasional dengan target persentase Penurunan IRB selama 5 Tahun Sebesar 4 s/d 8 %, hal ini merupakan kesepakatan rakortek PB Wilayah Timur Di Prov.BALI Bulan Agustus 2025.
13.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,67	1,64	1,59	1,55	1,51	1,48	1,45	
14.	Kepadatan Penduduk	Persen	77,24	78,45	79,64	80,83	82	83,15	84,3	
15.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks	59,84	61,84	63,84	65,84	67,84	69,84	71,84	
II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,4	5,96 -6,46*	5,5-6,5	6,75-7,78	7,53-8,44	9,1***	9,88-9,76	- Merupakan Sasaran Visi RPJPD Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,63	10,04-10,54*	10,30 -10,50	8,32-8,62	7,41-7,66	6,60-6,70***	5,69-5,74	- Merupakan Sasaran Visi RPJPD Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
3.	PDRB Per Kapita	Rp Juta	67,84	70,1 -70,49*	77,1 - 79,5	93,1-99,49	104,6-113,99	116,1- 128,49***	127,6- 142,99	- Merupakan Sasaran Visi RPJPD Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
4.	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	0,86	0,8****	0,9*****	0,9	0,9	0,9	0,9	- Merupakan Sasaran Visi RPJPD Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,09	2,54-3,04*	2,25 - 2,50*****	2,43-2,92	2,38-2,86	2,32 - 2,80***	2,27-2,74	- Merupakan Sasaran Visi RPJPD Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
6.	Rasio Gini	Angka	0,370	0,365-0,371*	0,358 - 0,365*****	0,354-0,359	0,348-0,353	0,343-0,347***	0,337-0,341	- Merupakan Sasaran Visi RPJPD Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
7.	Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,06	0,89	0,74	0,61	0,54	0,45	0,3	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Ket.	
				2025	2026	2027	2028	2029		2030
8.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,51 (2023)	0,53****	0,54	0,55	0,555	0,560***	0,565	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
9.	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,88	72,86*	73,09	73,32	73,55	73,78***	74,01	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
10.	Prevalensi Stunting	Persen	26,1	26,1*	24,55	23	21,45	19,9***	18,35	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
11.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	136	130	124	118	112	106	100	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD). Berdasarkan exercise yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi dengan data dari pelaporan MPDN (<i>Maternal Perinatal Death Notification</i>)
12.	Penanganan Tuberkulosis:									
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	Persen	73	71*	76,25	81,5	86,75	92***	97,25	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)*	Persen	80	90	90	90	90	90***	90	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD) - Merupakan Indikator Perpres No. 12 Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										tentang RPJMN Tahun 2025-2029
13.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persen	100,11	98,6	98,7	98,8	99	99***	99	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD) - Merupakan Indikator Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029
14.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,42	9,99*	10,09	10,18	10,28	10,37***	10,46	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
15.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,71	13,98*	14,01	14,04	14,07	14,10***	14,13	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
16.	a)Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:									
	- Literasi Membaca	Persen	N/A	5,88 -11,76*	8,82-14,70	11,77-17,64	14,71-20,59	17,65-23,53***	20,59-26,47	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	- Numerasi	Persen	N/A	0,00 – 5,88*	1,47-7,35	2,94-8,82	4,41-10,29	5,88-11,76***	7,35-13,23	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
	b)Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:									
	- Literasi Membaca	Persen	30,08	31.39-33.89****	28,12-30,25	31,04-33,29	33,96-36,34	36,88-39,38***	39,8-42,43	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
	- Numerasi	Persen	25,25	27.11-29.61****	23,09-25,21	25,76-28,01	28,44-30,81	31,11-33,61***	33,79-36,41	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
17.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	Persen	11,25 (2024)	15,95*	15,95 –16,14	15,95 –16,33	15,95 –16,51	15,95 – 16,70***	15,95 –16,89	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
18.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	Persen	55,66	73,54*	74,68	75,82	76,96	78,1***	79,24	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
19.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	72,31	74,38	76,27	78,21	79,01	79,87	80	
20.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Persen	38,17	34,11*	37,84	41,56	45,29	49,02***	52,75	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21.	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	12	12****	14	15	16	17	18****	- Merupakan Indikator Proksi dari Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045: "Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal" (sesuai arahan Bappenas pada penyelarasan Ranhir RPJMD)
22.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	78,31	76,23 - 6,27*	77,19-77,24	78,15-78,21	79,12-79,19	80,08-80,16***	81,04-81,13	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
23.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	55,10 (2023)	56,22	56,73	57,23	57,73	58,24***	58,75	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
24.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	55,66 (2023)	56,13	56,66	57,14	57,78	58,52	58,89	
25.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,4	63,10****	64,80****	66,50****	68,20****	69,90****	71,60	
26.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,460	0,467-0,464*	0,460-0,457	0,453-0,451	0,446-0,444	0,439	0,432	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
27.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,53	91,73	92,01	92,42	92,5	92,71	92,9	
28.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	73,67	74,95****	75,89****	76,60****	77,17****	77,63****	77,99	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
29.	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	63,93	66,26	66,79	67,3	67,79	68,25	68,99	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
30.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,67 (2023)	50,15	50,62	51,76	52,82	53,15	55,52	
31.	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Indeks	85,98	86,93	87,81	88,63	89,4	90,12	90,89	
32.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	56,33	55	55	56,5	57	57	58	
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1.	Angka Ketergantungan	Persen	48,87	48,74	48,6	48,22	47,93	47,5	47,18	
2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	9,39	9.53****	9,93	10,32	10,72	11.12****	11,52	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
3.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,50	0,56*	0,58	0,59	0,61	0,62***	0,64	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
4.	Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)*	Ribu Orang	2,04	2,36*	2,58	2,79	3,01	3,22***	3,44	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
5.	Kontribusi sektor2 pembentuk Ekonomi Kreatif terhadap PDB:									
	a) Kontribusi penyedia makan minum	Persen	0,32	0,345*	0,346	0,347	0,348	0,349	0,35	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
	b) Kontribusi industri makanan minuman	Persen	2,10	1,869*	1,881	1,893	1,906	1,918	1,93	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	c) Kontribusi industri tekstil dan pakaian jadi	Persen	0,03	0,030*	0,03025	0,0305	0,0375	0,031	0,043	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
6.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD									
	a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Persen	18	2,72****	2,75	2,77	2,8	2,83****	2,86	- Merupakan Indikator Proksi dari Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045: Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) dan - Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%) (sesuai RPJPD)
	b) Rasio Kewirausahaan	Persen	2,7	3,32*	3,44	3,55	3,67	3,79***	3,91	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Persen	1	0,59*	0,62	0,66	0,69	0,72***	0,75	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
	d) Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	Persen	N/A	2,83*	2,96	30,85	3,21	3,34***	3,47	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,81	74,12	75,58	76,83	76,9	77,34	77,8	
8.	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik :									

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Persen	N/A	41*	42,7	44,4	46,1	47,80***	49,5	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen	60,30 (sesuai data BPS, Sultra dalam Angka)	61,05	62,15	63,40	64,91	65,66	66,75	Sesuai target Renstra
9.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	51,36	35 -60**	36,25-62,00	37,50-64,00	38,75-66,00	40,00-68,00	41,25-70,00	- Merupakan Sasaran Visi RPJPD Prov. Sultra (sesuai RPJPD)
	Proporsi anggaran IPTEK dan inovasi terhadap APBD	Persen	0,019	0,018	0,020	0,021	0,023	0,025	0,027	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
10.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:									
	a) Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	N/A	80,80*	81,47	82,14	82,82	83,49***	84,16	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
	b) Indeks Ekonomi Biru Daerah	Indeks	N/A	49,72**	51,66	53,6	55,54	57,48	59,42	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
11.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*		N/A	7,91*	8,56	9,2	9,85	10,50***	11,15	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
12.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Persen	4,81		8.03						- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD) -Target Tahun 2025 dan 2026 berdasarkan hasil rakortekrenbangnas, target 2027-2030 mempertimbangkan capaian 2024 dan target 2025-2026
13.	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	Indeks	5,88 (2023)	5,82*	6,06	6,31	6,55	6,8***	7,05		- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
14.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	22,35	36,29*	36,04-36,39	35,78-36,49	35,53-36,59	35,28-36,69***	35,03-36,79		- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
15.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persen	17,62	41,42*	39,89-40,08	38,36-38,73	36,83-37,38	35,30-36,04***	33,77-34,70		- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
16.	Indeks Infrastruktur	Nilai	N/A	0,45	0,47	0,51	0,54	0,57	0,6		
17.	Indeks Kota Berkelanjutan (Kendari)	Indeks	64,42 (2022)	65,05	65,31	65,57	65,84	66,1	66,36		
18.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	76,67	81*	85,18	89,34	93,53	97,69***	100		- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
19.	Persentase Desa Mandiri (%)	Persen	2,73	31,29****	31,29****	31,60%****	31,60%****	31,60%****	31,60%****		- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov.

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
20.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	0,89	0,91*	0,94	0,97	1	1,03***	1,06	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
21.	Tingkat Inflasi (%)	Persen	1,05	2,5-3,5*	2,23-3,5	1,95-3,5	1,67-3,5	1,4-3,5***	1,1-3,5	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
22.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,43	3,46**	3,6	3,7	3,9	4,0	4,1	- Merupakan Indikator Sasaran Visi RPJPD Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
23.	Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks	64,22	70,0	72,50	75,0	75,75	80,0	85,0	
IV.	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	55	70*	70,38	70,75	71,13	71,50***	71,88	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	N/A	2,6*	3,1	36,05	41,07	4,61***	5,11	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
3.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,83	3,57*	3,6	3,63	3,66	3,69***	3,72	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.	Indeks Integritas Nasional	Indeks	71,94	72,53*	73,27	74,01	74,76	75,5***	76,25	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
5.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	21,65	70*	71,4	72,8	74,4	75,7***	77,1	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
6.	Persentase Capaian Pelaksanaan Hasil HAM	Persen	88,6	65*	66	67	68	70***	71	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
7.	Indeks Demokrasi Daerah	Indeks / Kategori	78,31/ Sedang	81.48 - 84.73/ Tinggi*	82,07-85,32/ Tinggi	82,66-85,91/ Tinggi	83,25- 86,5/Tinggi	83.84 - 87.09***/Tinggi	84,43- 87,68/Tinggi	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD) - Perubahan numenklatur indikator Indeks Demokrasi Indonesia
8.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Persen	N/A	70,08*	72,06	74,04	76,02	78,00**	79,98	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
9.	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	40	40	40,33	40,72	41,25	41,65	41,85	
10	Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan									
	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	Persen	N/A	21,4*	20,99	20,59	20,18	19,78***	19,37	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	Persen	N/A	0,19*	0,21	0,23	0,24	0,26***	0,28	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
	c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*	Persen	N/A	754.891,36*	950.598,58	1.146.305,80	1.342.013,02	1.537.720,24***	1.733.427,46	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
	d) Total Kredit/PDRB (%)	Persen	N/A	22,5*	24,1	25,7	27,3	28,9***	30,5	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
11.	Inklusi Keuangan (%)	Persen	N/A	90,64*	91,26	91,88	92,5	93,12***	93,74	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
12.	Jumlah Kerjasama provinsi	Persen	70	5	5	5	6	6	6	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD)
V. INDIKATOR KINERJA KUNCI										
I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
A. PENDIDIKAN										
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (APS)	Persen	74,59	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Persen	42,76	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Indeks Pendidikan	Indeks	N/A	0,711	0,716	0,722	0,727	0,733	0,738	Indikator Tujuan Renstra PD
B. KESEHATAN										
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio Daya tampung per 1.000 Penduduk	1,39	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
3.	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	93,33	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
4.	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Persen	99,1	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
5.	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,29	0,31	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46	Indikator Sasaran Renstra Dinas Kesehatan
6.	Proporsi Kab/Kota dengan Fasilitas Kesehatan Seusai Standar	Persen	65	65	70	75	80	83	85	Indikator Sasaran Renstra Dinas Kesehatan
7.	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan Aktif	Persen	86,04	87	88	89	90	91	92	Indikator Sasaran Renstra Dinas Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	136	130	124	118	112	106	100	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD). Berdasarkan exercise yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi dengan data dari pelaporan MPDN (Maternal Perinatal Death Notification) - Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan
9.	Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	13	12	11	10	9,5	9	8,5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan
10.	Cakupan Penerimaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	N/A	36	46	55	61	70	79	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan
11.	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	71,67	80	85	90	93	95	95	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan
12.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)	Persen	73	71*	76,25	81,5	86,75	92***	97,25	- Merupakan Indikator Utama Pembangunan Prov. Sultra Tahun 2025-2045 (sesuai RPJPD) - Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan
13.	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	Persen	6	29,41	35,29	41,17	47,06	52,94	58,82	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan
14.	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	Persen	82,4	84	86	88	90	92	94	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan
15.	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	Persen	18,9	20	25	30	35	40	45	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.	Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Malaria	Kab/Kota	15	15	15	15	16	16	16	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan
17.	ODHIV Baru yang Ditemukan yang Mendapatkan Pengobatan ARV	Persen	90	90	90	90	90	90	95	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan
18.	Indeks Kepuasan Pelayanan RSUD Bahteramas	Persen	85	>95	>95	>95	>95	>95	>95	Indikator Sasaran Renstra RSUD Bahteramas
19.	Indeks Kepuasan Pelayanan RS Jiwa	Persen	83	85	87	90	92	95	97	Indikator Sasaran Renstra RS Jiwa
20.	Indeks Kepuasan Pelayanan RS Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo	Persen	90	90	93,00	95,00	98,00	100,00	100,00	Indikator Sasaran Renstra RS Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo
C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
Sumber Daya Air dan Bina Marga										
1.	Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	Km	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0	
2.	Indeks kinerja sistem irigasi	Persen	61,54	64,08	65,56	67,05	68,53	70,01	71,49	Indikator Menggunakan ini menggantikan indikator Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi
3.	Rasio kemantapan jalan	Persen	66,57	68,00	73,00	79,00	84,00	89,00	95,00	Permendagri No.19/2024
Cipta Karya, Bina Kostruksi dan Tata Ruang										

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Ket.	
				2025	2026	2027	2028	2029		2030
1.	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persen	0	0	0	3	6	10	15	Permendagri No.19/2024 SPM Dinas CKBKTR
2.	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Persen	0	0	0	5	10	15	20	Permendagri No.19/2024 SPM Dinas CKBKTR
3.	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Persen	60,5	67,07	73,63	80,23	86,80	93,40	100	Permendagri No.19/2024
4.	Persentase Akses Air Minum yang Layak dan Aman	Persen	N/A	31,77	33,64	35,63	37,73	39,96	42,32	
5.	Persentase Penyediaan Akses Sanitasi yang Layak dan Aman	Persen	2,22	2,57	2,99	3,46	4,02	4,66	5,41	
6.	Persentase Penyediaan Infrastruktur Permukiman, Bangunan Gedung dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran Renstra Dinas CKBKTR
7.	Persentase Penyediaan RTR Kabupaten/Kota yang Mendapat Rekomendasi	Persen	33	60	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran Renstra Dinas CKBKTR

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Gubernur dan Dokumen RTR Provinsi yang Tersusun									
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
3.	Persentase Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	Persen	2,63	3,89	4,28	4,71	5,18	5,70	6,26	Permendagri No.19/2024
4.	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	14,22	15,64	17,20	18,92	20,82	22,90	25,19	Permendagri No.19/2024
E	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	21,65	80	80,25	80,45	80,65	80,85	81,15	Permendagri No.19/2024
3.	Capaian SPM Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persen	76	76	77,85	79,23	81,44	82,95	84,22	SPM dan Indikator Sasaran Renstra Satpol PP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
5.	Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
6.	Persentase Penanganan Darurat Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
7.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,36	0,35	0,37	0,38	0,39	0,40	0,42	Indikator Sasaran Renstra BPBD
F.	SOSIAL									
1.	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	87,58	90	90	90	92	92	93	Permendagri No.19/2024
2.	Tingkat Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	97	100	100	100	100	100	90	Permendagri No.19/2024
3.	Tingkat Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	92,33	93	95	95	96	96	97	Permendagri No.19/2024
4.	Tingkat Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	94	94	95	95	95	97	100	Permendagri No.19/2024
5.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	Persen	57	80	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Ket.	
				2025	2026	2027	2028	2029		2030
	setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi									
6.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya dan Berperan Serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	30	30	35	35	40	40	45	Indikator Sasaran Renstra Dinas Sosial
7.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Penanganan	Persen	88,97	89	89	90	90	92	95	Indikator Sasaran Renstra Dinas Sosial
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Sosial	Persen	50,08	78	80	80	82	85	89	Indikator Sasaran Renstra Dinas Sosial
II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
A. TENAGA KERJA										
1.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	17	17	29	41	58	76	100	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,26	4,03	7,8	13,1	19,7	26,3	32,8	Permendagri No.19/2024
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp Juta/orang	79,66	79,77	79,89	80,02	81,39	81,78	82,57	Permendagri No.19/2024
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	44,01	71,31	81,20	82,26	83,32	84,41	85,51	Permendagri No.19/2024
5.	Persentase perusahaan yang menerapkan Peraturan-	Persen	26,23	26,61	27	27,39	27,79	28,2	28,61	Permendagri No.19/2024

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan									
6.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui mekanisme layanan antar kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi	Persen	35,00	40,00	45	50	52	54	57	Permendagri No.19/2024
B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0,13	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	Permendagri No.19/2024
2.	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio per 10.000 anak	4,03	3,98	3,87	3,76	3,69	3,58	3,49	Permendagri No.19/2024
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio per 100.000 Penduduk Perempuan	10,52	15,31	14,94	14,54	14,17	13,87	13,66	Permendagri No.19/2024
C. PANGAN										
1.	Persentase Cadangan Pangan	Persen	29,89	33	15	20	25	25	15	Permendagri No.19/2024
D. PERTANAHAN										
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
3.	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
E. LINGKUNGAN HIDUP										
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	80,39	82.39 *****	82.56 *****	82.72 *****	82.89 *****	83.06 *****	83,23	Permendagri No.19/2024 Target mengikuti Hasil Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025 dan Sesuai dengan Kepdirjen PPKL No. SK 129 Tahun 2024 tentang Target IKLH Tahun 2025-2029
2.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks	80	50	50	70	85	95	100	Permendagri No.19/2024
F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1.	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Persen	95	96	98	98	99	99	99	Permendagri No.19/2024
2.	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	42	52	63	65	68	70	70	Permendagri No.19/2024
G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	50	50	60	70	80	85	90	Permendagri No.19/2024

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	20	30	40	50	60	70	80	Permendagri No.19/2024
3.	Indeks Desa	Persen	N/A	57,39	60,00	62,00	64,00	66,00	69,00	Indikator Tujuan Renstra DPMD
H	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio Angka Kelahiran Total	2,48	2,46****	2,44****	2,43****	2,41****	2,40****	2,39	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	54,9	55,68	56,52	57,41	58,30	59,29	60,18	Permendagri No.19/2024
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	15,8	14,9	13,8	12,82	11,84	10,86	9,76	Permendagri No.19/2024
I	PERHUBUNGAN									
1.	Rasio konektivitas	Rasio	0,468	0,477	0,501	0,521	0,562	0,6	0,641	Permendagri No.19/2024
2.	Tingkat Keselamatan Transportasi	Persen	96	96,5	97	97,5	98	98,5	99	RPJMN 2025-2045, Permendagri No.12/2024, BA Rakortekrenbang 2024
J	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	2,43	5,00	20,00	30,00	50,00	75,00	100,00	Sesuai Permendagri 19 Tahun 2024
2.	Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan	Persen	83,33	85,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	Sesuai Permendagri 19 Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Secara Online dan Terintegrasi									
3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	3,83	10,00	20,00	30,00	50,00	60,00	70,00	Sesuai Permendagri 19 Tahun 2024
K.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	43,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	Permendagri No.19/2024
2.	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	5,5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Permendagri No.19/2024
L.	PENANAMAN MODAL									
1.	Persentase peningkatan investasi (PMTB) di provinsi	Persen	0,21	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase Peningkatan Investasi PMA dan PMDN	Persen	-23,05	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	Permendagri No. 86/2017
M	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6	6	Permendagri No.19/2024
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	45,48	47,54	49,91	52,41	55,03	57,78	60,67	Permendagri No.19/2024
3.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	20,56	22,41	23,53	24,7	25,94	27,23	28,6	Permendagri No.19/2024

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Persen	15,02	15,26	15,28	15,35	16,05	16,26	16,38	Indikator Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5.	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	17,25	19,54	20,57	21,59	22,67	23,81	25,00	Indikator Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga
N. STATISTIK										
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	95,12	95,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai Permendagri 19 Tahun 2024
2.	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	95,12	95,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai Permendagri 19 Tahun 2024
O. PERSANDIAN										
1.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	30,23	33,00	35,00	37,00	40,00	42,00	45,00	Penilaian oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
P. KEBUDAYAAN										
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	Persen		17,00	17,50	18,20	18,80	19,30	19,70	Indikator Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Q. PERPUSTAKAAN										
1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	66,02	72,50	73,50	74,50	75,50	76,50	77,00	Permendagri No.19/2024

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	72,31	78,00	79,00	80,50	82,00	83,50	85,00	Permendagri No.19/2024
R. KEARSIPAN										
1.	Persentase Hasil Pangawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintah Daerah	Persen	50	55,00	57,00	60,00	63,00	65,00	68,00	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara baku	Persen	10	10,00	13,00	15,00	17,00	20,00	22,00	Permendagri No.19/2024
3.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Persen	50	60,00	62,00	65,00	68,00	70,00	72,00	Permendagri No.19/2024
4.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	Nilai	N/A	60,00	65,00	68,00	70,00	75,00	80,00	Indikator Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	Nilai Hasil Pengawasan Internal Kearsipan	Nilai	N/A	24,00	26,00	27,20	28,00	30,00	32,00	Indikator Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6.	Nilai Hasil Pengawasan Eksternal Kearsipan	Nilai	N/A	36,00	39,00	40,80	42,00	45,00	48,00	Indikator Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN										
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	Ton	695.644	698.000	701.000	704.000	707.000	710.000	713.000	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	93	90	91	92	93	94	95	Permendagri No.19/2024
3.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	NTN	96,98	102	103	103	104	104	105	Indikator Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	NTPi	115,9	108	109	110	111	112	113	Indikator Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
B. PARIWISATA										
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	52,36	20,01	20,02	20,03	20,04	20,05	20,06	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	Persen	15,87	12,10	12,20	12,30	12,40	12,50	12,60	Permendagri No.19/2024
3.	Tingkat hunian akomodasi	Persen	40,62	35,10	35,11	35,12	35,13	35,14	35,15	Permendagri No.19/2024
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	0,5	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	Permendagri No.19/2024
5.	Jumlah PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	1.115.146.000	153.968.595.626	155.497.281.563	157.052.254.359	158.622.776.883	160.209.004.633	161.811.094.660	Indikator Tujuan Renstra Dinas Pariwisata
C. PERTANIAN										
<i>Tanaman Pangan dan Peternakan</i>										
1.	Produktivitas pertanian tanaman pangan per hektar per tahun									Permendagri No.19/2024
	-Padi	Ton Per Hektar Per Tahun	4,280	4.158	4.385	4.400	4.446	4.483	4.515	
	-Jagung	Ton Per Hektar Per Tahun	3,414	3.921	4.291	4.409	4.450	4.480	4.510	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Ket.	
				2025	2026	2027	2028	2029		2030
	- Kedelai	Ton Per Hektar Per Tahun	1,348	1.352	1.357	1.361	1.365	1.369	1.373	
	- Kacang Tanah	Ton Per Hektar Per Tahun	0,870	0,874	0,876	0,878	0,880	0,882	0,884	
	- Kacang Hijau	Ton Per Hektar Per Tahun	0,929	1,066	1.068	1.07	1.072	1.074	1.076	
	- Ubi Kayu	Ton Per Hektar Per Tahun	24,858	24,845	24.847	24.849	24.851	24.853	24.855	
	- Ubi Jalar	Ton Per Hektar Per Tahun	11,273	11,275	11.277	11.279	11.281	11.283	11.285	
2.	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular									Permendagri No.19/2024
	Ai (Unggas)	Persen	0,00	2	2	2	2	2	2	
	Brucellosis dan Helminthiasis (Ternak Potong)	Persen	22,73	2	2		2	2	2	
	Rabies (Hewan Peliharaan/ anjing)	Persen	100,00	5	5	5	5	5	5	
3.	NTP Sektor Tanaman Pangan	Persen	98,55	98.70	99.70	100.70	101.70	102.70	103.70	Indikator Tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.	NTP Sektor Peternakan	Persen	106,84	111.20	112.20	113.20	114.20	115.20	116.20	Indikator Tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
5.	Jumlah produksi tanaman pangan									Indikator Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
	Padi	Ton/GKG	555.836	511,612	887,223	1,003,000	1,053,150	1,105,808	1,161,098	
	Jagung	Ton/GKG	124.981	189,916	236,43	250,61	265,647	281,585	298,481	
	Kedelai	Ton/GKG	585	10,141	10,445	10,759	11,081	11,414	11,756	
	Kacang Tanah	Ton/GKG	2.476	2,443	2,516	2,592	2,67	2,75	2,832	
	Kacang Hijau	Ton/GKG	313	322	332	342	352	362	373	
	Ubi Kayu	Ton/GKG	112.451	156,437	161,13	165,964	170,943	176,071	181,353	
	Ubi Jalar	Ton/GKG	13.879	15,995	16,475	16,969	17,478	18,003	18,543	
6.	Jumlah populasi ternak									Indikator Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
	Sapi	Ekor	235.714	403,085	415,178	427,633	440,462	453,676	467,286	
	Kerbau	Ekor	2.024	2,709	2,79	2,874	2,96	3,049	3,14	
	Kambing	Ekor	65.529	205,506	211,671	218,021	224,562	231,299	238,238	
	Babi	Ekor	14.373	112,749	116,131	119,615	123,204	126,9	130,707	
	Kuda	Ekor	616	816	840	866	892	918	946	
	Ayam Buras	Ekor	10.722.896	11.683.108	12.033.601	12.394.609	12.766.448	13.149.441	13.543.924	
	Ayam Ras Petelur	Ekor	218.050	492.285	507.054	522.265	537.933	554.071	570.693	
	Ayam Ras Pedaging	Ekor	9.654.576	6.005.639	6.185.808	6.371.382	6.562.524	6.759.400	6.962.182	
	Itik	Ekor	146.156	59.844	61.639	63.488	65.393	67.355	69.376	
	Itik Manila	Ekor	162.787	51.9	53.457	55.061	56.713	58.414	60.166	
	Puyuh	Ekor	0.00	10.295	10.604	10.922	11.25	11.587	11.935	
7.	Jumlah produksi daging dan telur									

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Sapi	Kg	5.985.197	8.516.952	8.772.461	9.035.634	9.306.703	9.585.905	9.873.482	Indikator Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
	Kerbau	Kg	13.911	50.079	51.581	53.129	54.723	56.364	58.055	
	Kambing	Kg	560.596	496.636	511.535	526.881	542.688	558.968	575.737	
	Babi	Kg	170.067	986.287	1.015.876	1.046.352	1.077.742	1.110.075	1.143.377	
	Kuda	Kg	244	10.576	10.893	11.22	11.557	11.903	12.26	
	Ayam Buras	Kg	1.857.282	12.377.847	12.749.182	13.131.658	13.525.608	13.931.376	14.349.317	
	Ayam Ras Petelur	Kg	159.743	377.544	388.87	400.536	412.553	424.929	437.677	
	Ayam Ras Pedaging	Kg	11.265.780	5.525.571	5.691.338	5.862.078	6.037.941	6.219.079	6.405.651	
	Itik	Kg	91.640	422.226	434.893	447.94	461.378	475.219	489.476	
	Itik Manila	Kg	10.965	39.895	41.092	42.325	43.594	44.902	46.249	
	Puyuh	Kg	0.00	250	258	265	273	281	290	
	Telur Ayam Buras	Kg	1.530.045	9.476.401	9.760.693	10.053.514	10.355.119	10.665.773	10.985.746	
	Telur Ayam Ras Petelur	Kg	2.822.785	3.990.020	4.109.721	4.233.012	4.360.003	4.490.803	4.625.527	
	Telur Itik	Kg	1.171.159	4.541.477	4.677.721	4.818.053	4.962.595	5.111.472	5.264.817	
	Telur Itik Manila	Kg	91.194	296.134	305.018	314.169	323.594	333.301	343.3	
	Telur Puyuh	Kg	0.00	20.575	21.192	21.828	22.483	23.157	23.852	
Perkebunan dan Hortikultura										

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	NTP Sub Sektor Perkebunan Rakyat	Indeks	128.65	128.65	128.65	128.65	128.66	128.66	128.66	Indikator Tujuan Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura
2.	NTP Sub Sektor Hortikultura	Indeks	111.23	111.23	111.23	111.23	111.43	111.43	111.43	Indikator Tujuan Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura
3.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	219.106	219.106	219.206	219.306	219.406	219.506	219.606	Indikator Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura
4.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	79.477	79.477	79.527	79.577	79.627	79.677	79.727	Indikator Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura
5.	Produktivitas Tanaman Perkebunan	Ton/Ha	0.84	0.84	0.84	0.84	0.85	0.85	0.85	Indikator Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura
6.	Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ton/Ha	3.79	3.79	3.84	3.89	3.94	3.99	4.49	Indikator Sasaran Renstra Dinas Perkebunan dan Hortikultura
7.	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	219.106	219.106	219.206	219.306	219.406	219.506	219.606	
8.	Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	79.477	79.477	79.527	79.577	79.627	79.677	79.727	
D. KEHUTANAN										
1.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Persen	100	20	20	20	20	20	20	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Persen	0.32	0.32	0.28	0.25	0.22	0.18	0.15	Permendagri No.19/2024

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Persen	0.02	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	Permendagri No.19/2024
4.	Nilai Transaksi Ekonomi	Rupiah	0	1.000.000.000	1.100.000.000	1.210.000.000	1.331.000.000	1.464.100.000	1.610.510.000	Indikator Tujuan Renstra Dinas Kehutanan
5.	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	Persen	1.36	1.61	1.86	2.11	2.36	2.61	2.86	Indikator Sasaran Renstra Dinas Kehutanan
6.	Persentase Tutupan Lahan	Persen	51.77	52.02	52.27	52.52	52.77	53.02	53.27	Indikator Tujuan Renstra Dinas Kehutanan
7.	Luas Pengelolaan Kawasan Konservasi	Hektar	5	15	25	25	15	15	15	Indikator Sasaran Renstra Dinas Kehutanan
E. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
1.	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Persen	N/A	20	45	60	75	90	100	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
3.	Rasio Elektrifikasi	Persen	N/A	99.83	99.85	99.9	99.93	99.96	100.00	Indikator Tujuan Renstra Dinas ESDM
4.	Kapasitas Daya Listrik yang Tersedia	MW	N/A	2.943.69	3.090.88	3.245.42	3.407.69	3.578.08	3.756.98	Indikator Sasaran Renstra Dinas ESDM
5.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	N/A	99.83	99.85	99.9	99.93	99.96	100.00	Indikator Sasaran Renstra Dinas ESDM
6.	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda	Persen	N/A	20.00	45.00	60.00	75.00	90.00	100.00	Indikator Sasaran Renstra Dinas ESDM
7.	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah yang ramah lingkungan	Persen	N/A	20.00	35.00	45.00	65.00	85.00	100.00	Indikator Sasaran Renstra Dinas ESDM
F. PERDAGANGAN										

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	-10.26	7.5	8	8.5	9	9.5	10	Permendagri No.19/2024
2.	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	95	96	97	98	99	100	100	Permendagri No.19/2024
3.	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persen	65	75	80	85	90	95	100	Permendagri No.19/2024
4.	Tertib Usaha	Persen	70	80	85	90	95	100	100	Permendagri No.19/2024
5.	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	72.40	75	80	85	90	95	100	Permendagri No.19/2024
6.	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	Persen	N/A	55	60	65	70	75	80	Permendagri No.19/2024
7.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	5	7	8	9	10	11	12	Permendagri No.19/2024
8.	Kontribusi PDRB sektor perdagangan	Persen	12.53	12.91	13.29	13.69	14.10	14.53	14.96	Indikator Tujuan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
G.	PERINDUSTRIAN									
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas Provinsi	Persen	12.98	13.49	14.02	14.58	15.19	15.87	16.59	Usulan IKK Bidang Perindustrian yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B/1734/SJ-IND.1/PR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Hal Perbaikan atas Usulan Pemutakhiran Indikator

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perindustrian
2.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB Provinsi	Persen	9.40	9.77	10.15	10.56	11.00	11.49	12.01	Usulan IKK Bidang Perindustrian yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B/1734/SJ-IND.1/PR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Hal Perbaikan atas Usulan Pemutakhiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perindustrian

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor IndustriPengolahan Non Migas Provinsi	Orang	266.619	277.017	287.959	299.391	311.966	326.004	340.674	Usulan IKK Bidang Perindustrian yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B/1734/SJ-IND.1/PR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Hal Perbaikan atas Usulan Pemutakhiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perindustrian

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Non Migas Provinsi	Milyar USD	3.80	3.95	4.10	4.27	4.45	4.65	4.86	Usulan IKK Bidang Perindustrian yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B/1734/SJ-IND.1/PR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Hal Perbaikan atas Usulan Pemutakhiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perindustrian

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Provinsi	Trilyun	46.98	48.81	50.74	52.75	54.97	57.44	60.03	Usulan IKK Bidang Perindustrian yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B/1734/SJ-IND.1/PR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Hal Perbaikan atas Usulan Pemutakhiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perindustrian
6.	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri di bandingkan realisasi Investasi seluruh Sektor	Trilyu Rupiah	19.13	19.88	20.66	21.48	22.38	23.39	24.44	Usulan IKK Bidang Perindustrian yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B/1734/SJ-IND.1/PR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Hal Perbaikan atas Usulan Pemutakhiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perindustrian

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Ket.	
				2025	2026	2027	2028	2029		2030
7.	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan di bandingkan dengan jumlah perusahaan industri dan kawasan industri yang telah dilakukan pengawasan	Persen	83.00	86.00	89.00	93.00	97.00	98.00	98.00	Usulan IKK Bidang Perindustrian yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B/1734/SJ-IND.1/PR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Hal Perbaikan atas Usulan Pemutakhiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perindustrian

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.	Persentase jumlah perusahaan industri dan kawasan industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah perusahaan industri dan kawasan industri yang sudah dilakukan pembinaan	Persen	86	89	93	97	98	98	98	Usulan IKK Bidang Perindustrian yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B/1734/SJ-IND.1/PR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Hal Perbaikan atas Usulan Pemutakhiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perindustrian
9.	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	Nilai Total Kelengkapan Informasi Industri (%)	100	100	100	100	100	100	100	Usulan IKK Bidang Perindustrian yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B/1734/SJ-IND.1/PR/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 Hal Perbaikan atas Usulan Pemutakhiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Perindustrian

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10.	Persentase pertumbuhan sektor industri kecil menengah	Persen	5.30	5.51	5.72	5.95	6.20	6.48	6.77	Indikator Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11.	Persentase Pertumbuhan sektor industri besar	Persen	4.00	4.00	4.16	4.32	4.49	4.66	4.87	Indikator Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
H. TRANSMIGRASI										
1.	Persentase Pemukiman Transmigrasi mandiri	UPT/KWS	UPT/KWS	1 UPT/4 KWS	1 UPT/KWS	1UPT/KWS	1UPT/KWS	1PT/KWS	1 UPT/KWS	SE Ka. LKPP No.4/2021
2.	Persentase Transmigrasi yang mendapatkan palatihan dasar umum	Persen	100%	100	60	80	85	90	100	Indikator Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IV. UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN										
A. UNSUR PENDUKUNG										
<i>Pengadaan Barang dan Jasa</i>										
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Persen	24.92	25.42	27.45	28.00	28.56	29.13	29.71	SE Ka. LKPP No.4/2021
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Persen	16.16	27.15	27.69	28.25	28.81	29.39	29.97	SE Ka. LKPP No.4/2021
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ	Persen	40	40	40	40	40	40	40	SE Ka. LKPP No.4/2021
B. PERENCANAAN DAN KEUANGAN										
<i>Perencanaan</i>										
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Provinsi	Indeks	81.19	82	84	86	88	90	92	Indikator Tujuan Renstra Bappeda
2.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas dan Ditetapkan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran Renstra Bappeda

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Persentase Rekomendasi Hasil Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran Renstra Bappeda
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah										
1.	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	31.22	32.78	34.41	36.13	37.94	39.84	41.83	Permendagri No.19/2024
2.	Opini Laporan Keuangan	Jumlah 1 - 10 Opini WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Permendagri No.19/2024
Pendapatan Daerah										
1.	Rasio PAD Terhadap total Pendapatan	Persen	33.39	35.15	36.91	38.75	40.69	42.73	44.86	Permendagri No.19/2024
C. MANAJEMEN KEUANGAN										
1.	Assets Management	Jumlah Manajemen Aset 1. 2. 3. 4.	4	4	4	4	4	4	4	Permendagri No.19/2024
D. KEPEGAWAIAN										
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	84.66	85.68	86.19	86.7	87.21	87.72	807.48	Permendagri No.19/2024
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	7.35	7.86	8.37	8.88	9.39	9.9	10.41	Permendagri No.19/2024

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Permendagri No.19/2024
4.	Sistem Merit	Nilai	0.62	0.65	0.68	0.71	0.74	0.78	0.87	Indikator Tujuan Renstra BKD
5.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	75.2	75.75	76.3	76.85	77.4	77.95	78.5	Indikator Sasaran Renstra BKD
E.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	N/A	20	40	60	80	100	100	Indikator Tujuan Renstra BRIDA
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Persen	N/A	20	40	60	80	100	100	Indikator Sasaran Renstra BRIDA
F.	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK									
1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Persen	N/A	85	90	93	95	100	100	Permendagri No.19/2024
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Persen	N/A	60	70	80	90	100	100	Permendagri No.19/2024
G.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	4	4	4	Permendagri No.19/2024
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	4	4	4	Permendagri No.19/2024

KETERANGAN

* = Sesuai dengan target pada RPJPD Prov. Sultra (imperatif dari pusat)

** = Sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Indikator Makro Daerah Tahun 2024

*** = Sesuai dengan hasil exercise Bappenas pada paparan Kick Off Penyelarasan RPJMD

**** = Sesuai dengan surat edaran/exercise kementerian/lembaga terkait

***** = Sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2026

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029 menjadi visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 20 Februari 2025 hingga berakhirnya jabatan tersebut pada tanggal 20 Februari 2030. Untuk mencapai visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029, yaitu: **“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA MAJU YANG AMAN, SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan ke dalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang menjadi janji-janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur yang harus diwujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan kemampuan finansial daerah dan sumber pendapatan lainnya. Visi tersebut dapat terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan. Kaidah pelaksanaan pembangunan ini meliputi: a) Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan; dan b) Keterhubungan dengan Dokumen Perencanaan Pusat dan Kabupaten/Kota

5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran serta kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas serta kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya. Selain itu juga mengoptimalkan pemanfaatan dari ketersediaan dana yang ada. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah.

Perlu adanya konsistensi antara perencanaan dan pendanaan yang didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal ini dilakukan khususnya dalam pengambilan Keputusan dalam menentukan prioritas pembangunan serta memastikan pelaksanaannya. Proses kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam upaya penguatan mekanisme ini.

5.1.2. Keterhubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pusat dan Kabupaten/Kota

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebelumnya telah diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Keselarasan tersebut meliputi Periodesasi; Strategi dan Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD yang merupakan Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029; Indikator Makro dalam RPJMD yang merupakan Sasaran Visi

dalam RPJMN; serta Program-Program Perangkat Daerah yang mendukung kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Selanjutnya RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Gubernur sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan anggaran yaitu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 – 2029 menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan mengingat bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka diperlukan keterlibatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota disamping keterlibatan semua pihak sesuai dengan kewenangannya.

5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Dalam upaya menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional dan daerah, diperlukan pengendalian secara berkelanjutan dengan data yang akurat. Pengendalian ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko yang dilakukan pada setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian ini dilakukan untuk menghadapi kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan nasional dan daerah. Pengendalian ini terbagi menjadi dua tahapan yaitu tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

5.2.1. Pengendalian Perencanaan

Dilakukan dengan tujuan memastikan konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:

- i) Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan. Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJMD terhadap dokumen RPJPD, konsistensi dokumen RKPD terhadap dokumen RPJMD, konsistensi dokumen Renstra PD terhadap dokumen RPJMD, dan konsistensi dokumen Renja PD terhadap dokumen Renstra PD;
- ii) Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu;
- iii) Konsistensi perencanaan dan penganggaran;
- iv) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan tidak tercapainya target kinerja karena disebabkan sesuatu hal, dampak yang akan ditimbulkan, kategori dan sumber risiko sehingga bisa dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

5.2.2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup:

- i) Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah;
- ii) Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan;
- iii) Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah;
- iv) Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tatahan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas.

5.3. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, SE., MM dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ir. Hugua, M. Ling periode Tahun 2025-2029. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan setiap tahun. Demikian pula menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja PD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra PD.

Dokumen RPJMD ini menjadi pijakan utama bagi transformasi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara menuju Sulawesi Tenggara maju yang aman, sejahtera dan berkelanjutan, dengan fokus pada prioritas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ketahanan pangan.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen daerah yang perlu diketahui dan dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh *stakeholder*) dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka menengah daerah. Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan

implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan kekuatan-Nya agar Provinsi Sulawesi Tenggara semakin maju dan sejahtera.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ANDI SUMANGERUKKA